Pemerintah
Kabupaten Manggarai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 - 2029

Pemerintah
Kabupaten Manggarai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2025-2029

SALINAN

BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secarabertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,keluaran,hasil,manfaat,dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.

15. Pengendalian...

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah KabupatenManggarai.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Manggarai.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD ini sebagai:
   a. Dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjabarkan visi,misi, dan program Bupati terpilih pada tahun 2024;
   b. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025-2030;
   c. tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih;
   d. tolok ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati; dan
   e. pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
   a. tersedianya dokumen yang memuat analisis mendalam kinerja pembangunan dan penganggaran daerah, serta memetakan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.;
   b. tersedianya dokumen yang merumuskan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan muatan RPJMD secara utuh, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program; dan
   c. tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi PD untuk persiapan penyusunan Renstra.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
   c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   e. Bab V Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervise terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi,tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MANGGARAI,

ttd

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 20 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

LAMBERTUS PAPUT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fransiskus Conny Gabur, MH
Pembina,IV/a
NIP.198312132011011010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI :03/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang meliputi pelayananpublik, pemberdayaan, dan partisipasi sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan menjadi tahapan krusial dalam proses pembangunan untuk menetapkan arah kebijakan daerah, memastikanpembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan turut berperan sebagai instrumen pengendalian danevaluasi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mencapai target dan selaras dengan tujuan pembangunan.

Dokumen perencanaan daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah, hal tersebut telah diamanatkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dokumen perencanaan daerah merupakan dokumen yang mencakup perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh, mencerminkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang,menengah,maupun tahunan. Dokumen ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD. Sedangkan dokumen rencana perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Dokumen ini terdiri dari Renstra PD yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan Renja PD yang bersifat tahunan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, salah satu dokumen kunci yang menjadi acuan utama adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah(RPJMD). RPJMD memiliki peran strategis sebagai dokumen yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam kebijakan, program, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Dengan demikian, diharapkan pembangunan jangka menengah menghasilkan pembangunan yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka lainnya dan berbagai sektor.

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 disusun oleh Bapperida Kabupaten Manggarai dengan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, Herybertus Geradus Laju Nabit,S.E.,M.A dan Fabianus Abu,S.PD, yang telah dilantik pada 20 Februari 2025. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan mempertimbangkan perencanaan jangka panjang serta memperhatikan kondisi global maupun nasional. Pendekatan ini kemudian diperkuat melalui pendekatan partisipatif, yang diwujudkan dalam forum konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Selain itu, proses perencanaanjuga menerapkan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* melalui mekanisme konsultasi serta evaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, guna memastikan keterpaduan dokumen perencanaan dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Dalam RPJPN 2025-2045 mengamanatkan tema pembangunan provinsi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara berupa Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang Bertaraf Inernasional. Sejalan dengan amanat tersebut maka pembangunanjangka menengah Kabupaten Manggarai diarahkan pada dukungan penguatan wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif internasional. Fokus utama pembangunan Kabupaten Manggarai dalam lima tahun kedepan mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, penguatan ekonomi kreatif dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung percepatan pertumbuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 02

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi bagian dari peta jalan transformasi yang akan membawa Kabupaten Manggarai semakin Sejahtera, bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan kebijakan lainnya. Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, melibatkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan, serta masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Manggarai, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dan seluruh perangkat daerah serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029. Kami berharap RPJMD ini dapat menjadi panduan yang efektif dan terukur dalam mewujudkan visi Kabupaten Manggarai tahun 2025-2029, yaitu ***"Manggarai Yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing"***. Keberhasilan implementasi RPJMD ini memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

BUPATI MANGGARAI

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-5
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-10
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045 ..... I-12
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ..... I-12
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 ..... I-13
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) I-13
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan KLHS I-14
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD I-15
1.4 Maksud dan Tujuan I-16
1.4.1 Maksud I-16
1.4.2 Tujuan I-16
1.5 Sistematika Penulisan I-17
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat II-40
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-65
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-83

2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-100
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-100
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 ..... II-154
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-184
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-184
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-222
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi dan Misi III-1
3.1.1 Visi III-1
3.1.2 Misi III-5
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... III-17
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan III-21
3.3.1 Strategi III-21
3.3.2 Arah Kebijakan III-64
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-122
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) IV-122
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) IV-123
4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) IV-134
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-2
5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai II-2
Tabel 2. 2 Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-3
Tabel 2. 3 Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2023 ..... II-4
Tabel 2. 4 Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024 ..... II-6
Tabel 2. 5 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024 ..... II-7
Tabel 2. 6 Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2019 - 2023 ..... II-8
Tabel 2. 7 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai II-9
Tabel 2. 8 Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai II-13
Tabel 2. 9 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 ..... II-14
Tabel 2. 10 Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita Kabupaten Manggarai II-15
Tabel 2. 11 Daya Dukung Lahan Pertanian (T) Kabupaten Manggarai II-15
Tabel 2. 12 Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ..... II-16
Tabel 2. 13 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 ..... II-17
Tabel 2. 14 Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Manggarai II-19
Tabel 2. 15 Proyeksi Daya Dukung Air Sistem Grid Tahun 2029 Kabupaten Manggarai (m^3) II-19
Tabel 2. 16 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ..... II-20
Tabel 2. 17 Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Manggarai II-22
Tabel 2. 18 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023 ..... II-24
Tabel 2. 19 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2023 ..... II-26

Tabel 2. 20 Pangawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023 ..... II-26
Tabel 2. 21 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2022 ..... II-28
Tabel 2. 22 IKLH, Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2019 -2024 ..... II-30
Tabel 2. 23 Produksi Sampah Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024 ..... II-34
Tabel 2. 24 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2029 Kabupaten Manggarai II-34
Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai II-37
Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Manggarai II-38
Tabel 2. 27 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ..... II-39
Tabel 2. 28 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB II-42
Tabel 2. 29 Rapor Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ..... II-52
Tabel 2. 30 Laju Inflasi Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (IHK 2018=100) Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2. 31 Pencapaian SPM Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 ..... II-98
Tabel 2. 34 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2. 39 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030 ..... II-167
Tabel 2. 40 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030 ..... II-176
Tabel 2. 41 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030 ..... II-180
Tabel 2. 42 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... II-185
Tabel 2. 43 Telaahan Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045 ..... II-223
Tabel 2. 44 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Manggarai 2024 – 2043 ..... II-242
Tabel 2. 45 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Manggarai II-247
Tabel 2. 46 Isu Strategis Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... II-251

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Manggarai, RPJMD Provinsi NTT, dan RPJMN III-4
Tabel 3. 2 Penyandingan Misi dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... III-13
Tabel 3. 3 Penyandingan Misi RPJMD Manggarai dengan Misi RPJPD Manggarai, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan RPJMN III-14
Tabel 3. 4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... III-18
Tabel 3. 5 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi NTT dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-25
Tabel 3. 6 Strategi Pembangunan Kewilayahan III-31
Tabel 3. 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Manggarai III-45
Tabel 3. 8 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Manggarai III-65

Tabel 4. 1 Rincian Program Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... IV-123
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... IV-125
Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... IV-135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Diagram Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai II-9
Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023 ..... II-23
Grafik 2. 3 Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023 ..... II-25
Grafik 2. 4 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan II-27
Grafik 2. 5 Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga Tahun 2019-2023 ..... II-29
Grafik 2. 6 Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023 ..... II-33
Grafik 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023 ..... II-36
Grafik 2. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai II-40
Grafik 2. 9 LPE Kabupaten Manggarai selama periode Tahun 2021-2024 ..... II-41
Grafik 2. 10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai II-44
Grafik 2. 11 PDRB per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-45
Grafik 2. 12 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-46
Grafik 2. 13 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Hasil Long Form SP2020 Tahun 2020-2024 ..... II-48
Grafik 2. 14 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-50
Grafik 2. 15 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-51
Grafik 2. 16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024 ..... II-54
Grafik 2. 17 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2024 ..... II-56
Grafik 2. 18 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023 ..... II-57
Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2021-2024 ..... II-59

Grafik 2. 20 Indeks Perlindungam Anak (IPA) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023 ..... II-60
Grafik 2. 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024 ..... II-63
Grafik 2. 22 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023 ..... II-64
Grafik 2. 23 Angka Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-65
Grafik 2. 24 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-67
Grafik 2. 25 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-69
Grafik 2. 26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-70
Grafik 2. 27 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-77
Grafik 2. 28 Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-78
Grafik 2. 29 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Manggarai II-79
Grafik 2. 30 Laju Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023 ..... II-82
Grafik 2. 31 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2023 ..... II-83
Grafik 2. 32 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-85
Grafik 2. 33 Indeks Demokrasi Provinsi NTT tahun 2021-2023 ..... II-88
Grafik 2. 34 Indeks Daya Saing Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024 ..... II-89
Grafik 2. 35 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-103
Grafik 2. 36 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-107
Grafik 2. 37 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-108

Grafik 2. 38 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-110
Grafik 2. 39 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-111
Grafik 2. 40 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-113
Grafik 2. 41 Rata-rata Proporsi Komponen PAD Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-114
Grafik 2. 42 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-115
Grafik 2. 43 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-116
Grafik 2. 44 Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-117
Grafik 2. 45 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-118
Grafik 2. 46 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-121
Grafik 2. 47 Rata-rata Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-123
Grafik 2. 48 Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-124
Grafik 2. 49 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-126
Grafik 2. 50 Rata-rata Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-127
Grafik 2. 51 Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-128
Grafik 2. 52 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-129
Grafik 2. 53 Rata-rata Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ..... II-130

Grafik 2. 54 Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-131
Grafik 2. 55 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-133
Grafik 2. 56 Realisasi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-134
Grafik 2. 57 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-135
Grafik 2. 58 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-136
Grafik 2. 59 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-140
Grafik 2. 60 Rasio Likuiditas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-147
Grafik 2. 61 Rasio Solvabilitas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-150
Grafik 2. 62 Rasio Aktivitas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ....II-152
Grafik 2. 63 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar) II-161
Grafik 2. 64 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar) II-168
Grafik 2. 65 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar) II-171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD I-2
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-10

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Manggarai II-1

Gambar 3. 1 Keterkaitan Kata Kunci Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ..... III-12
Gambar 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 ..... III-22
Gambar 3. 3 Tahapan/Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030 ..... III-22
Gambar 3. 4 Program Unggulan Kepala Daerah dan fokus kegiatannya III-63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang meliputi pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan menjadi tahapan krusial dalam proses pembangunan untuk menetapkan arah kebijakan daerah, memastikan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan turut berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mencapai target dan selaras dengan tujuan pembangunan.

Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam melaksakanan kegiatan tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawa atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Untuk memastikan seluruh pendekatan tersebut dijalankan, maka penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 harus dilakukan secara sistematis. Adapun tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

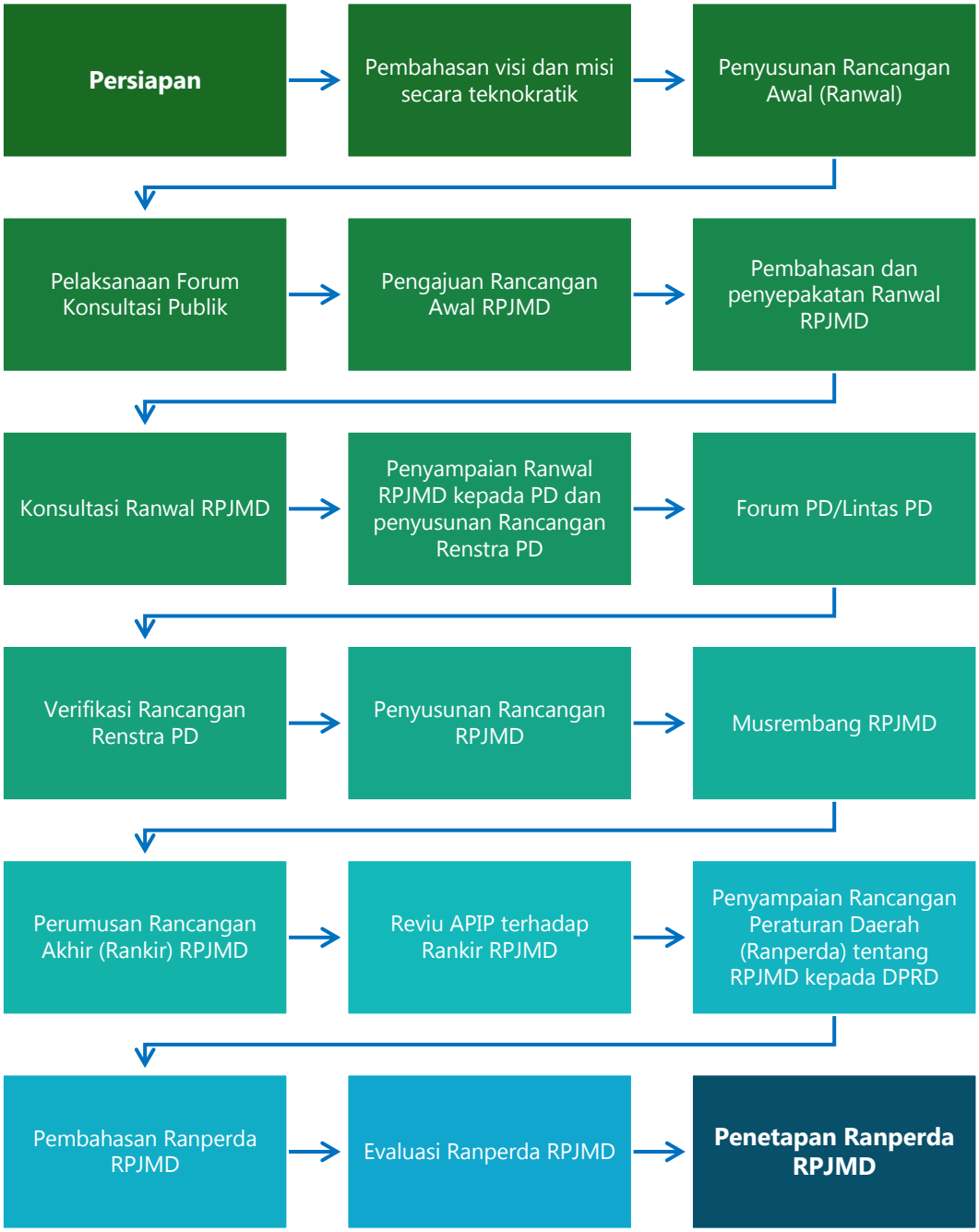

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dokumen perencanaan daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah, hal tersebut telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen perencanaan daerah merupakan dokumen yang mencakup perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh, mencerminkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka

panjang, menengah, maupun tahunan. Dokumen ini meliputi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sedangkan dokumen rencana perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Dokumen ini terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang bersifat tahunan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, salah satu dokumen kunci yang menjadi acuan utama adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki peran strategis sebagai dokumen yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam kebijakan, program, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Selain itu, dokumen ini juga mengintegrasikan KLHS RPJMD sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, serta sebagai acuan Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan jangka menengah menghasilkan pembangunan yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka lainnya dan berbagai sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 disusun oleh Bapperida Kabupaten Manggarai dengan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A dan Fabianus Abu, S.Pd. yang telah dilantik pada 20 Februari 2025. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan mempertimbangkan perencanaan jangka panjang serta

memperhatikan kondisi global maupun nasional. Pendekatan ini kemudian diperkuat melalui pendekatan partisipatif, yang diwujudkan dalam forum konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Selain itu, proses perencanaan juga menerapkan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* melalui mekanisme konsultasi serta evaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, guna memastikan keterpaduan dokumen perencanaan dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Dalam RPJPN 2025-2045 mengamanatkan tema pembangunan provinsi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara berupa Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang Bertaraf Internasional. Sejalan dengan amanat tersebut maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai diarahkan pada dukungan penguatan wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif internasional. Fokus utama pembangunan Kabupaten Manggarai dalam lima tahun ke depan mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, penguatan ekonomi kreatif dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung percepatan pertumbuhan daerah.

Selain berbagai amanat pembangunan yang telah ditetapkan di level provinsi maupun regional, pembangunan di Kabupaten Manggarai juga perlu memerhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini merupakan amanat yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penuangan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang menuangkan isu strategis tujuan pembangun berkelanjutan, program indikatif, dan penargetan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karenanya, dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang telah memertimbangkan berbagai mandat, amanat, dan intervensi penting yang perlu dilakukan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 013);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun2024 Nomor 01); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menetapkan dan menekankan mengenai keselarasan dan keterpaduan dokumen perencanaan dalam sebuah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menegah, dan tahunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 perlu mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan keselarasan dalam pembangunan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTRW Kabupaten Manggarai, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain itu, RPJMD juga harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dijabarkan dalam RKPD, dan digunakan sebagai dasar penyelarasan RPJM Desa agar pembangunan di tingkat desa dan kabupaten selaras. Keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

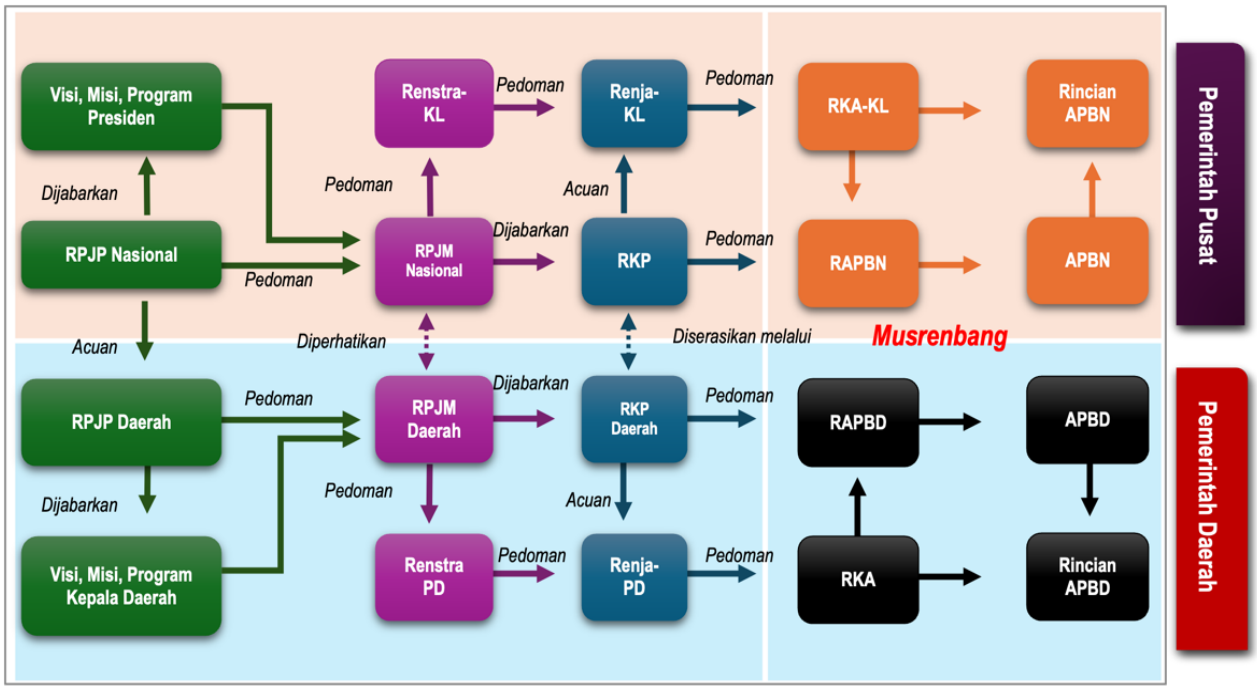

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 disusun secara sistematis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses ini dimulai dari visi, misi, dan program pemimpin, baik Presiden di tingkat pusat maupun Kepala Daerah di tingkat daerah.

Di tingkat pusat, visi dan misi Presiden dijabarkan dalam RPJPN sebagai rencana pembangunan jangka panjang. RPJPN menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMN yang bersifat jangka menengah. Selanjutnya, RPJMN dijabarkan dalam RKP atau Rencana Kerja Pemerintah yang bersifat tahunan. Dari dokumen RKP inilah kemudian kementerian dan lembaga menyusun Renstra-KL (rencana strategis) dan Renja-KL (rencana kerja tahunan). Hasil dari Renja-KL dituangkan ke dalam RKA-KL yang kemudian menjadi dasar penyusunan RAPBN. RAPBN selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi APBN, lalu dijabarkan ke dalam rincian APBN sebagai acuan pelaksanaan anggaran.

Di tingkat daerah, RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 disusun melalui proses yang berjalan selaras. Visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJPD yang menjadi dasar penyusunan RPJMD. RPJMD kemudian diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Renja PD. Dari Renja PD, perangkat daerah menyusun RKA yang kemudian dirangkum dalam RAPBD. RAPBD dibahas dan ditetapkan menjadi APBD, lalu dituangkan dalam rincian APBD sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

Hubungan pusat dan daerah terjalin erat dalam proses ini. RPJPN menjadi acuan bagi RPJPD, sedangkan RPJMN diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, RKP Nasional dan RKPD harus diselaraskan melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan cara ini, arah pembangunan di tingkat nasional dan daerah dapat terintegrasi, sejalan, dan saling mendukung demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045

RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai periode 2025–2045. Visi pembangunan jangka panjang ini telah dirumuskan dengan tujuan menjadikan Manggarai sebagai daerah yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi yang kreatif dan inovatif, pengembangan infrastruktur yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan pembangunan wilayah yang adil, serta kesinambungan pembangunan dalam rangka mencapai Indonesia Emas.

Dalam perencanaan pembangunan menengah, RPJMD berperan sebagai instrumen utama guna memastikan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Manggarai akan mengkaji secara mendalam poin-poin utama dari RPJPD Kabupaten Manggarai. Arah kebijakan maupun sasaran dalam RPJMD ini disusun untuk mendukung dan selaras dengan misi RPJPD Kabupaten Manggarai. Berikut keterkaitan antara visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Manggarai

Pada dasarnya rancangan RPJMD mencakup kajian mendalam terhadap berbagai aspek dalam RPJPD, seperti isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi, arah kebijakan tahap pertama RPJPD, strategi transformasi, sasaran utama, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP). Kajian ini diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih jelas dalam penyusunan RPJMD selanjutnya.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 turut memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional RPJPN

dan RPJMN Tahun 2025-2029. Komponen maupun aspek yang tertuang dalam RPJMN yang kemudian ditelaah dan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD, antara lain permasalahan, isu strategis nasional dan global, arah kebijakan teknokratik, dan arah pembangunan kewilayahan.

RPJMN tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Terdapat 8 Prioritas Nasional (Asta Cita) yang melingkupi peningkatan sektor SDM, kesehatan, lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi, hingga pemerataan ekonomi.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten dari 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2025-2029. Keterkaitan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan di Kabupaten Manggarai selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Manggarai terletak di posisi yang strategis sebagai bagian dari jalur utama Trans-Flores yang menghubungkan berbagai kabupaten di Pulau Flores. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat, yang berpusat di Labuan Bajo, yang merupakan kawasan wisata berkelas super-premium, serta Kabupaten Manggarai Timur, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai. Posisi strategis ini membuat Kabupaten

Manggarai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta pariwisata.

Dalam rangka mengoptimalkan kedudukan secara tata ruang wilayah, untuk itu RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, sehingga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD mendukung arah kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, integrasi antara RPJMD dan RTRW menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu global yang menjadi pedoman pembangunan hampir setiap wilayah di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan dasar untuk mengintegrasikan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kabupaten Manggarai sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata perlu

menerapkan kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, berbagai strategi dalam RPJMD diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya.

KLHS menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dari setiap kebijakan yang dirancang serta memberikan rekomendasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, keterpaduan antara RPJMD dan KLHS diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD

RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029 menjadi acuan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan teknis lainnya, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam momentum ini, renstra yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Manggarai, ini mengacu pada visi, misi, serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja perangkat daerah, yang menguraikan program dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Dalam konteks APBD sebagai instrumen penganggaran, disusun untuk mendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan dalam RPJMD, RKPD, dan Renja. Seluruh dokumen perencanaan disusun dengan terpadu sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten Manggarai dapat berjalan

secara sistematis, terarah, dan efektif untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 yaitu sebagai:

1. Dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih pada tahun 2024.
2. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025-2029.
3. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
4. Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah.
5. Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Dokumen tersebut juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menghasilkan

1. Tersedianya dokumen yang memuat analisis mendalam kinerja pembangunan dan penganggaran daerah, serta memetakan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.
2. Tersedianya dokumen yang merumuskan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan muatan RPJMD secara utuh, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.
3. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk persiapan penyusunan Renstra.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab I memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen.
2. **Bab II Gambaran Umum Daerah**

   Bab II memuat gambaran umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga turut memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.
3. **Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

   Bab III memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
4. **Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab IV memuat daftar program perangkat daerah yang digunakan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah.

5. **Bab V Penutup**

   Bab V memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah (IKD).

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak dan Posisi Wilayah

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu wilayah administrasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores. Luas wilayah daratan Kabupaten Manggarai adalah 134.383,41 Ha. Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 12 kecamatan, 145 desa, dan 26 kelurahan. Ibu kota kabupaten ini berada di Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong.

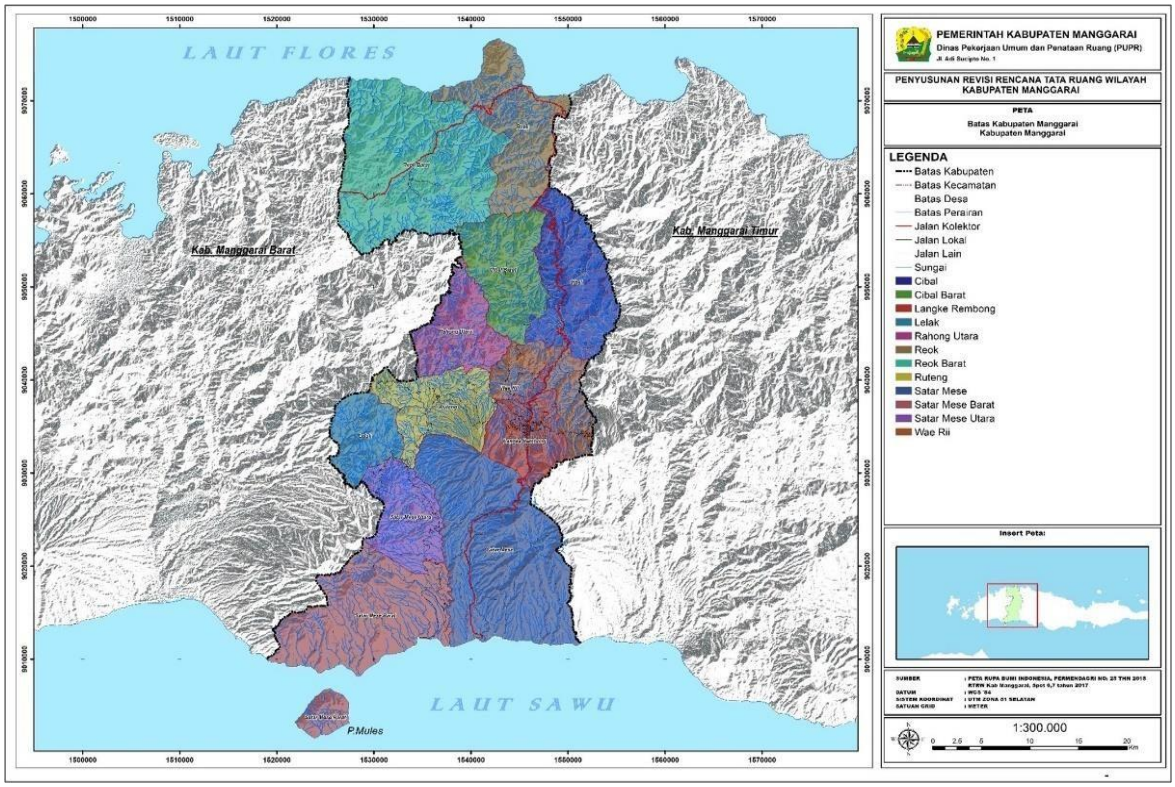

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Manggarai

Sumber: RTRW Kabupaten Manggarai, 2012-2032

Secara geografis, Kabupaten Manggarai terletak di 08°14' 27,32" - 08°54' 57,17" LS dan 120°13'41,34" - 120°32"47,22" BT (RTRW Kabupaten Manggarai). Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Manggarai meliputi:

- Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara : Laut Flores;
- Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;
- Sebelah Selatan : Laut Sawu.

Wilayah terluas adalah Kecamatan Satar Mese dengan luas 23.721,84 Ha (17,65%). Wilayah terkecil adalah Kecamatan Lelak dengan luas 5.147,00 Ha (3,83%). Berikut ini merupakan data luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai secara lebih rinci:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Cibal	10.722,35	7,98%
2	Cibal Barat	8.671,08	6,45%
3	Langke Rembong	6.370,52	4,74%
4	Lelak	5.147,00	3,83%
5	Rahong Utara	6.675,31	4,97%
6	Reok	11.850,04	8,82%
7	Reok Barat	22.584,21	16,81%
8	Ruteng	7.840,71	5,83%
9	Satar Mese	23.721,84	17,65%
10	Satar Mese Barat	17.494,66	13,02%
11	Satar Mese Utara	6.970,11	5,19%
12	Wae Rii	6.335,59	4,71%
Jumlah		**134.383,41**	**100,00%**

Sumber : Permendagri No. 25 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043

Sebagai wilayah yang didominasi dengan morfologi berombak sebesar 53 persen dari total wilayah, ketinggian relative Kabupaten Manggarai berkisar antara 12 hingga 1200 mdpl di atas permukaan laut (mdpl). Tipologi wilayah Kabupaten

Manggarai berada pada kemiringan lereng 0->40 persen dengan dominasi kelerengan 15 – 25 persen seluas 42.151,13 Ha.

2. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Manggarai memiliki letak yang strategis karena berada di jalur penghubung antar kabupaten di Pulau Flores (Trans-Flores). Posisinya yang strategis menjadikan Kabupaten Manggarai sebagai penghubung transportasi dan logistik terutama untuk wilayah Flores bagian barat. Di samping itu, lokasinya yang bersebelahan dengan Kabupaten Manggarai Barat menjadikan Kabupaten Manggarai memiliki peluang untuk berperan sebagai penyangga destinasi super prioritas Labuan Bajo terutama dalam menyediakan sumber daya pangan dan SDM serta menawarkan destinasi alternatif berbasis ekowisata dan wisata budaya.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Manggarai diapit oleh dua kabupaten hasil pemekaran, yakni Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo – yang telah menjadi Kawasan Pariwisata Super-Premium – dan Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai yang secara umum memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan sumber energi listrik dengan beroperasinya PLTP Ulumbu.

Tabel 2. 2 Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	144.164	139.811	123.076,90	86.795,13	106.737
2	Luas areal tanaman Padi /bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	31.641	27.673	22.451,19	18.593,02	20.682,01

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Manggarai dalam Angka 2025

Produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya pada pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,02 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan 11,97 persen dan mengalami penurunan sebesar 29,48 persen di tahun 2023 hal ini berbanding lurus dengan penurunan Luas Areal Tanam Padi/bahan pangan Utama lokal lainnya sebesar 3.968 Ha di tahun 2021, 5.221,81 Ha di tahun 2022 dan 3.858,13 di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan adanya elnino yang berakibat pada kemarau berkepanjangan sehingga sumber-sumber air untuk pertanian debitnya menjadi berkurang sehingga bagian hilir lahan pertanian tidak dapat terairi dan adanya pengerjaan perbaikan bendungan Wae Mantar II yang berdampak pada tidak dilakukan penanaman selama satu musim tanam di Kecamatan Satar Mese dengan luas sebesar 1.500 Ha. Pada tahun 2024, produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya kembali mengalami peningkatan seiring dengan penambahan luas areal tanam padi/bahan pangan utama lokal. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih berada di bawah capaian tahun 2020. Belum optimalnya produksi tersebut juga dipicu oleh adanya alih fungsi lahan yang dialihkan untuk perumahan dan tempat usaha, budidaya tanaman hortikultura dan sebagian lahan tidak diolah, rendahnya kapasitas SDM petani; generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian; terbatasnya benih unggul bersubsidi, ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu; serta masih kurangnya alat dan mesin pertanian, masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani.

Tabel 2. 3 Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2023

No	Urusan/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton BB)	25.003,29	578,550	35.158	32.507	20.179
2	Jumlah Produksi Komunitas Perkebunan (Ton)	7089,05	7.084,06	7.037,50	7.324,17	6.374
3	Jumlah Produksi Ubi kayu	8.343	1.386	4.848	1.457	597,58
4	Jumlah Produksi Ubi Jalar	1.399	537	1.365	827,22	430,90

No	Urusan/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah Produksi padi	123.667	129.415	123.353	112.020	83.520,64
6	Jumlah Produksi Kacang Tanah	217	187	161	90,93	88
7	Jumlah Produksi Kedelai	1.128	1.052	448	422,85	484,71
8	Jumlah Produksi Kacang Hijau	217	10	138	31,20	27,95
9	Jumlah Produksi Jagung	8,787	11.469	9.498	8.433	2.425,73
10	Jumlah Produksi sayur (TonBB)	25.003	578.550	28.632	20.260	19.379
11	Jumlah Produksi Kelapa (Ton)	581,83	582,83	583,94	630,11	578,97
12	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	599,25	602,12	603,18	492,04	235,03
13	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	2,551	2.553	2.525,60	2.499,60	2.523
14	Jumlah Produksi Cengkeh (Ton)	402,55	408,08	410,82	427,55	411

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2024

Produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan untuk komoditi kopi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan komoditi lain mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan karena sifat dari tanaman tahunan/perkebunan akan mengalami peningkatan produksi setelah kurangnya produksi di tahun sebelumnya, kondisi ini menjadikan petani melakukan perawatan lebih terhadap tanaman perkebunan tersebut agar berproduksi lebih di tahun berikut. Untuk produksi tanaman hortikultura dan tanaman pangan mengalami penurunan produksi yang menjadi faktor utama penurunan produksi karena kekeringan berkepanjangan akibat elnino.

Produksi padi dari tahun 2018–2019 mengalami penurunan karena adanya puso akibat kekeringan yang berkepanjangan dan perbaikan irigasi Wae Mantar II, mengalami peningkatan produksi di tahun 2020 dikarenakan anomali iklim yang mendukung serta adanya intervensi dari pemerintah lewat kegiatan pengembangan padi sawah, dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 dan 2022

dikarenakan curah hujan yang berkepanjangan sepanjang tahun dan pada tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebagai akibat luas tanam yang merupakan dampak dari elnino berkepanjangan sepanjang tahun yang mengakibatkan kemarau panjang dengan dampak keringnya sumber-sumber mata air pertanian, adanya pengerjaan perbaikan Bendungan Wae Mantar II yang berdampak pada tidak di tanamnya padi sawah seluas 1.500 Ha di Kecamatan Satar Mese sebagai sentra produksi Padi untuk Manggarai. Produksi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Kedelai mengalami penurunan dikarenakan kurangnya hujan yang berdampak pada petani tidak melakukan penanaman komoditi tersebut, khusus untuk tanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar petani tidak melakukan panen umbi, melainkan daun yang digunakan untuk konsumsi dan pakan ternak, selain itu nilai jual umbi yang rendah hal ini disebabkan karena minimnya SDM petani untuk melakukan pengolahan hasil yang berbasis industri. Untuk komoditi kedelai mengalami peningkatan karena adanya intervensi pemerintah pusat melalui alokasi APBN 1.500 Ha yang tersebar di dua Kecamatan yaitu Reok Barat dan Satar Mese.

Peternakan adalah salah satu sub-sektor pertanian. Peternakan di Kabupaten Manggarai memiliki potensi yang sangat besar, khususnya ternak babi dan sapi yang menunjukkan hasil yang semakin baik dari tahun 2020 ke 2024. Berbagai jenis populasi hewan ternak besar dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2020 - 2024 dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4 Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024

Tahun	Hewan Ternak Besar			Hewan Ternak Kecil		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba
2020	26.303	8.103	189	42.052	11.952	0
2021	26.816	8.247	191	43.428	12.295	0
2022	27.339	8.394	194	44.847	12.648	0
2023	27.872	8.543	199	46.314	13.011	0
2024	28.415	8.694	202	47.829	13.383	0

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, Manggarai dalam Angka 2025

Jumlah populasi hewan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah populasi terbesar terdapat pada hewan ternak kecil, yaitu babi yang memiliki peningkatan mencapai 5.777 ekor pada tahun 2020-2024. Pada populasi ternak besar, sapi merupakan jumlah terbesar kedua setelah populasi babi, dengan jumlah peningkatan sebesar 2.112 ekor. Jumlah populasi kambing dan kerbau masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat, sedangkan jumlah populasi kuda di posisi terakhir dengan jumlah peningkatan paling kecil sebesar 13 ekor.

Peningkatan jumlah populasi yang beragam dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan serangan penyakit ternak. Jumlah populasi hewan ternak lainnya terdiri dari ternak hewan unggas. Berikut adalah data mengenai hewan ternak unggas di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 5 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024

Tahun	Hewan Ternak Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Ras	Ayam Petelur
2020	200.743	74.000	8.400
2021	202.951	105.000	19.000
2022	205.183	343.935	20.000
2023	207.441	354.255	20.000
2024	209.724	154.310	14.500

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, Manggarai dalam Angka 2025

Populasi ternak unggas terbesar dan paling stabil di Kabupaten Manggarai terdapat pada komoditas ayam kampung yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 2.283 ekor. Adapun ternak unggas jenis ayam ras mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2024 sebesar 2.283 ekor. Sementara itu, populasi ternak unggas jenis ayam petelur mengalami fluktuasi sepanjang 2020-2025.

Tabel 2. 6 Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging Sapi (kg)	193.536	175.824	187.272	196.452	189.990
2	Daging Kerbau (kg)	8.100	6.615	5.400	14.040	14.985
3	Daging Kambing (kg)	7.760	5.560	5.480	6.640	6.720
4	Daging Babi (kg)	405.675	376.987.50	396.731,25	371.081,25	355.050
5	Daging Ayam Bukan Ras (kg)	193.237	195.361,73	197.510,39	126.783	2.209.818,06
6	Daging Ayam Ras (kg)	378.586	46.620	325.237,50	232.143,42	404.042,06
7	Telur (Butir)	8.042,451	7.593,522	7.802.881	164.572,87	124.922,93

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2024

Produksi hasil ternak di Kabupaten Manggarai cukup bervariasi dari tahun 2019-2023. Produksi daging tertinggi terdapat pada komoditas ayam bukan ras, dengan peningkatan produksi terbesar pada tahun 2023. Peningkatan produksi daging ayam ras cenderung mengalami fluktuatif, hal tersebut dikarenakan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020. Produksi daging terendah pada komoditas kambing, dibandingkan pada tahun 2019 jumlahnya lebih tinggi daripada tahun 2020-2023. Penurunan jumlah produksi daging terjadi pada seluruh komoditi pada tahun 2020, kecuali pada ayam ras. Produksi telur cenderung stabil.

Potensi sumber daya alam selanjutnya adalah terkait kawasan hutan. Hutan adalah komunitas tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam jenis pohon yang tumbuhnya secara bersama-sama dengan susunan yang berjajar rapat. Pepohonan yang tumbuh berjajar dan bersamaan itu membentuk sebuah penutupan pepohonan. Kawasan hutan di Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 3 yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan taman wisata alam. Kawasan hutan lindung mendominasi di Kabupaten Manggarai dengan

luas 17.710,87 ha. Kawasan hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai

No.	Kawasan Hutan	Luas (ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	17.710,87
2	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	1.125,38
3	Taman Wisata Alam	9.285,81
Jumlah		**28.122,06**

Sumber: SK Kemen LHK Nomer. 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

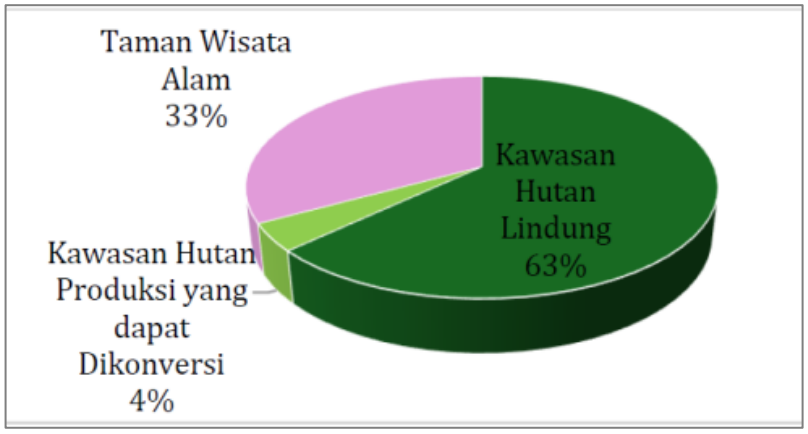

Grafik 2. 1 Diagram Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Taman wisata alam di Kabupaten Manggarai memiliki luas 9.285,81 ha. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Manggarai memiliki luas 1.125,38 ha. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. Berikut tabel dan diagram kawasan hutan di Kabupaten Manggarai.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi salah satu pertimbangan penting adalah perumusan rencana pembangunan selama lima tahun ke depan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan memberikan informasi mengenai kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan juga dapat merujuk kepada sebuah kondisi kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan.

Secara umum teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Muta'ali (2014) dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung.

A. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisis ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang.

a. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisis ini dilakukan dengan tujuan

mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang.

b. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

❖ **Ketersediaan Lahan**

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

❖ **Kebutuhan Lahan**

Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/ tahun. Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

❖ **Status Daya Dukung Lahan**

Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL) . Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- Bila SL > DL , daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Pada tabel dibawah ini, terdapat bahwa status daya dukung lahan Kabupaten Manggarai pada tahun 2024 dinyatakan terlampaui. Adapun terdapat total nilai produksi pertanian sebesar 37.529.057.450, produksi perkebunan sebesar 405.236.640.000 dan produksi peternakan sebesar 726.274.986.000 agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai

No.	kecamatan	Nilai Produksi	Nilai Produksi	Nilai Produksi	Total Produksi (Pi x Hi)	Harga Satuan Beras (Rp/kg)	Produktivitas Beras (kg/ha)	Ketersediaan Lahan (Ha)	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Luas Lahan yang Dibutuhkan untuk Kebutuhan Hidup Layak per Penduduk	Total Kebutuhan Lahan Setara Beras	Status Daya Dukung Lahan	Ket.
		Pertanian	Perkebunan	Peternakan		Hb	Ptvb	SL		KHLL	DL		
1	Satar Mese	2.318.888.450	47.022.000.000	50.349.761.000	99.690.649.450	11.100	2.400	3.742	39.376	0,17	6.694	SL < DL	Terlampaui
2	Satar Mese Barat	2.781.297.800	18.500.000.000	98.733.850.000	120.015.147.800	11.100	2.400	4.505	20.907	0,17	3.724	SL > DL	Belum terlampaui
3	Satar Mese Utara	645.080.200	28.644.000.000	51.821.700.000	81.110.780.200	11.100	2.400	3.045	17.574	0,17	2.988	SL > DL	Belum terlampaui
4	Langke Rembong	2.022.136.000	15.400.000.000	38.778.425.000	56.200.561.000	11.100	2.400	2.110	67.813	0,17	11.528	SL < DL	Terlampaui
5	Ruteng	1.268.884.200	79.400.000.000	77.190.500.000	157.799.384.200	11.100	2.400	5.923	46.920	0,17	7.976	SL < DL	Terlampaui
6	Wae Rii	1.129.219.900	38.338.000.000	65.493.175.000	104.960.394.900	11.100	2.400	3.940	32.592	0,17	5.541	SL < DL	Terlampaui
7	Lelak	2.065.378.000	25.348.000.000	20.539.200.000	47.952.658.000	11.100	2.400	1.800	13.827	0,17	2.351	SL < DL	Terlampaui
8	Rahong Utara	2.865.332.000	40.720.560.000	30.831.450.000	74.417.342.000	11.100	2.400	2.793	25.508	0,17	4.336	SL < DL	Terlampaui
9	Cibal	6.809.873.000	55.152.000.000	59.511.550.000	121.473.423.000	11.100	2.400	4.560	29.320	0,17	4.984	SL < DL	Terlampaui
10	Cibal Barat	2.509.172.000	30.528.000.000	64.759.500.000	97.796.672.000	11.100	2.400	3.671	17.307	0,17	2.942	SL > DL	Belum terlampaui
11	Reok	3.887.162.400	14.428.000.000	88.662.000.000	106.977.162.400	11.100	2.400	4.016	21.154	0,17	3.596	SL > DL	Belum terlampaui
12	Reok Barat	9.226.633.500	11.816.000.000	79.603.785.000	100.646.508.500	11.100	2.400	3.778	16.538	0,17	2.811	SL > DL	Belum terlampaui
		37.529.057.450	**405.296.560.000**	**726.274.896.000**	**1.169.040.683.450**	**11.100**	**2.400**	**43.883**	**349.836**	**0,17**	**59.472**	**SL < DL**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Tabel 2. 9 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Daya Dukung Lahan										Keterangan
		2025		2026		2027		2028		2029		
1	Satar Mese	6.952	SL < DL	7.038	SL < DL	7.124	SL < DL	7.210	SL < DL	7.296	SL < DL	Terlampaui
2	Satar Mese Barat	3.741	SL > DL	3.746	SL > DL	3.752	SL > DL	3.757	SL > DL	3.763	SL > DL	Belum terlampaui
3	Satar Mese Utara	3.012	SL > DL	3.020	SL > DL	3.028	SL < DL	3.036	SL < DL	3.044	SL < DL	Belum terlampaui
4	Langke Rembong	11.565	SL < DL	11.577	SL < DL	11.589	SL < DL	11.601	SL < DL	11.613	SL < DL	Terlampaui
5	Ruteng	8.148	SL < DL	8.205	SL < DL	8.262	SL < DL	8.319	SL < DL	8.376	SL < DL	Terlampaui
6	Wae Rii	5.758	SL < DL	5.831	SL < DL	5.903	SL < DL	5.976	SL < DL	6.048	SL < DL	Terlampaui
7	Lelak	2.440	SL < DL	2.470	SL < DL	2.499	SL < DL	2.529	SL < DL	2.559	SL < DL	Terlampaui
8	Rahong Utara	4.433	SL < DL	4.465	SL < DL	4.498	SL < DL	4.530	SL < DL	4.562	SL < DL	Terlampaui
9	Cibal	5.131	SL < DL	5.180	SL < DL	5.229	SL < DL	5.278	SL < DL	5.327	SL < DL	Terlampaui
10	Cibal Barat	3.043	SL > DL	3.076	SL > DL	3.110	SL > DL	3.143	SL > DL	3.177	SL > DL	Belum terlampaui
11	Reok	3.687	SL > DL	3.718	SL > DL	3.748	SL > DL	3.778	SL > DL	3.809	SL > DL	Belum terlampaui
12	Reok Barat	2.899	SL > DL	2.929	SL > DL	2.958	SL > DL	2.988	SL > DL	3.017	SL > DL	Belum terlampaui
Total		**60.808**	**SL < DL**	**61.253**	**SL < DL**	**61.699**	**SL < DL**	**62.144**	**SL < DL**	**62.589**	**SL < DL**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa proyeksi daya dukung lahan di Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 – 2045 telah termasuk dalam kategori defisit atau terlampaui.

- **Daya Dukung Lahan Pertanian**

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa keseluruhan wilayah di Kabupaten Manggarai termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

Tabel 2. 10 Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan per Kapita X					Luas Lahan Swasembada Pangan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Satar Mese	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,02
2	Satar Mese Barat	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,01
3	Satar Mese Utara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
4	Langke Rembong	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
5	Ruteng	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01
6	Wae Rii	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,01
7	Lelak	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,03
8	Rahong Utara	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01
9	Cibal	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01
10	Cibal Barat	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,01
11	Reok	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,02
12	Reok Barat	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,01
Total		1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	0,15

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Tabel 2. 11 Daya Dukung Lahan Pertanian (T) Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Luas Dukung Lahan Pertanian (T)					Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Satar Mese	8,84	8,73	8,62	8,52	8,42	mampu swasembada
2	Satar Mese Barat	31,53	31,48	31,44	31,39	31,35	mampu swasembada

No	Kecamatan	Luas Dukung Lahan Pertanian (T)					Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	
3	Satar Mese Utara	2,58	2,57	2,57	2,56	2,55	mampu swasembada
4	Langke Rembong	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	mampu swasembada
5	Ruteng	8,50	8,44	8,39	8,33	8,27	mampu swasembada
6	Wae Rii	9,73	9,60	9,49	9,37	9,26	mampu swasembada
7	Lelak	3,74	3,69	3,65	3,61	3,56	mampu swasembada
8	Rahong Utara	7,25	7,20	7,15	7,10	7,05	mampu swasembada
9	Cibal	8,32	8,24	8,16	8,09	8,01	mampu swasembada
10	Cibal Barat	8,11	8,02	7,94	7,85	7,77	mampu swasembada
11	Reok	4,64	4,60	4,57	4,53	4,49	mampu swasembada
12	Reok Barat	19,12	18,92	18,74	18,55	18,37	mampu swasembada
Total		7,52	7,46	7,40	7,34	7,28	mampu swasembada

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Selain menghitung daya dukung lahan pertanian dihitung pula nilai rasio kemampuan daya dukung (CCR) yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan pokok penduduknya. Rasio kemampuan daya dukung Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Kecamatan	2024						Keterangan	
		A	R	H	h	f	CCR		
1	Satar Mese	5.371	3,00	9.844	0,80	1	2,05	Mampu swasembada	Sangat baik
2	Satar Mese Barat	2.967	3,00	5.477	0,80	1	2,03	Mampu swasembada	Sangat baik
3	Satar Mese Utara	1.372	3,00	4.394	0,80	1	1,17	Mampu swasembada mampu	Cukup

No	Kecamatan	2024						Keterangan	
		A	R	H	h	f	CCR		
4	Langke Rembong	1.385	3,00	16.953	0,80	1	0,31	Tidak mampu swasembada	Sangat rendah
5	Ruteng	4.465	3,00	11.730	0,80	1	1,43	Mampu swasembada	Cukup
6	Wae Rii	3.609	3,00	8.148	0,80	1	1,66	Mampu swasembada	Baik
7	Lelak	1.151	3,00	3.457	0,80	1	1,25	Mampu swasembada	Cukup
8	Rahong Utara	2.951	3,00	6.377	0,80	1	1,74	Mampu swasembada	Baik
9	Cibal	3.163	3,00	7.330	0,80	1	1,62	Mampu swasembada	Baik
10	Cibal Barat	2.405	3,00	4.327	0,80	1	2,08	Mampu swasembada	Sangat baik
11	Reok	1.759	3,00	5.289	0,80	1	1,25	Mampu swasembada	Cukup
12	Reok Barat	2.868	3,00	4.135	0,80	1	2,60	Mampu swasembada	Sangat baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Dari perhitungan rasio kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk pada tahun perencanaan yaitu tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tiap kecamatan didominasi mampu swasembada dengan klasifikasi kelas ketersediaan kebutuhan beras termasuk sangat baik dan cukup.

Tabel 2. 13 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	CCR					Keterangan	
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Satar Mese	1,97	1,95	1,92	1,90	1,88	Mampu swasembada	Baik
2	Satar Mese Barat	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	Mampu swasembada	Sangat Baik
3	Satar Mese Utara	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	Mampu swasembada mampu	Cukup

No.	Kecamatan	CCR					Keterangan	
		2025	2026	2027	2028	2029		
4	Langke Rembong	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	Tidak mampu swasembada	Sangat rendah
5	Ruteng	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	Mampu swasembada	Cukup
6	Wae Rii	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	Mampu swasembada	Baik
7	Lelak	1,20	1,19	1,17	1,16	1,15	Mampu swasembada	Cukup
8	Rahong Utara	1,70	1,69	1,67	1,66	1,65	Mampu swasembada	Baik
9	Cibal	1,57	1,56	1,54	1,53	1,51	Mampu swasembada	Baik
10	Cibal Barat	2,02	1,99	1,97	1,95	1,93	Mampu swasembada	Baik
11	Reok	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	Mampu swasembada	Cukup
12	Reok Barat	2,52	2,50	2,47	2,45	2,42	Mampu swasembada	Sangat baik
Kabupaten Manggarai		**1,40**	**1,39**	**1,38**	**1,37**	**1,36**	**Mampu swasembada**	**Cukup**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Pada tabel tersebut, dapat terlihat bahwa proyeksi CCR daya dukung Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 – 2029 didominasi mampu swasembada dan dengan klasifikasi kelas ketersediaan kebutuhan beras termasuk baik.

- **Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid**

Sistem Grid skala ragam tersebut dibuat dengan memperhatikan datum geodetik, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat grid skala ragam, resolusi grid, dan sistem penomoran grid. Sistem grid skala ragam ini dimanfaatkan untuk data lingkungan Indonesia dengan titik asal (origin) sistem koordinat terletak pada koordinat terletak pada koordinat (90° BT, 15° LS); titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 144° BT dan 10° LU, sama dengan grid penomoran lembar peta rupa bumi Indonesia (RBI) (BAKOSURTANAL, 2005). Titik asal

tersebut terletak pada sudut kiri bawah yang menjadi awal dari nomor grid pada sistem grid skala ragam Indonesia.

Ukuran grid yang dibangun berbeda-beda dari mulai ukuran 1°30 x 1° hingga ukuran grid terkecil yaitu 5" x 5" (atau setara dengan ukuran di lapangan sekitar 154 x 154 m). Dalam sistem yang dibuat, data jumlah penduduk, kondisi tutupan lahan dan keberadaan jalan akses akan diintegrasikan melalui nilai tertentu. Berikut tabel daya dukung berdasarkan sistem grid Kabupaten Manggarai selengkapnya.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1.	Satar Mese	7.579,51	3.142,84	10.722,35
2.	Satar Mese Barat	7.377,00	1.294,08	8.671,08
3.	Satar Mese Utara	4.683,61	1.686,90	6.370,52
4.	Langke Rembong	2.965,12	2.181,88	5.147,00
5.	Ruteng	4.034,03	2.641,28	6.675,31
6.	Wae Rii	8.076,38	3.773,66	11.850,04
7.	Lelak	17.353,07	5.231,15	22.584,21
8.	Rahong Utara	4.594,60	3.246,11	7.840,71
9.	Cibal	18.024,51	5.697,33	23.721,84
10.	Cibal Barat	14.197,40	3.297,25	17.494,66
11.	Reok	6.545,19	424,92	6.970,11
12.	Reok Barat	3.417,29	2.918,30	6.335,59
Kabupaten Manggarai		**98.847,70**	**35.535,71**	**134.383,41**

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Tabel 2. 15 Proyeksi Daya Dukung Air Sistem Grid Tahun 2029 Kabupaten Manggarai (m^3)

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air
Cibal	34.276.907	15.192.639
Cibal Barat	37.218.335	11.507.404
Langke Rembong	34.644.252	5.453.758
Lelak	13.005.819	4.774.981
Rahong Utara	20.855.395	7.146.832
Reok	43.166.918	17.167.023
Reok Barat	73.307.239	27.481.501
Ruteng	29.973.349	9.982.815
Satar Mese	123.892.700	25.471.996
Satar Mese Barat	77.760.241	17.242.911

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air
Satar Mese Utara	43.103.142	11.144.240
Wae Rii	22.096.773	8.853.234
Belum Terlampaui	553.301.071	161.419.334
Cibal	17.527.114	28.137.473
Cibal Barat	10.420.537	16.317.031
Langke Rembong	14.144.862	32.294.879
Lelak	8.393.374	16.666.150
Rahong Utara	15.364.358	27.158.016
Reok	20.606.565	30.398.832
Reok Barat	24.692.341	42.545.095
Ruteng	21.330.902	43.738.496
Satar Mese	40.116.015	79.758.890
Satar Mese Barat	19.431.432	44.325.709
Satar Mese Utara	4.460.912	6.584.894
Wae Rii	21.397.607	47.343.053
Terlampaui	217.886.019	415.268.521
Total	**771.187.090**	**576.687.854**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

- **Daya Dukung Fungsi Lindung**

Hutan dengan penyebaran vegetasinya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang sangat beragam merupakan salah satu komponen sumber daya alam terpenting dalam ekosistem. Keberadaan hutan diharapkan mampu memberi manfaat lingkungan yang besar bagi kehidupan manusia, antara lain dalam pengendalian banjir, erosi, sedimentasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengendalian daur air dan pemeliharaan kualitas udara.

Tabel 2. 16 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No.	Kecamatan	DDL	Keterangan
1	Satar Mese	0,9	Sangat Baik
2	Satar Mese Barat	1,0	Sangat Baik
3	Satar Mese Utara	0,9	Sangat Baik
4	Langke Rembong	0,7	Sangat Baik
5	Ruteng	0,6	Baik
6	Wae Rii	0,7	Sangat Baik
7	Lelak	0,6	Baik
8	Rahong Utara	0,3	Cukup Baik

No.	Kecamatan	DDL	Keterangan
9	Cibal	0,7	Sangat Baik
10	Cibal Barat	0,5	Cukup Baik
11	Reok	0,8	Sangat Baik
12	Reok Barat	0,8	Sangat Baik
Total		**0,8**	**Sangat Baik**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Manggarai tahun 2024 dikategorikan sangat baik.

- **Daya Tampung Penduduk**

Daya tampung penduduk sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran permukiman dan kebutuhan permukiman sampai akhir tahun perencanaan. Daya tampung penduduk juga berfungsi untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan pada tahun perencanaan 2040 dengan membandingkan kesesuaian lahan potensial yang ada.

Asumsi yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu, lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana : menengah : mewah). Berdasarkan tabel dibawah ini, daya tampung penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2029 yaitu 2.878.286 jiwa dengan daya tampung rumah sebesar 719.572 unit. Selain itu juga, daya tampung rumah memenuhi daya tampung jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 17 Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Manggarai

No.`	Kecamatan	Lahan permukiman Eksisting	PSU (30%)	Perumahan (70%)	Luas Lahan Bagi Perumahan Baru			Jumlah Unit Rumah			Daya Tampung Rumah (unit)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk 2029 (Jiwa)	Keterangan
					Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)	Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)				
		A	B = (Ax30%)	C = (Ax70%)	D= (Cx1/3)	E= (Cx2/3)	F= (Cx3/3)	H = (Dx10.000 m/ 288 m²)	I = (E x10.000 m/144 m²)	J = (Fx 10.000 m/ 72 m²)	K = H+I+J	L = Kx 4 jiwa		
1	Satar Mese	591,87	178	414	138	276	414	4.795	19.181	57.543	81.519	326.077	47.727	memenuhi
2	Satar Mese Barat	357,15	107	250	83	167	250	2.894	11.574	34.723	49.191	196.766	35.039	memenuhi
3	Satar Mese Utara	241,37	72	169	56	113	169	1.956	7.822	23.467	33.245	132.979	31.205	memenuhi
4	Langke Rembong	1.292,01	388	904	301	603	904	10.468	41.871	125.612	177.951	711.802	69.626	memenuhi
5	Ruteng	599,46	180	420	140	280	420	4.857	19.427	58.281	82.565	330.260	72.108	memenuhi
6	Wae Rii	444,55	133	311	104	207	311	3.602	14.407	43.220	61.229	244.915	46.952	memenuhi
7	Lelak	221,41	66	155	52	103	155	1.794	7.175	21.526	30.495	121.979	20.935	memenuhi
8	Rahong Utara	296,25	89	207	69	138	207	2.400	9.601	28.802	40.803	163.212	42.370	memenuhi
9	Cibal	381,25	114	267	89	178	267	3.089	12.355	37.066	52.510	210.041	47.900	memenuhi
10	Cibal Barat	271,13	81	190	63	127	190	2.197	8.787	26.360	37.344	149.375	28.102	memenuhi
11	Reok	289,07	87	202	67	135	202	2.342	9.368	28.104	39.814	159.254	27.353	memenuhi
12	Reok Barat	238,92	72	167	56	111	167	1.936	7.743	23.228	32.906	131.626	22.593	memenuhi
Total		**5.224,45**	**1.567**	**3.657**	**1.219**	**2.438**	**3.657**	**42.328**	**169.311**	**507.933**	**719.572**	**2.878.286**	**491.911**	**memenuhi**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Sub bagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, serta Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

1. Ketahanan Pangan

Data makro mengenai pangan dapat dicermati melalui indikator indeks ketahanan pangan. Indikator tersebut dapat dipecah menjadi indikator yang lebih mikro, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Ketiga indeks ini baru dirumuskan oleh Kementerian Pertanian RI pada tahun 2019. Berikut adalah data mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 hingga 2023.

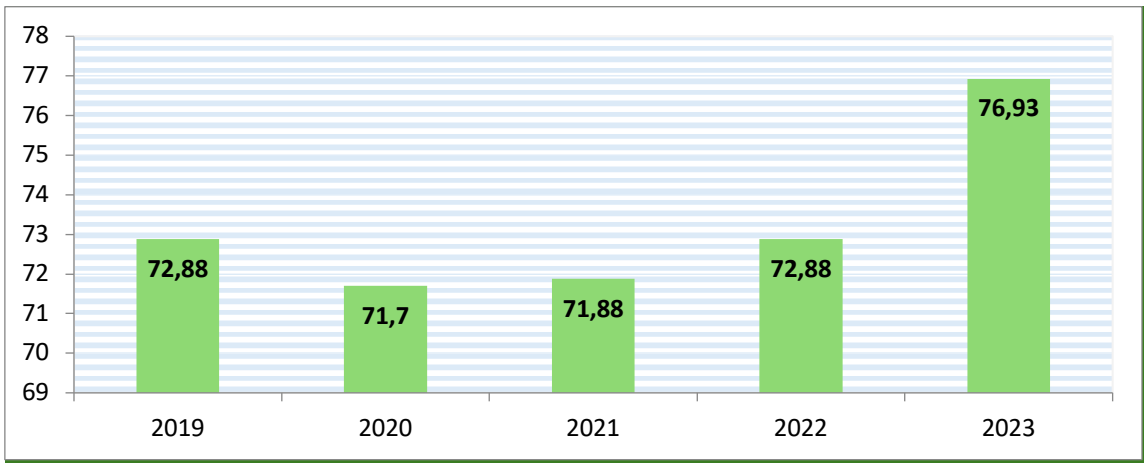

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 4,05% pada tahun 2023 yaitu hal ini dikarenakan ketersediaan pangan daerah yang cukup dan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional, adanya pola konsumsi masyarakat yang sudah mengandalkan beras

sebagai pangan utama, tingkat pendapatan petani semakin baik dan kurangnya impor beras. Pada tahun 2019 ke 2021 IKP mengalami penurunan sebesar 1% disebabkan karena masih terbatas dan belum meratanya sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas (keterjangkauan) pangan seperti pasar, minimarket, kedai dll di setiap kecamatan serta belum optimalnya pemanfaatan lumbung-lumbung pangan masyarakat. Di samping itu masih rendahnya tingkat pemanfaatan pangan karena belum optimalnya diversifikasi pangan dan masih rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan.

Pangan merupakan salah satu sektor utama penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan pangan perlu untuk dijamin. Ketersediaan pangan utama menunjukkan hubungan dengan ketersediaan atau suplai pangan pokok masyarakat melalui standar kebutuhan masyarakat, hasil produksi, dan luas panen.

Berikut merupakan data ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 18 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata–rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun(ton)	136.699	176.185	201.501	228.028	199.119
2	Jumlah Penduduk	338.426	349.090	325.758	331.299	333.730

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai,2023

Pertumbuhan jumlah penduduk bersifat fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penduduk 2.431 jiwa dan berdampak terhadap peningkatan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan mengalami penurunan rata–rata sebesar 29.909 ton di tahun 2023. Persentase ketersediaan pangan utama per tahun di Kabupaten Manggarai juga cenderung mengalami penurunan karena adanya elnino yang berdampak pada penurunan produksi, tetapi ada stok

pangan bantuan yang diterima masyarakat. Ketersediaan pangan tertinggi berada pada tahun 2022. Ini menunjukkan masyarakat mulai melakukan penganekaragaman konsumsi yang seimbang, tidak semata beras.

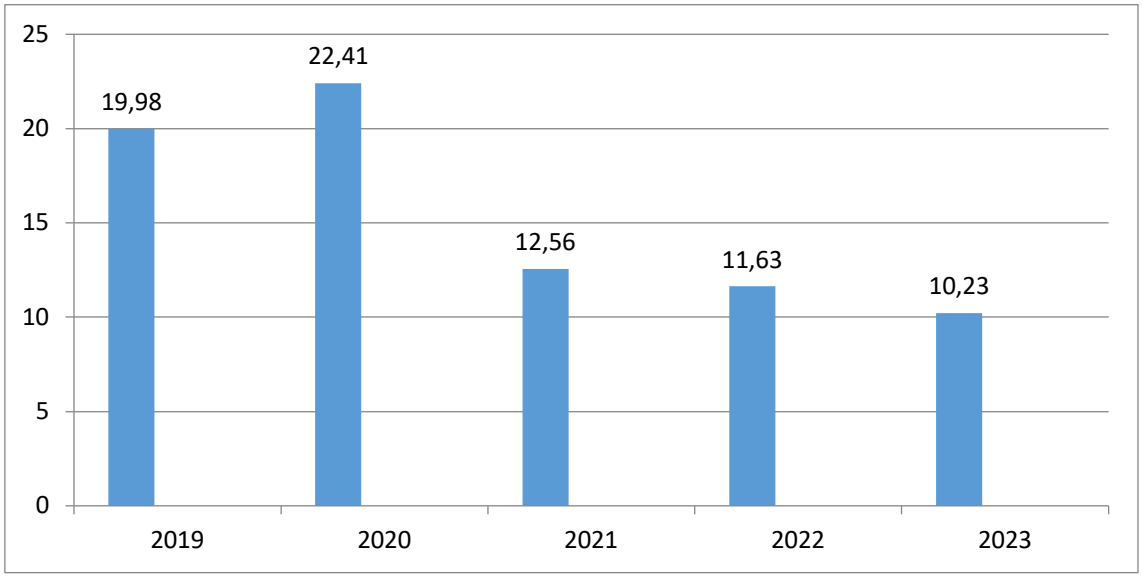

Grafik 2. 3 Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai,2024

Ketersediaan Pangan Utama mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2019-2023, ketersediaan pangan utama mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 7,2 persen hal ini di sebabkan karena adanya penurunan produksi semua komoditi pangan utama padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar akibat elnino sehingga banyak tanaman yang mengalami puso atau gagal panen. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan ketersediaan pangan utama sebesar 2,43 persen, ini dikarenakan adanya peningkatan produksi tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Ketersediaan Pangan Utama mengalami penurunan sebesar 2,43 di tahun 2022 dan 1,40 di tahun 2023 hal ini dikarenakan produksi pangan utama mengalami penurunan sebagai akibat kekeringan berkepanjangan sebagai akibat elnino.

Tabel 2. 19 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Energi Per Kapita	3.537 kkal/ kapita/hari	3.650 kkal/ kapita/hari	4.353 kkal/ kapita/hari	3.835 kkal/ kapita/hari	2.938 kkal/ kapita/hari
2	Ketersediaan Protein Per Kapita	93,46 gram/hari	95 gram/hari	97,6 gram/hari	95.15 gram/hari	92,30 gram/hari

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2024

Ketersediaan energi per kapita mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 510 kkal/kapita/hari dan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 703 kkal/kapita/hari dan mengalami penurunan sebesar 518 kkal/kapita/hari. Ketersediaan Protein per kapita mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,45 gram/kapita/hari dan mengalami penurunan 897 kkal/kapita/hari di tahun 2023. Ketersediaan energi per kapita masyarakat Manggarai masih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Manggarai masih tinggi mengonsumsi padi-padian, minyak dan lemak sedangkan Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah, umbi-umbian dan kacangan-kacangan masih perlu ditingkatkan, untuk mencapai komposisi konsumsi ke arah keseimbangan gizi.

Pengawasan dan pembinaan konsumsi pangan tetap digalakan untuk menjamin kebutuhan pangan seimbang terpenuhi. Data terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 20 Pangawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	162	175	180	-	-
2	Jumlah sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	715	728	730	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2024

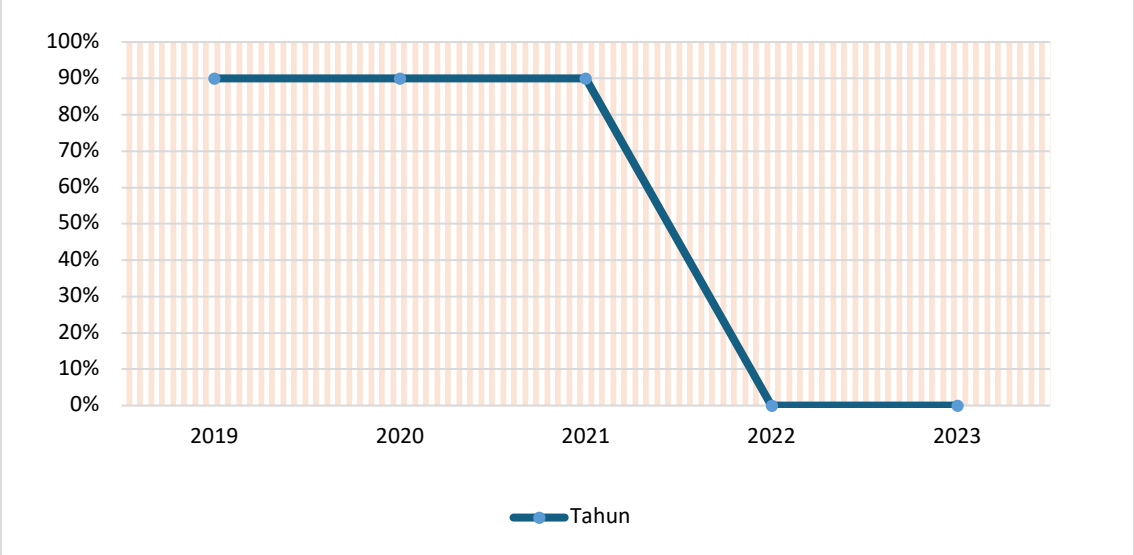

Grafik 2. 4 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2024

Data sampel pangan aman konsumsi terhadap total jumlah sampel makanan yang dijual di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2018-2021. Hal tersebut didukung oleh data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang meningkat hingga 5% selama tahun 2018-2021. Semakin meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Manggarai menunjukkan kualitas pangan yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat semakin baik pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak dilakukan pendataan karena keterbatasan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mengambil Data Sampel Makanan dan kesulitan mendapatkan alat tes kit untuk uji pangan dan Keterbatasan Anggaran.

2. Ketenagalistrikan

Kondisi pembangunan jaringan listrik di perkotaan dan perdesaan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan (BPS, 2024). Terjadi penambahan pelanggan listrik sebanyak kurang lebih 9.523 dengan total pelanggan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66.528 pelanggan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik sebanyak 124.245 pelanggan. Penerangan

jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Manggarai telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah.

3. Akses Terhadap Air Minum

Penyediaan kebutuhan pokok air minum merupakan amanat Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan. Target jumlah jiwa yang memperoleh air minum sehari-hari adalah 100%. Capaian jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum bersih tahun 2021 sebanyak 70.379 KK. Pada tahun 2022 capaian jumlah jiwa yang terlayani air minum bersih mengalami peningkatan menjadi 282.339 jiwa atau sebesar 86,41% dari total 326.737 jiwa. Capaian jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum bersih tahun 2022 sebanyak 81.176 KK atau sebesar 85,81% dari total 94.598 KK.

Tabel 2. 21 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator	2021	2022	2023
1	Jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari	267.477	282.339	287.252
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	70.379	81.176	84.140

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, Tahun 2023

Target jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah 88,00% pada tahun 2022. Namun, capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 85,81%. Artinya, angka tersebut kurang 2,190% dari target dan kurang 14,190% dari total keseluruhan rumah tangga.

Pada tahun 2023 capaian jumlah jiwa yang terlayani air minum bersih mengalami peningkatan menjadi 287.252 jiwa atau sebesar 86,07% dari total 333.730 jiwa. Capaian jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum bersih tahun 2023 sebanyak 84.140 KK atau sebesar 86,00% dari total 97.838 KK.

Target jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah 89,00% pada tahun 2023. Namun, capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 86,00%. Artinya, angka tersebut kurang 3,00% dari target dan kurang 14,00% dari total keseluruhan rumah tangga.

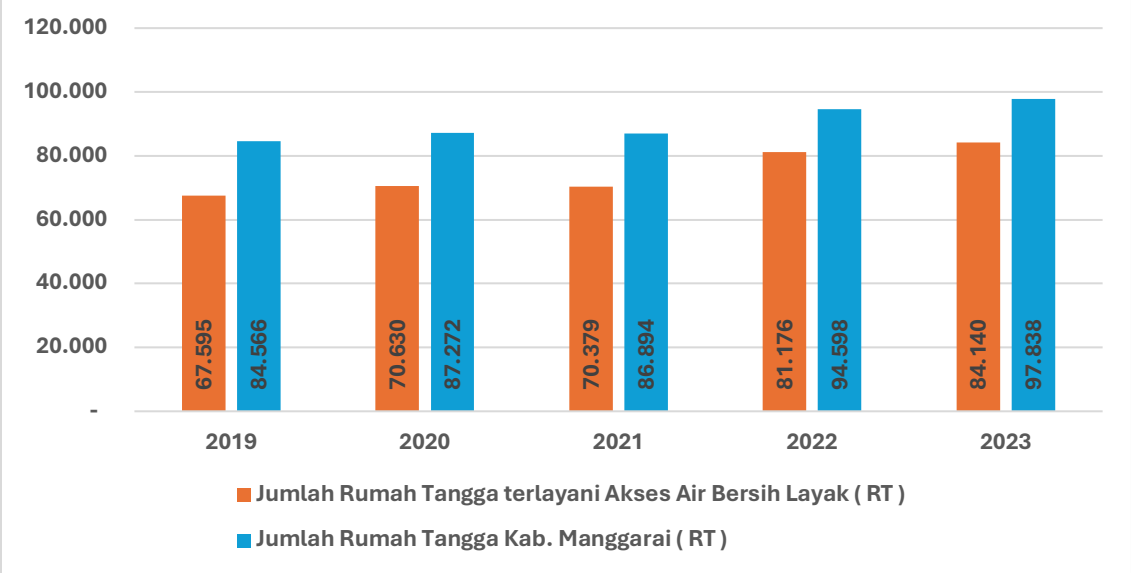

Grafik 2. 5 Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2024

Persentase rumah tangga menggunakan air bersih dari tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Indikator ini meningkat dengan total peningkatan sebesar 3.035 rumah tangga atau 6,89% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi penurunan layanan Saluran Rumah Tangga air minum bersih karena ada lonjakan jumlah rumah tangga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan air bersih bagi rumah tangga, sehingga terjadi penurunan

persentase layanan pada tahun 2021. Indikator ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari 70.379 rumah tangga menjadi 81.176 rumah tangga, dan konsisten bertambah pada tahun 2023 menjadi 84.140 Rumah Tangga yang terlayani air minum layak dari total 97.838 Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai. Diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber daya air, sehingga air baku di Kabupaten Manggarai dapat terlayani optimal. Selain itu, adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, danau, dan mata air merupakan akar masalah yang dapat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas sumber daya air, misalnya saja sempadan sungai yang dijadikan lahan terbangun tentu akan mengurangi area resapan air.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup sebuah daerah dapat dinilai dengan indikator makro Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator ini memiliki tiga komponen, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Skala IKLH Kabupaten Manggarai berada pada kategori baik. Berikut merupakan data mengenai komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018 hingga 2024.

Tabel 2. 22 IKLH, Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2018 -2024

Tahun	IKLH	Kategori
2018	77,06	Baik
2019	78,66	Baik
2020	77,24	Baik
2021	76,23	Baik
2022	72,98	Baik
2023	81,47	Baik
2024	76,69	Baik
Tahun	**IKA**	**Kategori**
2018	60,00	Baik
2019	70,00	Baik
2020	70,00	Baik
2021	60,00	Baik
2022	50,00	Cukup Baik
2023	73,31	Baik
2024	61,25	Baik

Tahun	IKU	Kategori
2018	89,71	Baik
2019	87,20	Baik
2020	87,87	Baik
2021	92,57	Sangat Baik
2022	93,82	Sangat Baik
2023	89,08	Baik
2024	92,19	Sangat Baik
Tahun	**IKTL**	**Kategori**
2018	80,36	Baik
2019	78,76	Baik
2020	74,70	Baik
2021	73,89	Baik
2022	73,89	Baik
2023	81,40	Baik
2024	74,53	Baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Indeks kualitas air mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 6,25 poin dari tahun 2022. Peningkatan indeks kualitas air pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya peran serta pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran air. Pada tahun 2023 terdapat 6 titik yang memenuhi baku mutu, 9 titik cemar ringan dan 1 titik cemar sedang sedangkan pada tahun 2022 semua titik (16 titik) cemar ringan. Parameter yang memberikan pengaruh besar ialah kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan *Fecal Coliform*. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga) serta tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian yang langsung dibuang ke sungai.

Indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 0,55 poin, pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Namun jika dilihat angka Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Manggarai masih masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan yang terjadi tidak signifikan dan tidak berdampak besar terhadap lingkungan. Kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan sebesar

1,53 poin dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya penambahan data luas belukar pada fungsi lindung yaitu sebesar 4598,64 ha.

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kualitas lingkungan hidup adalah sistem pengelolaan sampah. Sistem pengolahan sampah yang dimiliki pemerintah saat ini masih menggunakan sistem *open dumping*, yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan untuk digunakan karena tidak bisa mengatasi persoalan sampah secara optimal. Sistem ini memiliki fokus pada pemindahan/pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga pada TPA masih menyisakan residu yang belum terkelola.

Selain persoalan tersebut peningkatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang melonjak dari tahun ke tahun membuat volume sampah terus meningkat sedangkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis masih sangat terbatas, sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai belum mendapat pelayanan persampahan.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan beberapa upaya agar pelayanan penanganan sampah yang ada di lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian realisasi penanganan sampah yang meningkat pada tahun 2023. Berikut merupakan persentase target dan realisasi penanganan sampah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2019-2023.

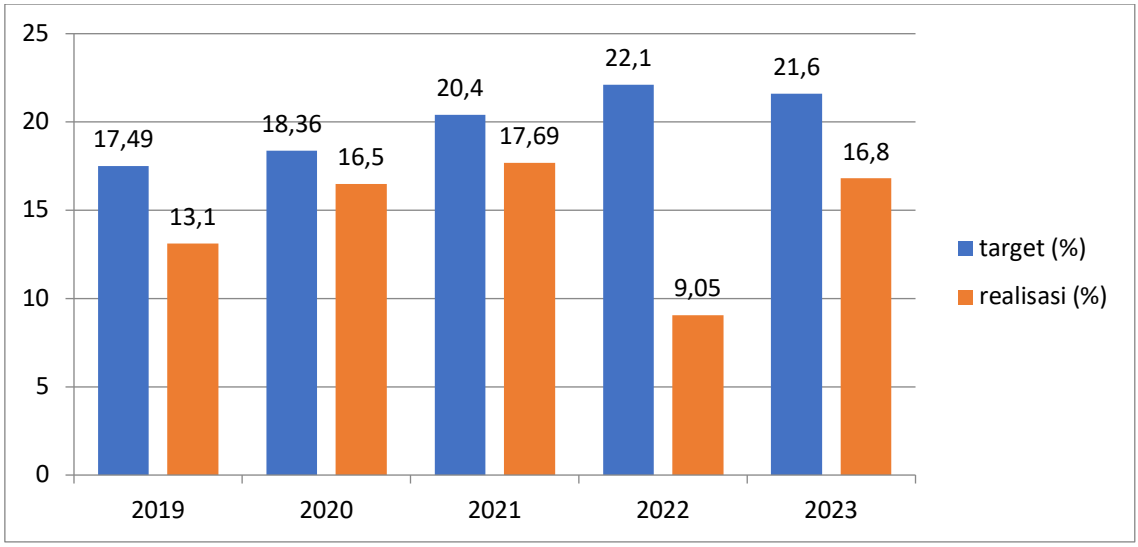

Grafik 2. 6 Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 - 2023

Sumber: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, 2024

Persentase capaian penanganan sampah pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, dari 9,05% meningkat menjadi 16,8%. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan armada yaitu amroll dan kontainer serta perluasan wilayah pengangkutan di beberapa kelurahan pada Kecamatan Reo, sehingga wilayah penanganan sampah saat ini mencakup Kecamatan Langke Rembong, Kelurahan Wae Belang-Kecamatan Ruteng, Kelurahan Pagal-Kecamatan Cibal serta Kecamatan Reo pada Kelurahan Mata Air, Kelurahan Wangkung, Kelurahan Baru dan Kelurahan Reo. Selain itu, kendaraan sampah/ armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup seringkali melakukan pengangkutan sampah melebihi bak pengangkutnya, sehingga perhitungan volume sampah terangkut pun mengikuti estimasi real volume sampah terangkut.

Wilayah Cancar dan Pagal tidak memiliki petugas khusus karena pemerintah kekurangan sumber daya manusia dan tidak memiliki fasilitas persampahan di wilayah tersebut, sehingga petugas kebersihan berasal dari wilayah Kecamatan Langke Rembong yang secara bergilir melakukan pengangkutan sekali seminggu di wilayah Cancar dan sekali sebulan di wilayah

Pagal. Berikut tabel produksi sampah Kabupaten Manggarai tahun 2023-2024 dan proyeksi timbulan sampah tahun 2025-2029.

Tabel 2. 23 Produksi Sampah Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Manggarai	Jumlah Sampah Terangkut ke TPA	Jumlah Sampah Tidak Terangkut
2023	916,13 m3 atau 141,936 ton	70,99 m3 atau ± 11 ton	845,13 m3 atau 130,936 ton
2024	933,61 m3 atau 144,64 ton	70,99 m3 atau ± 11 ton	845,13 m3 atau 133,64 ton

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Tabel 2. 24 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2029 Kabupaten Manggarai

Kecamatan	Berat (ton/hari)				
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Satar Mese	17,76	18,25	18,75	19,24	19,73
Satar Mese Barat	11,38	12,16	12,94	13,71	14,49
Satar Mese Utara	9,68	10,49	11,29	12,10	12,90
Langke Rembong	28,36	28,47	28,57	28,68	28,79
Ruteng	23,86	25,35	26,84	28,33	29,81
Wae Rii	16,02	16,87	17,72	18,56	19,41
Lelak	6,98	7,40	7,82	8,24	8,66
Rahong Utara	13,53	14,53	15,53	16,52	17,52
Cibal	15,41	16,51	17,61	18,71	19,80
Cibal Barat	9,07	9,71	10,34	10,98	11,62
Reok	9,84	10,21	10,58	10,94	11,31
Reok Barat	7,91	8,27	8,63	8,98	9,34
Total	**169,81**	**178,21**	**186,60**	**194,99**	**203,38**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029

Perhitungan tersebut merupakan estimasi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perhitungan Jumlah Produksi Sampah mengacu pada SNI 3242:2008 dan SNI 19:3864:1994, di mana jumlah sampah yang dihasilkan tiap orang sebesar 2,5 liter/hari dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten

Manggarai sebesar 366.352 Jiwa sama dengan 141,936 Ton sampah pada tahun 2023 dan 373.444 Jiwa sama dengan 144,64 ton sampah pada tahun 2024. Sedangkan jumlah sampah terangkut mengacu pada volume bak sampah, baik kontainer maupun *dump truck*, yang setiap harinya dapat mengangkut ± 7 m3 (timbulan sampah selalu melebihi Kapasitas Bak) sampah ke TPA.

Jika merujuk pada densitas sampah kota kecil seperti Kecamatan Rungkut Surabaya (Sumber: Ratya dkk, 2017-Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rungkut Surabaya), maka konversi jumlah produksi sampah di Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 141,936 ton/hari dan tahun 2024 sebesar 144,64 ton/hari. Sedangkan jumlah sampah terangkut dalam satuan Kg adalah ± 11000 Kg/hari atau setara dengan ± 11 Ton/hari, dengan rincian di Kota Ruteng sebesar 10 ton/hari, Reo sebesar 1 ton/hari, Pagal 1 ton/minggu, dan Cancar 1 ton/bulan pada untuk 2023 dan tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ada ± 130 ton sampah yang belum dapat terangkut ke TPA setiap hari, jumlah tersebut sangatlah banyak dan tidak sebanding dengan sarpras dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Manggarai yaitu TPA Ncolang yang berada di Desa Poco, Kecamatan Wae Rii. Sistem pengolahan sampah saat ini masih menggunakan sistem *open dumping*, yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan untuk digunakan karena tidak bisa mengatasi persoalan sampah secara optimal. Sistem ini memiliki fokus pada pemindahan/pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga pada TPA masih menyisakan residu yang belum terkelola. Selain persoalan tersebut peningkatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang melonjak dari tahun ke tahun membuat volume sampah terus meningkat sedangkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas

Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis masih sangat terbatas, sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai belum mendapat pelayanan persampahan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan data BPS, jenis bencana yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Jenis bencana alam dan identifikasi wilayah kecamatan ini membantu daerah untuk mempersiapkan intervensi kebijakan dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Berbagai jenis bencana ini harus diidentifikasi dan ditanggulangi dengan baik agar dampaknya dapat diminimalkan. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat diidentifikasi melalui indeks risiko bencana. Indeks risiko bencana di Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut.

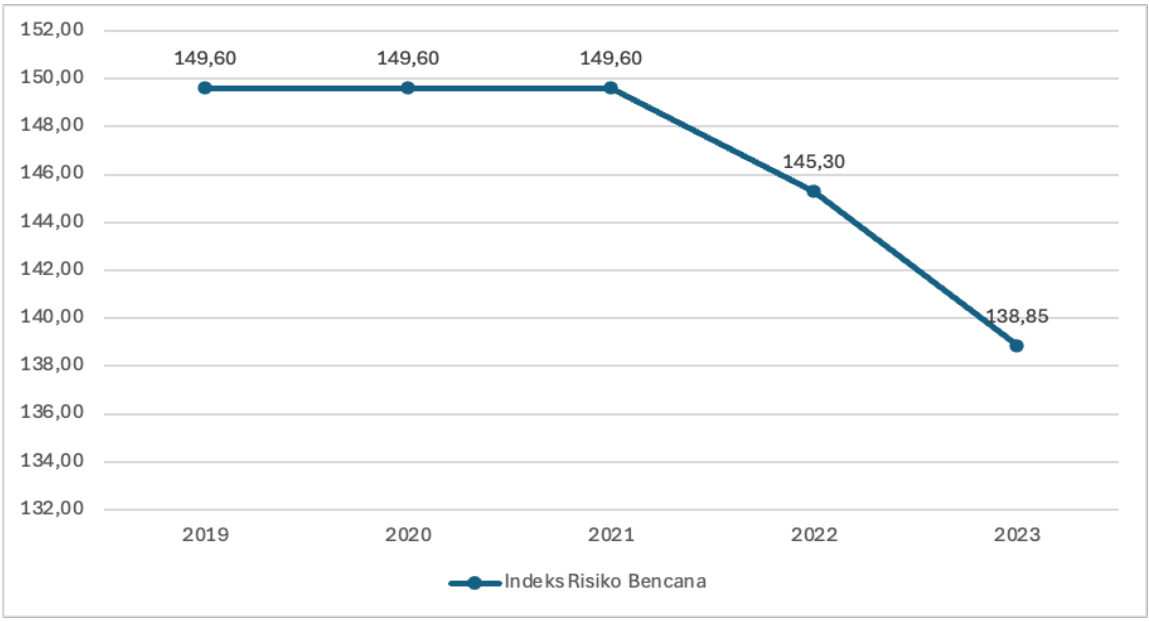

Grafik 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Nasional Penanggulanggan Bencana, 2024

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator untuk mengukur kerawanan suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana. Nilai Indeks Risiko Bencana yang

semakin menurun menujukkan bahwa semakin baik kondisi suatu daerah. Pada tahun 2019 hingga 2021 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai cenderung stagnan, selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Penurunan Indeks Risiko Bencana tersebut masih perlu diakselerasi dengan meningkatkan upaya-upaya mitigasi bencana terutama dalam peningkatan kualitas layanan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.

2.1.1.7 Demografi

Secara umum, kondisi demografi Kabupaten Manggarai dilihat dari dua indikator yaitu jumlah penduduk dan struktur penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Satar Mese	37.418	33.917	34.260	35.978	35.978
2	Satar Mese Barat	20.774	18.944	19.030	20.179	20.179
3	Satar Mese Utara	16.465	14.854	15.170	15.821	15.821
4	Langke Rembong	67.355	65.626	65.631	67.555	67.555
5	Ruteng	45.422	41.533	41.801	43.578	43.578
6	Wae Rii	31.066	28.788	29.119	30.662	30.662
7	Lelak	13.331	12.111	12.245	12.881	12.881
8	Rahong Utara	24.877	22.180	22.334	23.307	23.307
9	Cibal	28.288	25.569	24.460	26.886	26.886
10	Cibal Barat	16.469	15.111	16.512	15.891	15.891
11	Reok	20.847	19.291	19.436	20.304	20.304
12	Reok Barat	15.952	14.931	15.043	15.716	15.716
	Kabupaten Manggarai	**338.264**	**312.855**	**315.041**	**328.758**	**328.758**

Sumber: Manggarai Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 mencapai 328.758 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Langke Rembong yaitu 67.555 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan

Lelak yaitu 12.881 jiwa. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Langke Rembong merupakan kawasan pusat kota dan pemerintahan.

Rata-rata persentase laju pertumbuhan penduduk bervariasi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perpindahan penduduk dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap populasi penduduk memiliki kontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai. Persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 (%)
1	Satar Mese	35.978	2,17
2	Satar Mese Barat	20.179	2,32
3	Satar Mese Utara	15.821	2,32
4	Langke Rembong	67.555	1,06
5	Ruteng	43.578	1,76
6	Wae Rii	30.662	2,32
7	Lelak	12.881	2,27
8	Rahong Utara	23.307	1,82
9	Cibal	26.886	1,84
10	Cibal Barat	15.891	1,85
11	Reok	20.304	1,88
12	Reok Barat	15.716	1,88
	Kabupaten Manggarai	**328.758**	1,96

Sumber: Manggarai Dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai pada periode tahun 2020-2023 adalah 1,96%. Persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,09% dari tahun 2022. Faktor kelahiran dan kematian sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai.

Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Manggarai cukup bervariasi. Kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, sedangkan kecamatan di sekitarnya berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Satar Mese	35.978	10,94	191,53	187,85
2	Satar Mese Barat	20.179	6,14	128,16	157,45
3	Satar Mese Utara	15.821	4,81	114,74	137,89
4	Langke Rembong	67.555	20,55	38,8	1.741,11
5	Ruteng	43.578	13,25	87,35	498,89
6	Wae Rii	30.662	9,33	83,26	368,27
7	Lelak	12.881	3,92	41,43	310,91
8	Rahong Utara	23.307	7,09	84,58	275,56
9	Cibal	26.886	8,18	89,71	299,70
10	Cibal Barat	15.891	4,83	76,25	208,41
11	Reok	20.304	6,18	151,79	133,76
12	Reok Barat	15.716	4,78	256,23	61,34
	Kabupaten Manggarai	**328.758**	**100**	**1.343,83**	**244,64**

Sumber: Manggarai Dalam Angka, 2024

Sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, dan Satar Mese. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Sebaran penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Reok Barat. Kondisi geografis dan pembangunan ekonomi cukup berpengaruh terhadap sebaran penduduk di Kabupaten Manggarai. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Langke Rembong yaitu 1.741,11 jiwa/km^2, sedangkan Kecamatan Reok Barat menjadi wilayah yang kepadatan penduduknya terendah.

Struktur penduduk di Kabupaten Manggarai didominasi oleh penduduk laki-laki sebesar 51 persen atau 164.420 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 164.338 jiwa. Struktur penduduk di Kabupaten Manggarai dapat digambarkan pada gambar berikut.

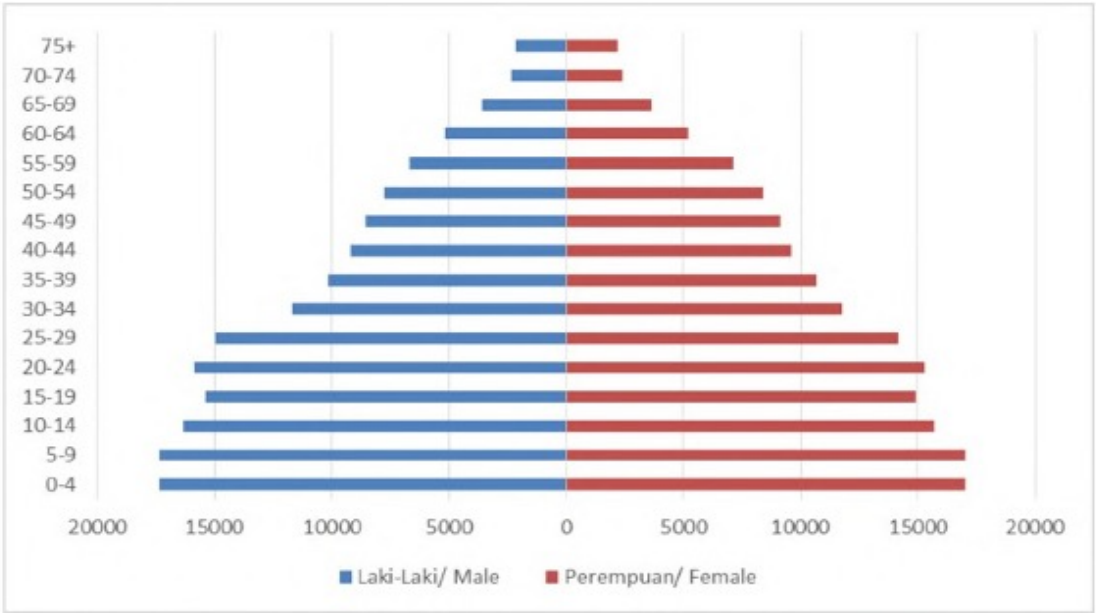

Grafik 2. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai

Sumber: Manggarai Dalam Angka, 2024

Piramida penduduk tersebut menunjukkan piramida penduduk muda atau kategori ekspansif yang menunjukkan tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Piramida ini menunjukkan cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Tidak ada kesenjangan siginifikan antara kelompok usia produktif dengan nonproduktif di Kabupaten Manggarai.

2.1.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Manggarai dapat diukur melalui berbagai indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, serta laju inflasi. Berikut ini adalah pemaparan berbagai data tersebut yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Manggarai selama periode Tahun 2021-2024.

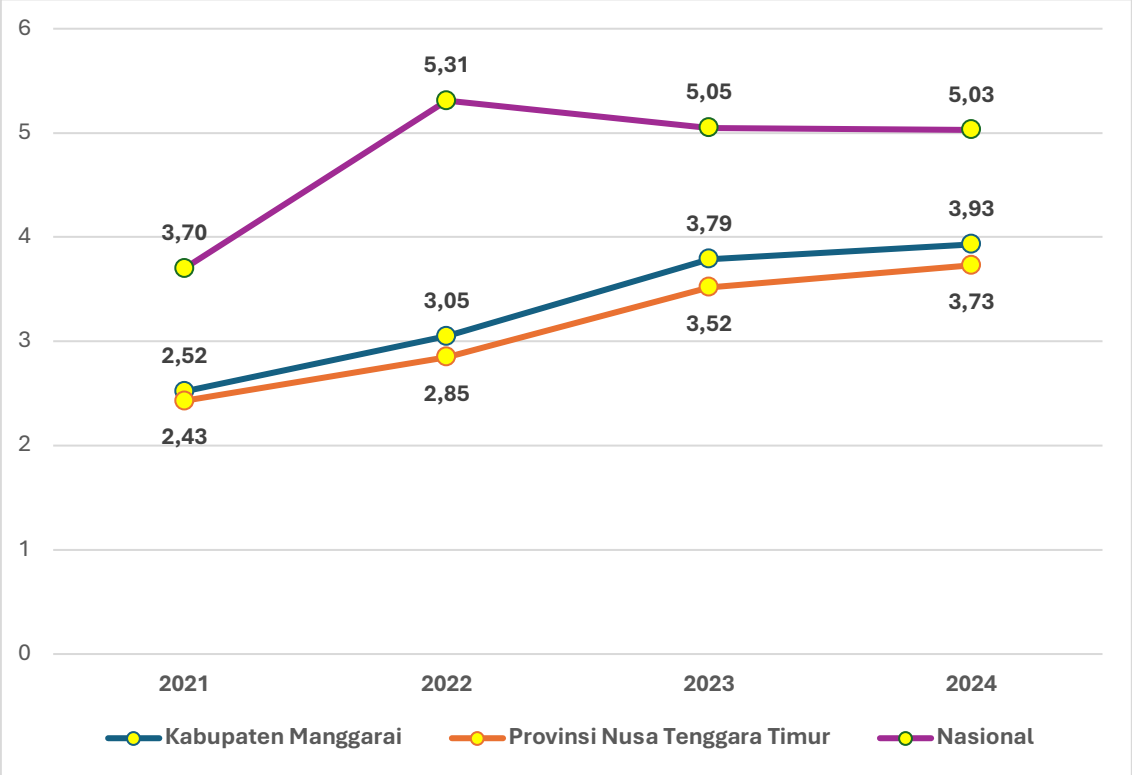

Grafik 2. 9 LPE Kabupaten Manggarai selama periode Tahun 2021-2024

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2021 dengan

kondisi pandemi Covid-19, Kabupaten Manggarai mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 2,43 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam aspek lainnya, struktur ekonomi akan menjelaskan perihal sektor-sektor perekonomian daerah Kabupaten Manggarai baik dari aspek distribusi maupun laju pertumbuhannya. Data mengenai struktur ekonomi bertujuan untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan yang ada di Kabupaten Manggarai melihat dari produktivitas ekonomi masing-masing sektor. Produktivitas masing-masing sektor ini dinilai dari angka Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan lapangan usaha yang sudah mengklasifikasi masing-masing sektor ke dalam suatu lapangan usaha tertentu. Berikut merupakan distribusi perekonomian Kabupaten Manggarai menurut lapangan usaha dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 28 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,57	21,76	22,35	22,01	21,42%
Pertambangan dan Penggalian	2,52	2,48	2,50	2,52	2,47%
Industri Pengolahan	0,38	0,36	0,36	0,39	0,43%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12%
Konstruksi	13,90	14,42	14,04	14,54	13,82%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,00	9,26	9,73	10,39	10,71%
Transportasi dan Pergudangan	3,41	3,36	3,43	3,59	3,89%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,33	0,39	0,43	0,47%
Informasi dan Komunikasi	10,25	10,25	10,34	10,08	10,24%
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	7,22	7,49	7,14	6,88%
Real Estate	2,14	2,06	2,11	2,11	2,05%

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Perusahaan	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,97	15,04	14,29	13,81	15,06%
Jasa Pendidikan	7,77	7,65	7,34	7,37	6,90%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,04	2,07	2,02	2,09	2,12%
Jasa lainnya	3,47	3,38	3,23	3,16	3,15%
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Distribusi PDRB Kabupaten Manggarai menunjukkan beberapa sektor yang memiliki rata-rata distribusi di atas 20 persen yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Capaian distribusi tertinggi kedua yaitu lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha tertinggi ke tiga yaitu konstruksi. Sedangkan distribusi PDRB Kabupaten Manggarai terendah yaitu berada pada sektor pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

2. Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

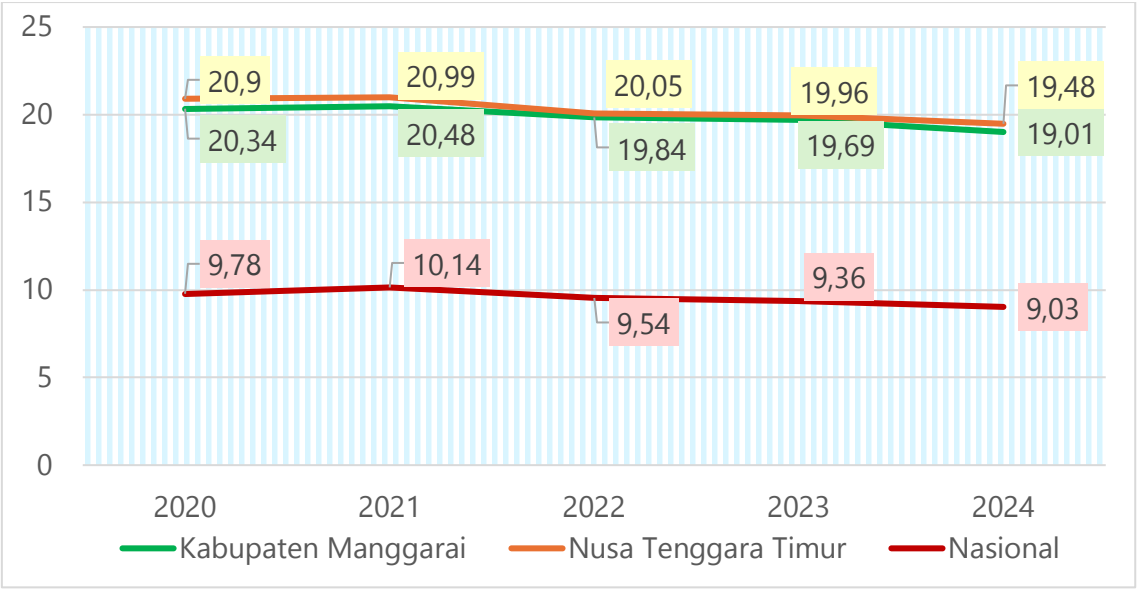

Grafik 2. 10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai memiliki nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada level nasional. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai mencapai 19,01 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan pada level nasional dan Kabupaten Manggarai memiliki gap lebih dari 10 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada level Provinsi. Namun, perbedaan tingkat kemiskinan yang terjadi pada level Kabupaten dan Provinsi tidak terlalu signifikan.

Dalam periode 2020-2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai mengalami penurunan pada setiap periodenya. Tingkat kemiskinan terendah Kabupaten Manggarai terjadi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 19,01 persen. Rata-rata penduduk miskin pada tahun 2020-2024 Kabupaten Manggarai mencapai 20,18.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk mengetahui kesejahteraan penduduk secara umum di suatu wilayah. PDRB per kapita menunjukkan kemampuan tiap penduduk dalam memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Semakin

tinggi nilai PDRB per kapita, maka semakin tinggi imbal hasil produksi yang diterima oleh setiap penduduk. Perhitungan PDRB per kapita dihitung dengan membandingkan total PDRB daerah terhadap total penduduk.

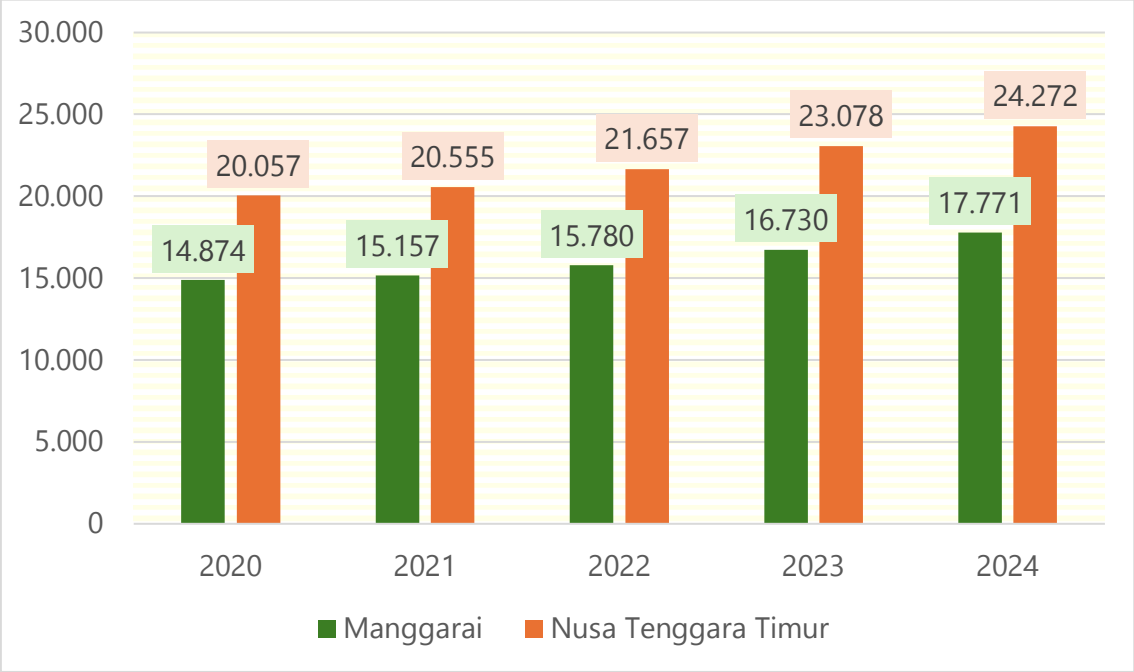

Grafik 2. 11 PDRB per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Tinggi rendahnya PDRB per kapita tergantung dengan perubahan nilai PDRB dan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk maupun laju pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada sektor perekonomian di Kabupaten Manggarai. Beberapa sektor yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Manggarai di antaranya adalah pertanian, perikanan, perkebunan, konstruksi, perdagangan, komunikasi dan informasi serta administrasi pemerintahan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan daerah adalah berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi lapangan kerja.

Kondisi tenaga kerja di suatu wilayah dapat dilihat di antaranya melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Walaupun secara konseptual Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya dapat mengukur persentase individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai, sehingga, TPT tidak serta merta dapat memberikan gambaran lengkap tentang tingkat pengangguran di suatu daerah.

5. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0, yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa tenggara Timur, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

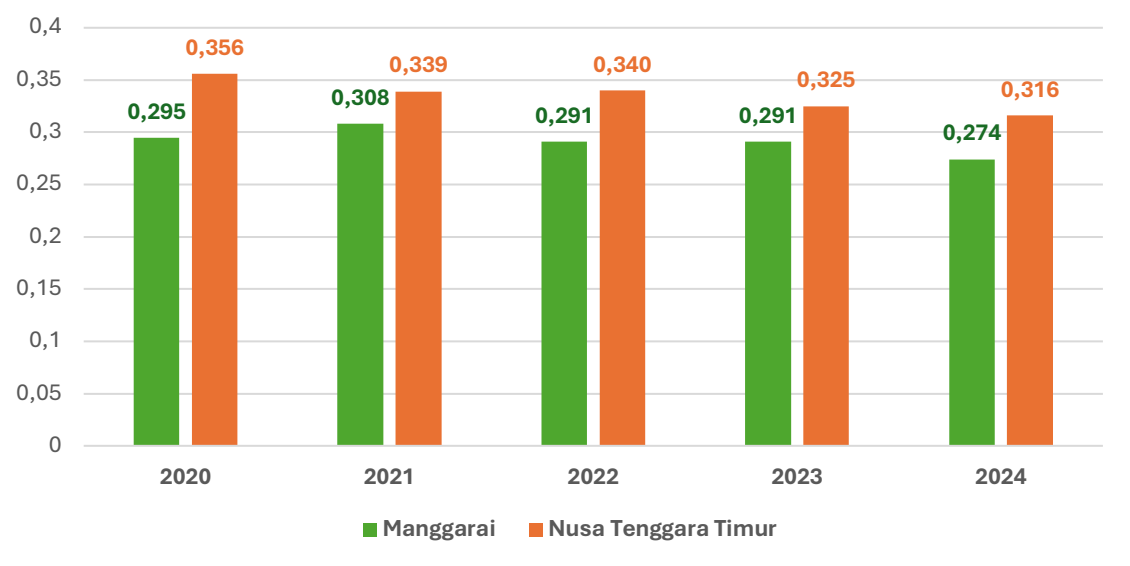

Grafik 2. 12 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Indeks Gini Kabupaten Manggarai memiliki tren yang relatif menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ketimpangan di daerah tercatat sebesar -0,021 poin, di mana laju penurunan ini lebih baik dari level nasional dengan penurunan sebesar -0,001 poin namun lebih rendah dari laju penurunan provinsi sebesar -0,040 poin. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang semakin baik dari kondisi sebelumnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kondisi ketimpangan daerah memiliki angka yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir, di mana hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan yang masih belum kokoh dan mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat yang masih volatil.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta peningkatan askes dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai.

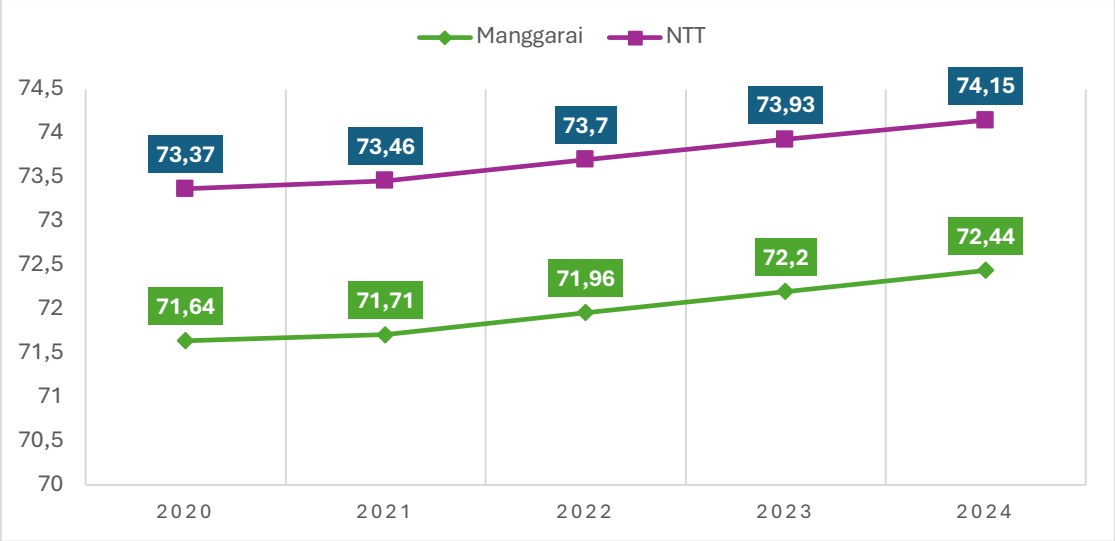

Grafik 2. 13 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Hasil Long Form SP2020 Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Kabupaten Manggarai naik sebesar 0,8 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Manggarai 72,44. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 72,44 tahun. Meskipun capaian UHH Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2024, UHH Provinsi NTT 74,15 dan Kabupaten Manggarai 72,44, sehingga terdapat selisih 1,71 poin.

Meskipun secara capaian masih di bawah Provinsi, namun rata-rata kenaikan per tahun masih lebih tinggi yakni 0,28 persen, sedangkan Provinsi NTT 0,26 persen. Dengan demikian, upaya percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan, sehingga capaian UHH Kabupaten Manggarai dapat sejajar bahkan lebih tinggi dibanding provinsi. Capaian UHH dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya akses dan kualitas layanan

kesehatan yang memadai, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta pemenuhan infrastruktur lingkungan yang memadai seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang aman, dan pengelolaan sampah yang baik.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam membangun sumber daya manusia. Urusan pendidikan sendiri menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan. indeks pendidikan dihitung dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Berikut adalah capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai selama periode 2020 hingga 2024

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Manggarai periode 2020 hingga 2024.

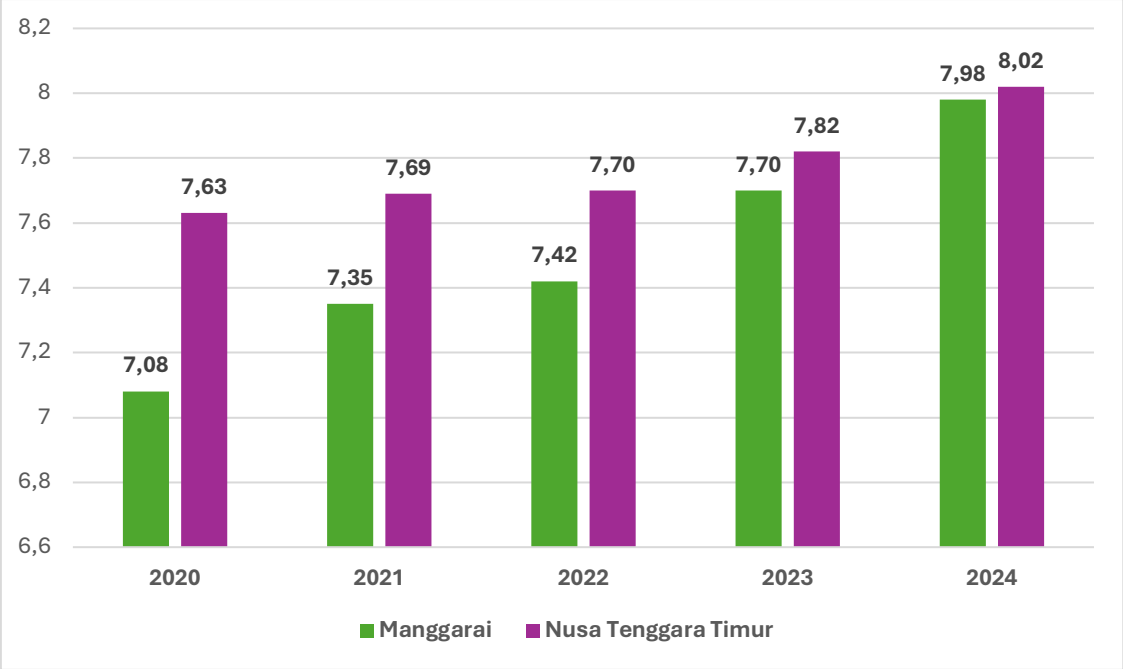

Grafik 2. 14 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,9 poin. Pada tahun 2024 RLS Kabupaten Manggarai berada pada angka 7,98. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Manggarai dapat merasakan pendidikan formal selama 7 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Upaya peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Manggarai perlu menjadi perhatian, mengingat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Manggarai masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai.

2. Harapan Lama Sekolah

Salah satu aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat

ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2020 hingga 2024.

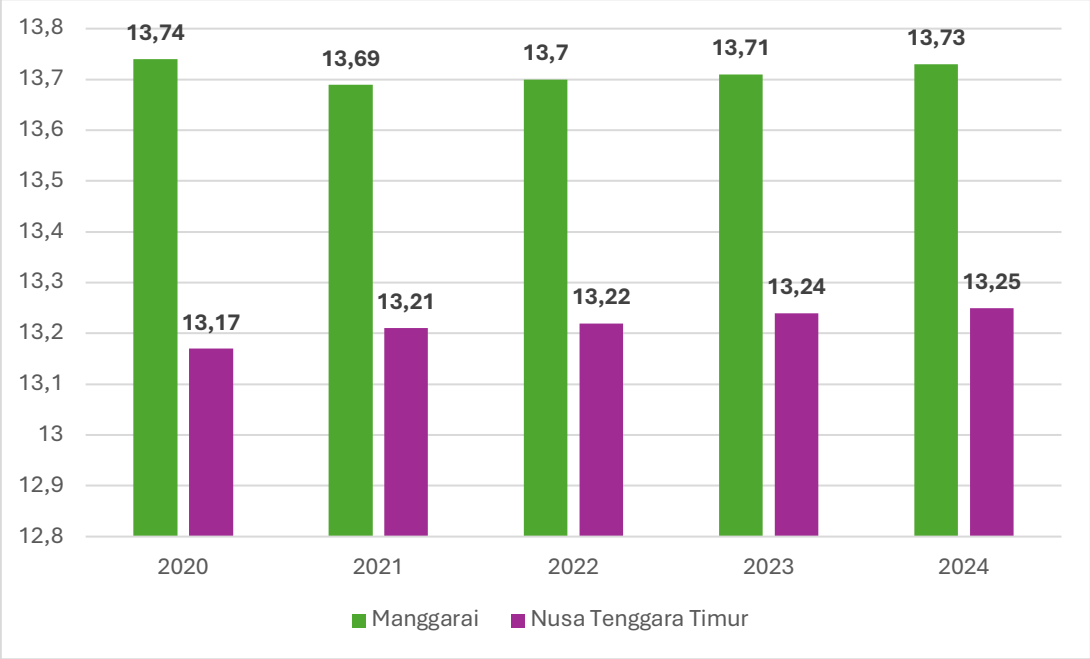

Grafik 2. 15 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam periode lima tahun terakhir, capaian HLS Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Manggarai berada di angka 13,45 tahun atau setara diploma I. Selama periode 2020 hingga 2024, capaian HLS Kabupaten Manggarai berada di atas capaian rata-rata HLS Provinsi Nusa Tenggarai Timur, yang mana pada tahun 2024 berada pada angka 13,25 tahun atau 0,48 poin di bawah HLS Kabupaten Manggarai. Namun demikian, upaya untuk meningkatan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing

masyarakat Kabupaten Manggarai terutama dalam mendukung target nasional, yaitu Indonesia emas 2045.

3. Angka Literasi dan Angka Numerasi

Angka literasi merupakan ukuran Tingkat kemampuan Masyarakat dalam menulis dan membaca serta kemampuan mengelola informasi dan pengetahuan. Angka literasi menentukan kualitas SDM suatu daerah, semakin tinggi tingkat literasi maka akan semakin luas wawasan ilmu dan kecakapan yang dimiliki Masyarakat. Sementara itu, angka numerasi merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan menganalisis dan menggunakan angka, symbol, dan grafik. Hal ini dapat tercermin dari rapor pendidikan yang merupakan hasi evaluasi sistem pendidikan mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Berikut merupakan hasil rapor pendidikan Kabupaten Manggarai tahun 2024.

Tabel 2. 29 Rapor Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2024

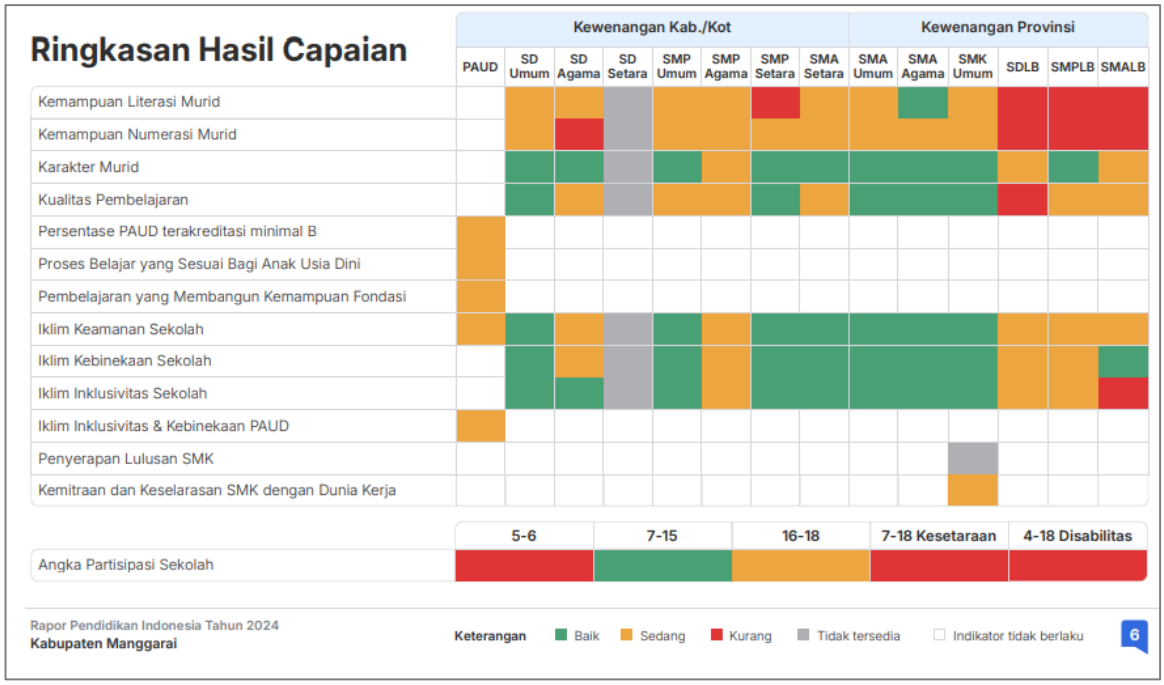

Sumber: kemendikdasmen, 2025

Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2024 untuk Kabupaten Manggarai, menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Manggarai memiliki

variasi yang signifikan antar jenjang dan indikator. Kelemahan utama tampak pada indikator kemampuan literasi dan numerasi murid, khususnya di jenjang SD Umum dan SMK, yang didominasi kategori merah (kurang), serta angka partisipasi sekolah di kelompok usia 5–6 tahun dan 4–18 disabilitas yang juga berada pada kategori kurang. Namun demikian, terdapat indikator yang menunjukkan kinerja baik, seperti iklim keamanan dan kebhinnekaan sekolah yang merata hijau di hampir semua jenjang. Selain itu, kualitas pembelajaran dan proses belajar PAUD masih dalam kategori sedang hingga baik, menunjukkan potensi penguatan di jenjang dasar. Tantangan utama terletak pada pemerataan mutu dan layanan pendidikan, terutama pada jenjang yang menjadi kewenangan provinsi seperti SMK dan SLB. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara inklusif di semua jenjang dan segmen usia.

Keterkaitan literasi dan numerasi penting dalam pengembangan mengambil Keputusan berbasis data. Dengan demikian, proses literasi dan numerasi yang baik dan berkesinambungan sangat penting dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif dalam membangun daerah

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh Perpustakaan Nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan

Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kabupaten Manggarai tahun 2023 dan 2024.

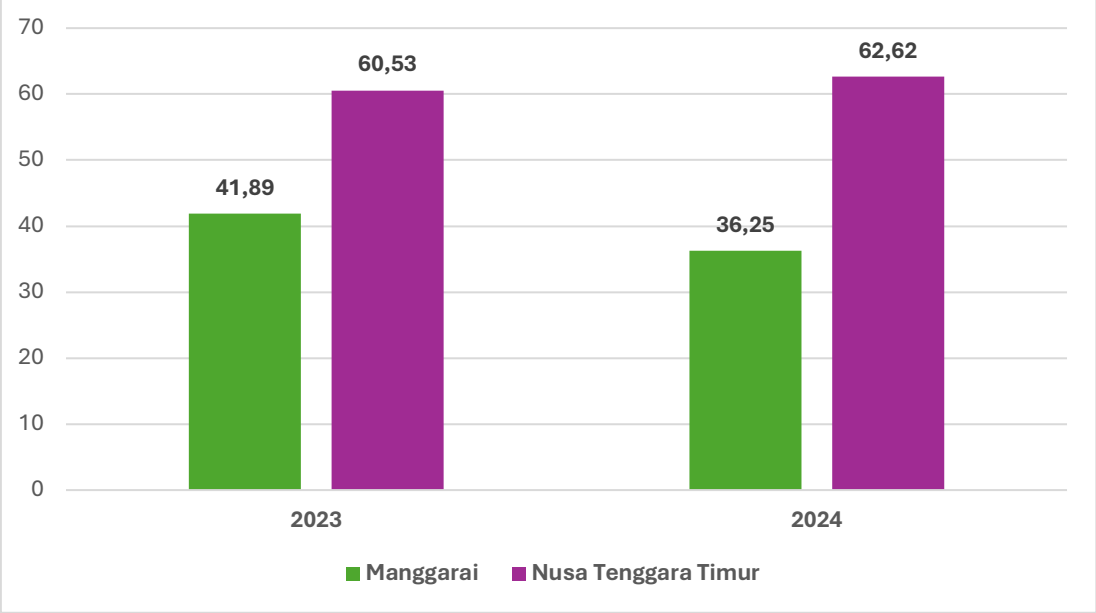

Grafik 2. 16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024

Sumber: Perpusnas, 2025

IPLM Kabupaten Manggarai mengalami tren yang menurun selama periode 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hal ini menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka meningkatkan budaya literasi masyarakat, di antaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Salah satu indikator yang mencerminkan

perlindungan sosial yakni cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara umum, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah NTT masih perlu ditingkatkan, khususnya BPJS Ketengakerjaan pada pekerja informal. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, minimnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah NTT yakni belum tersedianya regulasi terkait PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal (petani, nelayan, pelaku UMKM). Kebijakan PBI jaminan sosial ketenagakerjaan masih bersifat sporadis, sehingga terkait syarat penerima bantuan dan kuota penerima bantuan masih terbatas. Dengan demikian, diperlukan regulasi untuk optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep beragama maslahat dan berkebudayaan maju menekankan pada prinsip kehidupan beragama yang memberikan manfaat luas bagi Masyarakat dan pengembangan kebudayaan yang adaptif dan progresif. Kabupaten Manggarai sebagai wilayah dengan keberagaman etnis dan agama memiliki relevansi terhadap konsep ini untuk membangun harmoni sosial di lingkungan Masyarakat. Indikator yang menggambarkan moderasi agama inklusif dan kebudayaan yang maju diuraikan sebagai berikut.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan salah satu indikator makro yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 hingga

2024 yang digunakan sebagai proxy untuk melihat kerukunanan umat beragama di Kabupaten Manggarai.

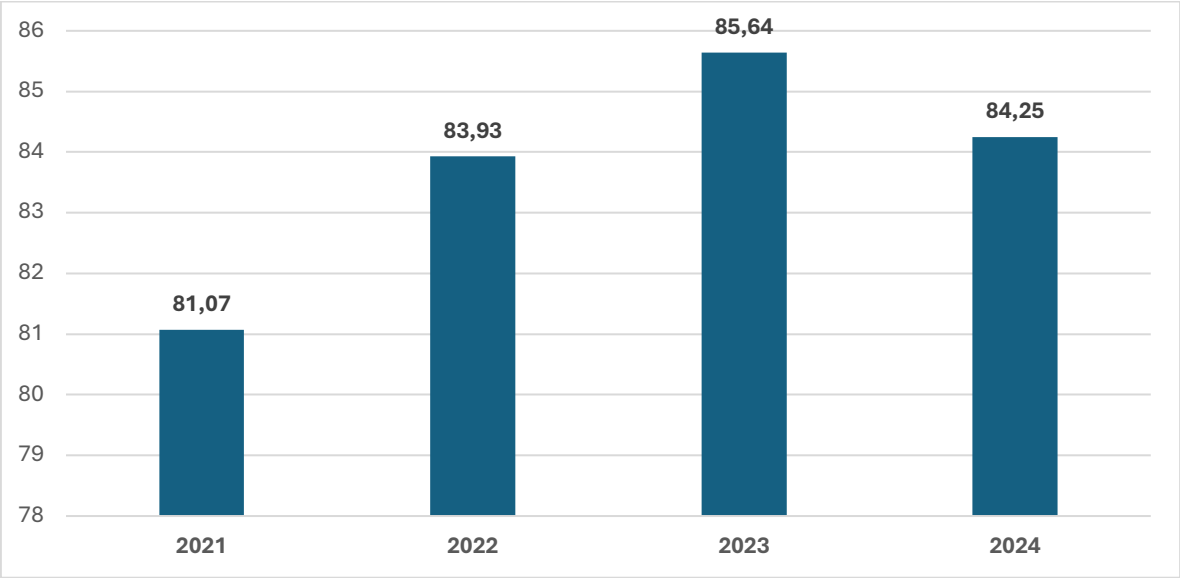

Grafik 2. 17 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Agama RI, 2025

Indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren yang cukup positif dalam periode 2021–2024, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 81,07 dan meningkat signifikan menjadi 83,93 pada tahun 2022, lalu mencapai puncaknya di angka 85,64 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 84,25, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di NTT relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, yang mencerminkan adanya penguatan toleransi, harmoni sosial, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberagaman. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran yang dapat mencerminkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Manggarai selama periode 2021 hingga 2024.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu pilar yang cukup vital dalam pembangunan berkelanjutan karena kebudayaan bukan hanya mencerminkan identitas dan karakter suatu bangsa, namun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kemajuan dan perkembangan di bidang kebudayaan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana budaya berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dengan adanya IPK, diharapkan setiap daerah dapat lebih fokus dalam mengembangan potensi budaya lokal dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. IPK terdiri dari tujuh dimensi dengan bobot yang berbeda pada tiap dimensi yaitu 1) ekonomi budaya; 2) pendidikan; 3) ketahanan sosial budaya; 4) warisan budaya; 5) ekspresi budaya; 6) budaya literasi; 7) gender. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2020-2023.

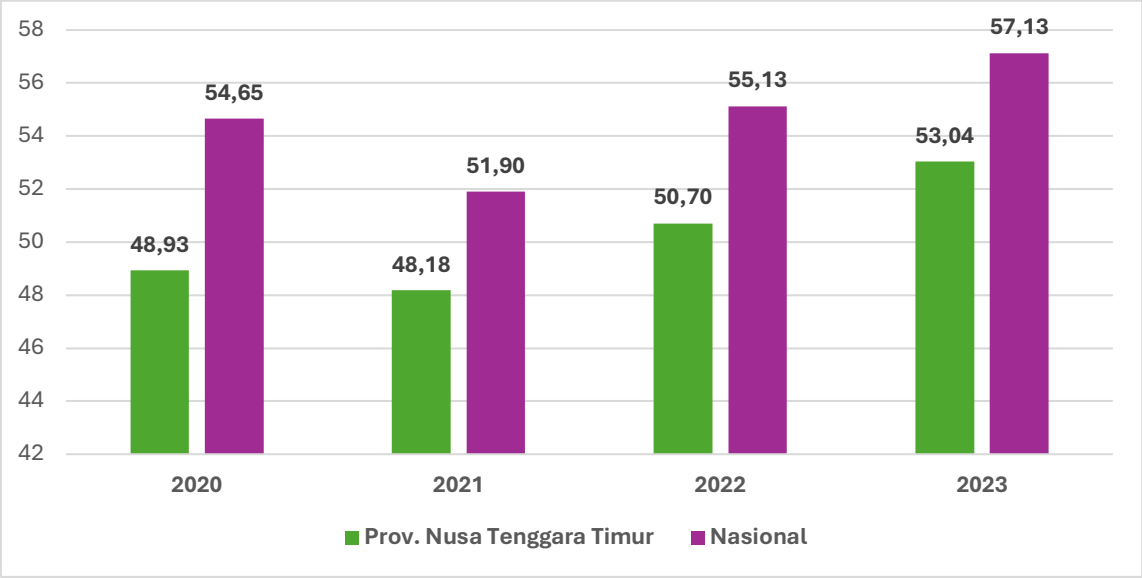

Grafik 2. 18 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023

Sumber : https://ipk.kemdikbud.go.id/

Indeks pembangunan kebudayaan menunjukkan bahwa capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2020–2023 masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, NTT mencatat angka 48,93 sementara nasional 54,65, dan kondisi ini berlanjut hingga 2023 ketika NTT mencapai 53,04 sedangkan nasional berada pada angka 57,13. Meskipun demikian, terlihat adanya tren peningkatan di NTT, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah. Jika dikaitkan dengan kondisi kebudayaan di Kabupaten Manggarai, perkembangan ini sejalan dengan upaya pelestarian budaya lokal yang masih sangat kuat, seperti tradisi caci, rumah adat mbaru gendang, serta praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan kekayaan budaya lokal tersebut ke dalam strategi pembangunan kebudayaan yang lebih luas, sehingga dapat mendongkrak capaian indeks kebudayaan daerah sekaligus mempersempit kesenjangan dengan capaian nasional

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut di antaranya Indeks Pembangunan Keluarga (IKK), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Berikut capaian IKK, IPA, IKG, dan IPP Kabupaten Manggarai.

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks pembangunan keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menilai tingkat kualitas pembanguan keluarga di indonesia. Indikator tersebut mencerminkan tingkat ketahanan, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui pengukuran tiga dimensi yaitu dimensi

ketahanan keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahgiaan keluarga. Skala nilai iBanga berkisar 0-100, semakin tinggi nilai menunjukan keluarga lebih berkualitas, mandiri, bahagia, dan harmonis. Berikut capaian iBangga Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT.

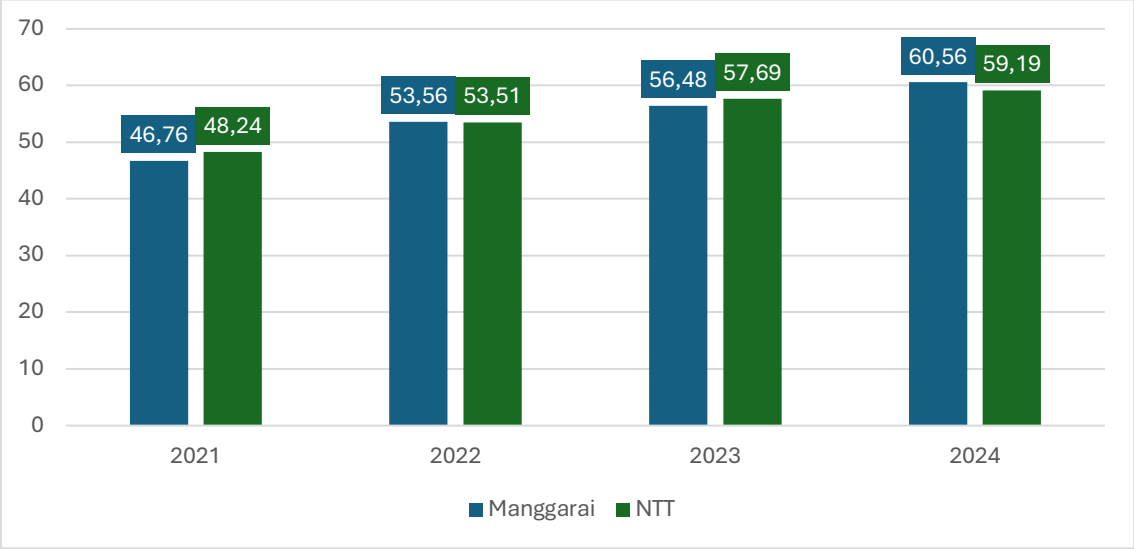

Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2021-2024

Sumber: BKKBN, 2025

Selama periode 2021-2024, capaian iBangga Kabupaten Manggarai memiliki trend positif. Capaian iBangga Manggarai sempat lebih rendah dibanding Provinsi NTT pada tahun 2021 dan 2023, kemudian berhasil menyalip pada tahun 2022 dan 2024. Capaian iBangga Manggari naik 13,8 poin, sedangkan Provinsi NTT naik 10,95 poin. Selain itu, Kabupaten Manggarai berhasil melakukan lompatan dari kategori rendah (2021) menjadi kategori tinggi (2024), sedangkan NTT masih berada pada kategori sedang. Dengan demikian, selama empat tahun terakhir Manggarai berhasil meningkatkan upaya pembangunan keluarga dengan baik dibanding Provinsi. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan capaian iBangga pada periode mendatang. Adapun strategi yang bisa dilakukan di antaranya penguatan pendampingan keluarga, peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan,

penguatan dimensi kebahagiaan dan keharmonisa keluarga, san penguatan sinergi lintas OPD dan lembaga.

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Berikut capaian IPA Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru tersedia hingga tahun 2023.

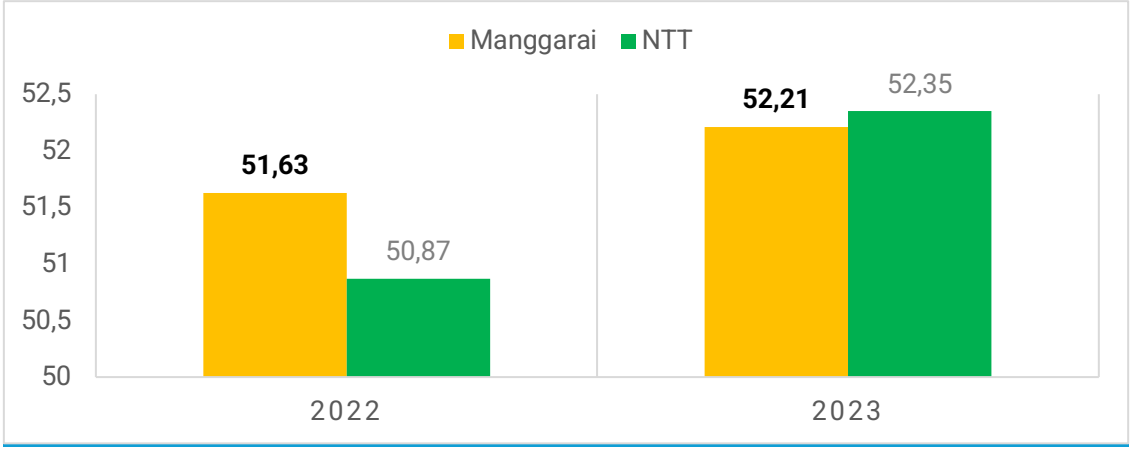

Grafik 2. 20 Indeks Perlindungam Anak (IPA) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022-2023, KemenPPPA dan BPS, 2025

Selama periode 2022-2023, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pada tahun 2023, capaian IPA Kabupaten Manggarai sebesar 52,21.

Capaian tersebut selisih 0,14 poin lebih rendah dibanding Provinsi NTT sebesar 52,35. Dengan demikian, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak baik di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Berikut lima kluster pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Manggarai tahun 2023.

Tabel 2. 25 Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Kabupaten	Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Kluster 5 Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Manggarai	43,5	65,87	76,25	27,2	47,26	52,21	53,55	47,57

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023, KemenPPPA dan BPS, 2025

Berdasarkan lima kluster pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Manggarai, terdapat dua kluster memiliki capaian cukup baik yakni kluster dua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 86,27 dan kluster tiga kesehatan dasar dan kesejahteraan 82,33. Kluster 2 diukur dari lima indikator yaitu jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, jumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua, dan angka kesiapan sekolah. Kluster 3 diukur dari sembilan indikator yaitu jumlah anak yang melahirkan di fasilitas kesehatan, balita stunting, anak yang mendapatkan ASI ekslusif, anak yang terpenuhi kebutuhan kalorinya, anak yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak, anak yang merokok, serta anak yang mendapat imunisasi lengkap. Sedangkan tiga kluster lainnya memiliki capaian yang tergolong masih kurang. Ketiga kluster tersebut yakni kluster 1 hak sipil dan kebebasan, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster 5 perlindungan khusus.

Kluster 1 diukur dari lima indikator yaitu tingkat kepemilikan akta, partisipasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi,

jumlah anak yang memanfaatkan taman bacaan, serta jumlah anak yang mengakses internet. Kluster 4 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang tidak sekolah, jumlah anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan budaya, jumlah anak yang mengikuti kursus, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, dan jumlah anak yang terlibat dalam pertunjukan seni. Kluster 5 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang bekerja, rasio anak yang mengakses internet, rasio angka partisipasi sekolah, jumlah anak di bawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang terlantar. Dengan demikian, untuk meningkatkan upaya perlindungan anak maka pemenuhan aspek pada masing-masing kluster perlu lebih dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke atas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Manggarai.

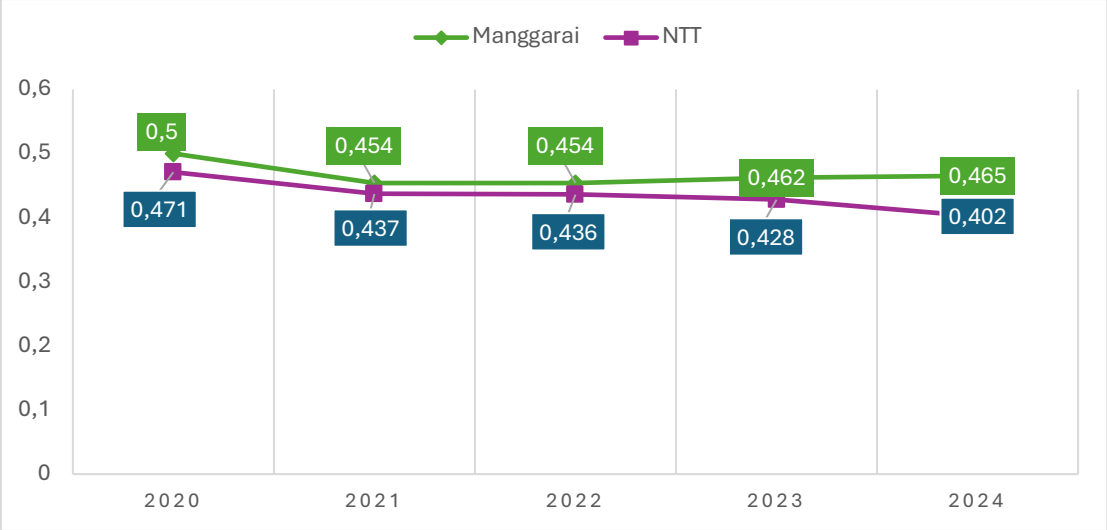

Grafik 2. 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Selama periode 2020-2022, capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Manggarai cenderung menurun. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024. Secara capaian, IKG Manggarai selalu berada diatas rata-rata Provinsi NTT. Kondisi tersebut menunjukan ketimpangan gender di Manggarai lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi. Pada tahun 2024, IKG Manggarai 0,465. Capaian tersebut selisih lebih tinggi 0,063 poin dibanding provinsi sebesar 0,402. Dengan demikian, upaya perwujudan kesetaraan gender di Manggarai perlu ditingkatkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan perempuan dengan meminimalisir perempuan melahirkan dibawah usia 20 tahun dan perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Selain itu, mendorong akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan dan tenaga kerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen dalam mengukur upaya pembangunan pemuda dari sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Capaian IPP mencerminkan status pembangunan berdasar domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan

kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi**.** Berikut capaian indeks pembangunan pemuda (IPP) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT yang baru tersedia sampai tahun 2023.

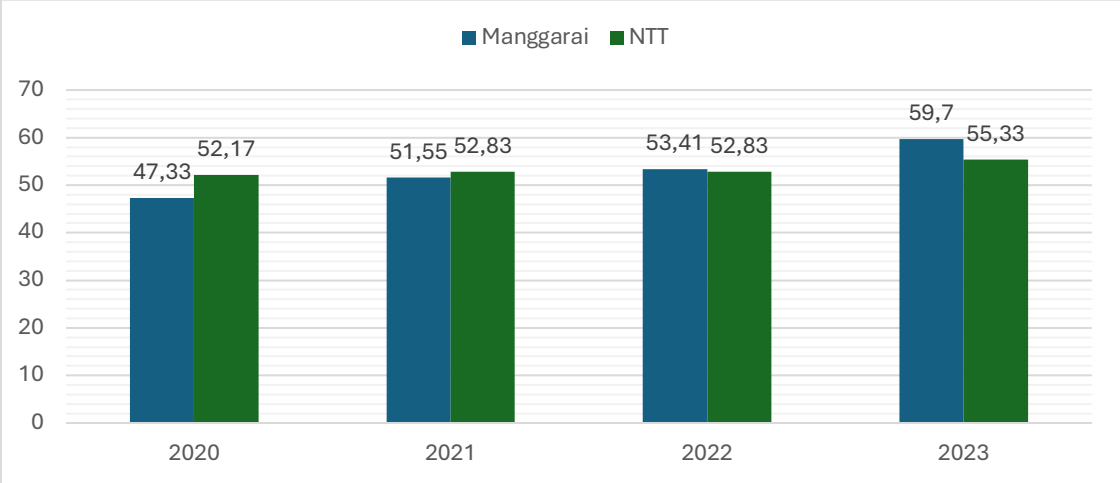

Grafik 2. 22 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2025

Selama periode 2020-2023, capaian IPP Kabupaten Manggarai menunjukan trend positif. Capaian IPP Manggarai sempat dibawah Provinsi NTT pada tahun 2020 dan 2021, kemudian berhasil menyalip pada tahun 2022 dan 2023. Capaian IPP Manggarai naik 11,37 poin, sednagkan NTT naik 3,16. Kondisi tersebut menunjukan pembangunan pemuda di Manggarai naik cukup progresif dibanding capaian Provinsi NTT. Dengan demikian, kualitas pembangunan pemuda dari aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi kepemudaan di Manggari lebih baik dibanding rata-rata Provinsi NTT. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan capaian IPP pada periode mendatang. Adapun strategi yang bisa dilakukan di antaranya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pemuda, penguatan kesehatan dan kesejahteraan pemuda, peningkatan kesempat kerja dan kewirausahaan, penguatan partisipasi, kepemimpinan, dan inklusi pemuda, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam pembangunan pemuda.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang krusial dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi di Kabupaten Manggarai. Memiliki SDM yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun produktivitas berperan penting dalam menciptakan inovasi, mendorong investasi, maupun memperkuat sektor-sektor unggulan daerah. Kondisi Daya Saing Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui Angka Ketergantungan. Berikut angka ketergantungan di Kabupaten Manggarai selama tahun 2020 – 2024.

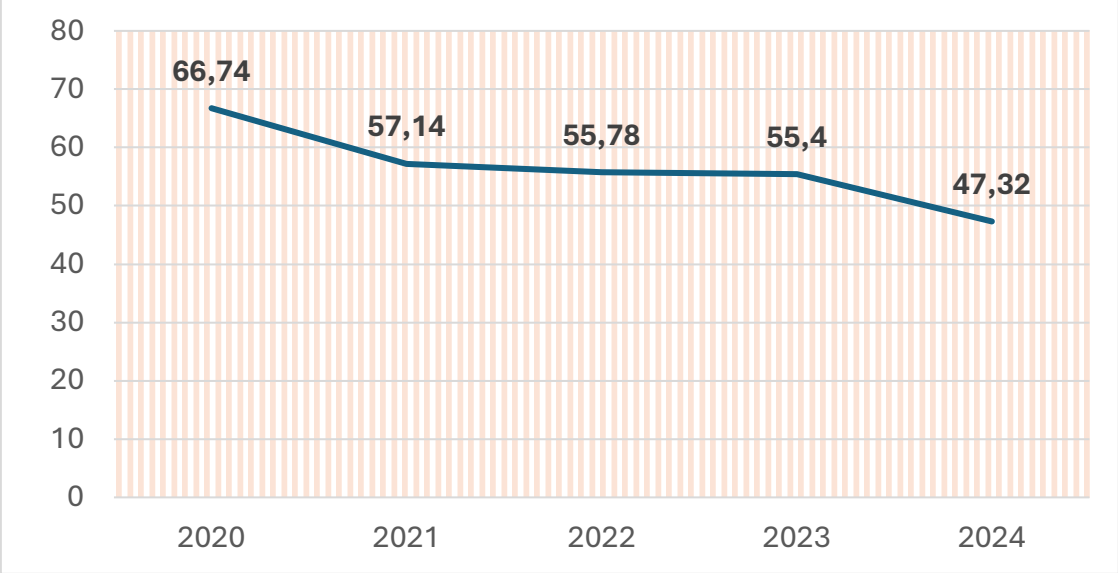

Grafik 2. 23 Angka Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2025

Capaian angka ketergantungan di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang menurun khususnya pada tahun 2022 - 2024. Capaian angka ketergantungan tahun 2023 mencapai 55,4 kemudian turun hampir sebesar 8 poin pada tahun 2024 menjadi sebesar 47,32. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2024 setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 47 orang usia tidak produktif (0-14 & 65 tahun ke atas). Penurunan angka ketergantungan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk usia tidak

produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang bergantung pada penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah karena beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin ringan. Selain itu, kondisi ini juga dapat menjadi indikasi awal dari potensi bonus demografi, yang jika dikelola dengan kebijakan yang tepat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Manggarai maupun Nusa Tenggara Timur.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh kemajuan teknologi serta lingkungan inovasi daerah yang mendukung. Kemajuan teknologi dan informasi di suatu wilayah dapat terlihat dari pertumbuhan sektor-sektor yang mengandalkan penerapan teknologi dalam operasionalnya, seperti industri pengolahan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga mencerminkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah, karena sektor ini sangat bergantung pada teknologi digital yang modern. Bagian ini akan membahas beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta indeks inovasi daerah di Kabupaten Manggarai. Analisis terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana teknologi dan inovasi telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total produksi ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan sektor industri menjadi salah satu elemen utama dalam pembangunan ekonomi, karena mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Sektor ini berperan dalam meningkatkan nilai produk daerah dengan mengolah bahan mentah

menjadi barang konsumsi akhir. Rasio PDRB Industri Pengolahan dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana sektor industri berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Berikut adalah data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Manggarai untuk periode 2020-2024.

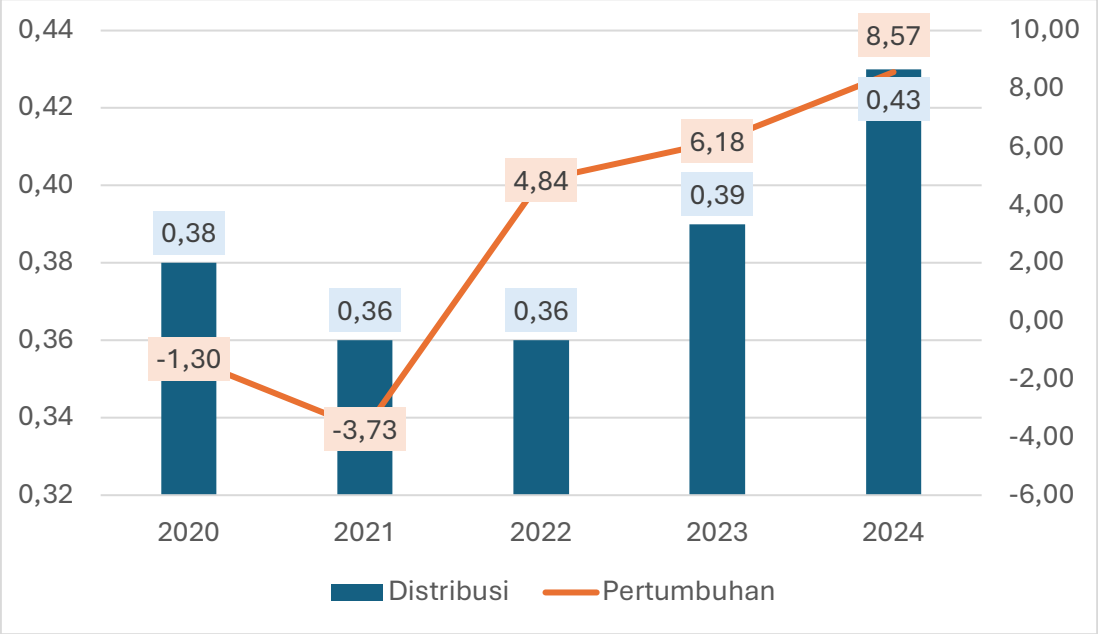

Grafik 2. 24 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Data PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Manggarai periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam distribusi dan pertumbuhan sektor industri daerah. Pada tahun 2020, distribusi PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 0,38 persen dengan kontraksi pertumbuhan yang negatif sebesar -1,30 persen. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2021, di mana distribusi menurun menjadi 0,36 persen dengan disertai penurunan pertumbuhan yang lebih tajam sebesar -3,73 persen. Tren ini berbalik sejak tahun 2022, di mana pertumbuhan industri pengolahan mulai pulih dengan angka 4,84 persen, meskipun distribusinya masih stagnan di 0,36 persen.

Pemulihan ini semakin kuat pada tahun 2023 dan 2024, dengan pertumbuhan yang terus meningkat menjadi 6,18 persen dan 8,57 persen masing-masing, serta distribusi yang meningkat menjadi 0,39 persen dan 0,43 persen. Secara umum, distribusi industri pengolahan di Kabupaten Manggarai meningkat 0,05 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Manggarai mulai bangkit setelah periode kontraksi yang diakibatkan oleh pandemi, di mana hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas produksi. Ke depannya, penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini dengan kebijakan yang mendukung industri lokal, seperti peningkatan investasi, akses bahan baku, dan penguatan tenaga kerja industri.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman merupakan salah satu elemen dalam perhitungan total PDRB suatu wilayah. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan nilai produksi dari sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, terutama dalam kaitannya dengan industri pariwisata dan jasa kuliner. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana sektor akomodasi, makanan, dan minuman berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah data mengenai PDRB lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman di Kabupaten Manggarai untuk periode 2020-2024.

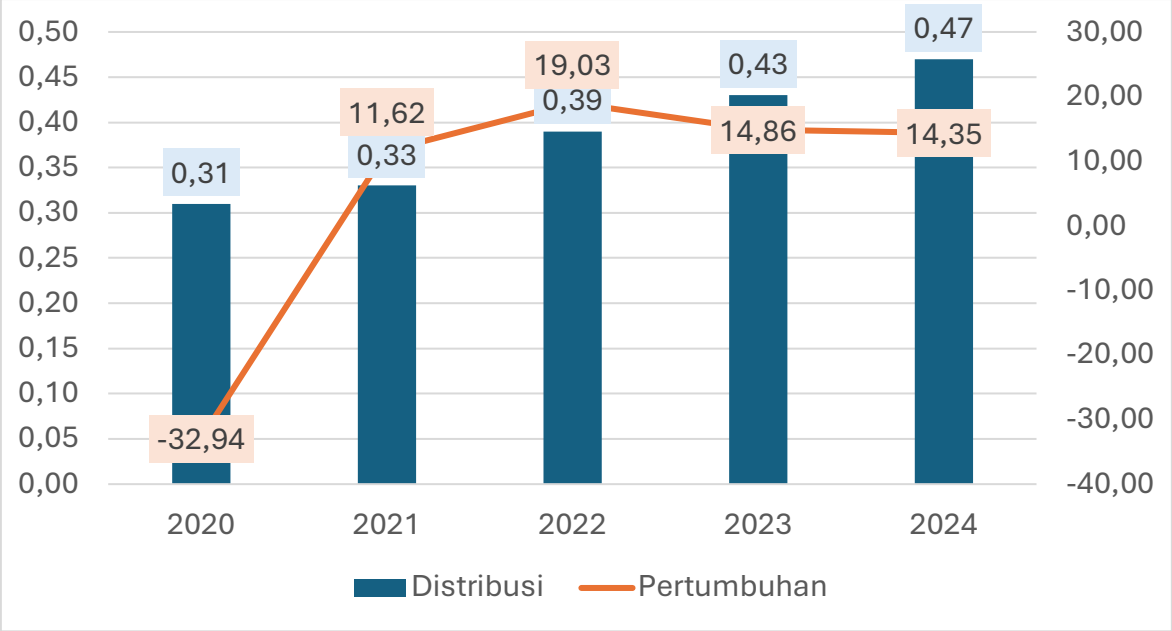

Grafik 2. 25 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman di Kabupaten Manggarai periode 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam distribusi dan pertumbuhan sektor ini. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi tajam dengan pertumbuhan negatif -32,94 persen, yang mencerminkan dampak besar dari pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata dan kuliner daerah. Distribusi sektor ini terhadap PDRB juga berada pada angka yang relatif rendah, yaitu 0,31 persen. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 11,62% persen, diikuti oleh peningkatan lebih tinggi pada tahun 2022 sebesar 19,03 persen. Distribusi sektor ini pun terus meningkat dari 0,33 persen pada tahun 2021 menjadi 0,39 persen pada tahun 2022. Tren pertumbuhan positif ini berlanjut pada 2023 dan 2024, dengan pertumbuhan 14,86 persen dan 14,35 persen pada masing-masing tahun, serta distribusi yang meningkat menjadi 0,43 persen dan 0,47 persen pada masing-masing tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman di Kabupaten Manggarai telah mengalami pemulihan yang kuat dan menjanjikan pasca pandemi. Penguatan

sektor ini dapat dilakukan melalui peningkatan berbagai infrastruktur pariwisata, promosi wisata daerah, serta penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner dan perhotelan.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja di suatu wilayah. Nilai TPAK yang lebih tinggi mencerminkan besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ketenagakerjaan dan potensi ekonomi suatu daerah. Berikut merupakan data capaian TPAK Kabupaten Manggarai dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.

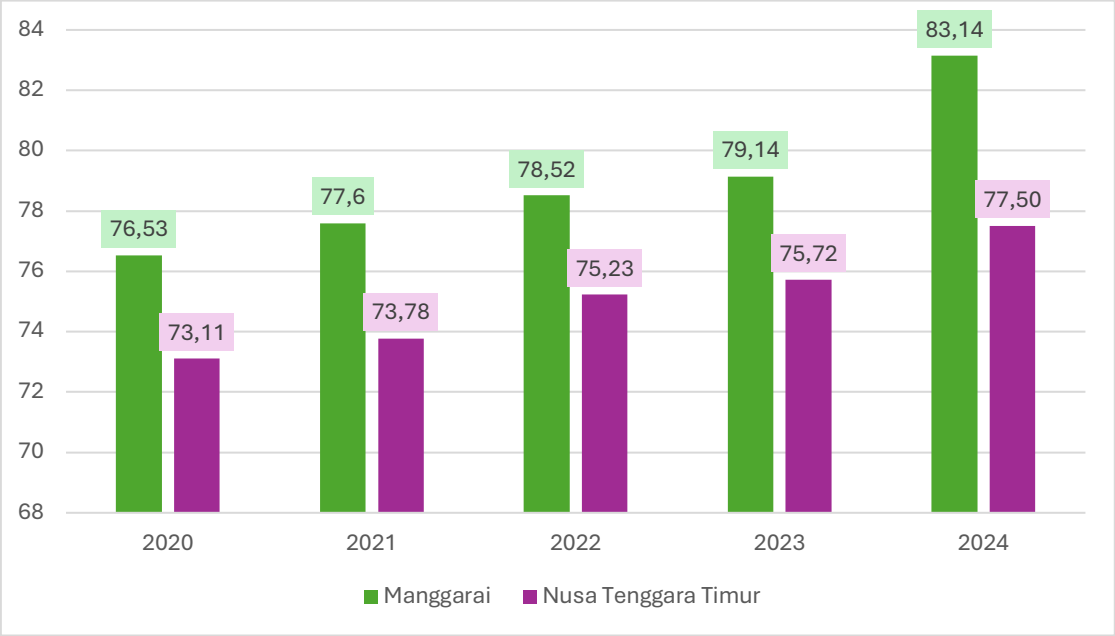

Grafik 2. 26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2025

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai pada periode 2020-2024, tercatat bahwa TPAK Kabupaten Manggarai

secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi di seluruh periode data. Pada tahun 2020, TPAK Manggarai tercatat sebesar 76,53 persen, sedangkan rata-rata provinsi berada di angka 73,11 persen. Selama lima tahun berikutnya, tren TPAK di Manggarai mengalami peningkatan stabil, mencapai 83,14 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja di Manggarai yang terlibat dalam aktivitas perekonomian daerah secara umum.

Meskipun TPAK Provinsi NTT juga mengalami peningkatan dari 73,11 persen pada tahun 2020 menjadi 77,50 persen pada tahun 2024, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan Kabupaten Manggarai. Kesenjangan antara TPAK Manggarai dan NTT semakin melebar, yang dapat mengindikasikan perbedaan dalam dinamika ekonomi lokal, kesempatan kerja, atau kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan di masing-masing wilayah. Peningkatan TPAK di Kabupaten Manggarai mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di daerah semakin berkembang, menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk usia produktif. Namun, penting untuk memastikan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja ini juga disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang layak dalam rangka menguatkan *link and match* ketenagakerjaan daerah.

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan inovasi dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Inovasi sendiri merupakan upaya menemukan solusi terhadap permasalahan dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Keberadaan inovasi berperan krusial dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mengembangkan serta menerapkan ide-ide baru dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta

sektor ekonomi. Berikut adalah data mengenai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai untuk periode 2021-2024.

Tabel 2. 26 Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Skor	49,63	47,56	36,56	51,84
Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai dalam periode 2021-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, di mana kondisi ini mencerminkan dinamika dalam penerapan inovasi di daerah. Pada tahun 2021, skor indeks inovasi daerah tercatat sebesar 49,63, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 47,56 pada tahun 2022. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan inovasi dan keterbatasan dalam pengembangan program inovasi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023 di mana skor turun hingga 36,56. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya hambatan signifikan dalam penerapan inovasi, seperti keterbatasan sumber daya, kebijakan yang kurang efektif, atau rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Namun, pada tahun 2024, skor indeks kembali meningkat secara signifikan menjadi 51,84. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam strategi inovasi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Meskipun terjadi fluktuasi skor, Kabupaten Manggarai secara konsisten mempertahankan predikat "Inovatif" sepanjang periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam beberapa tahun, Kabupaten Manggarai masih mampu menjaga komitmen terhadap pengembangan inovasi di berbagai sektor.

5. Realisasi investasi

Realisasi investasi adalah pelaksanaan nyata dari rencana investasi yang sebelumnya telah dirancang atau disetujui. Dalam konteks ini, investasi tidak lagi hanya sebatas rencana atau komitmen, tetapi sudah dieksekusi dalam bentuk

kegiatan atau alokasi dana secara konkret. Realisasi investasi berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi. Berikut adalah data realisasi investasi di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 27 Realisasi Investasi (Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi investasi	N/A	271.084.902.297	195.134.403.611	181.955.578.575	154.668.191.707

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Manggarai, 2025

Realisasi investasi di Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan sebesar Rp.116.416.710.590 dari tahun 2021 hingga 2024. Beberapa faktor determinan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai seperti, identifikasi potensi investasi, promosi investasi, pengendalian penanaman modal dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan secara berkesinambungan. Beberapa faktor pendukung lainnya seperti kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas tata kelola pemerintahan dan perhatian yang baik terhadap isu lingkungan juga harus dikelola agar realisasi investasi dapat meningkat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan di semua sektor.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan ekonomi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam proses produksi di suatu daerah. Kesadaran akan aspek lingkungan telah mendorong pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, muncul perhatian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (green economy) maupun ekonomi biru (blue economy). Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan kelestarian lingkungan. Bagian ini akan membahas bagaimana penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Manggarai, khususnya melalui distribusi PDRB Non Pertambangan.

1. PDRB Non Pertambangan

PDRB Non Pertambangan merupakan nilai produksi ekonomi suatu daerah yang tidak berasal dari aktivitas pertambangan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah bergantung pada sektor-sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan. Semakin rendah kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB, semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sebaliknya, jika angka PDRB Non Pertambangan lebih kecil, hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi daerah tersebut masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Analisis ini akan membahas kondisi PDRB Non-Pertambangan di Kabupaten Manggarai selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 28 Distribusi PDRB Non Pertambangan Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambangan	2,52	2,48	2,50	2,52	2,47
Non Pertambangan	**97,48**	**97,52**	**97,50**	**97,48**	**97,53**
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Data PDRB Kabupaten Manggarai pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap total PDRB relatif cukup kecil dan cenderung stabil dengan rentang antara 2,47 persen hingga 2,52 persen. Sementara itu, sektor non-pertambangan tetap menjadi sektor dominan dengan kontribusi di atas 97 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Manggarai tidak bergantung pada sektor pertambangan, melainkan lebih didominasi oleh sektor lain seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa.

Tren dalam lima tahun terakhir memperlihatkan sedikit fluktuasi pada kontribusi sektor pertambangan, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun

2024 sebesar 2,47 persen, dibandingkan kontribusi 2,52 persen pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, sektor non-pertambangan mengalami sedikit peningkatan pada tahun yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai memiliki struktur ekonomi yang cenderung lebih berkelanjutan karena tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif. Ke depannya, peningkatan nilai tambah di sektor non-pertambangan seperti industri pengolahan dan pariwisata, dapat semakin memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara jangka panjang.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan yang secara signifikan memengaruhi cara dan perilaku manusia dalam beraktivitas. Dalam konteks pembangunan daerah, digitalisasi dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Penerapan ini memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Berikut ini merupakan sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat transformasi digital di Kabupaten Manggarai.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Indeks P-TIK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan serta kesiapan suatu wilayah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indeks ini mencerminkan tingkat akses, penggunaan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Capaian IP-TIK Kabupaten Manggarai ditaksir berdasarkan capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai acuan.

Tabel 2. 29 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT

Wilayah	Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	
	2018	2019
Nusa Tenggara Timur	3,77	4,15

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2020

Capaian nilai IP-TIK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2019 mencapai 4,15 poin, meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adaptasi TIK di Provinsi NTT secara umum masih tergolong rendah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Meskipun demikian, diperlukan data terbaru untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan TIK telah berkembang di wilayah tersebut. Daerah dengan nilai IP-TIK yang tinggi cenderung memiliki daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul karena telah siap menghadapi era digital. Selain itu, pelayanan publik di daerah tersebut juga akan berjalan lebih efisien dan efektif.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sub-bab ini menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Berikut adalah data tentang pembentukan modal tetap bruto dan net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Manggarai.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan tingkat investasi suatu negara dalam aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dalam jangka panjang. Investasi ini mencakup berbagai jenis barang modal tetap, seperti pembangunan gedung perkantoran, pabrik, dan perumahan, serta pengadaan mesin, peralatan, dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. PMTB berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dengan memperkuat daya saing industri dan sektor usaha. Berikut adalah data tentang PMTB di Kabupaten Manggarai.

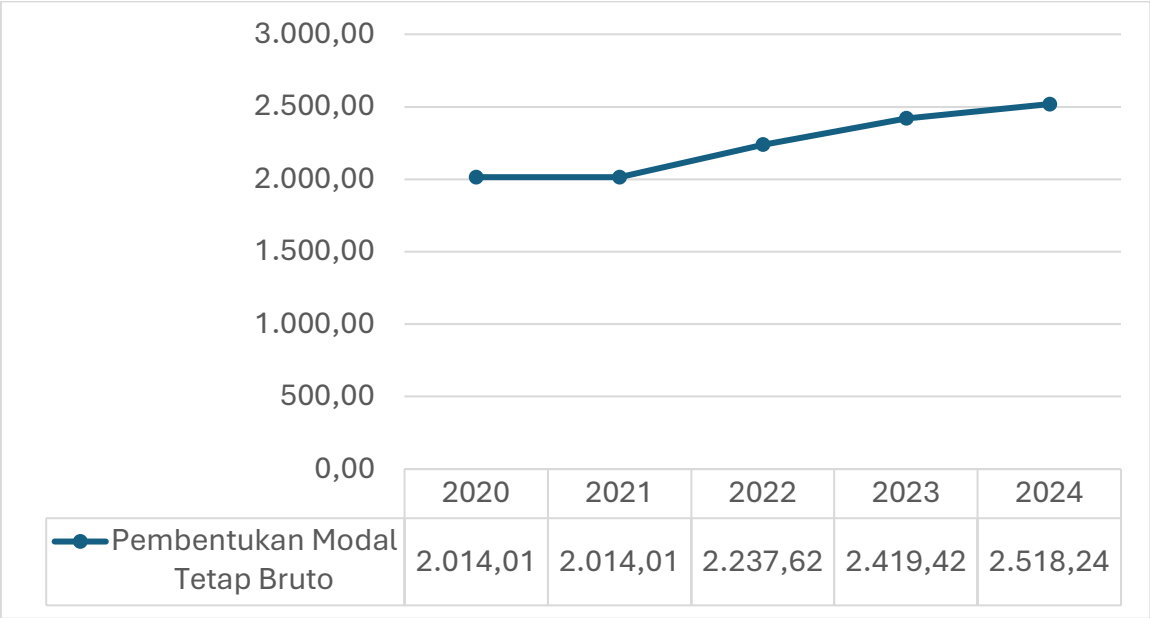

	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.014,01	2.014,01	2.237,62	2.419,42	2.518,24

Grafik 2. 27 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di Kabupaten Manggarai menunjukkan peningkatan sebesar 504,23 juta rupiah. Faktor-faktor penentu PMTB di Kabupaten Manggarai seperti pembangunan sektor pertanian, kualitas infrastruktur pendukung perekonomian, investasi, kebijakan pemerintah, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan. PMTB Kabupaten Manggarai harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai.

Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa adalah selisih antara total ekspor dan total impor suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Net ekspor digunakan untuk menghitung kontribusi perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Net ekspor positif (surplus perdagangan) terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti negara tersebut memiliki surplus perdagangan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

memperkuat nilai mata uang. Net ekspor negatif (defisit perdagangan) terjadi jika impor lebih besar daripada ekspor, berarti negara mengalami defisit perdagangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada produk luar negeri dan melemahkan mata uang. Berikut adalah data net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Manggarai.

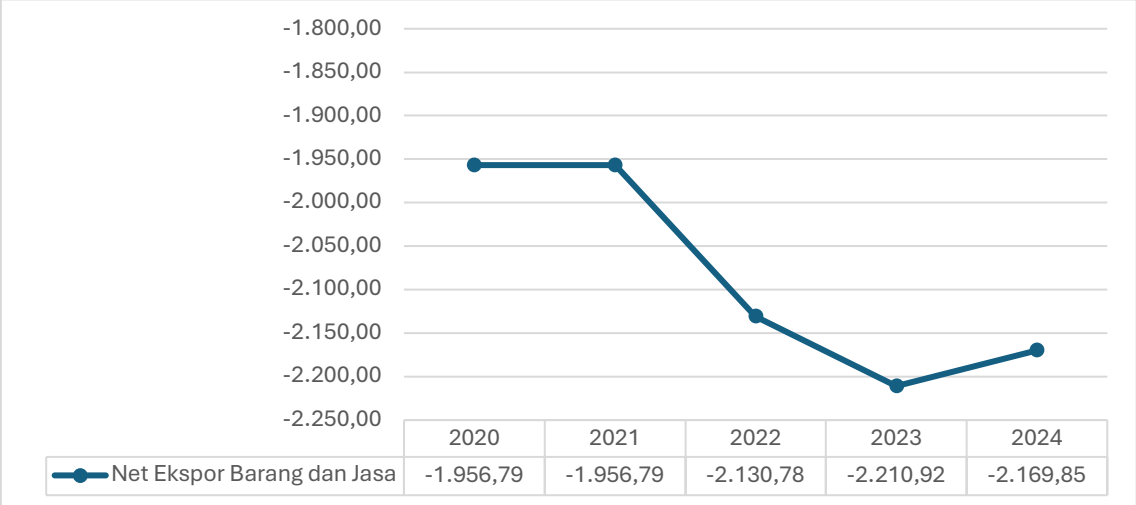

Grafik 2. 28 Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025

Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Manggarai menunjukkan angka yang negatif. Kondisi ini berarti terjadi defisit perdagangan di Kabupaten Manggarai. Defisit tersebut terjadi karena impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor. Defisit net ekspor barang dan jasa memburuk dari 2022 hingga puncaknya pada tahun 2023. Net ekspor barang dan jasa diprediksi mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2024, namun masih jauh dari surplus. Ekspor barang dari dalam Kabupaten Manggarai ke luar daerah harus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai net ekspor barang dan jasa secara berkesinambungan.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan melalui semakin berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi

di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Manggarai yang memiliki potensi pengembangan wilayah pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perikanan dan kelautan telah menggerakkan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan perdesaan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, optimalisasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, mendukung kepentingan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

Aspek perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi salah satunya diukur dari kualitas layanan infrastruktur wilayah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melihat persentase jalan dalam kondisi baik pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

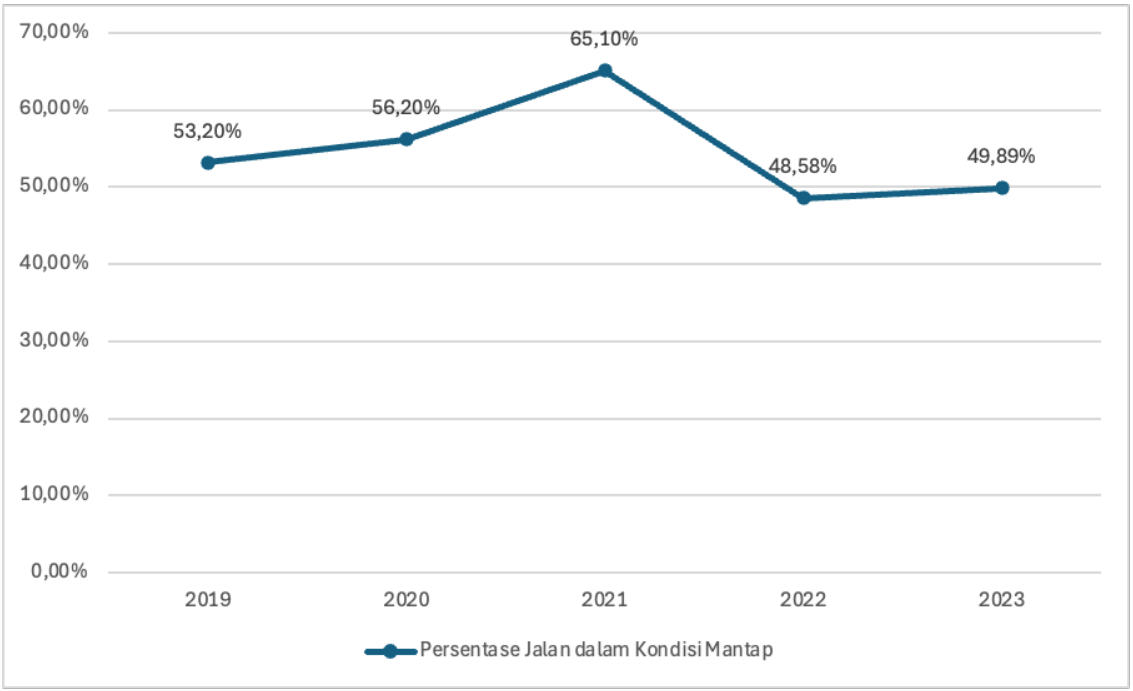

Grafik 2. 29 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Manggarai

Sumber: Manggarai Dalam Angka, 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 hingga 2021

mengalami peningkatan yang cukup siginifikan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dan kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat. Penurunan jalan dalam kondisi baik salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya perawatan dan pengembangan jalan kabupaten, kemudian adanya bencana alam banjir dan curah hujan yang tinggi juga menyebabkan kondisi permukaan jalan tergerus.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Bagian ini akan menguraikan kondisi stabilitas ekonomi makro yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan fiskal serta menjaga keseimbangan di sektor moneter dan keuangan. Stabilitas ekonomi makro dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah laju inflasi daerah. Indikator ini berguna untuk memahami tingkat kestabilan harga barang pokok dan kebutuhan utama masyarakat dalam suatu wilayah. Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi inflasi di Kabupaten Manggarai sebagai salah satu aspek penting dalam stabilitas ekonomi daerah.

1. Laju Inflasi

Tingkat inflasi mencerminkan perubahan harga komoditas yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar serta daya beli masyarakat. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara menyeluruh, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat, atau sebagai penurunan daya beli mata uang suatu negara. Kenaikan harga satu atau dua komoditas saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan berdampak pada harga barang lainnya. Inflasi yang terkendali dan stabil menjadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian inflasi menjadi hal yang krusial, mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Pertama, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan daya beli dan standar hidup mereka. Kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi inflasi di Kabupaten Manggarai dan bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dalam hal ini, inflasi Kabupaten Manggarai akan digambarkan melalui data proksi yaitu data laju inflasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan data laju inflasi bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020-2023:

Tabel 2. 30 Laju Inflasi Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (IHK 2018=100) Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,53	0,40	1,01	1,01	0,97
Februari	0,36	0,44	0,51	-0,66	0,90
Maret	-0,59	-0,36	0,15	1,26	1,21
April	0,07	0,82	1,33	-0,05	-0,02
Mei	0,12	0,63	0,23	-0,64	-0,45
Juni	-0,02	-0,72	0,52	0,89	-0,06
Juli	-0,32	0,08	1,05	0,38	0,03
Agustus	-0,71	-0,58	-0,93	-0,86	0,09
September	-0,15	-0,30	1,64	-0,08	0,32
Oktober	0,26	-0,13	0,25	0,42	1,07
November	0,29	0,49	-0,10	0,37	0,20
Desember	0,78	0,89	0,81	0,39	0,41

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Laju inflasi bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif setiap bulannya dan belum terjaga dengan cukup optimal. Secara umum, inflasi cenderung meningkat pada awal dan akhir tahun, sementara beberapa bulan di pertengahan tahun mengalami deflasi, terutama Agustus dan September. Tahun 2022 mencatat kenaikan harga tertinggi pada September 1,64 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada

Agustus pada tahun yang sama dengan angka sebesar -0,93 persen. Berikut merupakan laju inflasi tahunan Provinsi NTT dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:

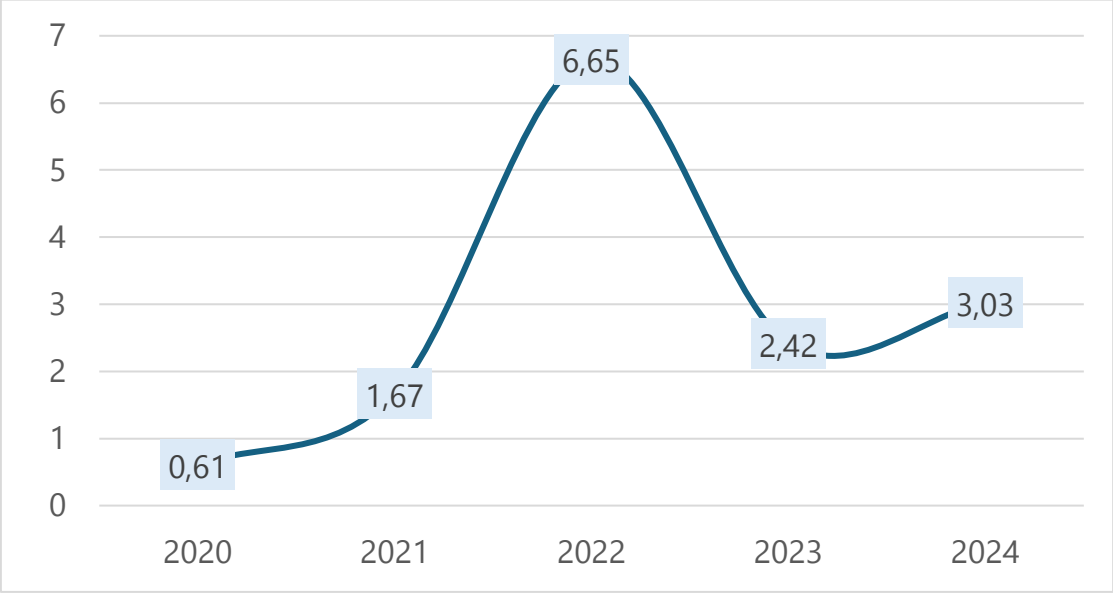

Grafik 2. 30 Laju Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Berdasarkan data laju inflasi tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terlihat adanya tren kenaikan signifikan selama tahun 2020 hingga 2022, sebelum mengalami penurunan pada 2023. Inflasi pada 2020 relatif rendah sebesar 0,61 persen yang kemudian meningkat menjadi 1,67 persen pada 2021. Puncaknya, laju inflasi menyentuh 6,65 persen pada tahun 2022 yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya menguatnya permintaan yang tidak diiringi dengan penguatan suplai komoditas, volatilitas harga energi, dan berbagai faktor lain. Namun, inflasi turun cukup signifikan menjadi 2,42 persen, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga atau berkurangnya tekanan inflasi. Namun, pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kembali di angka 3,03. Lima tahun belakangan menunjukkan bahwa harga-harga di Provinsi NTT secara umum belum terjaga dengan baik dan stabil, mengindikasikan masih fluktuatifnya ketersediaan barang pokok dan penting daerah dibandingkan dengan permintaan, distribusi barang pokok dan penting

yang belum stabil, atau meningkatnya permintaan yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan barang.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Aspek ini dinilai menggunakan beberapa ukuran, seperti Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks SPBE, dan Nilai SAKIP daerah, serta beberapa indikator lain yang relevan. Adapun masing-masing capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih secara komprehensif, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB merupakan indikator komposit dalam tata kelola pemerintahan untuk menilai sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai. Berikut kinerja reformasi birokrasi Kabupaten Manggarai.

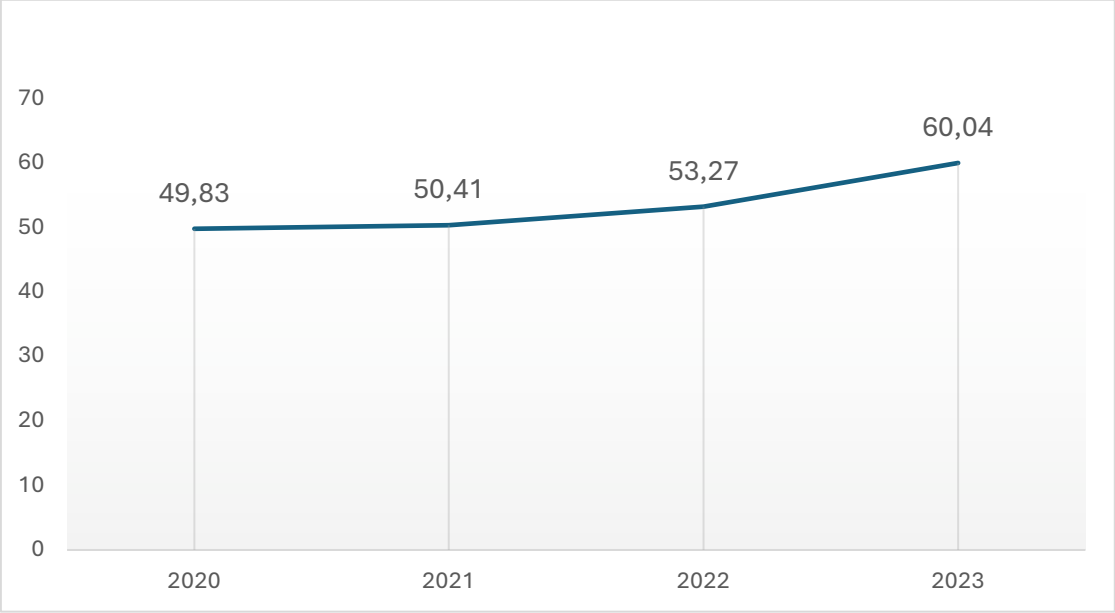

Grafik 2. 31 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2023

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

IRB Kabupaten Menggarai menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023, sementara peningkatan terendah terjadi pada tahun 2021. Nilai 60,04 ini masuk dalam kategori B (Baik) yang menunjukkan Sebagian besar pelasananaan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing telah dilaksanakan, akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik belum optimal.

2. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, indeks ini mencoba mengetahui sejauh mana proses digitalisasi pemerintah dan pelayanan publik berjalan optimal. Adapun nilai SPBE Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 2. 31 Nilai SPBE Kabupaten Manggarai

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	1,55	1,76	2,68	2,90

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045

Indeks SPBE Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan setiap tahun dari predikat cukup menjadi predikat baik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE Kabupaten Manggarai semakin optimal. Dengan kata lain, proses digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pengadaan barang

dan jasa telah memanfaatkan TIK dan adanya beberapa aplikasi baru Perangkat Daerah.

3. Nilai SAKIP

Penerapan SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah daerah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adapun akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

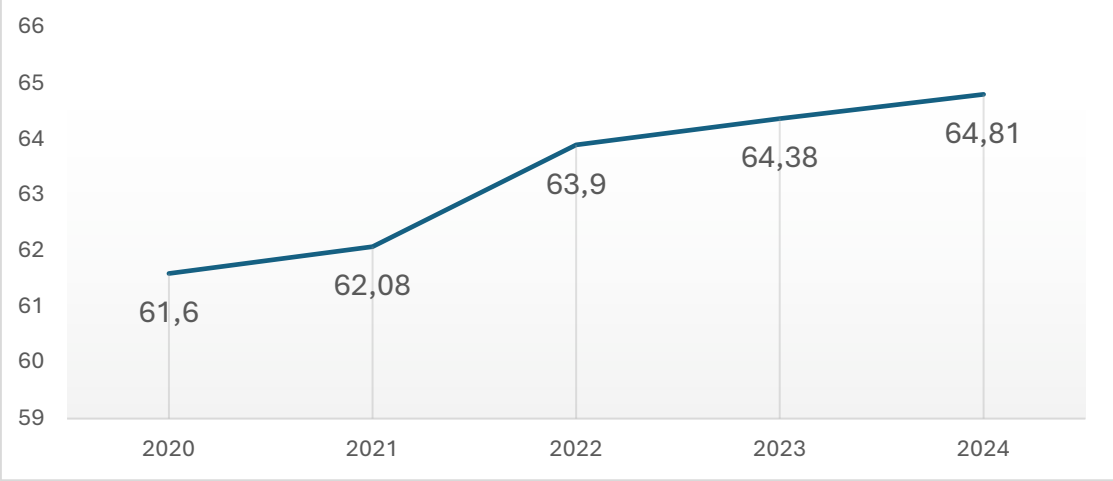

Grafik 2. 32 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun demikian, peningkatan nilai tersebut belum terlalu optimal karena selama 5 tahun terakhir predikat SAKIP hanya B (Baik). Kondisi ini menandakan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikkan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Di sisi lain, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek keadilan hukum, ketahanan keamanan nasional, dan demokrasi mencerminkan stabilitas serta kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka. Aspek ini tidak hanya menggambarkan ketertiban dan keamanan, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses demokrasi dan kebijakan publik. Penilaian dilakukan melalui Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Indeks Demokrasi Daerah, yang mencerminkan keseimbangan antara keamanan, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan Keputusan.

1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan indikator yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Indeks ini diukur melalui tiga dimensi, tujuh sub dimensi, dan 38 indikator yang telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan. Tiga dimensi utama yang membentuk indeks ini meliputi dimensi sistem, dimensi strategi, dan dimensi sumber daya manusia. Indeks menjadi ukuran sejauh mana Kabupaten/Kota di Indonesia mewujudkan rasa aman, nyaman, dan suasana yang tertib bagi setiap warganya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam hal tidak tersedianya data Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, digunakan data jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan. Berikut jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Manggarai selama tahun 2021-2023 :

Tabel 2. 32 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Manggarai selama Tahun 2021 - 2023

Jenis Data	2021	2022	2023
Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan	260	312	255
Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	202	238	150

Jenis Data	2021	2022	2023
Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan	77, 69%	76,28%	58,82%

Sumber : Manggarai Dalam Angka 2025 (BPS Kabupaten Manggarai, 2025)

Selama periode tahun 2021–2023, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dan persentase tindak kejahatan yang diselesaikan menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Angka tertinggi jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 mencapai 312 kejahatan dengan persentase penyelesaian 76,28%. Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menurun pada tahun 2023 sebesar 255, namun persentase penyelesaian turut menurun mencapai 58,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyelesaikan tindak kejahatan maupun menjaga ketertiban umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan angka tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2023 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai faktor, seperti peningkatan langkah-langkah pencegahan, perubahan pola kejahatan, atau penurunan pelaporan dari masyarakat. Namun, penurunan persentase penyelesaian kasus mengindikasikan adanya tantangan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, meningkatnya kompleksitas kasus, atau faktor lainnya yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum.

2. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah melalui berbagai fenomena yang mencerminkan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Indeks ini disusun oleh BPS bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah. Pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator yang mencerminkan perlindungan hak-hak masyarakat, akses yang setara dalam kebijakan publik, serta efektivitas institusi demokrasi. IDI menjadi instrumen penting bagi

Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi. Dalam hal tidak tersedianya data IDI Kabupaten Manggarai, digunakan proksi IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional sebagai pembanding :

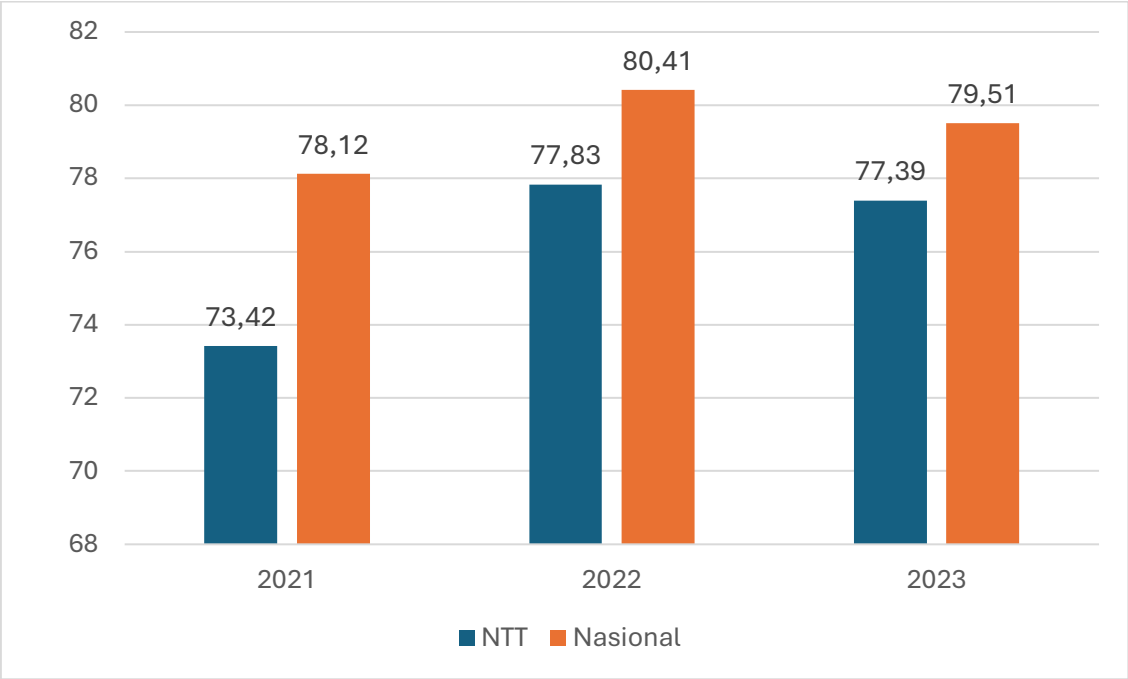

Grafik 2. 33 Indeks Demokrasi Provinsi NTT tahun 2021-2023

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Capaian angka Indeks Demokrasi Provinsi NTT menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2021–2023. Indeks Demokrasi NTT mengalami peningkatan 6,02% dari 73,42 pada 2021 menjadi 77,83 pada 2022, namun mengalami sedikit penurunan 0,56% menjadi 77,39 pada 2023, sementara indeks demokrasi nasional meningkat 2,93% dari 78,12 pada 2021 ke 80,41 pada 2022, lalu turun 1,12% menjadi 79,51 pada 2023. Penurunan di tahun 2023 dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan yang mempengaruhi kebebasan sipil maupun keleluasaan institusi demokrasi. Untuk meningkatkan tren positif, pemerintah daerah perlu memperkuat partisipasi publik, transparansi kebijakan, serta perlindungan hak-hak demokratis masyarakat.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrument untuk mengukur dan menilai bagaimana tingkat daya saing suatu daerah pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Indeks ini mencerminkan tingkat produktivitas daerah dalam berbagai aspek di antaranya ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia maupun inovasi dan teknologi. Pengukuran IDSD dilakukan secara rutin oleh **Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI)** guna memberikan gambaran komprehensif mengenai keunggulan kompetitif suatu daerah. Data Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Manggarai hanya tersedia dari tahun 2023 – 2024. Berikut capaian IDSD Kabupaten Manggarai :

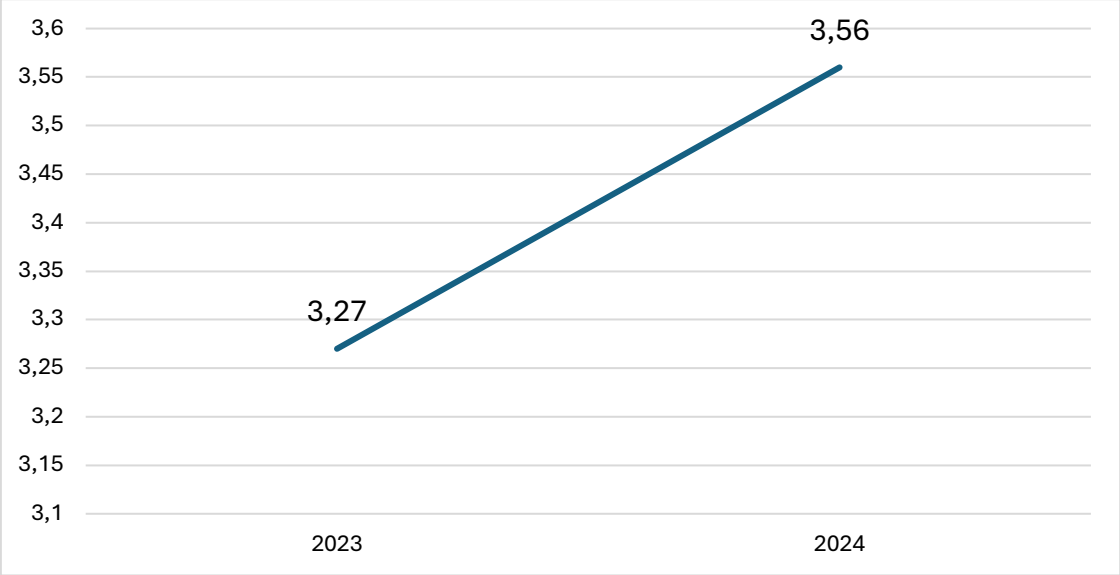

Grafik 2. 34 Indeks Daya Saing Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2024

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Indeks Daya Saing Kabupaten Manggarai, NTT, menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,27 pada tahun 2023 menjadi 3,56 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa berbagai faktor pendukung daya saing seperti inovasi, insfratuktur, dan ekonomi (UMKM dan sektor pariwisata) dalam kondisi tren yang positif. Untuk menjaga tren positif ini penting untuk selalu mengoptimalkan

kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan pemberdayaan sektor ekonomi dengan memperkuat kolaborasi berbagai pihak.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek kinerja urusan pemerintah daerah menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian perencanaan pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun terakhir. Dalam merumuskan perencanaan ke depan, evaluasi atas pencapaian lima tahun ke belakang menjadi diperlukan. Hasil evaluasi atas pencapaian perencanaan periode sebelumnya bermanfaat untuk memastikan perencanaan yang dilakukan ke depan kontekstual dan tepat dengan kondisi yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan ke depan. Berikut merupakan kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai yang digambarkan melalui hasil evaluasi atas pelaksanaan perencanaan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026:

Tabel 2. 33 Hasil Evaluasi Capaian Makro RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**	**64,54**	**69,3**	**66,24**	**67,01**	**67,77**	**68,54**	**69,3**	**65,83**	**68,48**	**69,35**	**99,38**	**102,19**	**102,331**
Sasaran : Meningkatnya akses, kualitas, dan daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,37	8,04	7,61	7,72	7,82	7,93	8,04	7,62	7,63	7,91	100,13	98,83	101,151
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,41	14,03	13,53	13,66	13,78	13,91	14,03	13,7	13,71	13,73	101,26	100,37	99,6372
	Rata-rata Nilai Ujian	56,4	56,52	56,42	56,45	56,47	56,49	56,52	73,47	73,74	74,56	130,22	130,63	132,035
Sasaran : Meningkatnya Literasi/Minat Baca Msayarakat	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	12	15	12	14	14	15	15	18,46	18,82	18,58	153,79	134,41	132,7
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,03	69,24	67,7	68,14	68,51	68,88	69,24	67,38	67,63	72,44	99,53	99,25	105,74
	Persentase Kecamatan yang Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBM GESI	16,67	100	100	100	100	100	100	16,67	16,67	16,67	16,67	17	16,67
Sasaran : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,07	2	2,05	2,04	2,02	2,01	2	2,09	1,9	1,75	98,05	106,86	113,37
Sasaran: Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	N/A	9,75	9,19	9,33	9,47	9,61	9,75	16,05	18,52	14,58	174,65	198,5	153,96
	Peringkat pada Event Olahraga Daerah (POPDA)	6	4	5	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0
Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya	Persentase Budaya Benda dan tak Benda yang Dilestarikan	55%	100%	64	73	82	91	100	16,58	76,65	82,81	25,91	105	100,99

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN: MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT	**ANGKA PMKS**	**19.589**	**17.089**	**19.089**	**18.059**	**18.059**	**17.589**	**17.089**	**16.299**	**18.335**	**5.351**	**114,62**	**98,47**	**170,37**
Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS yang Tertangani	0,13	5,08	1,12	2,11	3,1	4,09	5,08	0,85	0,99	0,3	75,89	46,92	9,68
Sasaran: Menurunnya Kesenjangan Gender	Indikator Sasaran: TPAK Perempuan	63,11	68,37	64,16	65,22	66,27	67,32	68,37	81,91	75,04	78,04	127,67	115,06	117,76
Sasaran: Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	26,5	21,24	25,45	24,39	23,34	22,29	21,24	28,18	42,65	42,2	89,27	25,13	19,19
	Angka kasus kekerasan terhadap anak	0,021	0,14	0,019	0,018	0,016	0,015	0,14	0,025	0,028	0,033	68,42	44,44	-6,25
TUJUAN: MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL	**ANGKA KONFLIK SOSIAL**	**6**	**3**	**6**	**5**	**4**	**4**	**3**	**6**	**12**	**1**	**100**	**-40**	**175**
Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	721 kasus	67,87%	13,86	16,1	28,79	40,43	67,87	18,095	14,52	30,28	130,56	90,19	105,18
Sasaran: Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Angka Konflik Sosial	6	3	6	5	4	4	3	6	12	1	100	-40	175
	INDIKATOR TUJUAN: INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA (IRBI)	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	54,18	32,55	142,09	55,79	33,52	146,3
Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Sedang -0,49	Sedang -0,49	Sedang -0,49	Sedang -0,49	Sedang -0,49	Sedang -0,49	Sedang -0,49	0,66 (Sedang)	0,49 (Sedang)	0,40 (Sedang)	134,69	100	81,63
TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI**	**-0,79**	**5,23**	**4,93**	**5,19**	**5,2**	**5,22**	**5,23**	**2,21**	**3,79**	**3,93**	**44,83**	**73,03**	**75,58**
	PDRB PER KAPITA	**9.572**	**11.706**	**10.125**	**10.497**	**10.885**	**11.288**	**11.706**	**9.750**	**9.949**	**10.161**	**96,3**	**94,78**	**93,35**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian	0,86	3,85	2,44	2,93	3,32	3,84	3,85	3,57	1,85	0,95	146,31	63,14	28,61
Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan sub-sektor Perikanan	0,86	3,85	2,44	2,93	3,32	3,84	3,85	3,57	1,85	0,95	146,31	63,14	28,61
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	-1,3	6,53	5,62	5,85	6,08	6,31	6,53	4,95	6,18	8,57	88,08	105,64	140,95
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	-32,94	5,72	4,56	5,59	5,63	5,68	5,72	19,03	15,45	14,35	417,32	276,39	254,88
Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-4,63	6,3	5,16	5,44	5,73	6,01	6,3	6,75	7,25	9,62	130,81	133,27	167,89
Sasaran: Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN	N/A	25	5	5	5	5	5	1,68	-6,75	-15,01	33,6	-135	-300,2
	Persentase peningkatan realisasi PMA	N/A	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Sasaran: Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	53,21	67,9	56,2	59,1	62	65	67,9	54,8	56,53	55,47	97,51	95,65	89,47
Sasaran: Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun	72	88	76,2	79,7	81,7	84,8	88	72,31	72,45	72,82	94,9	90,9	89,13
Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan	Rasio Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer	77	100	81,71	86,42	91,13	95,84	100	72,26	86,86	87,94	88,43	100,51	96,5
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Rasio konektivitas	N/A	0,061805556	0,81	0,84	0,85	0,86	0,89	0,74	0,74	0,74	91,36	88,1	87,06
	Kinerja Lalu lintas	N/A	65.09.00	46,2	49,4	53,7	59,4	65,9	21,74	27,42	30,4	47,06	55,51	56,61
TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	**LAJU INFLASI**	**1,84**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**6,25**	**3,33**	**1,61**	**312,5**	**166,5**	**80,5**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan Pangan	71,7	81,94	74,6	76,09	77,99	79,94	81,94	71,88	74,27	75,69	96,35	97,61	97,05
Sasaran: Meningkatnya Stabilitas Harga Barang	Indeks Harga Konsumen	106,28	119,69	110,57	112,04	115,04	117,34	119,69	113,54	117,32	105,34	102,69	104,71	91,57
TUJUAN: MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	**INDEKS GINI**	**0,295**	**0,276**	**0,289**	**0,286**	**0,283**	**0,28**	**0,276**	**0,291**	**0,291**	**0,291**	**99,31**	**98,25**	**97,17**
Sasaran: Meningkatnya Kontribusi koperasi dan UKM Terhadap Perekonomian	Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya	N/A	100	90	92,5	95	97,5	100	40,7	28,95	28,05	45,22	31,3	29,53
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Kecil	N/A	70	50	55	60	65	70	0,35	0,48	0,42	0,7	0,87	0,7
TUJUAN: MENURUNNYA KEMISKINAN	**TINGKAT KEMISKINAN**	**20,34**	**17,12**	**19,47**	**18,88**	**18,3**	**17,71**	**17,12**	**19,84**	**19,69**	**19,01**	**98,1**	**95,71**	**96,12**
Sasaran: Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,09	2,08	3,09	2,84	2,58	2,33	2,08	3,5	2,44	1,17	86,73	114,08	154,65
Sasaran: Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	88,75	90.08.00	90,8	91,8	92,8	93,8	94,8	92,56	92,81	92,34	101,94	101,1	99,5
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Indikator sasaran: Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali	12	62	22	32	42	52	62	23,18	36,06	40,77	105,36	112,69	97,07
TUJUAN: MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA	**INDEKS DESA MEMBANGUN**	**0,576**	**0,65**	**0,601**	**0,613**	**0,625**	**0,638**	**0,65**	**0,618**	**0,633**	**0,642**	**102,83**	**103,26**	**102,72**
Sasaran: Meningkatnya Keberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	32,41	65,51	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	68,28	75,17	79,31	162,34	156,83	147,44

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	**TUJUAN INDIKATOR: INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**	**80,59**	**82,16**	**81,36**	**81,36**	**81,75**	**81,86**	**82,16**	**72,98**	**75,42**	**76,69**	**89,7**	**92,7**	**93,81**
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	70	72,5	71,5	71,5	72	72	72,5	50	56,25	61,25	69,93	78,67	85,07
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	87,87	88,87	88,37	88,37	88,87	88,87	88,87	93,82	93,27	92,19	106,17	105,54	103,74
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegatasi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	85,32	86,32	85,32	85,32	85,32	85,82	86,32	73,89	75,33	74,53	86,6	88,29	87,35
Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	18,74	29,91	20,97	23,21	25,44	27,68	29,91	9,05	11,97	12,52	43,16	51,57	49,21
TUJUAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH AKUNTABEL, PROFESIONAL, DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI**	**49.83** **CC**	**60,1** **B**	**50,1** **CC**	**54** **CC**	**56** **CC**	**58** **CC**	**60,1** **B**	**53,27 CC**	**60,04 B**	**67,02 B**	**106,33**	**111,19**	**119,68**
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	61,6 B	68 B	63,1 B	64,5 B	66 B	67,5 B	68 B	63,90 B	64,38 B	64,81 B	101,27	99,81	98,197
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peringkat EKPPD	N/A	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	100	63,34	69,64
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indikator Sasaran: Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	Baik	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Baik	100	82,93	100
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas Fiskal	0,541	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	75,1	104,24	76,18

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-					Capaian RPJMD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke- (%)		
				1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indikator Sasaran: Indeks Kematangan Penerapan Manajemen dan Risiko								Level 2	Level 2	Level 2	66,67	86,03	78,13
Sasaran: Meningkatnya Birokrsi yang Kapabel	Indikator Sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,91	3	2,1	2,4	2,6	2,8	3	1,76	2,68	2,9	83,81	111,67	111,54
			Baik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
Sasaran: Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN	47,59	83	71	74	78	81	83	47,73 (Sangat Rendah)	52,70 (Sangat Rendah)	73,69 (Sedang)	67,23	71,22	94,47
			tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi						
Sasaran: Meningkatnya pelayanan Publik yang Prima	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat	79,59	84,5	80	81,5	82,5	83,5	84,5	84,54	85,25	86,28	105,68	104,6	104,58

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, Diolah, 2025

Hasil evaluasi atas capaian makro dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 menunjukkan capaian yang beragam. Melihat pencapaian tujuan, terdapat beberapa pencapaian yang masih belum optimal, di antaranya adalah:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata capaian sebesar 64,48 persen per tahunnya;
2. Tujuan Meningkatnya Ketahanan Sosial dengan indikator Angka Konflik Sosial memiliki rata-rata capaian sebesar 78,33 per tahunnya; dan
3. Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan rata-rata capaian sebesar 92,07 persen per tahunnya.

Ketiga capaian tujuan yang belum optimal ini menggambarkan beberapa intervensi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang belum efektif dalam mencapai tujuan kinerja yang diharapkan. Oleh karenanya, beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 yang disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan upaya penegakan perda dan penjagaan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
2. Pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah;
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai fasilitasi pelatihan, penguatan akses permodalan dan perluasan akses pasar; dan
4. Penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan penindakan atas pelanggaran upaya pelestarian dan penguatan upaya konservasi secara menyeluruh.

Selain pencapaian dalam hal indikator makro, pemerintah daerah juga memiliki mandat dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal. Penetapan regulasi ini memiliki tujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan, dalam rangka memastikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Berikut merupakan ringkasan atas pencapaian SPM Kabupaten Manggarai dalam rentang tahun 2022-2024:

Tabel 2. 31 Pencapaian SPM Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024

Jenis Pelayanan	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Urusan Pendidikan			
Pendidikan Anak Usia Dini	51,02	78,56	78,56
Pendidikan Dasar	82,47	94,18	80,00
Pendidikan Kesetaraan	61,50	91,75	91,75
Urusan Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	81,46	59,00	68,60
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	98,18	80,00	72,46
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,60	69,00	71,80
Pelayanan kesehatan balita	86,73	71,00	69,73
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	90,02	52,00	98,55
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	48,58	65,00	87,25
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	51,56	55,00	74,95
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28,21	80,00	83,23
Pelayanan kesehatan diabetes melitus	96,45	84,00	99,21
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	82,37	68,00	86,56
Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	64,29	86,00	68,96
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	81,13	78,00	80,29
Urusan Pekerjaan Umum			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	85,81	86,00	86,17
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	83,13	83,30	82,58
Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman			
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	45,45	11,36	45,45
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/Kab/Kota	-	-	-
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	100,00	100,00

Jenis Pelayanan	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Pelayanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,00
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	-
Urusan Sosial			
Pelindungan sosial korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	101,04	111,00	34,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100,00	100,00	100,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-	-	-
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100,00	100,00	100,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti	-	-	-

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024

Secara umum pencapaian SPM dalam beberapa urusan wajib pelayanan dasar dalam kurun tiga tahun terakhir menunjukkan rata-rata capaian sebesar 81,80 persen. Meskipun belum optimal, capaian ini relatif sudah menunjukkan pelayanan SPM yang relatif baik. Beberapa pencapaian SPM yang cukup rendah secara rata-rata dibandingkan dengan capaian lainnya tercatat dalam beberapa urusan: kesehatan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sedangkan beberapa capaian SPM tidak dihitung dikarenakan di tahun berkenaan tidak ada kejadian atau aktivitas yang memerlukan SPM tersebut dilaksanakan pada tahun tersebut.

Dalam urusan kesehatan, capaian SPM yang masih relatif rendah dibandingkan dengan capaian lain adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut dan pelayanan kesehatan hipertensi, masing-masing dengan rata-rata capaian sebesar 60,50 persen dan 63,81 persen. Capaian SPM dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih relatif rendah adalah perihal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang

memiliki rata-rata capaian sebesar 34,09 persen. Berbagai capaian ini menunjukkan pelaksanaan SPM di Kabupaten Manggarai yang masih perlu ditingkatkan hingga optimal, mengingat SPM pada dasarnya merupakan standar minimum, sehingga pemenuhan optimalnya berada di angka yang terpenuhi atau 100 persen.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi APBD Kabupaten Manggarai periode 2020–2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan jenis pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah periode 2026–2030.
Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai serta rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi APBD					Rata - rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**						
A.	Pendapatan Asli Daerah	96.873.499.070,67	97.878.120.398,43	110.722.937.745,65	124.626.655.943,35	109.307.352.589,08	1,59
B.	Pendapatan Transfer	1.000.203.346.522,41	986.712.538.223,00	919.332.114.485,00	1.087.761.742.229,00	1.163.065.281.980,00	2,32
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	60.310.077.834,00	3.825.000.000,00	16.731.673.688,30	46,60
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.156.337.467.137,08**	**1.142.553.988.621,43**	**1.090.365.130.064,65**	**1.216.213.398.172,35**	**1.289.104.308.257,38**	**1,17**
2	**BELANJA**						
A.	Belanja Operasi	707.540.653.377,00	721.098.288.730,92	747.599.452.368,96	788.068.796.446,48	874.604.336.520,03	4,30
B.	Belanja Modal	206.921.382.491,00	174.222.039.501,00	169.206.541.293,98	290.872.850.601,00	159.732.790.450,10	-2,46
C.	Belanja Tidak Terduga	20.348.859.454,13	24.271.887.055,00	5.329.997.314,00	3.604.625.600,00	667.330.200,00	162,46
D.	Belanja Transfer	206.676.533.982,00	207.570.319.275,00	183.121.727.308,00	193.308.409.085,00	201.701.424.200,00	-0,99
	JUMLAH BELANJA	**1.141.487.429.304,13**	**1.127.162.534.561,92**	**1.105.257.718.284,94**	**1.275.854.681.732,48**	**1.236.705.881.370,13**	**1,06**
	SURPLUS/DEFISIT	**14.850.037.832,95**	**15.391.454.059,51**	**(14.892.588.220,29)**	**(59.641.283.560,13)**	**52.398.426.887,25**	**-74,08**
3	**PEMBIAYAAN**						
A.	Penerimaan Pembiayaan	60.798.358.974,63	62.959.369.719,58	74.809.717.603,09	144.297.516.200,20	27.206.748.573,66	28,77
B.	Pengeluaran Pembiayaan	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	57.433.695.652,00	58.391.304.347,99	59,55
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.718.369.719,58**	**55.512.717.603,09**	**86.863.820.548,20**	**(31.184.555.774,33)**	**17,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**63.183.957.854,58**	**68.109.823.779,09**	**40.620.129.382,80**	**27.222.536.988,07**	**21.213.871.112,92**	**-16,91**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai memiliki rata rata pertumbuhan sebesar 1,17 persen per tahun pada lima tahun terakhir. Pendapatan transfer merupakan kontributor utama terhadap pendapatan daerah dengan proporsi terbesar di setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,32 persen. Kontribusi kedua pada pendapatan manggarai disokong oleh Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Penyumbang pendapatan daerah yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan dua komponen lainnya, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,60 persen.

Total belanja daerah Kabupaten Manggarai memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,06 persen pada lima tahun terakhir. Dengan kontributor utama yaitu belanja operasi. Belanja dengan pertumbuhan terbesar berada pada belanja tak terduga, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 162,46 persen pada lima tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Manggarai mencatat adanya surplus anggaran sebanyak tiga kali pada lima tahun terakhir. Surplus anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan total surplus sebesar Rp52,4 miliar di mana hal ini mengalami peningkatan sebesar 187,86 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Defisit Kabupaten Manggarai terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai defisit tertinggi terjadi pada tahun 2023. Nilai defisit Kabupaten Manggarai mencapai Rp59,6 miliar. Pertumbuhan pendapatan, belanja, dan surplus defisit keuangan daerah Kabupaten Manggarai kemudian dapat dilihat lebih detail melalui grafik berikut:

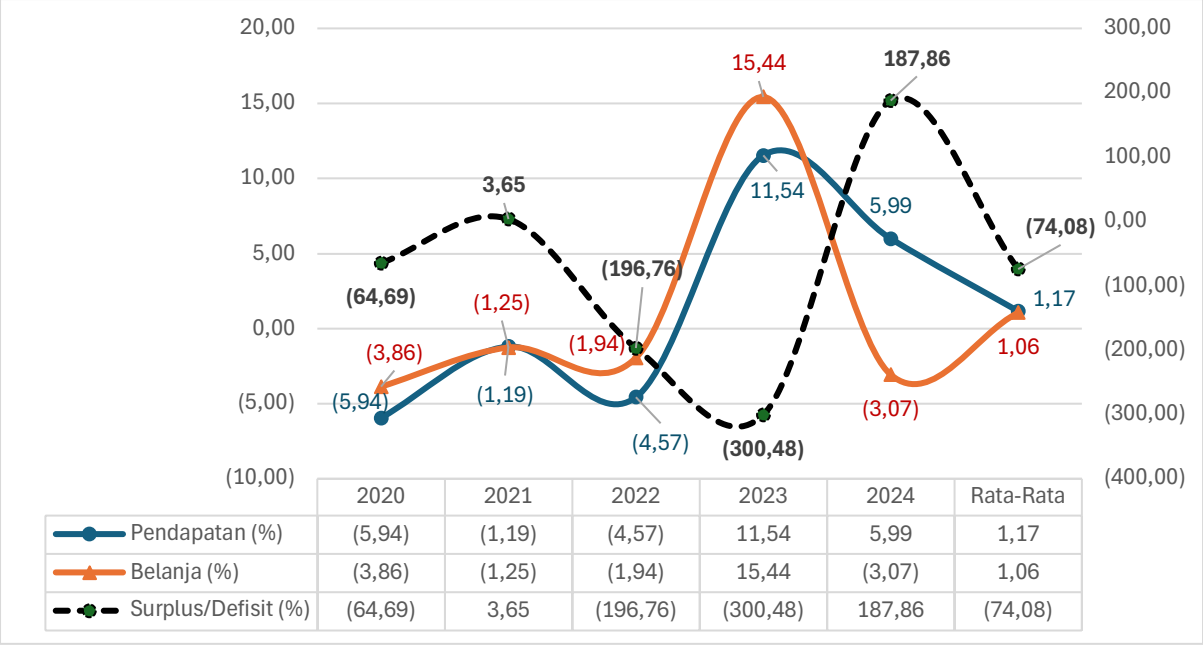

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pendapatan (%)	(5,94)	(1,19)	(4,57)	11,54	5,99	1,17
Belanja (%)	(3,86)	(1,25)	(1,94)	15,44	(3,07)	1,06
Surplus/Defisit (%)	(64,69)	3,65	(196,76)	(300,48)	187,86	(74,08)

Grafik 2. 35 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dalam aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan mengalami tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan pembiayaan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari perspektif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terdapat tren peningkatan hingga tahun 2021, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2024. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu Rp68,1 miliar sedangkan SILPA terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu Rp21.2 miliar. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya optimalisasi penggunaan anggaran atau peningkatan defisit yang lebih besar.

Secara keseluruhan, realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan adanya pola fluktuatif dalam pendapatan, belanja, dan surplus/defisit. Peningkatan belanja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan berpotensi meningkatkan tekanan fiskal pada tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, strategi pengelolaan fiskal yang lebih optimal diperlukan, terutama dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran.

2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah memiliki kedudukan, fungsi, dan peran strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemberian pelayanan kepada publik.

Realisasi pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; serta
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perkembangan realisasi komponen pendapatan daerah Kabupaten Manggarai serta rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata - rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**96.873.499.070,67**	**97.878.120.398,43**	**110.722.937.745,65**	**124.626.655.943,35**	**109.307.352.589,08**	**1,59**
1.1.1	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.249.331.177,00	17.591.100.545,64	23.729.337.459,76	21.270.967.323,00	4,41
1.1.2	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.008.336.669,00	6.636.049.044,00	9.001.027.062,42	7.155.915.070,00	4,41
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	3.371.631.127,65	5.567.584.252,00	3.579.443.275,00	-2,37
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	70.396.274.959,50	71.276.085.095,43	83.124.157.028,36	86.328.707.169,17	77.301.026.921,08	1,79
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.000.203.346.522,41**	**986.712.538.223,00**	**919.332.114.485,00**	**1.087.761.742.229,00**	**1.163.065.281.980,00**	**2,32**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**973.639.205.467,00**	**957.453.138.052,00**	**890.891.745.638,00**	**1.052.370.973.217,00**	**1.124.743.136.037,00**	**2,20**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.237.946.811,00	13.288.255.536,00	11.023.832.886,00	6.438.985.829,00	5.824.669.000,00	5,78
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA	1.643.959.689,00	3.371.184.256,00	3.255.003.100,00	3.061.632.000,00	2.589.809.000,00	13,22
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	548.841.188.585,00	596.218.538.347,00	677.515.472.202,00	2,55
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-Fisik	121.991.931.619,00	124.901.455.462,00	118.652.389.317,00	131.686.954.206,00	114.943.944.920,00	-6,37
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	105.644.601.348,00	101.164.526.798,00	85.933.750.750,00	181.173.256.835,00	194.807.331.915,00	21,45
1.2.1.6	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	127.982.480.000,00	129.061.909.000,00	-2,57
1.2.1.7	Dana Insentif	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	5.809.126.000,00	-	-51,21
1.2.2	**Transfer Antar – Daerah**	**26.564.141.055,41**	**29.259.400.171,00**	**28.440.368.847,00**	**35.390.769.012,00**	**38.322.145.943,00**	**6,43**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	26.564.141.055,41	22.259.400.171,00	28.440.368.847,00	35.390.769.012,00	38.322.145.943,00	7,27
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	7.000.000.000,00	-	-	-	-20,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**59.260.621.544,00**	**57.963.330.000,00**	**60.310.077.834,00**	**3.825.000.000,00**	**16.731.673.688,30**	**46,60**
1.3.1	Pendapatan Hibah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	9.297.000.000,00	3.825.000.000,00	-	-51,53
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-		51.013.077.834,00	-	16.731.673.688,30	-20,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.156.337.467.137,08**	**1.142.553.988.621,43**	**1.090.365.130.064,65**	**1.216.213.398.172,35**	**1.289.104.308.257,38**	**1,17**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai 2020-2024

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan adanya fluktuasi dalam perolehan pendapatan pada tahun 2020 hingga 2024. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah pada kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 1,59 persen per tahun dengan komponen dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu pajak daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,41 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah didominasi oleh pendapatan yang dihasilkan pada lain-lain PAD yang sah.

Pada pos pendapatan transfer, pendapatan transfer yang bersumber dari transfer antar daerah memiliki proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer antar daerah diperoleh dari pendapatan bagi hasil. Sementara itu proporsi penyumbang pendapatan transfer pemerintah pusat didominasi oleh dana alokasi umum. Pendapatan transfer Kabupaten Manggarai tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan pendapatan mencapai Rp1,16 triliun. sedangkan pendapatan transfer terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp919,3 miliar.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Manggarai bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp60,3 miliar, sedangkan perolehan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp3,8 miliar.

Fluktuasi dalam komponen pendapatan daerah ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur penerimaan keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer mengindikasikan bahwa sumber pendapatan asli daerah masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penurunan drastis dalam lain-lain pendapatan yang sah juga perlu mendapatkan perhatian guna mengidentifikasi faktor penyebabnya dan mencari strategi untuk meningkatkan kembali sumber pendapatan tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penerimaan daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tahun 2020-2024.

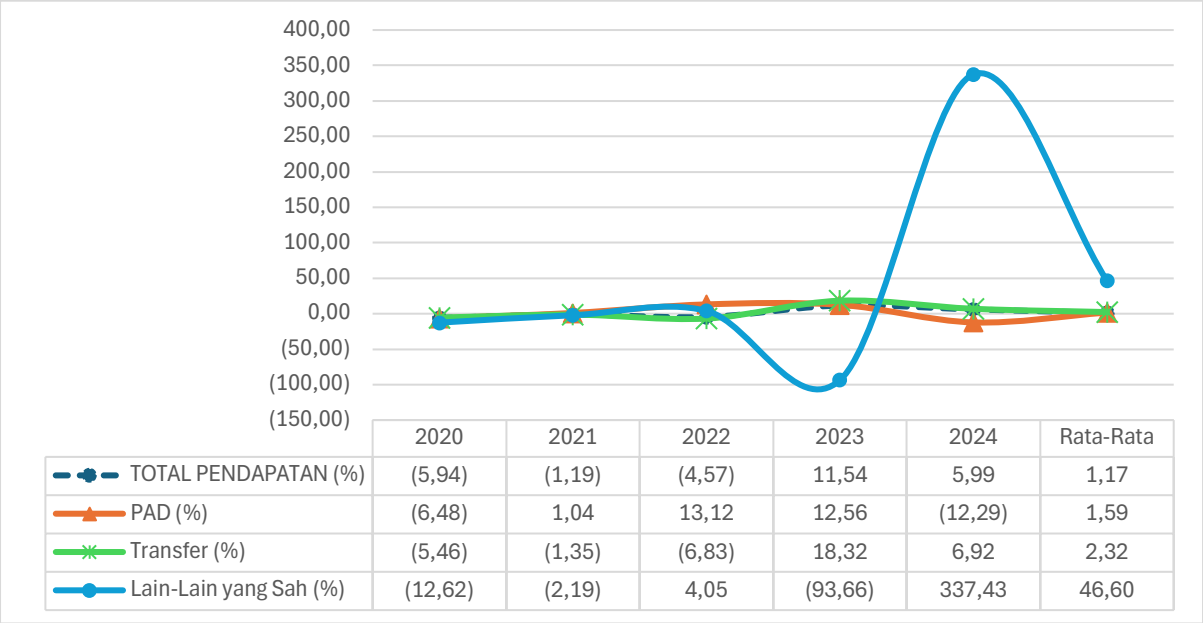

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
TOTAL PENDAPATAN (%)	(5,94)	(1,19)	(4,57)	11,54	5,99	1,17
PAD (%)	(6,48)	1,04	13,12	12,56	(12,29)	1,59
Transfer (%)	(5,46)	(1,35)	(6,83)	18,32	6,92	2,32
Lain-Lain yang Sah (%)	(12,62)	(2,19)	4,05	(93,66)	337,43	46,60

Grafik 2. 36 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Secara umum, fluktuasi total pendapatan Kabupaten Manggarai pada lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup stabil. Namun, jika melihat lebih detail, pada lain-lain pendapatan yang sah memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 46,60 persen. Fluktuasi yang cukup tinggi pada komponen lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sumber pendapatan yang tidak tetap dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan fiskal daerah.

Fluktuasi terlihat pada pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan transfer, namun jika dibandingkan dengan lain-lain pendapatan yang sah, kedua komponen tersebut masih terbilang stabil. Fluktuasi yang terjadi pada pendapatan asli daerah mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kinerja pengelolaan PAD, seperti kebijakan fiskal, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pemungutan retribusi daerah. Sementara itu, pendapatan

transfer sebagai komponen utama pendukung total pendapatan daerah memiliki fluktuasi yang masih terbilang stabil. Stabilitas pertumbuhan transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan belanja daerah dan pembiayaan program pembangunan. Secara lebih lanjut mengenai rata-rata kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan ketiga komponen yang ada dapat dilihat melalui grafik berikut

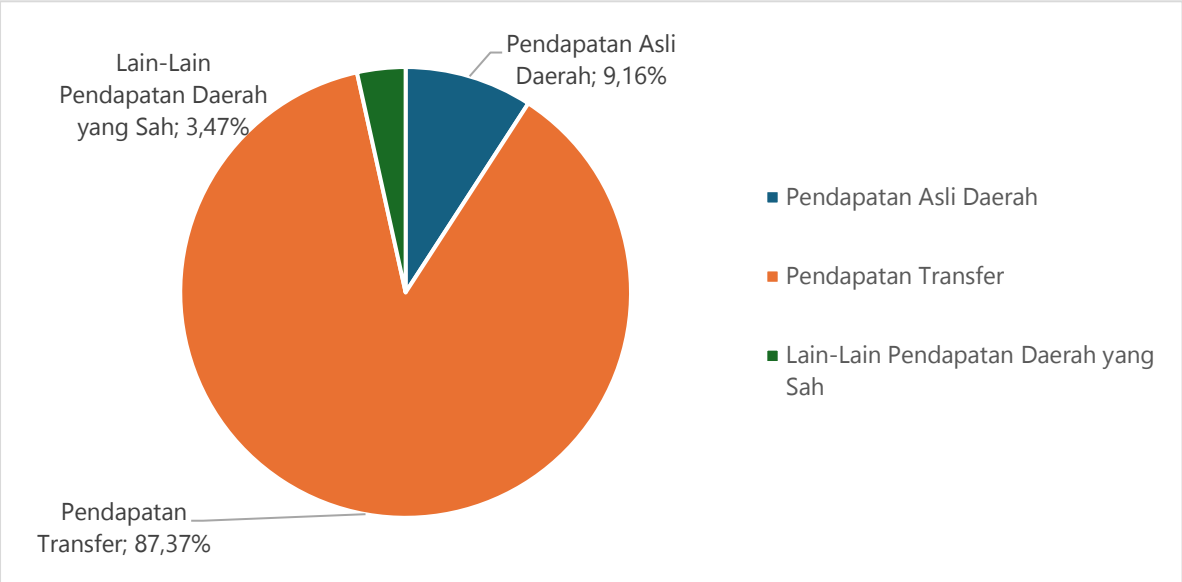

Grafik 2. 37 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa sumber utama pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer selama lima tahun terakhir mencapai 87,37 persen, menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tren ini juga memperlihatkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya, porsi pendapatan transfer tetap mendominasi. Kontribusi terbesar kedua diperoleh dari pendapatan asli daerah yaitu sebesar 9,16 persen dan kontribusi terkecil berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu sebesar 3,47 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya penguatan kapasitas PAD serta optimalisasi pendapatan transfer menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keuangan daerah di masa mendatang.

Untuk melihat tingkat kemandirian atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan tingkat ketergantungan Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Rasio Ketergantungan (RK) menggambarkan tingkat kemandirian dan ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang (DDF ≤ 10,00); (2) Kurang (10,00 < DDF ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < DDF ≤ 30,00); (4) Cukup Baik (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Baik (40,00 < DDF ≤ 50,00); dan (6) Sangat Baik (DDF > 50,00). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Manggarai 2020-2024.

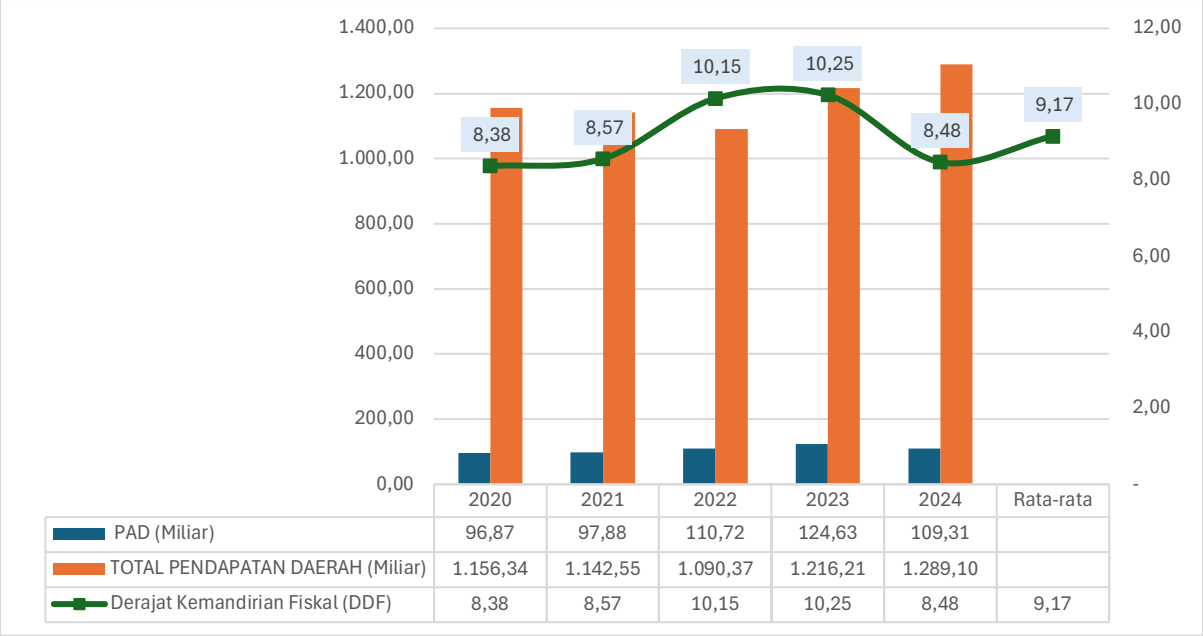

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
PAD (Miliar)	96,87	97,88	110,72	124,63	109,31	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	1.156,34	1.142,55	1.090,37	1.216,21	1.289,10	
Derajat Kemandirian Fiskal (DDF)	8,38	8,57	10,15	10,25	8,48	9,17

Grafik 2. 38 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, derajat kemandirian fiskal (DDF) Kabupaten Manggarai selama periode 2020-2024 tergolong dalam kategori Sangat Kurang (DDF ≤ 10,00), dengan rata-rata 9,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi untuk membiayai kebutuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya basis ekonomi lokal, kurangnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Manggarai perlu mengoptimalkan penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset daerah, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar anggaran dapat digunakan lebih produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah (RK ≤ 10,00); (2) Rendah (10,00 < RK ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < RK ≤ 30,00); (4) Cukup Tinggi (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Tinggi (40,00 < RK ≤ 50,00); dan (6) Sangat Tinggi (RK > 50,00). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Manggarai 2020-2024.

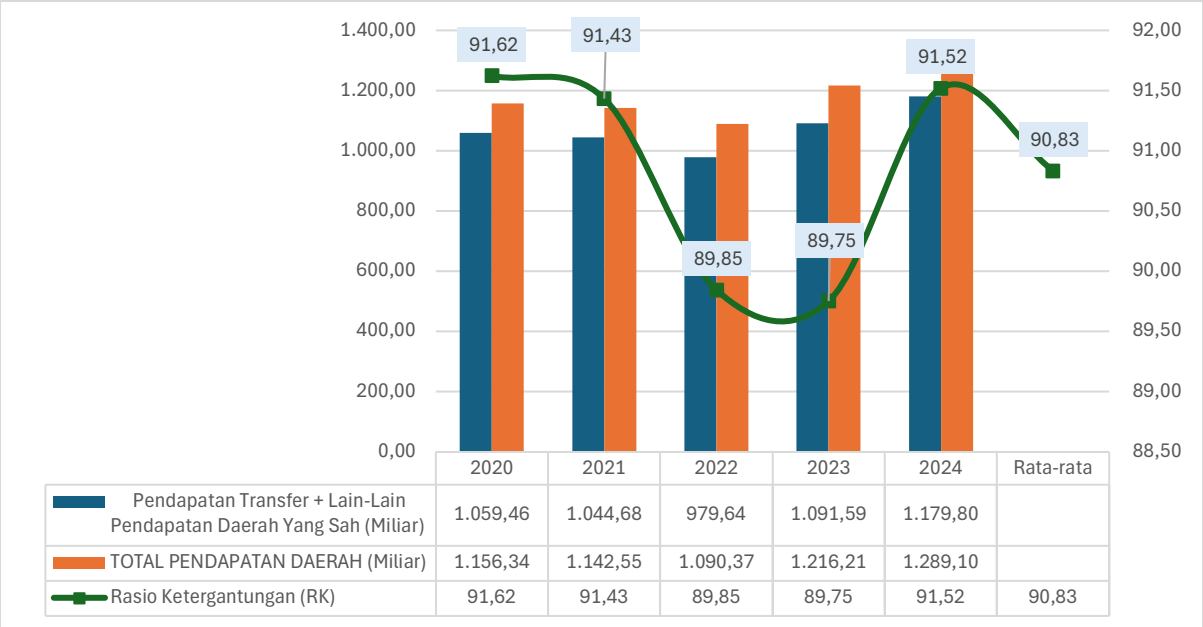

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pendapatan Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Miliar)	1.059,46	1.044,68	979,64	1.091,59	1.179,80	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	1.156,34	1.142,55	1.090,37	1.216,21	1.289,10	
Rasio Ketergantungan (RK)	91,62	91,43	89,85	89,75	91,52	90,83

Grafik 2. 39 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Kabupaten Manggarai selama periode 2020-2024 tergolong sangat tinggi (RK > 50,00), dengan rata-rata 90,83. Hal ini menunjukkan bahwa 90 persen pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas.

Tingginya ketergantungan fiskal mencerminkan rendahnya kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya sektor ekonomi produktif, kurang optimalnya pemanfaatan aset

daerah, serta minimnya inovasi dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Ketergantungan yang berlebihan ini juga berisiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk daerah.

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan ini, Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penguatan sektor ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Manggarai dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang bersumber dari PAD sangat bergantung pada optimalisasi potensi daerah melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Kegiatan ekonomi tersebut harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai yang meningkat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Untuk memahami realisasi masing-masing

sumber pendapatan daerah, berikut disajikan data realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

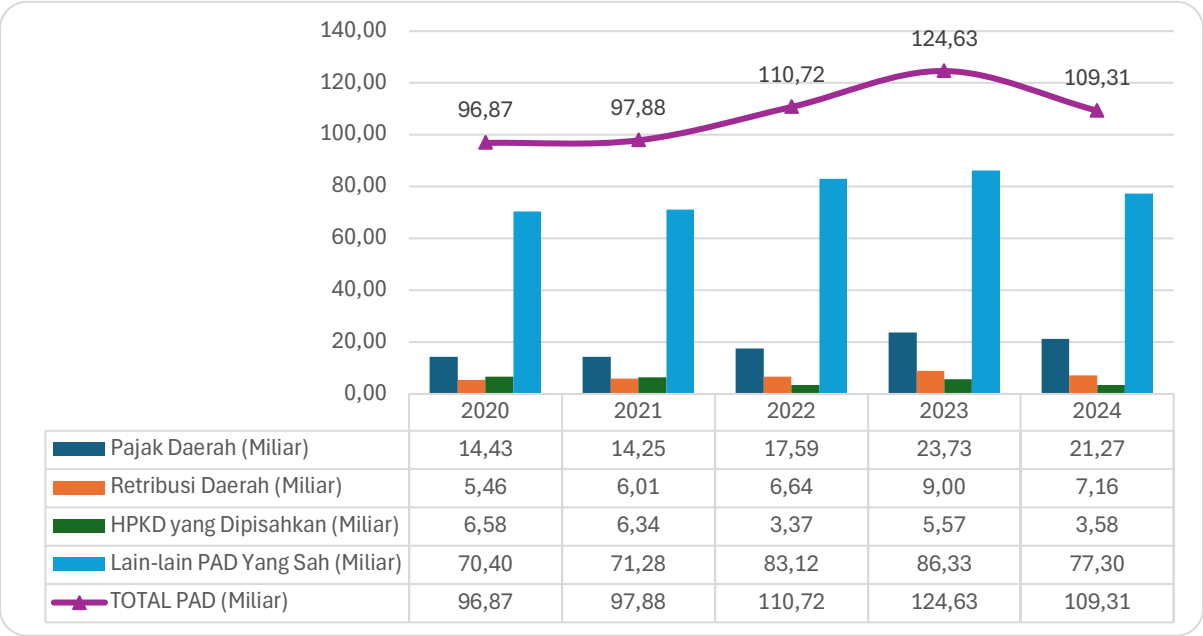

	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (Miliar)	14,43	14,25	17,59	23,73	21,27
Retribusi Daerah (Miliar)	5,46	6,01	6,64	9,00	7,16
HPKD yang Dipisahkan (Miliar)	6,58	6,34	3,37	5,57	3,58
Lain-lain PAD Yang Sah (Miliar)	70,40	71,28	83,12	86,33	77,30
TOTAL PAD (Miliar)	96,87	97,88	110,72	124,63	109,31

Grafik 2. 40 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Secara umum, total pendapatan PAD Kabupaten Manggarai menunjukkan tren fluktuatif. PAD tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp124,63 miliar kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi Rp109,31 miliar. PAD terendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar Rp96,87 miliar. Penurunan PAD pada tahun 2024 menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi pendapatan lainnya.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut disajikan grafik rata-rata proporsi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

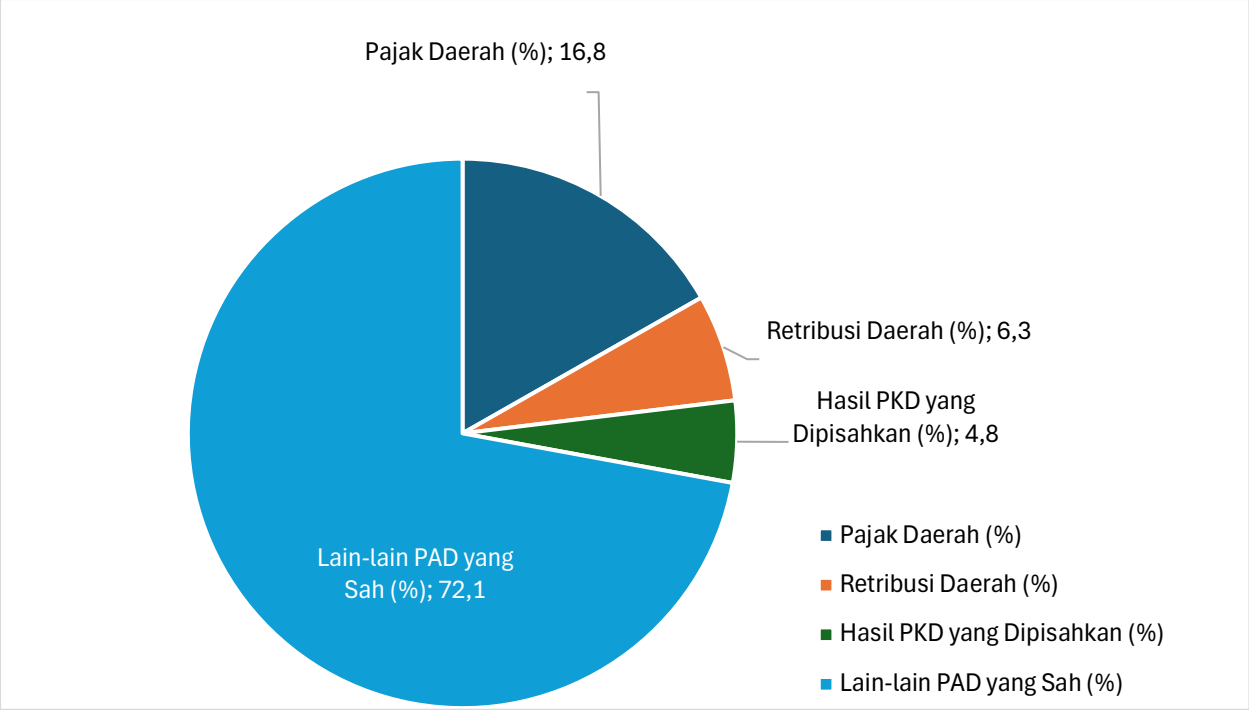

Grafik 2. 41 Rata-rata Proporsi Komponen PAD Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Kontribusi PAD Kabupaten Manggarai didominasi oleh lain-lain PAD yang sah dengan besaran proporsi rata-rata pada lima tahun terakhir mencapai 72,1 persen. Komponen penyumbang PAD terbesar kedua diperoleh dari pajak daerah dengan kontribusi mencapai 16,8 persen kemudian dilanjutkan dengan retribusi daerah dan hasil PKD yang dipisahkan. Meskipun lain-lain PAD yang sah menyumbang proporsi terbesar bagi PAD namun pada tahun 2024 terdapat tren penurunan. Namun jika dilihat labih lanjut secara keseluruhan di setiap komponen pada tahun 2024, jumlah pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

b. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Pendapatan TKD untuk Kabupaten Manggarai terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal dan Dana Desa. Berikut ini adalah Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

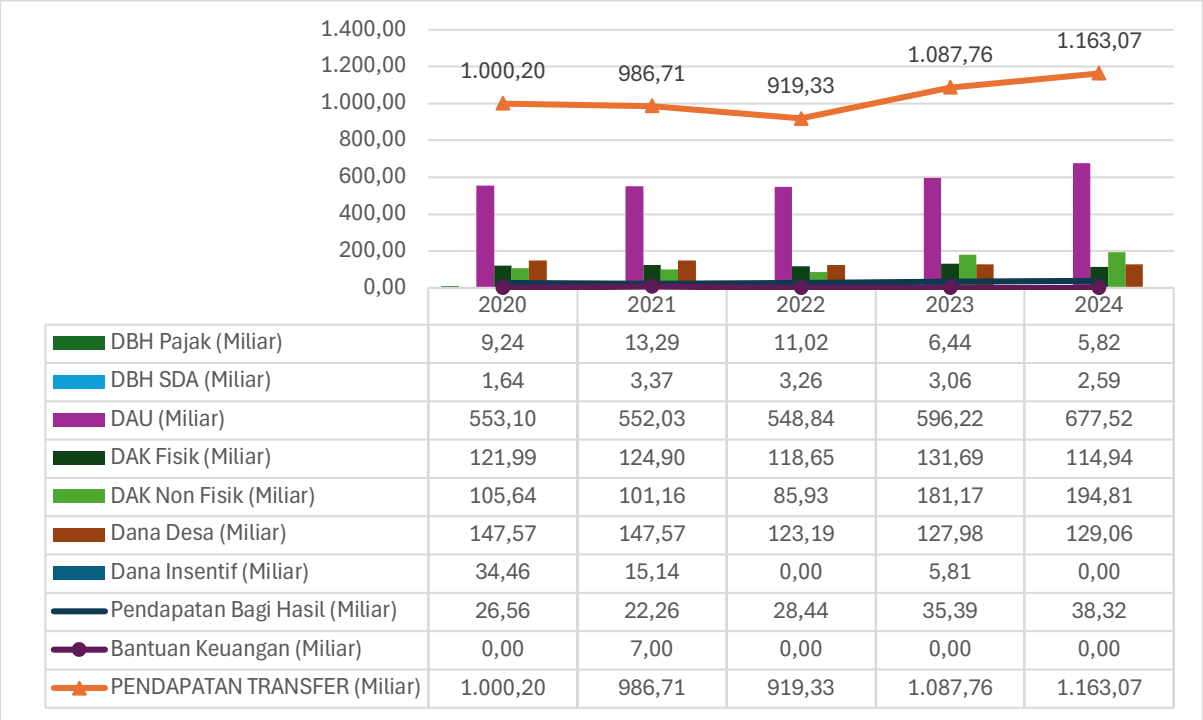

	2020	2021	2022	2023	2024
DBH Pajak (Miliar)	9,24	13,29	11,02	6,44	5,82
DBH SDA (Miliar)	1,64	3,37	3,26	3,06	2,59
DAU (Miliar)	553,10	552,03	548,84	596,22	677,52
DAK Fisik (Miliar)	121,99	124,90	118,65	131,69	114,94
DAK Non Fisik (Miliar)	105,64	101,16	85,93	181,17	194,81
Dana Desa (Miliar)	147,57	147,57	123,19	127,98	129,06
Dana Insentif (Miliar)	34,46	15,14	0,00	5,81	0,00
Pendapatan Bagi Hasil (Miliar)	26,56	22,26	28,44	35,39	38,32
Bantuan Keuangan (Miliar)	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER (Miliar)	1.000,20	986,71	919,33	1.087,76	1.163,07

Grafik 2. 42 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen pendapatan transfer Kabupaten Manggarai secara umum pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Pertumbuhan yang signifikan terhadap pendapatan transfer dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan transfer Kabupaten Manggarai terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp919,33 miliar dan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai Rp1.163,07 miliar.

Secara keseluruhan, pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Fluktuasi dalam berbagai komponen pendapatan transfer mencerminkan dinamika kebijakan fiskal

pemerintah pusat serta kondisi ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil dan dana transfer lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang adaptif untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan transfer guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

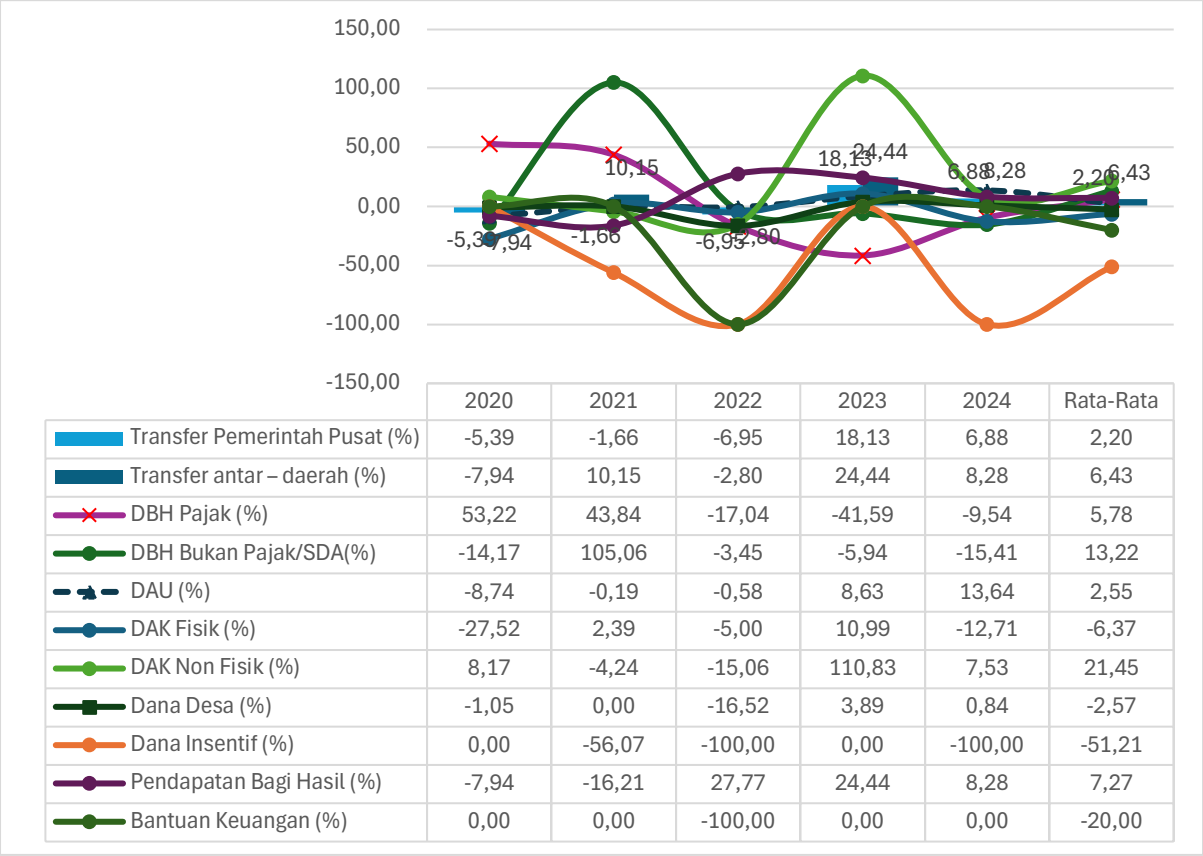

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Transfer Pemerintah Pusat (%)	-5,39	-1,66	-6,95	18,13	6,88	2,20
Transfer antar – daerah (%)	-7,94	10,15	-2,80	24,44	8,28	6,43
DBH Pajak (%)	53,22	43,84	-17,04	-41,59	-9,54	5,78
DBH Bukan Pajak/SDA(%)	-14,17	105,06	-3,45	-5,94	-15,41	13,22
DAU (%)	-8,74	-0,19	-0,58	8,63	13,64	2,55
DAK Fisik (%)	-27,52	2,39	-5,00	10,99	-12,71	-6,37
DAK Non Fisik (%)	8,17	-4,24	-15,06	110,83	7,53	21,45
Dana Desa (%)	-1,05	0,00	-16,52	3,89	0,84	-2,57
Dana Insentif (%)	0,00	-56,07	-100,00	0,00	-100,00	-51,21
Pendapatan Bagi Hasil (%)	-7,94	-16,21	27,77	24,44	8,28	7,27
Bantuan Keuangan (%)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-20,00

Grafik 2. 43 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada setiap komponen pendapatan transfer. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer selama periode tersebut adalah sebesar 2,32 persen.

DAK fisik, dana desa, dana insentif, dan bantuan keuangan memiliki rata-rata pertumbuhan pada lima tahun terakhir yang bernilai negative. Rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan transfer tertinggi terjadi pada komponen DAK non fisik dengan rata-rata sebesar 21,45 persen.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam pertumbuhan pendapatan transfer mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat serta dinamika ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan negara. Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap perubahan dalam alokasi dana transfer, sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer, berikut disajikan grafik rata-rata proporsi komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

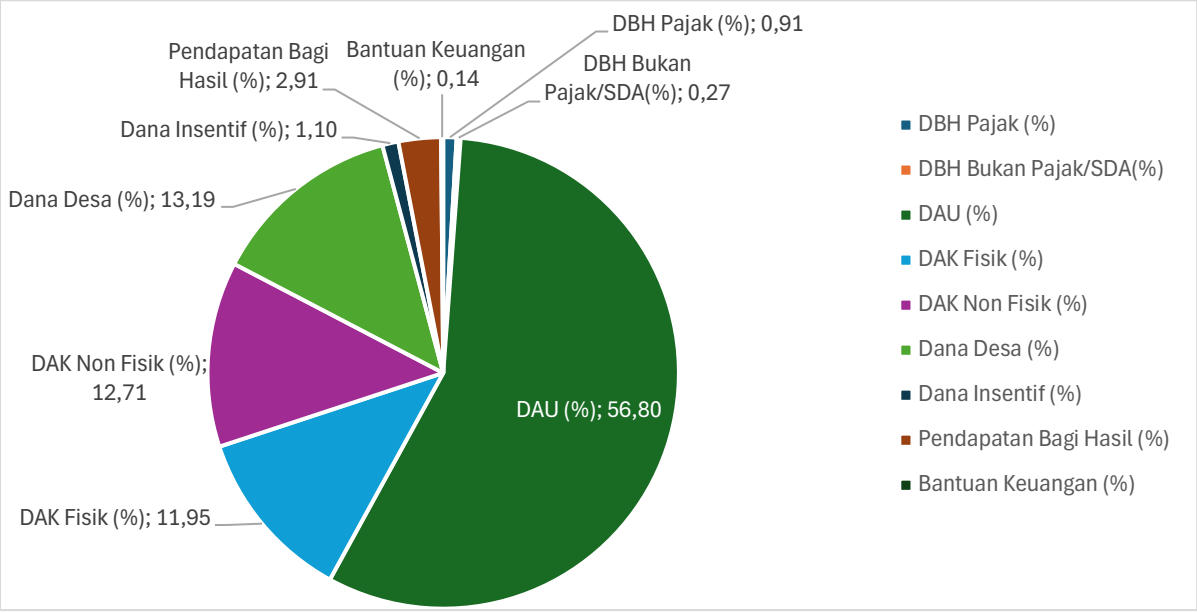

Grafik 2. 44 Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Kontributor terbesar dalam pendapatan transfer didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proporsi kontribusi mencapai 56,80 persen, kontributor kedua

yaitu Dana desa dengan proporsi 13,19 persen, dan diikuti dengan DAK non fisik dengan proporsi 12,71 persen. Sedangkan kontribusi terkecil dalam komponen pendapatan transfer diperoleh melalui komponen bantuan keuangan dengan besaran kontribusi mencapai 0,14 persen. Pola ini mengindikasikan pentingnya strategi dalam optimalisasi pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Manggarai untuk realisasi selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

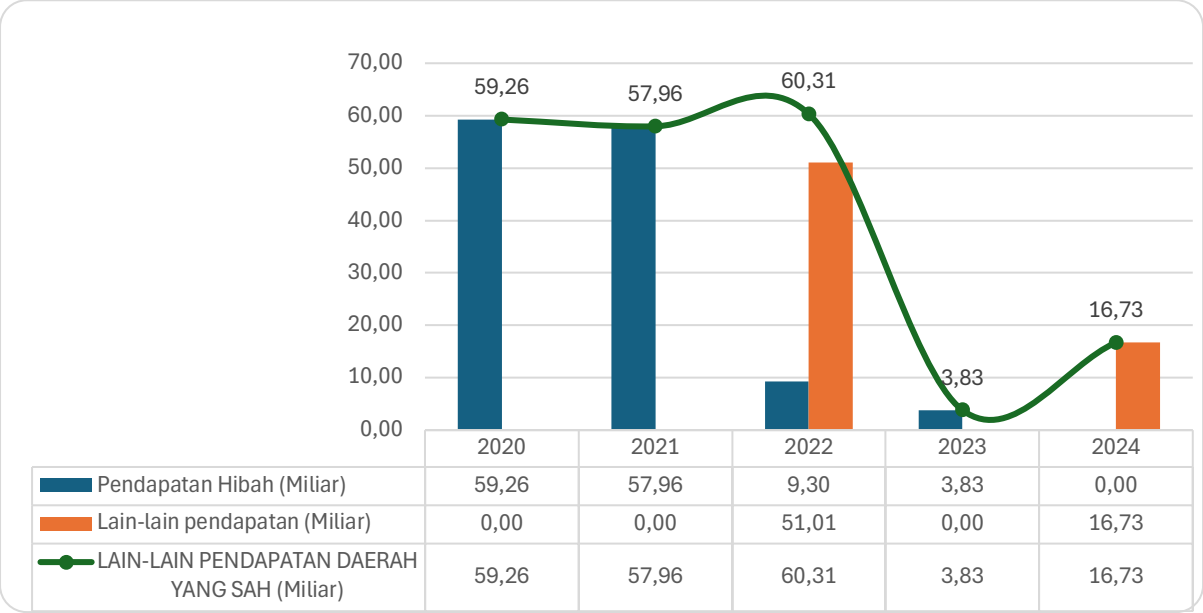

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Hibah (Miliar)	59,26	57,96	9,30	3,83	0,00
Lain-lain pendapatan (Miliar)	0,00	0,00	51,01	0,00	16,73
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (Miliar)	59,26	57,96	60,31	3,83	16,73

Grafik 2. 45 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Manggarai lima tahun terakhir mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan total nilai lain-lain PAD yang sah mencapai Rp3,83 miliar dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 yang mencapai Rp60,31 miliar, di mana tahun 2022 merupakan tahun penerimaan lainlain PAD yang sah tertinggi pada lima tahun terakhir.

Fluktuasi dalam komponen ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki sifat yang tidak stabil dan bergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemberian hibah atau adanya regulasi baru yang mengatur sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu mengevaluasi keberlanjutan dan potensi sumber pendapatan ini dalam jangka panjang serta mencari strategi untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2.2.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk memahami lebih lanjut dinamika pengeluaran daerah, berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 32 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata - rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**707.540.653.377,00**	**721.098.288.730,92**	**747.599.452.368,96**	**788.068.796.446,48**	**874.604.336.520,03**	**4,30**
2.1.1	Belanja Pegawai	396.377.256.159,00	406.236.865.405,92	416.863.482.286,24	429.160.625.973,00	491.977.680.014,10	4,97
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	274.510.456.317,00	237.908.984.373,00	267.835.774.738,00	302.918.207.257,43	299.480.727.145,13	-0,11
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	727.530.923,72	5.799.999.999,99	2.504.451.584,80	128,08
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	60.060.498.551,00	37.194.158.116,06	72.645.506.776,00	91,50
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.112.165.870,00	12.995.805.100,00	7.995.971.000,00	395,62
2.2	**Belanja Modal**	**206.921.382.491,00**	**174.222.039.501,00**	**169.206.541.293,98**	**290.872.850.601,00**	**159.732.790.450,10**	**-2,46**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	5.947.920,00	1.962.083.000,00	-	-	6.537,54
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.598.829.729,00	15.696.481.723,00	33.377.856.959,98	50.726.852.239,00	40.880.603.233,10	16,63
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.704.359.626,00	53.847.392.337,00	71.649.025.218,00	62.631.878.165,00	39.089.157.311,00	-5,83
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.654.992.173,00	104.672.217.521,00	62.217.576.116,00	175.128.999.197,00	75.324.159.743,00	11,74
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	963.200.963,00	-	-	2.385.121.000,00	4.438.870.163,00	-12,14
2.2.6	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**20.348.859.454,13**	**24.271.887.055,00**	**5.329.997.314,00**	**3.604.625.600,00**	**667.330.200,00**	**162,46**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	20.348.859.454,13	24.271.887.055,00	5.329.997.314,00	3.604.625.600,00	667.330.200,00	162,46
2.4	**Belanja Transfer**	**206.676.533.982,00**	**207.570.319.275,00**	**183.121.727.308,00**	**193.308.409.085,00**	**201.701.424.200,00**	**-0,99**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.847.557.908,00	4.951.164.585,00	4.952.787.580,00	15,45
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.274.169.400,00	188.357.244.500,00	196.748.636.620,00	-1,48
	JUMLAH BELANJA	**1.141.487.429.304,13**	**1.127.162.534.561,92**	**1.105.257.718.284,94**	**1.275.854.681.732,48**	**1.236.705.881.370,13**	**1,06**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai 2020-2024

Realisasi jumlah belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai belanja Kabupaten Manggarai mencapai Rp1,141 triliun, sedangkan pada tahun 2024 jumlah total belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai mencapau Rp1,236 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk belanja dan pembiayaan berbagai program Pembangunan daerah.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa belanja operasi besaran belanja operasi cukup mendominasi terhadap keseluruhan total belanja Kabupaten Manggarai. Rata- rata pertumbuhan belanja operasi mencapai 4,30 persen pada lima tahun terakhir. Sedangkan belanja tidak terduga merupakan pos belanja dengan nominal kontribusi terendah jika dibandingkan dengan pos belanja lainnya.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja daerah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

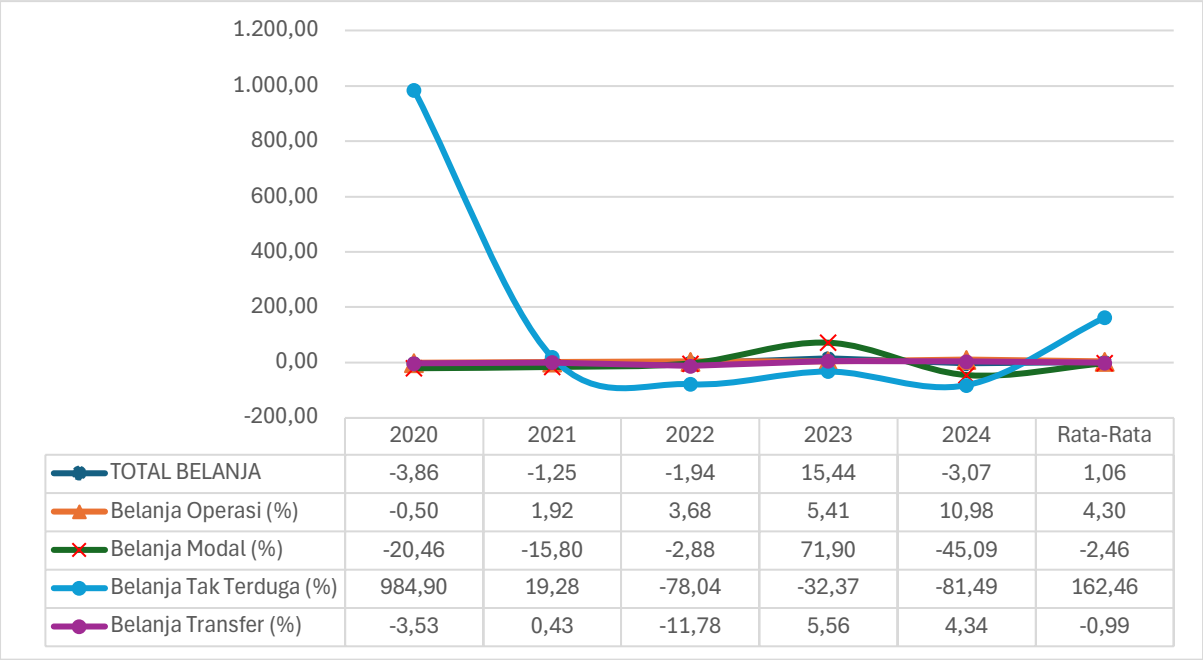

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
TOTAL BELANJA	-3,86	-1,25	-1,94	15,44	-3,07	1,06
Belanja Operasi (%)	-0,50	1,92	3,68	5,41	10,98	4,30
Belanja Modal (%)	-20,46	-15,80	-2,88	71,90	-45,09	-2,46
Belanja Tak Terduga (%)	984,90	19,28	-78,04	-32,37	-81,49	162,46
Belanja Transfer (%)	-3,53	0,43	-11,78	5,56	4,34	-0,99

Grafik 2. 46 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Secara keseluruhan, total belanja Kabupaten Manggarai selama lima tahun terakhir rata-rata mangalami peningkatan sebesar 1,06 persen. Dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020 sebesar -3,86 persen dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 15,44 persen.

Belanja tidak terduga menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 meningkatnya belanja tidak terduga mencapai 984,90 persen. Peningkatan yang sangat besar pada belanja tidak terduga diakibatkan oleh kebijakan pengembalian kelebihan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa. Namun hingga tahun 2024 pertumbuhan belanja tidak terduga selalu mengalami penurunan hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya alokasi anggaran untuk keperluan darurat atau keadaan luar biasa.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan arah yang positif, terutama pada belanja operasi dan belanja modal sebagai komponen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun belanja tak terduga mengalami penurunan drastis, hal ini dapat mencerminkan perubahan kebijakan anggaran yang lebih terarah pascapandemi. Pertumbuhan yang cukup baik pada belanja operasi dan belanja modal mengindikasikan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur daerah.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen Belanja Daerah, berikut disajikan grafik proporsi komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

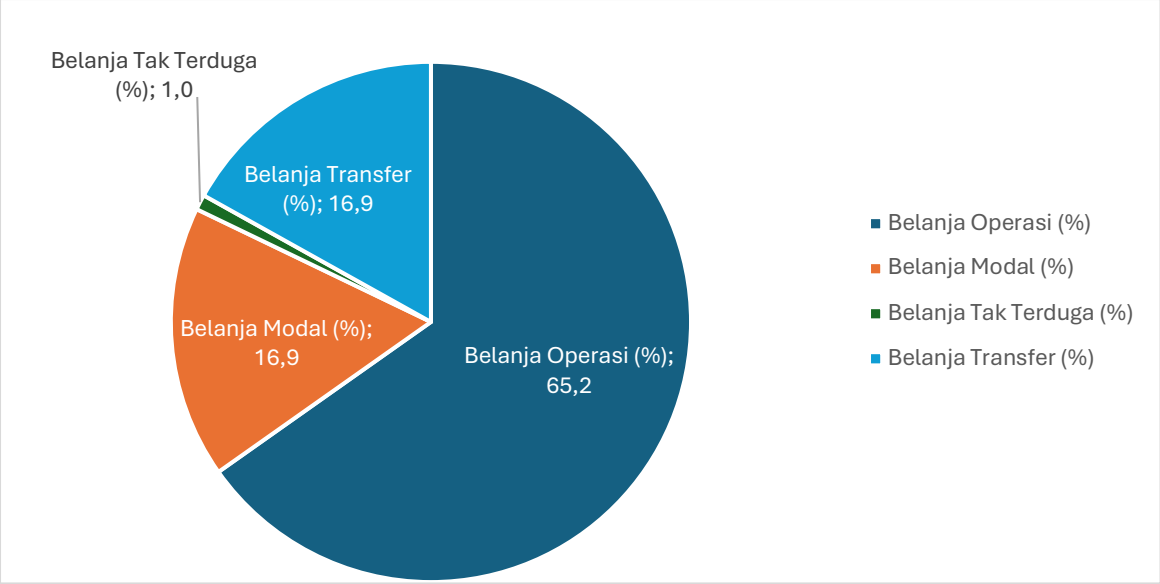

Grafik 2. 47 Rata-rata Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja operasi merupakan komponen kontributor utama dalam belanja Kabupaten Manggarai. Dalam lima tahun kebelakang, kontribusi belanja operasi rata-rata mencapai 65,2 persen. Besaran kontribusi belanja modal dan belanja transfer memiliki nilai yang sama yaitu 16,9 persen. Sedangkan kontribusi terendah dalam belanja Kabupaten Manggarai yaitu belanja tidak terduga.

Struktur belanja daerah Kabupaten Manggarai didominasi oleh belanja operasi dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Belanja modal memiliki proporsi yang cukup besar terutama pada tahun 2022 dengan proporsi peningkatan terbesar diakibatkan oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan belanja transfer didominasi oleh belanja bantuan keuangan.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos

belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki tren positif atau mengalami pemingkatan setiap tahunnya, secara lebih detail dapat dijelaskan melalui grafik berikut.

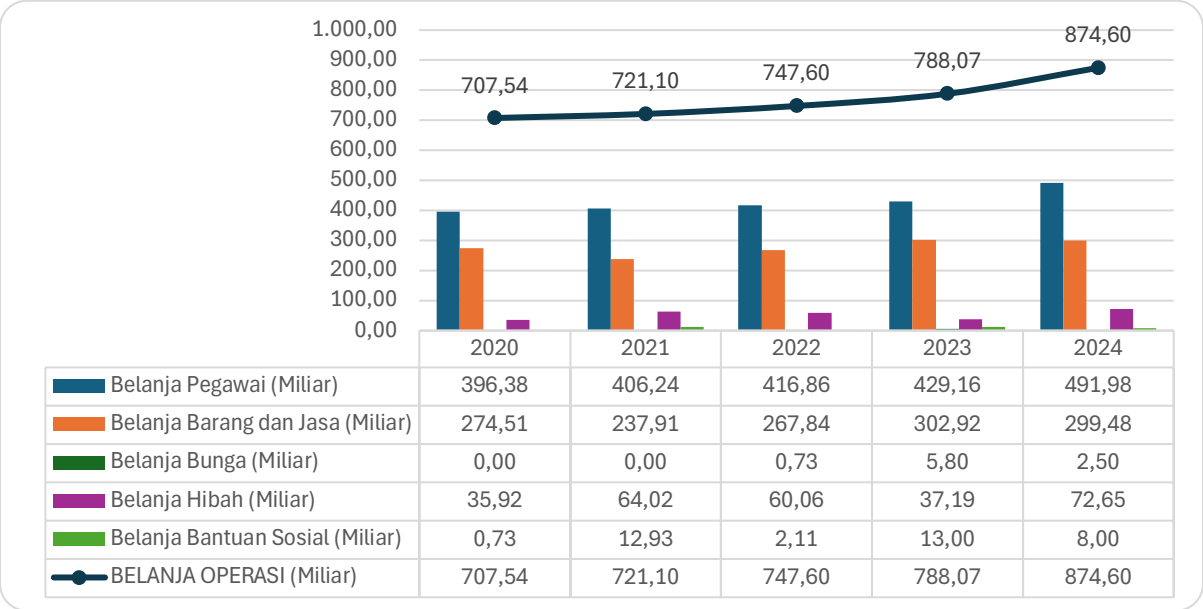

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai (Miliar)	396,38	406,24	416,86	429,16	491,98
Belanja Barang dan Jasa (Miliar)	274,51	237,91	267,84	302,92	299,48
Belanja Bunga (Miliar)	0,00	0,00	0,73	5,80	2,50
Belanja Hibah (Miliar)	35,92	64,02	60,06	37,19	72,65
Belanja Bantuan Sosial (Miliar)	0,73	12,93	2,11	13,00	8,00
BELANJA OPERASI (Miliar)	707,54	721,10	747,60	788,07	874,60

Grafik 2. 48 Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Kenaikan nilai belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai 2020-2024 dipengaruhi oleh berbagai pos belanja yang juga mengalami peningkatan terutama pada tahun 2024. Pada tahun 2024 dominasi komponen belanja baik belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja hibah mengalami peningkatan. Namun, pada pos belanja bantuan sosial dan belanja bunga yang mengalami penurunan. Meskipun demikian

penurunan pada pos belanja bunga dan bantuan sosial tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan belanja pada pos lainnya.

Belanja operasi didominasi oleh komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai mengalami peningkatan di setiap tahunnya, peningkatan ini mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk kemungkinan kenaikan gaji atau peningkatan jumlah pegawai. Sedangkan dominasi dalam belanja barang dan jasa mencerminkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan operasional pemerintah daerah, baik dalam penyediaan layanan publik maupun pengadaan barang untuk mendukung aktivitas pemerintahan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan belanja operasi mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

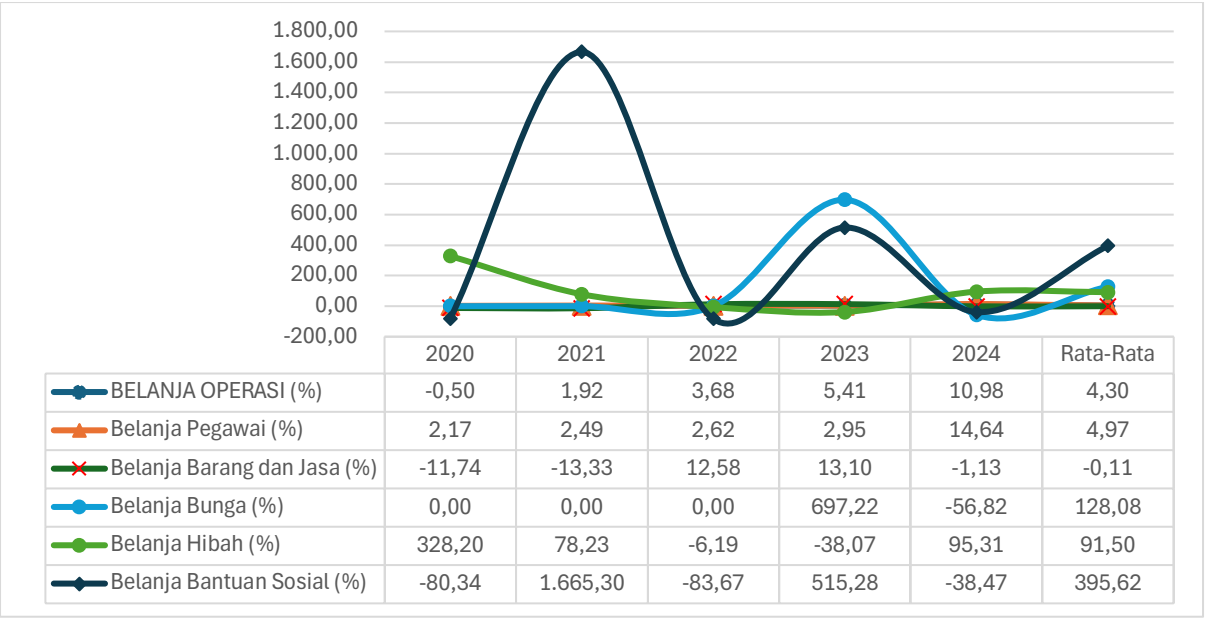

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA OPERASI (%)	-0,50	1,92	3,68	5,41	10,98	4,30
Belanja Pegawai (%)	2,17	2,49	2,62	2,95	14,64	4,97
Belanja Barang dan Jasa (%)	-11,74	-13,33	12,58	13,10	-1,13	-0,11
Belanja Bunga (%)	0,00	0,00	0,00	697,22	-56,82	128,08
Belanja Hibah (%)	328,20	78,23	-6,19	-38,07	95,31	91,50
Belanja Bantuan Sosial (%)	-80,34	1.665,30	-83,67	515,28	-38,47	395,62

Grafik 2. 49 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang belanja operasional mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,30 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada belanja bantuan sosial dengan rata-rata sebesar 395,62 persen. Rata-rata peningkatan terbesar kedua yaitu belanja bunga dengan rata-rata peningkatan tahunan mencapai 128,08 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja operasi dan komponen belanja operasi Kabupaten Manggarai mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tren positif secara umum pada belanja operasi menunjukkan adanya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan, namun fluktuasi pada setiap komponen menunjukkan adanya ketidakpastian dalam kebijakan sosial dan belanja bunga. Perlu analisis lebih lanjut mengenai efektivitas belanja tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

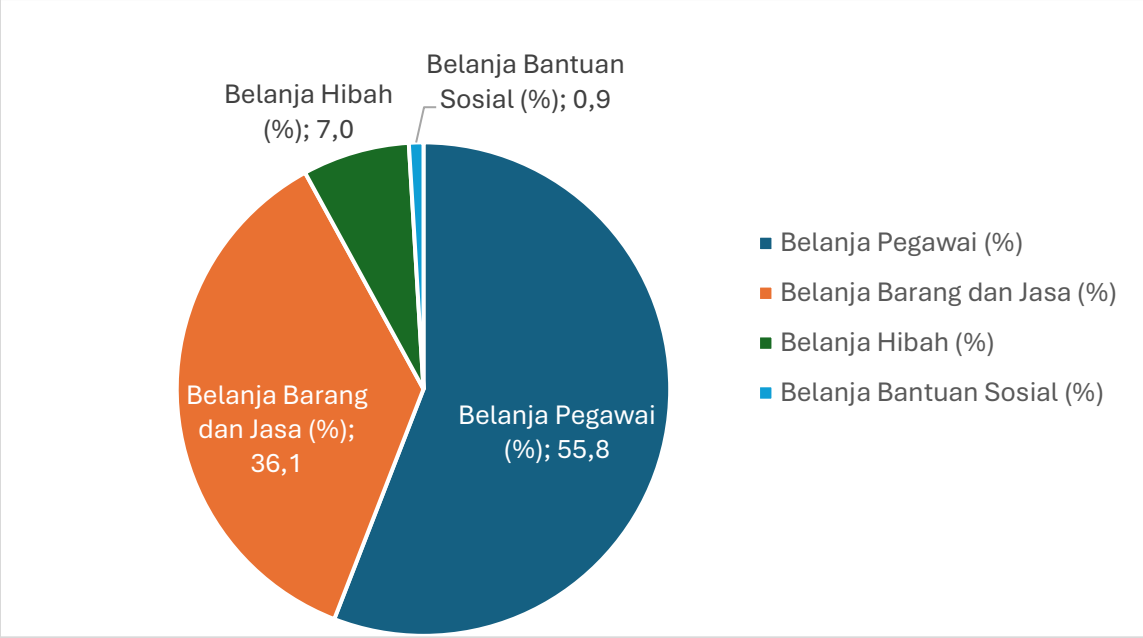

Grafik 2. 50 Rata-rata Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja pegawai merupakan kontributor terbesar dalam komponen belanja operasi. Kontribusi belanja pegawai terhadap belanja operasi mencapai 55,8 persen. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh belanja barang dan jasa dengan kontribusi mencapai 36,1 persen pada lima tahun kebelakang.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan dominasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang mencerminkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah serta operasional daerah. Sementara itu, belanja hibah dan bantuan sosial tetap memiliki porsi yang lebih kecil dalam struktur belanja operasi, mencerminkan prioritas yang lebih terbatas dalam alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut.

b. Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh

pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset Lainnya.

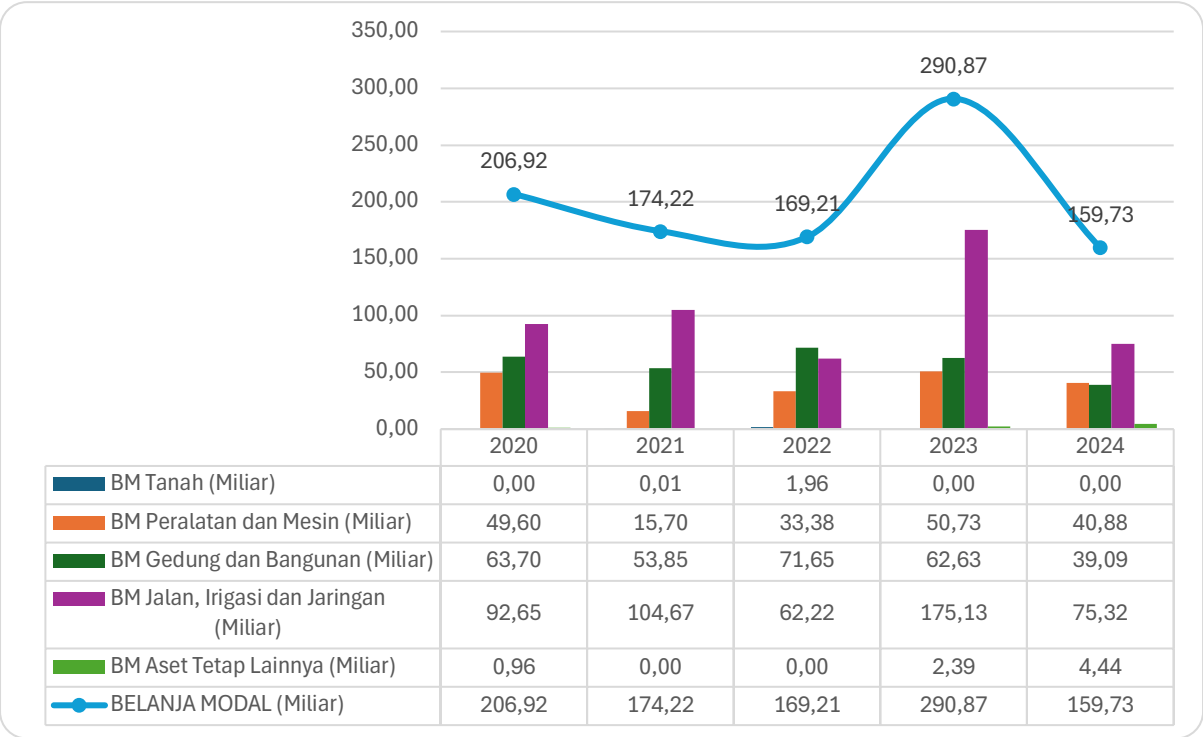

	2020	2021	2022	2023	2024
BM Tanah (Miliar)	0,00	0,01	1,96	0,00	0,00
BM Peralatan dan Mesin (Miliar)	49,60	15,70	33,38	50,73	40,88
BM Gedung dan Bangunan (Miliar)	63,70	53,85	71,65	62,63	39,09
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan (Miliar)	92,65	104,67	62,22	175,13	75,32
BM Aset Tetap Lainnya (Miliar)	0,96	0,00	0,00	2,39	4,44
BELANJA MODAL (Miliar)	206,92	174,22	169,21	290,87	159,73

Grafik 2. 51 Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pos terbesar pada belanja modal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan besaran belanja mencapai Rp175,13 miliar. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp75,32 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan yang kemungkinan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan layanan publik di wilayah Kabupaten Manggarai.

Secara keseluruhan, peningkatan belanja modal dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memperkuat pembangunan infrastruktur serta investasi aset jangka panjang. Meskipun pada tahun 2024 jumlah total belanja modal Kabupaten Manggarai mengalami penurunan. Secara lebih detail beberapa komponen belanja modalpun mengalami fluktuasi, belanja untuk infrastruktur jalan dan jaringan tetap menjadi prioritas utama, mencerminkan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai 2020-2024.

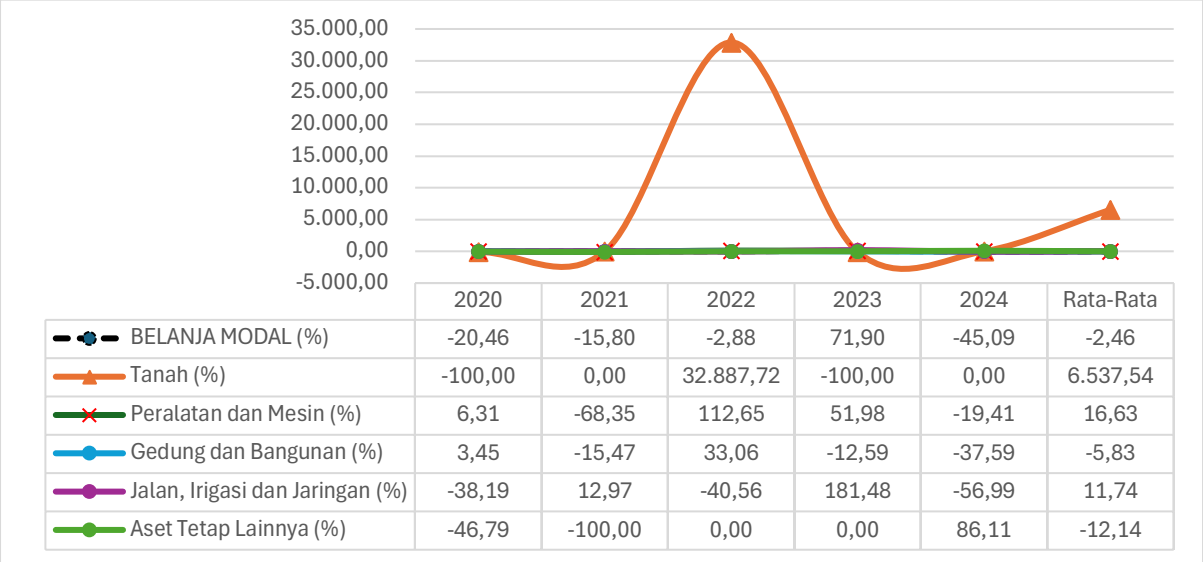

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA MODAL (%)	-20,46	-15,80	-2,88	71,90	-45,09	-2,46
Tanah (%)	-100,00	0,00	32.887,72	-100,00	0,00	6.537,54
Peralatan dan Mesin (%)	6,31	-68,35	112,65	51,98	-19,41	16,63
Gedung dan Bangunan (%)	3,45	-15,47	33,06	-12,59	-37,59	-5,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan (%)	-38,19	12,97	-40,56	181,48	-56,99	11,74
Aset Tetap Lainnya (%)	-46,79	-100,00	0,00	0,00	86,11	-12,14

Grafik 2. 52 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024. Secara rata-rata, belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar -2,46 persen per tahun.

Komponen belanja tanah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dengan lonjakan sebesar 32.887,72 persen, tetapi mengalami kontraksi besar pada

tahun berikutnya dengan pertumbuhan negatif -100 persen. Hal ini menunjukkan adanya investasi besar pada aset tanah di tahun 2022 yang tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Belanja modal Kabupaten Manggarai mengalami dinamika yang cukup signifikan, dengan beberapa komponen mengalami fluktuasi tajam dari tahun ke tahun. Peningkatan yang sangat tinggi pada beberapa tahun tertentu menunjukkan adanya program investasi besar yang bersifat sementara, sementara kontraksi besar pada tahun lainnya mengindikasikan adanya kebijakan penghematan atau perubahan prioritas belanja daerah.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik rata-rata proporsi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

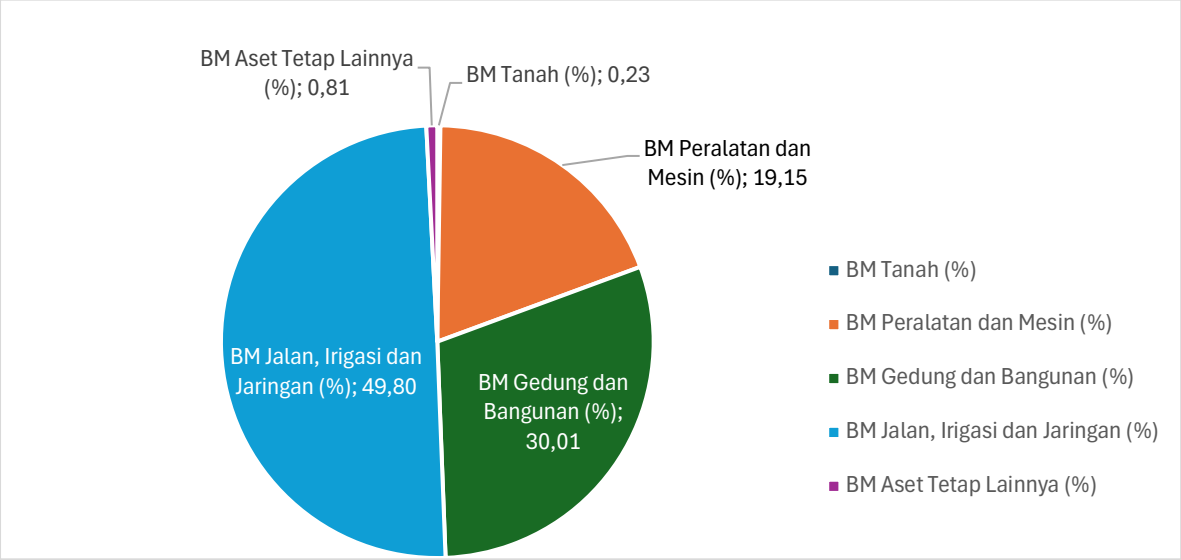

Grafik 2. 53 Rata-rata Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai, terlihat bahwa porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,8 persen per tahun. Sementara komponen terbesar kedua pada komponen belanja modal yaitu belanja modal Gedung dan bangunan dengan kontribusi mencapai 30,01 per tahun.

Sedangkan kontribusi terendah dalam belanja modal yaitu belanja modal asset tetap lainnya dan belanja modal tanah, dengan masing-masing kontribusi mencapai 0,81 persen dan 0,23 persen.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan perhatian utama pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan, yang secara konsisten memiliki kontribusi terbesar dalam belanja modal. Sementara itu, komponen lain seperti gedung dan mesin mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kebutuhan pembangunan daerah.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

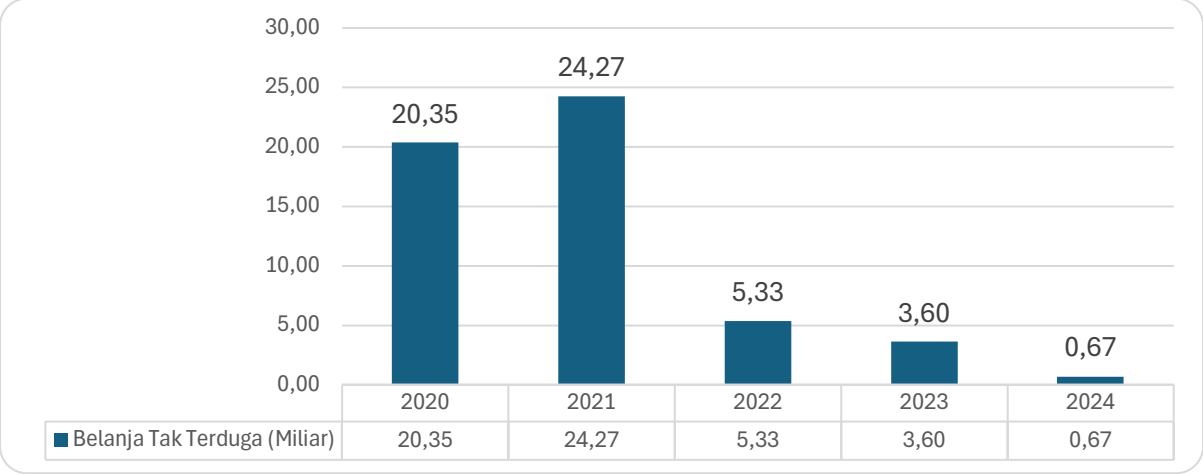

Grafik 2. 54 Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam lima tahun terakhir memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2020 belanja tak terduga Kabupaten Manggarai mencapai Rp20,35 miliar kemudian meningkat menjadi Rp24,27 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh kebutuhan mendesak, seperti kebijakan pengembalian kelebihan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa. yang membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar.

Mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, belanja tidak terduga Kabupaten Manggarai terus mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan darurat atau kejadian tidak terduga yang memerlukan intervensi fiskal mungkin lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa belanja tak terduga sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti kondisi darurat atau bencana, serta kebijakan fiskal daerah dalam mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Oleh karena itu, meskipun belanja tak terduga berfungsi sebagai cadangan keuangan untuk keadaan darurat, perencanaan anggaran yang efektif tetap diperlukan agar anggaran daerah dapat digunakan secara optimal dan tidak menghambat program pembangunan lainnya.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja tak terduga, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen Belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

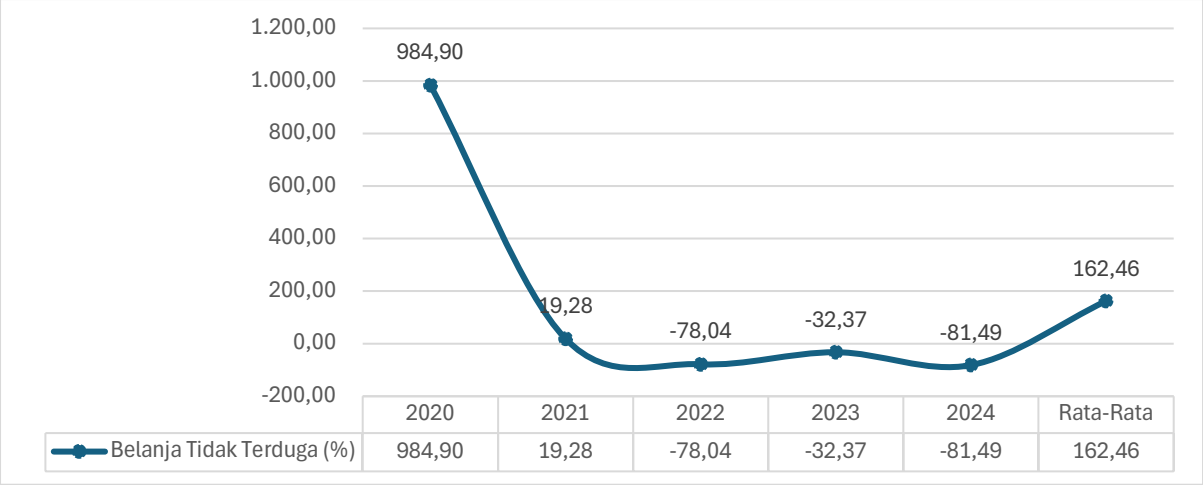

Grafik 2. 55 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga Kabupaten Manggarai dalam lima tahun terakhir mencapai 162,46 persen per tahun. Tahun 2020 merupakan pertumbuhan terbesar belanja tak terduga pemerintah daerah hingga mencapai 984,90 persen. Peningkatan belanja tidak terduga kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebutuhan penanganan darurat, seperti kebijakan pengembalian kelebihan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pembayaran langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Fluktuasi yang ekstrem ini dapat mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan fiskal, seperti kondisi darurat atau perubahan dalam prioritas anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terukur dalam perencanaan belanja tak terduga agar tetap dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak tanpa menyebabkan ketidakstabilan anggaran daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta memperkuat layanan publik di tingkat lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Tren Belanja Transfer dalam lima tahun terakhir menunjukkan bagaimana pola distribusi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan desa serta efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal. Besaran alokasi Belanja Transfer dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

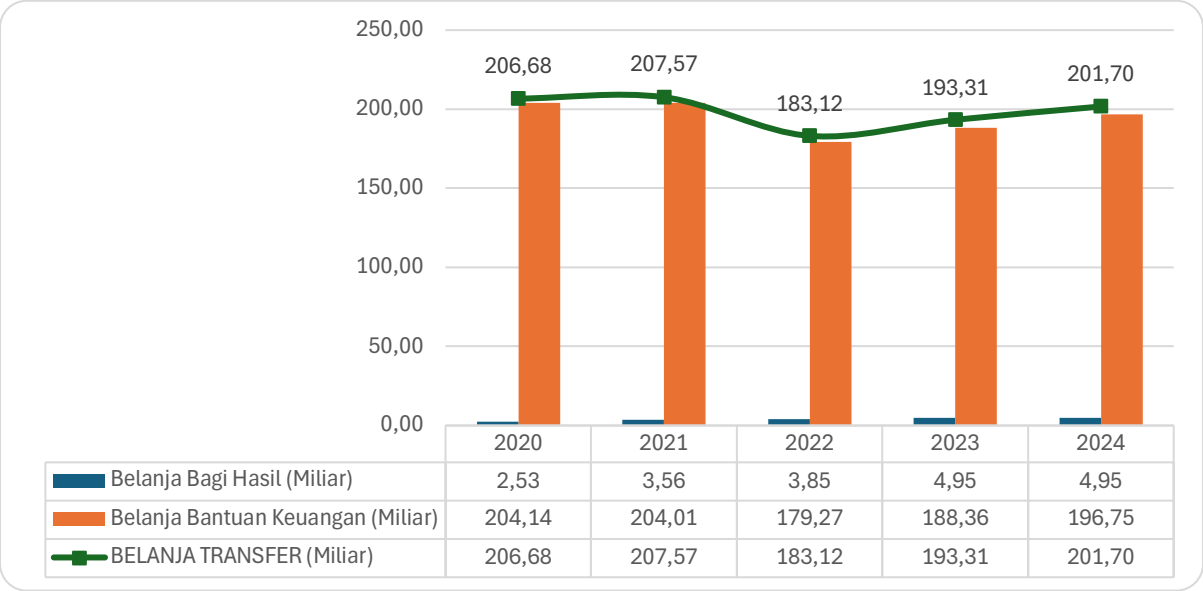

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bagi Hasil (Miliar)	2,53	3,56	3,85	4,95	4,95
Belanja Bantuan Keuangan (Miliar)	204,14	204,01	179,27	188,36	196,75
BELANJA TRANSFER (Miliar)	206,68	207,57	183,12	193,31	201,70

Grafik 2. 56 Realisasi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja bagi hasil terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Belanja bagi hasil terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp4,95 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya dorongan untuk meningkatkan alokasi bagi hasil kepada penerima yang berhak. Sementara itu belanja bantuan keuangan memiliki tren yang lebih fluktuatif. Tahun 2022 merupakan belanja terendah dengan nominal mencapai Rp179,27 miliar, di mana hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp204,01 miliar.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

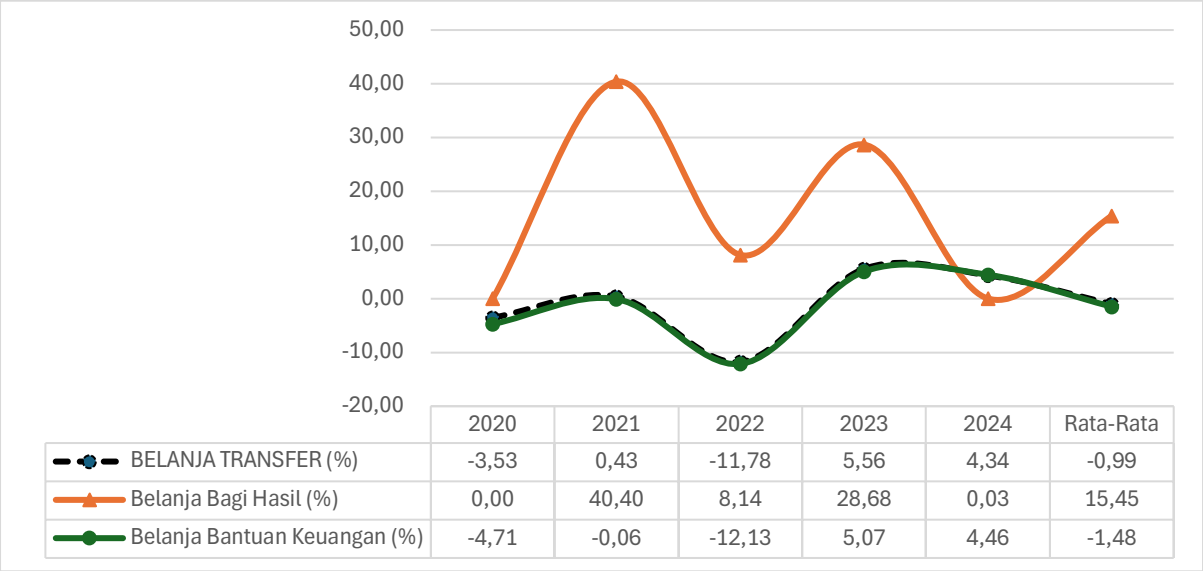

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA TRANSFER (%)	-3,53	0,43	-11,78	5,56	4,34	-0,99
Belanja Bagi Hasil (%)	0,00	40,40	8,14	28,68	0,03	15,45
Belanja Bantuan Keuangan (%)	-4,71	-0,06	-12,13	5,07	4,46	-1,48

Grafik 2. 57 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen Belanja Bagi Hasil menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 40,40 persen. Sementara itu rata-rata pertumbuhan belanja bagi hasil dalam lima tahun terakhir mencapai 15,45 persen. Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan cenderung lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi bantuan keuangan memiliki kecenderungan yang lebih moderat dibandingkan dengan belanja bagi hasil.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja transfer menunjukkan pola yang tidak stabil, terutama karena dinamika pada belanja bagi hasil yang mengalami fluktuasi tajam. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal, alokasi pendapatan daerah, serta penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber dana bagi transfer daerah.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja transfer, berikut disajikan grafik rata-rata proporsi komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024.

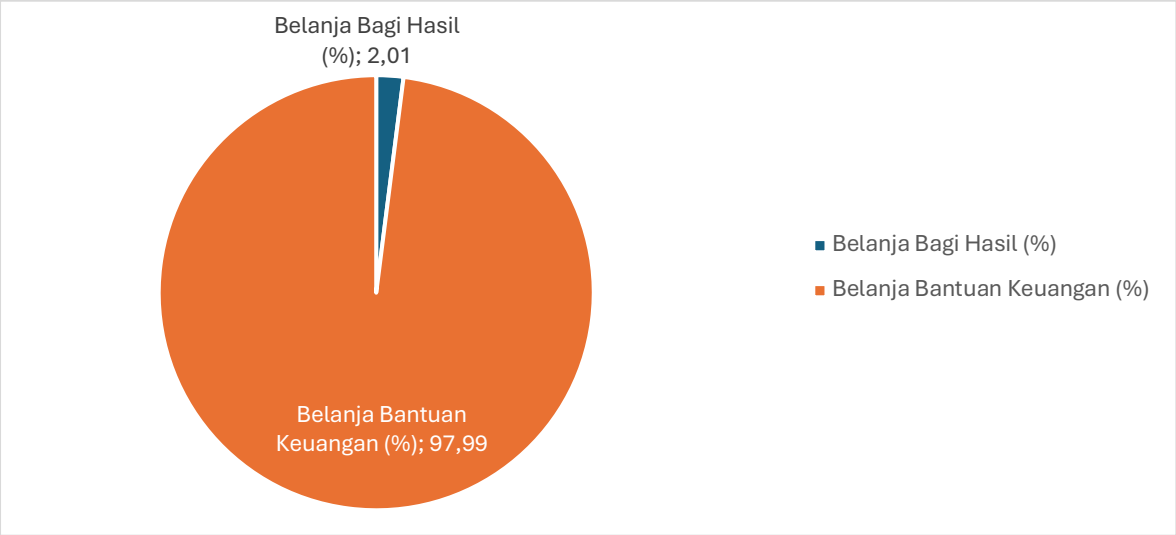

Grafik 2. 58 Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komposisi belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai selama periode 2020 hingga 2024 didominasi oleh belanja bantuan keuangan, dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 97,33 persen dari total belanja transfer. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran transfer dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, lembaga daerah, atau program pembangunan yang bersifat transfer.

Tren ini mencerminkan kebijakan fiskal daerah yang lebih memprioritaskan alokasi bantuan keuangan dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil, yang umumnya terkait dengan pembagian pendapatan daerah kepada entitas lain. Perubahan dalam komposisi belanja transfer ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan strategis pemerintah daerah, kondisi ekonomi, serta kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas di setiap tahunnya.

2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan akibat selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun cakupan pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencaiaran Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 2. 37 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata - rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**60.798.358.974,63**	**62.959.369.719,58**	**74.809.717.603,09**	**144.297.516.200,20**	**27.206.748.573,66**	**28,77**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	60.796.045.974,63	62.959.369.719,58	68.559.000.049,09	40.548.233.754,20	27.206.748.573,66	**9,70**
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah			6.250.717.554,00	103.749.282.446,00		291,96
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.313.000,00					-34,43
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.464.438.953,00**	**10.241.000.000,00**	**19.297.000.000,00**	**57.433.695.652,00**	**58.391.304.347,99**	**59,55**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	52.608.695.652,00	57.391.304.347,99	1,82
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	4.825.000.000,00	1.000.000.000,00	-11,17
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.718.369.719,58**	**55.512.717.603,09**	**86.863.820.548,20**	**(31.184.555.774,33)**	**17,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**63.183.957.854,58**	**68.109.823.779,09**	**40.620.129.382,80**	**27.222.536.988,07**	**21.213.871.112,92**	**-16,91**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Manggarai 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada sisi penerimaan pembiayaan, terdapat fluktuasi yang tajam, terutama pada tahun 2023 yang mencatat angka tertinggi sebesar Rp144,29 miliar, jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini terutama dipengaruhi oleh penerimaan pinjaman daerah yang mencapai Rp103,75 miliar—komponen yang sebelumnya tidak muncul pada tahun 2020 hingga 2021. Namun demikian, pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan drastis menjadi hanya Rp27,21 miliar. Secara rata-rata, penerimaan pembiayaan tumbuh sebesar 28,77 persen per tahun.

Jika ditelusuri lebih dalam, komponen utama penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang juga mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, dari Rp68,56 miliar pada 2022 menjadi Rp27,21 miliar pada 2024. Sementara itu, penerimaan pinjaman daerah hanya muncul pada tahun 2022 dan 2023, dan tidak lagi tercatat pada 2024. Hal ini dapat mencerminkan strategi pengelolaan utang yang lebih konservatif atau penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terjadi pertumbuhan rata-rata tahunan yang cukup tinggi, yakni 59,55 persen. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, terutama karena mulai dilaksanakannya pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, masing-masing sebesar Rp52,61 miliar dan Rp57,39 miliar. Di sisi lain, penyertaan modal pemerintah daerah justru mengalami penurunan tajam, dari Rp19,29 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp1 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -11,17 persen. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran prioritas dalam pembiayaan daerah, dari investasi jangka panjang ke kewajiban pembayaran utang.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,24 persen per tahun. Namun demikian, nilai pembiayaan netto pada tahun 2024 tercatat negatif sebesar Rp31,18 miliar, mencerminkan bahwa pengeluaran

pembiayaan melebihi penerimaan. Dampaknya terlihat pada penurunan SiLPA, yang menurun secara konsisten dari Rp68,10 miliar pada 2021 menjadi Rp21,21 miliar pada 2024, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar -16,91 persen.

Data ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan pembiayaan, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal jangka menengah. Penurunan SiLPA dan tren pembiayaan netto negatif pada tahun terakhir menjadi sinyal penting untuk memperkuat perencanaan pembiayaan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

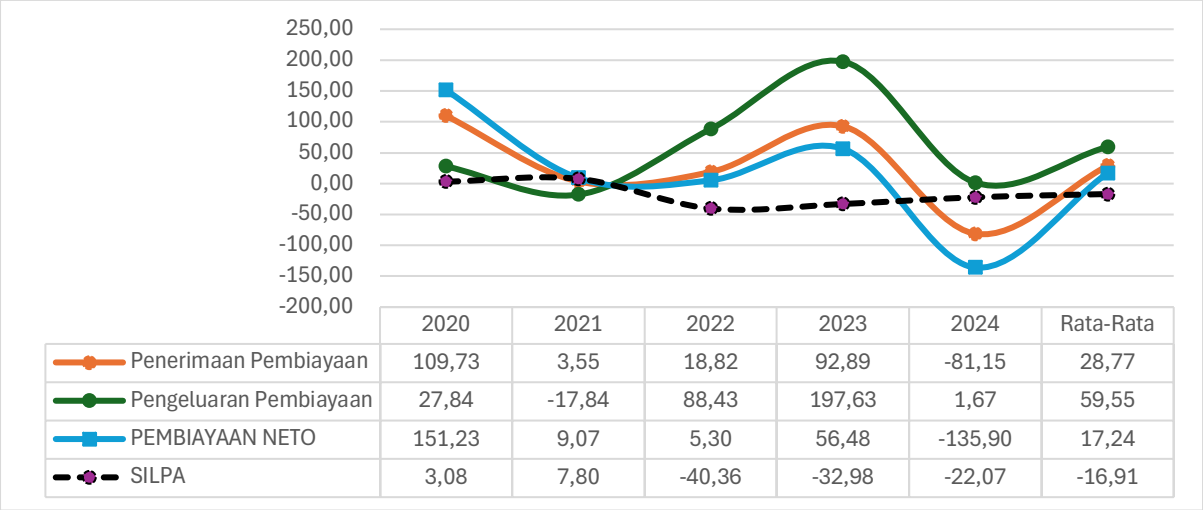

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Penerimaan Pembiayaan	109,73	3,55	18,82	92,89	-81,15	28,77
Pengeluaran Pembiayaan	27,84	-17,84	88,43	197,63	1,67	59,55
PEMBIAYAAN NETO	151,23	9,07	5,30	56,48	-135,90	17,24
SILPA	3,08	7,80	-40,36	-32,98	-22,07	-16,91

Grafik 2. 59 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai dalam periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika fiskal yang mencerminkan tantangan serta penyesuaian kebijakan keuangan daerah. Dari sisi penerimaan pembiayaan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 109,73 persen, yang kemungkinan besar mencerminkan adanya penyerapan SiLPA dari tahun sebelumnya sebagai strategi fiskal untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan pembiayaan mengalami kontraksi yang tajam hingga -81,15 persen. Hal

ini menurunkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan menjadi sebesar 28,77 persen per tahun. Fluktuasi ini mencerminkan ketergantungan penerimaan pembiayaan terhadap faktor-faktor non-reguler, seperti pinjaman dan SiLPA.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pola pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan yang lebih agresif dan tidak stabil. Tahun 2023 menjadi titik tertinggi dengan lonjakan mencapai 197,63 persen, dipicu oleh mulai dilakukannya pembayaran pokok utang daerah. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan menjadi hanya 1,67 persen pada tahun 2024, rata-rata pertumbuhan tahunan pengeluaran pembiayaan tetap tinggi, yakni 59,55 persen. Fenomena ini mengindikasikan peningkatan beban fiskal jangka panjang dan perlunya penguatan tata kelola utang serta kebijakan investasi yang lebih selektif.

Lebih lanjut, pembiayaan netto—selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan—juga memperlihatkan gejolak yang cukup ekstrem. Tahun 2020 mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 151,23 persen, namun diikuti tren penurunan signifikan hingga mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -135,90 persen pada tahun 2024. Penurunan tajam ini menandakan bahwa beban pengeluaran pembiayaan mulai melampaui kapasitas penerimaan, dan mengakibatkan rata-rata pertumbuhan pembiayaan netto hanya sebesar 17,24 persen per tahun. Hal ini memberi sinyal bahwa ruang fiskal untuk mendukung belanja daerah melalui pembiayaan semakin menyempit.

Dampak dari fluktuasi pembiayaan tersebut tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang juga mengalami penurunan pertumbuhan secara konsisten. Setelah mencatat pertumbuhan positif sebesar 7,80 persen pada 2021, SILPA berturut-turut mencatatkan pertumbuhan negatif pada tiga tahun terakhir, dengan titik terendah sebesar -40,36 persen pada 2022. Rata-rata pertumbuhan SiLPA selama lima tahun terakhir berada pada angka negatif, yaitu -16,91 persen, mencerminkan berkurangnya kapasitas fiskal yang tersisa setiap akhir tahun anggaran.

Secara umum, dinamika pertumbuhan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan perlunya kebijakan pembiayaan yang lebih berhati-hati, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas perencanaan pembiayaan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan.

2.2.1.4 Realisasi Neraca Daerah

Neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu daerah meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam satu periode tertentu. Analisis terhadap neraca keuangan penting dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal daerah, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Perkembangan realisasi neraca daerah Kabupaten Manggarai selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**	**2.165.104.735.970,68**	**2.263.092.502.361,11**	**2.296.765.944.510,39**	**2.001.684.987.727,65**	**2.058.948.671.872,87**
1.1	**ASET LANCAR**	**90.933.043.203,40**	**117.578.014.535,54**	**83.517.869.412,03**	**59.608.598.879,21**	**58.563.353.811,97**
	Kas	63.026.385.204,58	68.653.403.849,09	40.761.247.014,80	27.223.992.145,07	21.346.292.419,09
	Piutang	17.727.394.702,31	27.972.888.397,79	26.639.282.044,23	19.933.725.730,34	16.195.405.294,66
	Persediaan	10.179.263.296,51	20.951.722.288,66	16.117.340.353,00	12.450.881.003,80	15.324.552.840,63
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	5.697.103.257,59
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**118.037.844.093,08**	**129.356.568.884,66**	**150.244.258.428,57**	**154.940.907.674,51**	**156.450.628.582,45**
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Panjang Permanen	118.037.844.093,08	129.356.568.884,66	150.244.258.428,57	154.940.907.674,51	156.450.628.582,45
1.3	**ASET TETAP**	**1.950.090.767.181,22**	**2.010.297.172.507,93**	**2.049.123.136.543,76**	**1.692.250.188.868,14**	**1.750.096.233.285,34**
	Tanah	282.110.208.107,67	284.037.308.826,67	285.563.277.967,67	257.651.230.062,67	257.675.756.562,67
	Peralatan dan Mesin	348.531.186.556,00	379.670.834.859,00	418.099.673.430,98	469.626.745.618,31	501.051.753.981,13
	Gedung dan Bangunan	786.568.683.526,15	831.413.633.566,40	898.442.208.508,10	884.048.022.297,51	920.427.550.164,70
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.699.079.575.274,07	1.817.691.651.030,14	1.887.299.041.422,22	2.066.383.520.696,44	2.147.104.890.863,89
	Aset tetap Lainnya	90.656.776.603,00	74.911.395.164,00	78.357.517.723,00	70.597.146.237,00	71.857.448.438,68
	Konstruksi dalam pengerjaan	25.112.499.811,97	16.147.067.299,65	13.341.021.074,82	18.501.597.410,99	18.030.619.030,71
	Akumulasi Penyusutan	(1.281.968.162.697,64)	(1.393.574.718.237,93)	(1.531.979.603.583,03)	(2.074.558.073.454,78)	(2.166.051.785.756,44)
1.4	**ASET LAINNYA**	**6.043.081.492,98**	**5.860.746.432,98**	**13.880.680.126,03**	**15.580.324.062,16**	**15.898.873.124,07**
	Tagihan jangka panjang	158.572.650,00	98.772.650,00	74.081.282,00	218.499.532,00	213.999.532,00
	Aset tak berwujud	794.592.368,00	672.057.308,00	1.205.826.823,00	323.237.148,00	548.736.557,40
	Aset Lain-lain	5.089.916.474,98	5.089.916.474,98	12.600.772.021,03	15.038.587.382,16	15.136.137.034,67
1.5	**PROPERTI INVESTASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.304.968.243,63**	**77.939.583.069,04**
	Tanah	-	-	-	27.912.047.905,00	27.912.047.905,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	66.121.116.688,00	66.121.116.688,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-14.728.196.349,37	-16.093.581.523,96
1.6	**DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	**KEWAJIBAN**	**4.116.848.013,25**	**14.150.529.425,25**	**21.116.053.872,23**	**66.817.773.575,11**	**3.805.907.176,68**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4.116.848.013,25**	**14.150.529.425,25**	**14.865.336.318,23**	**66.817.773.575,11**	**3.805.907.176,68**
	Utang perhitungan pihak ketiga	1.000.000,00	94.403.800,00	141.117.632,00	1.455.157,00	132.421.306,17
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	57.391.304.348,00	-
	Utang belanja	2.925.652.378,25	14.056.125.625,25	7.325.937.665,23	8.543.574.503,11	3.484.752.617,51
	Utang jangka pendek lainnya	1.190.195.635,00	-	7.398.281.021,00	881.439.567,00	188.733.253,00
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**0,00**	**6.250.717.554,00**	**0,00**	**0,00**
	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	6.250.717.554,00	-	-
3	**EKUITAS**	**2.160.987.887.957,43**	**2.248.941.972.935,86**	**2.275.649.890.638,16**	**1.934.867.214.152,54**	**2.055.142.764.696,19**
	Ekuitas	2.160.987.887.957,43	2.248.941.972.935,86	2.275.649.890.638,16	1.934.867.214.152,54	2.055.142.764.696,19
4	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**2.165.104.735.970,68**	**2.263.092.502.361,11**	**2.296.765.944.510,39**	**2.001.684.987.727,65**	**2.058.948.671.872,87**

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai 2020-2024

Dalam periode lima tahun terakhir, struktur neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai memperlihatkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan aset dan kewajiban daerah, serta strategi fiskal yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Total aset daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,165 triliun dan mengalami peningkatan moderat hingga tahun 2022. Namun demikian, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana total aset merosot menjadi Rp2,001 triliun, sebelum kembali meningkat tipis menjadi Rp2,058 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan kemungkinan adanya realokasi atau penyusutan nilai aset yang cukup besar, terutama pada komponen aset tetap.

Aset tetap menjadi komponen dominan dalam struktur kekayaan daerah, dengan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap total aset. Meskipun nilai bruto aset tetap terus meningkat setiap tahun, akumulasi penyusutan juga meningkat tajam, dari Rp1,28 triliun pada 2020 menjadi Rp2,17 triliun pada 2024. Hal ini menandakan perlunya strategi peremajaan dan pemeliharaan aset tetap untuk menjaga nilai ekonomisnya. Komponen lainnya seperti investasi jangka panjang juga menunjukkan tren peningkatan positif dan stabil, mencerminkan orientasi daerah terhadap investasi berjangka guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, aset lancar justru mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp117,57 miliar pada 2021 menjadi Rp58,56 miliar pada 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya kas dan piutang, yang berpotensi memengaruhi likuiditas jangka pendek pemerintah daerah. Di sisi lain, kemunculan aset properti investasi sejak 2023 menjadi indikator positif atas upaya diversifikasi portofolio aset daerah. Properti investasi tersebut senilai lebih dari Rp77 miliar di tahun 2024 dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan jika dikelola secara optimal.

Pada sisi kewajiban, terjadi peningkatan mencolok pada tahun 2023 yang mencapai Rp66,82 miliar, didorong oleh munculnya utang jangka pendek dalam

bentuk bagian lancar dari utang jangka panjang, yakni sebesar Rp57,39 miliar. Kewajiban ini tampaknya berkaitan dengan kewajiban pelunasan pinjaman daerah yang telah jatuh tempo. Namun demikian, pada tahun 2024, kewajiban kembali menurun drastis menjadi hanya Rp3,80 miliar, mengindikasikan adanya pelunasan yang signifikan dan/atau tidak adanya kewajiban baru yang muncul. Kewajiban jangka panjang juga hanya tercatat sekali, yakni pada tahun 2022, sebesar Rp6,25 miliar.

Secara keseluruhan, ekuitas daerah menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023. Dari Rp2,275 triliun pada tahun 2022, ekuitas menurun menjadi Rp1,934 triliun, sebelum kembali meningkat pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya aset tetap dan lancar, serta peningkatan kewajiban pada tahun tersebut.

Dengan memperhatikan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai secara umum cukup sehat, dengan dominasi aset tetap dan investasi jangka panjang yang relatif stabil. Namun, penurunan aset lancar dan peningkatan kewajiban pada tahun-tahun tertentu perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam menjaga likuiditas jangka pendek dan meminimalkan risiko fiskal. Perlu adanya strategi keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan utang, optimalisasi aset investasi, serta perencanaan peremajaan aset tetap untuk mendukung kapasitas fiskal dan pelayanan publik yang berdaya saing.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis Rasio Likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

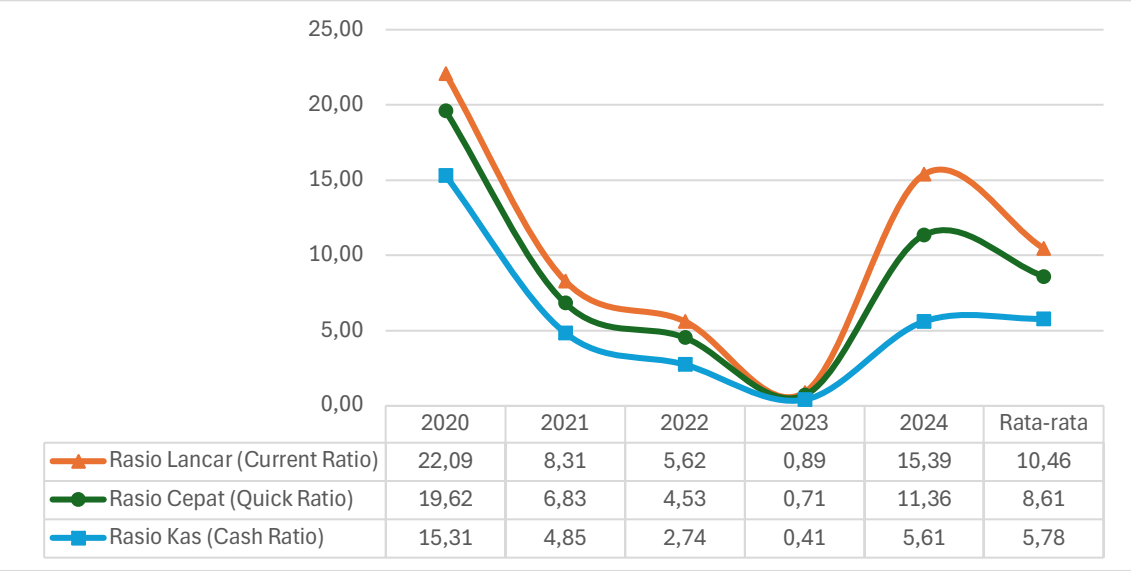

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Lancar (Current Ratio)	22,09	8,31	5,62	0,89	15,39	10,46
Rasio Cepat (Quick Ratio)	19,62	6,83	4,53	0,71	11,36	8,61
Rasio Kas (Cash Ratio)	15,31	4,85	2,74	0,41	5,61	5,78

Grafik 2. 60 Rasio Likuiditas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Manggarai selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, mencerminkan dinamika kemampuan keuangan jangka pendek pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Tiga indikator utama yang digunakan—rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*)—mengindikasikan penurunan kualitas likuiditas yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan fiskal ke depan.

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan

menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rasio lancar, yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancarnya, tercatat sangat tinggi pada tahun 2020 sebesar 22,09. Namun, nilai ini menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai titik terendah sebesar 0,89 pada tahun 2023. Meskipun kembali meningkat pada 2024 menjadi 15,39, rata-rata rasio selama lima tahun berada pada angka 10,46. Penurunan tajam pada tahun 2023 mengindikasikan tekanan likuiditas yang signifikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan kas dan peningkatan kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun tersebut.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rasio cepat, yang mengecualikan persediaan dari aset lancar dan memberikan gambaran yang lebih konservatif terhadap kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, juga menunjukkan tren serupa. Nilainya turun dari 19,62 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,71 pada 2023, kemudian kembali naik menjadi 11,36 di tahun 2024. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun tercatat sebesar 8,61. Pola ini mencerminkan bahwa ketersediaan aset likuid yang benar-benar siap

digunakan untuk menutup kewajiban sangat terbatas pada tahun-tahun tertentu, terutama saat terjadi tekanan fiskal atau penurunan penerimaan.

3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

Rasio kas, yang merupakan indikator paling konservatif karena hanya memperhitungkan kas sebagai aset likuid utama, mencerminkan kondisi yang lebih kritis. Nilainya turun dari 15,31 pada 2020 menjadi hanya 0,41 pada 2023, dengan rata-rata hanya sebesar 5,78 selama lima tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa pada titik terendahnya, pemerintah daerah hanya memiliki sekitar 41 sen kas untuk setiap satu rupiah kewajiban jangka pendek yang harus dibayar—suatu kondisi yang mengindikasikan potensi kesulitan arus kas dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, tren Rasio Likuiditas Kabupaten Manggarai menunjukkan kebutuhan akan perencanaan kas yang lebih cermat dan disiplin fiskal yang lebih kuat, terutama dalam menjaga kestabilan kas daerah untuk mendukung keberlangsungan operasional dan layanan publik. Penurunan tajam pada tahun 2023 di seluruh rasio menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengelolaan aset lancar, mengendalikan kewajiban jangka pendek, serta merancang skema pembiayaan yang lebih terukur agar terhindar dari tekanan likuiditas yang berkelanjutan.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan

seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).

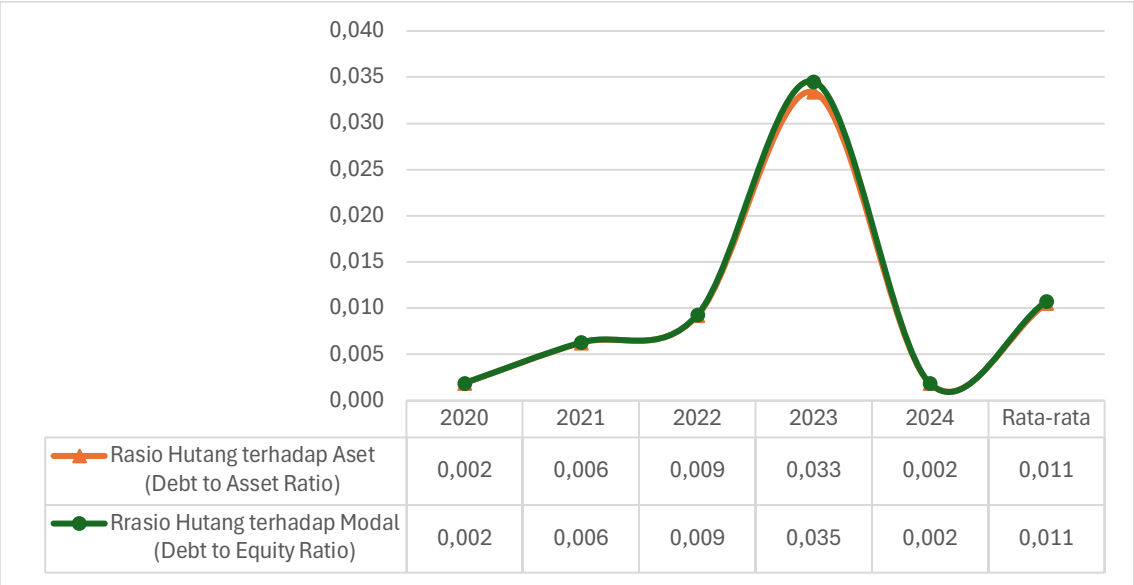

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Hutang terhadap Aset (Debt to Asset Ratio)	0,002	0,006	0,009	0,033	0,002	0,011
Rrasio Hutang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)	0,002	0,006	0,009	0,035	0,002	0,011

Grafik 2. 61 Rasio Solvabilitas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Kondisi solvabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat risiko keuangan jangka panjang yang relatif rendah dan terkendali. Meskipun pada tahun 2023 rasio solvabilitas menunjukkan sedikit peningkatan, kondisi tersebut bersifat sementara dan berhasil dikendalikan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen fiskal daerah dalam merespons beban kewajiban secara adaptif dan hati-hati. Dari perspektif tata kelola keuangan daerah, kinerja ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan integritas neraca keuangannya dalam jangka panjang..

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap

pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Rasio utang terhadap aset, yang menunjukkan seberapa besar total aset yang dibiayai oleh utang, tercatat hanya sebesar 0,002 pada tahun 2020 dan kembali berada di level yang sama pada tahun 2024. Rasio ini sempat meningkat menjadi 0,033 pada tahun 2023 akibat lonjakan kewajiban, terutama dari bagian lancar utang jangka panjang yang berasal dari pelunasan pinjaman daerah. Namun, secara rata-rata selama lima tahun, rasio ini hanya sebesar 0,011. Angka ini berarti bahwa hanya sekitar 1,1% dari total aset yang dibiayai oleh kewajiban, suatu kondisi yang menandakan tingginya kapasitas aset daerah untuk menopang keberlangsungan fiskal tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal.

b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) pun menunjukkan pola serupa, dengan nilai rata-rata yang identik, yakni sebesar 0,011. Artinya, untuk setiap satu rupiah ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai, hanya terdapat sekitar satu sen kewajiban. Hal ini mencerminkan struktur permodalan yang sangat kuat dan konservatif, di mana hampir seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah ditopang oleh modal sendiri tanpa ketergantungan yang berarti terhadap utang jangka panjang.

Secara keseluruhan, tingkat solvabilitas yang rendah dan stabil ini mencerminkan keuangan daerah yang sehat, dengan ketergantungan terhadap

utang yang sangat minimal. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini sambil tetap mendorong investasi pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat, tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal yang telah terjaga dengan baik.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.

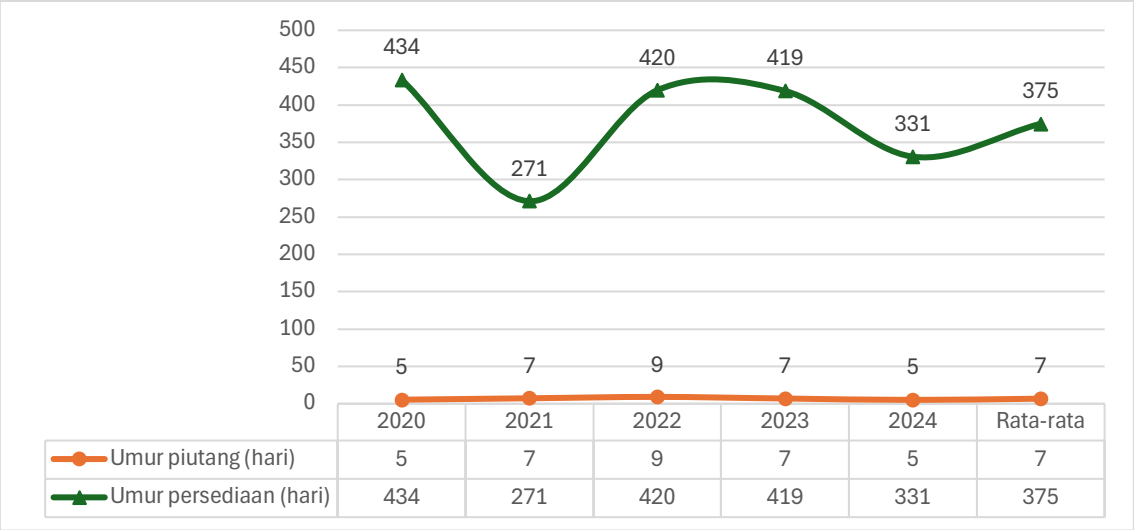

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Umur piutang (hari)	5	7	9	7	5	7
Umur persediaan (hari)	434	271	420	419	331	375

Grafik 2. 62 Rasio Aktivitas Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Selama periode lima tahun terakhir, rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Manggarai memperlihatkan efisiensi yang relatif stabil dalam pengelolaan piutang, namun menunjukkan tantangan dalam pengelolaan persediaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat penyimpanan persediaan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko kehilangan nilai, kerusakan, dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan pencatatan barang daerah, agar siklus pemanfaatan persediaan dapat dipercepat serta lebih selaras dengan kebutuhan riil perangkat daerah.

1) Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Umur piutang, yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang, berada pada kisaran yang sangat efisien, yaitu antara 5 hingga 9 hari. Nilai rata-rata selama lima tahun tercatat hanya 7 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan penagihan piutang oleh pemerintah daerah dilakukan secara cepat dan efektif. Efisiensi ini menjadi salah satu indikator positif dalam manajemen kas, karena semakin pendek umur piutang, semakin cepat kas tersedia untuk mendukung kebutuhan operasional maupun belanja pembangunan.

2) Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Umur persediaan menunjukkan angka yang cukup tinggi dan cenderung tidak stabil, dengan nilai tertinggi mencapai 434 hari pada tahun 2020 dan nilai terendah sebesar 271 hari pada 2021. Rata-rata umur persediaan selama lima tahun berada pada angka 375 hari. Ini berarti, rata-rata persediaan disimpan lebih dari satu tahun sebelum digunakan atau habis terpakai. Tingginya umur persediaan dapat mengindikasikan adanya kelebihan stok, penumpukan barang yang

tidak segera dimanfaatkan, atau kurang optimalnya perencanaan dan distribusi logistik barang milik daerah.

Secara keseluruhan, rasio aktivitas Kabupaten Manggarai menunjukkan pengelolaan piutang yang baik namun masih menyimpan tantangan dalam manajemen persediaan. Untuk memperkuat efisiensi aktivitas keuangan daerah secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu mengintegrasikan sistem informasi barang dan aset secara lebih efektif, serta menerapkan kebijakan pengendalian stok yang adaptif dan berbasis kebutuhan aktual.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah selama periode 2026-2030.

Tabel 2. 39 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.307.352.589,08	140.673.966.762,00	148.749.320.509,00	153.484.701.330,00	159.827.968.445,00	164.152.353.786,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.163.065.281.980,00	1.524.842.672.990,00	1.767.914.551.765,17	1.884.510.748.377,29	2.090.305.213.443,63	2.058.222.345.313,29
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.731.673.688,30	20.202.933.437,00	20.696.992.105,00	21.198.931.947,00	21.306.970.744,00	21.816.139.414,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.289.104.308.257,38**	**1.685.719.573.189,00**	**1.937.360.864.379,17**	**2.059.194.381.654,29**	**2.271.440.152.632,63**	**2.244.190.838.513,29**
2.	**BELANJA**	**0,00**					
2.1	Belanja Operasi	874.604.336.520,03	1.208.407.835.718,00	1.303.475.959.279,17	1.337.778.374.326,29	1.378.866.367.507,63	1.423.320.443.997,29
2.2	Belanja Modal	159.732.790.450,10	397.854.822.247,00	482.089.356.186,00	551.271.361.546,00	556.066.061.966,00	518.739.900.974,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	667.330.200,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	201.701.424.200,00	235.456.915.224,00	258.295.548.914,00	266.644.645.782,00	278.007.723.159,00	282.630.493.542,00
	JUMLAH BELANJA	**1.236.705.881.370,13**	**1.844.719.573.189,00**	**2.047.860.864.379,17**	**2.159.694.381.654,29**	**2.216.940.152.632,63**	**2.229.690.838.513,29**
	SURPLUS/DEFISIT	**52.398.426.887,25**	**(159.000.000.000,00)**	**(110.500.000.000,00)**	**(100.500.000.000,00)**	**54.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	27.206.748.573,66	161.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	58.391.304.347,99	2.000.000.000,00	39.500.000.000,00	49.500.000.000,00	54.500.000.000,00	39.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(31.184.555.774,33)**	**159.000.000.000,00**	**110.500.000.000,00**	**100.500.000.000,00**	**(54.500.000.000,00)**	**(14.500.000.000,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**21.213.871.112,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2024 hingga proyeksi 2030, terlihat adanya dinamika fiskal yang cukup signifikan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan dari Rp1,29 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,24 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini sebagian besar ditopang oleh pendapatan transfer yang masih menjadi komponen dominan, dengan rata-rata kontribusi lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memperlihatkan tren positif, meskipun porsinya relatif kecil, dari Rp109,30 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp164,15 miliar pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan adanya potensi peningkatan kemandirian fiskal, walaupun ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi.

Dari sisi belanja, total belanja daerah meningkat secara konsisten, dari Rp1,24 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,23 triliun pada tahun 2030. Kenaikan terbesar berasal dari belanja operasi yang mendominasi struktur belanja, mencapai lebih dari 60 persen setiap tahunnya. Belanja modal juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada periode 2026–2029, yang dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik. Namun demikian, belanja modal mulai mengalami penurunan pada 2030, yang patut menjadi perhatian agar tidak berdampak pada kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Dari aspek keseimbangan fiskal, terlihat bahwa Kabupaten Manggarai sempat mengalami defisit pada periode 2026–2028, yang kemudian dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Kondisi ini kembali membaik pada 2029 dan 2030 dengan tercatatnya surplus sebesar Rp54,5 miliar dan Rp14,5 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun daerah mampu menjaga stabilitas fiskal, manajemen pembiayaan masih berperan penting dalam menjaga keseimbangan anggaran.

Secara umum, proyeksi keuangan Kabupaten Manggarai menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten serta belanja yang relatif terkendali. Namun, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga strategi peningkatan PAD menjadi keharusan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, keberlanjutan belanja modal juga perlu dijaga agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan adalah berdasarkan analisis tren dari data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang terjadi, serta

kebijakan serta strategi terkait dengan pendapatan daerah di masa mendatang sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut menjadi lebih realistis. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**109.307.352.589,08**	**140.673.966.762,00**	**148.749.320.509,00**	**153.484.701.330,00**	**159.827.968.445,00**	**164.152.353.786,00**
1.1.1	Pajak Daerah	21.270.967.323,00	47.223.319.973,00	48.167.786.371,00	49.131.142.096,00	49.150.409.211,00	49.150.794.552,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.155.915.070,00	13.175.218.573,00	13.926.218.573,00	13.419.218.573,00	13.463.218.573,00	13.507.218.573,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.579.443.275,00	6.344.367.457,00	6.551.254.806,00	6.760.279.902,00	6.760.279.902,00	6.760.279.902,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	77.301.026.921,08	73.931.060.759,00	80.104.060.759,00	84.174.060.759,00	90.454.060.759,00	94.734.060.759,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.163.065.281.980,00**	**1.524.842.672.990,00**	**1.767.914.551.765,17**	**1.884.510.748.377,29**	**2.090.305.213.443,63**	**2.058.222.345.313,29**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.124.743.136.037,00	1.480.249.638.614,00	1.722.429.656.703,17	1.838.116.155.416,29	2.042.982.728.625,63	2.009.953.410.801,29
1.2.2	Transfer Antar – Daerah	38.322.145.943,00	44.593.034.376,00	45.484.895.062,00	46.394.592.961,00	47.322.484.818,00	48.268.934.512,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.731.673.688,30**	**20.202.933.437,00**	**20.696.992.105,00**	**21.198.931.947,00**	**21.306.970.744,00**	**21.816.139.414,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.731.673.688,30	20.202.933.437,00	20.696.992.105,00	21.198.931.947,00	21.306.970.744,00	21.816.139.414,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.289.104.308.257,38**	**1.685.719.573.189,00**	**1.937.360.864.379,17**	**2.059.194.381.654,29**	**2.271.440.152.632,63**	**2.244.190.838.513,29**

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan cukup stabil. Pada tahun 2024, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,29 triliun, dan diperkirakan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp2,24 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya optimisme terhadap kinerja fiskal daerah yang diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dari Rp109,31 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp164,15 miliar pada tahun 2030. Peningkatan PAD ini menjadi indikator penting bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah. Proyeksi PAD menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan dari 2026 hingga 2030 sebesar 3,94 persen. Capaian ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal mandiri guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dalam struktur PAD, terdapat empat komponen utama: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain PAD yang Sah.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar terhadap total PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 55,11 persen dan pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,41 persen per tahun. Kinerja ini mencerminkan optimalisasi berbagai sumber pendapatan sah seperti pendapatan jasa giro, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kecenderungan ini perlu terus diperkuat melalui tata kelola keuangan daerah yang transparan dan inovatif.

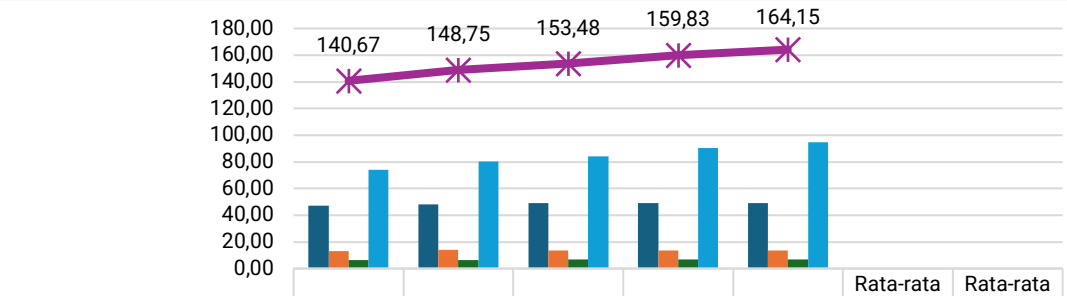

	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	47,22	48,17	49,13	49,15	49,15	31,73	1,01
Retribusi Daerah	13,18	13,93	13,42	13,46	13,51	8,82	0,68
HPKD yang Dipisahkan	6,34	6,55	6,76	6,76	6,76	4,33	1,61
Lain-lain PAD yang Sah	73,93	80,10	84,17	90,45	94,73	55,11	6,41
TOTAL PAD	140,67	148,75	153,48	159,83	164,15	100,00	3,94

Grafik 2. 63 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Pajak Daerah menempati posisi kedua dengan kontribusi rata-rata sebesar 31,73 persen, meskipun pertumbuhan tahunannya relatif rendah, hanya 1,01 persen. Kenaikan nilai pajak daerah yang relatif stagnan dari tahun 2029 ke 2030 menandakan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang lebih agresif. Pemerintah daerah dapat melakukan pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan sistem digitalisasi pajak, dan penguatan regulasi sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja penerimaan dari sektor ini.

Sementara itu, Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 8,82 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan retribusi perlu menjadi perhatian serius, mengingat potensi retribusi sebagai pendapatan langsung dari pelayanan publik. Evaluasi atas kebijakan tarif, jenis layanan yang dikenai retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi krusial dalam meningkatkan kontribusi komponen ini.

Komponen HPKD yang Dipisahkan, meskipun hanya berkontribusi sekitar 4,33 persen terhadap total PAD, mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,61 persen. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan. Profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan BUMD akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi komponen ini.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Manggarai masih sangat bergantung pada pos "lain-lain PAD yang sah", sementara tiga komponen lainnya menunjukkan pertumbuhan yang cenderung lambat. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan basis data dan sistem pemungutan, pembenahan manajemen aset dan BUMD, serta penguatan kapasitas kelembagaan di sektor pendapatan. Transformasi digital dan kolaborasi antarperangkat daerah juga menjadi elemen penting dalam mempercepat reformasi pendapatan asli daerah di masa mendatang.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber dominan dalam struktur pendapatan daerah, mencapai lebih dari 90 persen dari total pendapatan pada setiap tahun proyeksi. Pada tahun 2024, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,16 triliun dan diperkirakan terus meningkat menjadi Rp2,06 triliun pada tahun 2030. Komponen terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, yang mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa. Transfer antar-daerah, meskipun kontribusinya lebih kecil, tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten dan mencerminkan adanya sinergi antarpemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Ketergantungan tinggi pada transfer ini perlu menjadi perhatian strategis, terutama dalam konteks keberlanjutan fiskal dan kemandirian daerah. Dalam jangka panjang, terlalu dominannya peran transfer dapat membatasi fleksibilitas Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis lokal.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat dari Rp16,73 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp21,82 miliar pada tahun 2030. Kategori ini seluruhnya berasal dari pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, tanpa adanya proyeksi dari pendapatan hibah. Meskipun nominalnya relatif kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, pendapatan ini dapat berfungsi sebagai cadangan pendapatan fleksibel untuk mendukung kegiatan strategis tertentu.

Secara umum, struktur pendapatan daerah Kabupaten Manggarai masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, tren peningkatan pada PAD menunjukkan adanya langkah progresif dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu terus mendorong inovasi pendapatan, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah agar kemandirian fiskal dapat lebih diperkuat secara berkelanjutan. Hal ini penting agar daerah memiliki daya lenting yang lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi maupun perubahan kebijakan fiskal nasional

Dalam rangka mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai di masa mendatang, diarahkan pada:

a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui: (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
c. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
d. Mengurangi ketergantungan terhadap transfer, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagai basis fiskal jangka panjang.
e. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
f. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
    1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB;
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen BBNKB;
    3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Opsen Pajak MBLB.

g. Meningkatkan kemampuan SDM dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
h. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
i. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
j. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
k. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai dengan penyertaan modal;
l. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
m. Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya.

Dengan arah kebijakan yang tepat dan pengelolaan fiskal yang cermat, Kabupaten Manggarai memiliki peluang untuk membangun kemandirian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam periode RPJMD 2025–2029.

2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah didasarkan pada analisis tren data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap objek belanja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga

menjadi faktor utama agar hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai memperhitungkan kebutuhan belanja secara proporsional, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pemerintah Kabupaten Manggarai memprioritaskan belanja daerah untuk mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kabupaten Manggarai 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**874.604.336.520,03**	**1.208.407.835.718,00**	**1.303.475.959.279,17**	**1.337.778.374.326,29**	**1.378.866.367.507,63**	**1.423.320.443.997,29**
2.1.1	Belanja Pegawai	491.977.680.014,10	889.241.793.609,00	908.815.899.789,00	930.524.615.618,00	936.460.409.814,00	940.190.537.388,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	299.480.727.145,13	265.992.394.400,00	330.113.737.804,17	337.754.482.770,29	341.648.769.786,63	335.536.793.695,29
2.1.3	Belanja Bunga	2.504.451.584,80	0,00	9.960.937.500,00	7.148.437.500,00	10.335.937.500,00	21.523.437.500,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	72.645.506.776,00	50.105.207.700,00	50.476.259.777,00	54.200.622.785,00	76.229.532.598,00	109.594.123.249,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.995.971.000,00	3.068.440.009,00	4.109.124.409,00	8.150.215.653,00	14.191.717.809,00	16.475.552.165,00
2.2	**Belanja Modal**	**159.732.790.450,10**	**397.854.822.247,00**	**482.089.356.186,00**	**551.271.361.546,00**	**556.066.061.966,00**	**518.739.900.974,00**
2.2.1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Peralatan dan Mesin	40.880.603.233,10	49.218.061.175,00	51.978.607.189,00	74.387.396.215,00	103.978.016.026,00	107.726.916.827,00
2.2.3	Gedung dan Bangunan	39.089.157.311,00	97.724.570.300,00	128.924.570.300,00	149.541.771.943,00	159.794.860.540,00	119.633.203.567,00
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.324.159.743,00	247.860.954.747,00	285.984.942.672,00	308.861.080.966,00	263.488.017.357,00	259.072.028.516,00
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	4.438.870.163,00	2.401.236.025,00	12.401.236.025,00	15.761.112.422,00	24.049.168.043,00	27.073.752.064,00
2.2.6	Aset Lainnya	0,00	650.000.000,00	2.800.000.000,00	2.720.000.000,00	4.756.000.000,00	5.234.000.000,00
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**667.330.200,00**	**3.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	667.330.200,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**201.701.424.200,00**	**235.456.915.224,00**	**258.295.548.914,00**	**266.644.645.782,00**	**278.007.723.159,00**	**282.630.493.542,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.952.787.580,00	6.039.853.855,00	6.209.400.496,00	6.255.036.068,00	6.261.362.778,00	6.265.801.312,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	196.748.636.620,00	229.417.061.369,00	252.086.148.418,00	260.389.609.714,00	271.746.360.381,00	276.364.692.230,00
	JUMLAH BELANJA	**1.236.705.881.370,13**	**1.844.719.573.189,00**	**2.047.860.864.379,17**	**2.159.694.381.654,29**	**2.216.940.152.632,63**	**2.229.690.838.513,29**

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan data proyeksi belanja daerah Kabupaten Manggarai, terjadi peningkatan total belanja yang cukup signifikan dari tahun 2024 hingga 2030. Pada tahun 2024, total belanja daerah berada pada angka sebesar Rp1,24 triliun dan diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp2,23 triliun pada tahun 2030.

Komponen terbesar dari belanja daerah adalah belanja operasi, yang mendominasi alokasi anggaran tahunan. Pada tahun 2024, belanja operasi tercatat sebesar Rp874,60 miliar dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,42 triliun pada tahun 2030. Grafik berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing komponen belanja operasi selama periode 2026-2030.

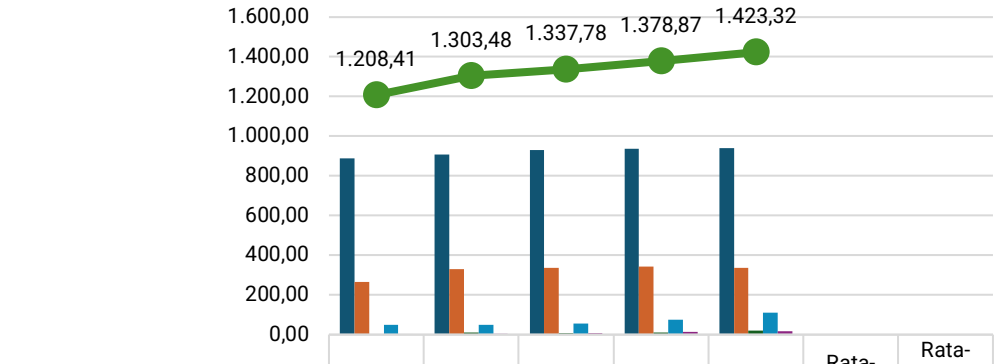

	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Pegawai	889,24	908,82	930,52	936,46	940,19	69,37	1,41
Belanja Barang dan Jasa	265,99	330,11	337,75	341,65	335,54	24,19	6,45
Belanja Bunga	0,00	9,96	7,15	10,34	21,52	0,71	56,15
Belanja Hibah	50,11	50,48	54,20	76,23	109,59	5,06	23,13
Belanja Bantuan Sosial	3,07	4,11	8,15	14,19	16,48	0,67	55,62
TOTAL BELANJA OPERASI	1.208,41	1.303,48	1.337,78	1.378,87	1.423,32	100,00	4,20

Grafik 2. 64 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan komponen belanja operasi Kabupaten Manggarai tahun 2026–2030, terlihat bahwa struktur belanja daerah masih sangat didominasi oleh belanja pegawai. Rata-rata kontribusi belanja pegawai mencapai 69,37 persen terhadap total belanja operasi, dengan

nilai yang terus meningkat dari Rp889,24 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp940,19 miliar pada tahun 2030. Meskipun pertumbuhannya relatif rendah dengan rata-rata 1,41 persen per tahun, dominasi belanja pegawai menunjukkan tingginya porsi belanja rutin yang bersifat mengikat, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi lebih terbatas.

Komponen terbesar kedua adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi 24,19 persen. Pertumbuhan rata-rata komponen ini tercatat sebesar 6,45 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai. Nilai belanja barang dan jasa naik dari Rp265,99 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp335,54 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, peningkatan yang cukup signifikan ini perlu diimbangi dengan efektivitas penggunaan agar tidak menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Komponen belanja hibah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,06 persen, dengan pertumbuhan rata-rata 23,13 persen per tahun. Nilainya meningkat tajam dari Rp50,11 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp109,59 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pembangunan daerah. Namun, peningkatan belanja hibah harus diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat agar tepat sasaran dan benar-benar mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) masih memberikan kontribusi yang sangat kecil, rata-rata hanya 0,67 persen. Meski demikian, pertumbuhannya relatif tinggi, yaitu 55,62 persen per tahun, dengan peningkatan dari Rp3,07 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp16,48 miliar pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan perhatian pemerintah terhadap

perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan, meskipun jumlahnya belum signifikan terhadap total belanja operasi.

Adapun belanja bunga memiliki kontribusi rata-rata 0,71 persen dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 56,15 persen per tahun. Nilainya meningkat tajam dari nihil pada tahun 2026 menjadi Rp21,52 miliar pada tahun 2030. Peningkatan belanja bunga ini perlu dicermati, karena dapat mencerminkan adanya beban kewajiban pembiayaan yang semakin besar, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal di masa depan.

Secara keseluruhan, total belanja operasi Kabupaten Manggarai diproyeksikan meningkat dari Rp1,20 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,42 triliun pada tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 4,20 persen per tahun. Struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja pegawai menunjukkan bahwa belanja operasi sebagian besar terserap untuk kebutuhan rutin, sementara porsi untuk belanja yang lebih produktif seperti hibah, bansos, dan barang/jasa relatif terbatas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan belanja perlu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara belanja rutin dan belanja produktif, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Komponen belanja modal mengalami perubahan dinamis. Dari Rp159,73 miliar pada tahun 2024, belanja ini naik signifikan menjadi Rp518,74 miliar pada tahun 2030. Kenaikan belanja modal, khususnya untuk infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan, menunjukkan arah kebijakan pembangunan fisik yang masih menjadi prioritas daerah. Proporsi belanja modal terhadap total belanja perlu terus dimonitor agar seimbang antara pembangunan fisik dan pelayanan dasar. Grafik berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing komponen belanja modal selama periode 2026-2030.

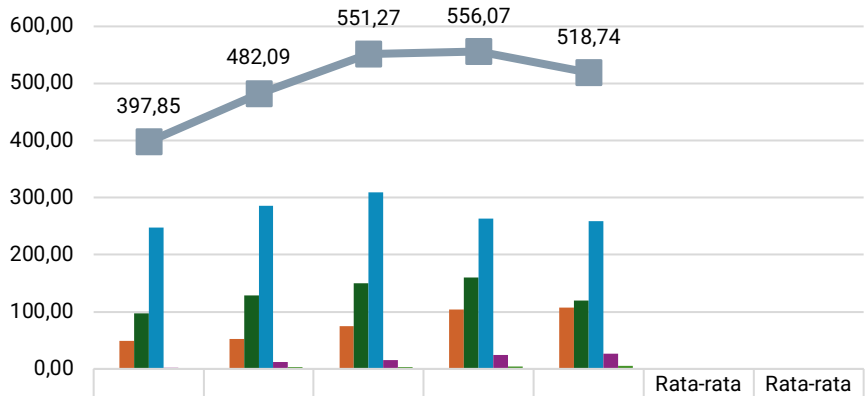

	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	49,22	51,98	74,39	103,98	107,73	15,22	23,03
Gedung dan Bangunan	97,72	128,92	149,54	159,79	119,63	26,05	7,41
Jalan, Irigasi dan Jaringan	247,86	285,98	308,86	263,49	259,07	55,00	1,75
Aset Tetap Lainnya	2,40	12,40	15,76	24,05	27,07	3,12	127,18
Aset Lainnya	0,65	2,80	2,72	4,76	5,23	0,62	103,20
TOTAL BELANJA MODAL	397,85	482,09	551,27	556,07	518,74	100,00	7,42

Grafik 2. 65 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kabupaten Manggarai 2026-2030 (Rp. Miliar)

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan proyeksi belanja modal Kabupaten Manggarai tahun 2026–2030, terlihat adanya arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada penguatan infrastruktur dasar dan penunjang pembangunan daerah. Total belanja modal diproyeksikan meningkat dari Rp159,73 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp518,74 miliar pada tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 7,42 persen per tahun. Struktur belanja modal menunjukkan dominasi pada komponen jalan, irigasi, dan jaringan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55 persen. Porsi terbesar ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperbaiki aksesibilitas masyarakat, serta memperkuat sarana penunjang aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Komponen kedua terbesar adalah gedung dan bangunan dengan kontribusi rata-rata 26,05 persen dan pertumbuhan rata-rata 7,41 persen per tahun. Peningkatan nilai dari Rp97,72 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp119,63

miliar pada tahun 2030 menandakan adanya perhatian serius terhadap pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, termasuk gedung pemerintahan, sekolah, maupun sarana kesehatan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sementara itu, peralatan dan mesin memberikan kontribusi rata-rata 15,22 persen dengan pertumbuhan cukup tinggi, yakni 23,03 persen per tahun. Kenaikan dari Rp49,22 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp107,73 miliar pada tahun 2030 menunjukkan adanya upaya modernisasi sarana kerja pemerintah, baik berupa peralatan teknologi, mesin operasional, maupun kendaraan dinas yang menunjang kinerja pelayanan publik.

Komponen yang relatif kecil tetapi dengan pertumbuhan sangat signifikan adalah aset tetap lainnya dan aset lainnya. Aset tetap lainnya memiliki kontribusi rata-rata 3,12 persen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 127,18 persen per tahun, sedangkan aset lainnya berkontribusi 0,62 persen dengan pertumbuhan 103,20 persen per tahun. Meskipun kontribusinya kecil, lonjakan pertumbuhan ini patut diperhatikan sebagai indikasi adanya diversifikasi belanja modal, termasuk investasi pada aset nonkonvensional yang berpotensi mendukung efisiensi dan inovasi pelayanan.

Adapun untuk belanja modal tanah tidak diproyeksikan adanya alokasi pada periode 2026–2030. Hal ini dapat dimaknai bahwa kebutuhan dasar lahan untuk pembangunan strategis telah relatif terpenuhi, atau pemerintah daerah lebih mengutamakan optimalisasi pemanfaatan aset tanah yang sudah dimiliki.

Secara keseluruhan, struktur belanja modal Kabupaten Manggarai memperlihatkan arah kebijakan yang seimbang antara pembangunan infrastruktur fisik (jalan, irigasi, gedung) dengan modernisasi sarana operasional (peralatan/mesin) serta pengembangan aset lainnya. Dengan dominasi belanja pada sektor yang bersifat produktif, kebijakan ini diharapkan mampu

memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat daya saing Kabupaten Manggarai dalam jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, belanja tak terduga dialokasikan secara konservatif, dengan kisaran antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, mencerminkan kesiapsiagaan terhadap kebutuhan darurat. Belanja transfer, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau entitas lain, terus meningkat secara perlahan dari Rp201,7 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp282,6 miliar pada tahun 2030, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan berbasis kewilayahan dan dukungan terhadap otonomi desa.

Secara umum, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai tampak diarahkan pada penguatan aparatur, peningkatan kapasitas infrastruktur dasar, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Namun demikian, fluktuasi pada beberapa komponen belanja seperti hibah dan modal mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut:

a. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pencapaian hasil guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan

pemerintahan, dengan peningkatan alokasi yang terukur dan diikuti oleh peningkatan kinerja serta kualitas layanan publik.

c. Belanja daerah dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.
d. Belanja honorarium bagi ASN dianggarkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran program. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, serta volume pekerjaan, dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan tahun anggaran berjalan.
f. Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
g. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas, dengan mengutamakan produk dalam negeri. Perencanaan kebutuhan BMD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengusulkan anggaran, baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
i. Optimalisasi skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban APBD.
j. Efisiensi dalam realisasi belanja modal, dengan memastikan proyek yang direncanakan dapat dieksekusi sesuai target waktu dan anggaran.
k. Belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, agar bantuan keuangan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.
l. Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan lebih diperketat, guna menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah beriorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini

Tabel 2. 34 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**27.206.748.573,66**	**161.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000.000,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	27.206.748.573,66	11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**58.391.304.347,99**	**2.000.000.000,00**	**39.500.000.000,00**	**49.500.000.000,00**	**54.500.000.000,00**	**39.500.000.000,00**
3.1.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	57.391.304.347,99	0,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00
3.1.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(31.184.555.774,33)**	**159.000.000.000,00**	**110.500.000.000,00**	**100.500.000.000,00**	**(54.500.000.000,00)**	**(14.500.000.000,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**21.213.871.112,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2026–2030, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada sisi penerimaan, porsi terbesar pada tahun 2026 hingga 2028 didominasi oleh rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar per tahun, yang menunjukkan strategi pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber pembiayaan eksternal untuk mendukung pembangunan. Namun demikian, kontribusi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan menurun dari Rp11 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp0 miliar pada tahun 2030, yang menandakan adanya tren pengetatan ruang fiskal dalam bentuk saldo anggaran yang semakin terbatas. Sementara itu, pada tahun 2030 direncanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp25 miliar, yang dapat dipahami sebagai bentuk antisipasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembiayaan strategis yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Pada sisi pengeluaran, terdapat alokasi cukup besar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang mulai muncul pada tahun 2027 hingga 2030, dengan nilai relatif stabil di angka Rp37,5 miliar per tahun. Hal ini mencerminkan konsekuensi fiskal dari strategi pembiayaan melalui pinjaman daerah, yang menuntut adanya manajemen risiko utang yang cermat. Selain itu, pengeluaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar per tahun konsisten dialokasikan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Terdapat pula pembentukan dana cadangan pada tahun 2029 dan 2030 masing-masing sebesar Rp10 miliar dan Rp15 miliar, yang secara strategis penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dari sisi pembiayaan netto, terlihat adanya surplus cukup besar pada tahun 2026 hingga 2028, yang masing-masing mencapai Rp159 miliar, Rp110,5 miliar, dan Rp100,5 miliar. Namun, pada tahun 2029 dan 2030 kondisi berbalik menjadi defisit dengan nilai negatif Rp54,5 miliar dan Rp14,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir periode proyeksi, beban pembiayaan semakin berat, terutama akibat kewajiban pembayaran utang dan pembentukan dana cadangan. Oleh karena itu, secara akademik dapat ditegaskan bahwa strategi pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan efisiensi penggunaan pinjaman, serta memperkuat sumber penerimaan riil sehingga keberlanjutan fiskal tetap terjaga tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan bagi generasi berikutnya.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan kecenderungan pemanfaatan utang daerah dan dana cadangan sebagai bagian dari strategi fiskal untuk menjembatani kebutuhan belanja yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pendapatan daerah. Penggunaan pembiayaan secara hati-hati, terutama yang berasal dari pinjaman, sangat krusial untuk menjamin kesinambungan fiskal daerah di masa mendatang, serta menjaga kualitas belanja agar tetap produktif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah ke depan diarahkan pada:

a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
b. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;

c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
e. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 35 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.289.104.308.257,38	1.685.719.573.189,00	1.937.360.864.379,17	2.059.194.381.654,29	2.271.440.152.632,63	2.244.190.838.513,29
2	Penerimaan Pembiayaan	27.206.748.573,66	161.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
A	**Total Penerimaan**	**1.316.311.056.831,04**	**1.846.719.573.189,00**	**2.087.360.864.379,17**	**2.209.194.381.654,29**	**2.271.440.152.632,63**	**2.269.190.838.513,29**
B	**Dikurangi**	**58.391.304.347,99**	**2.000.000.000,00**	**39.500.000.000,00**	**49.500.000.000,00**	**54.500.000.000,00**	**39.500.000.000,00**
3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	57.391.304.347,99	0,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
C	**KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (A - B)**	**1.257.919.752.483,05**	**1.844.719.573.189,00**	**2.047.860.864.379,17**	**2.159.694.381.654,29**	**2.216.940.152.632,63**	**2.229.690.838.513,29**
6	PRIORITAS I		814.744.679.361,47	834.514.999.436,14	866.003.924.039,81	894.745.188.497,38	922.370.943.386,18
7	PRIORITAS II		806.223.123.854,53	985.204.094.873,03	1.061.941.284.077,50	1.087.789.741.768,88	1.067.143.143.294,11
8	PRIORITAS III		223.751.769.973,00	228.141.770.070,00	231.749.173.536,98	234.405.222.366,37	240.176.751.833,00

Sumber: BKAD, Bapenda, dan Bapperida Kabupaten Manggarai (Hasil Olah Data 2025)

Berdasarkan data proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026–2030, terlihat bahwa kemampuan fiskal daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, kapasitas riil tercatat sebesar Rp1,84 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,05 triliun pada tahun 2027, dan terus bertumbuh hingga mencapai Rp2,22 triliun pada tahun 2029. Puncaknya terjadi pada tahun 2030 dengan nilai Rp2,23 triliun. Tren ini mencerminkan adanya ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Pada sisi belanja, pemerintah daerah telah mengklasifikasikan penggunaannya ke dalam tiga kelompok prioritas. Prioritas I, yang umumnya mencakup belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang mencakup *mandatory spending*, menempati porsi terbesar dari kapasitas riil. Nilai prioritas ini meningkat dari Rp814,74 miliar pada 2026 menjadi Rp922,37 miliar pada 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Sementara itu, Prioritas II, yang meliputi belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Alokasi peningkatan yang lebih progresif, dari Rp806,22 miliar pada 2026 hingga menembus Rp1,09 triliun pada 2029, meskipun sedikit terkoreksi pada 2030. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati mencakup:

1) Percepatan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan
2) Optimalisasi pemanfaatan BLK (balai latihan kerja) serta menciptakan peluang usaha bagi para kaum muda dan perempuan

3) Pemanfaatan data registasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk program kesejahteraan
4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk promosi dan pemasaran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
5) Pembangunan irigasi untuk pertanian efisien
6) Pembangunan kawasan ekonomi kreatif berbasis digital
7) Pembangunan pusat industri kecil dan menengah berbasis produk lokal
8) Pembangunan sekolah/pembangunan ruang kelas baru, perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana di sekolah
9) Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan rumah sakit rujukan di daerah terpencil
10) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi yang inklusif
11) Pencegahan dan pengendalian penyakit akibat perubahan iklim
12) Penerapan pertanian organik
13) Penerapan SPM bidang pendidikan, kesehatan, sosial
14) Pengembangan desa wisata berbasis komunitas
15) Pengembangan food estate berbasis komunitas di lahan potensial
16) Pengembangan pangan lokal dan diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan
17) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sentra ekonomi lokal
18) Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif
19) Penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan Penguatan konektivitas transportasi dan infrastruktur wilayah
20) Penguatan posyandu dititik pelayanan
21) Peningkatan akses pelayanan kesehatan
22) Penuntasan stunting dan eliminasi malaria

23) Penyediaan afirmasi akses pendidikan untuk daerah kepulauan dan terpencil
24) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang aman dan berkelanjutan
25) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan dengan afirmasi tenaga lokal
26) Perluasan upaya promotif dan preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
27) Program bantuan iuran BPJS kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan
28) Program bantuan sosial berbasis data terpadu
29) Program beasiswa bagi tenaga pendidik PAUD
30) Program inkubasi bisnis untuk wirausaha muda dan UMKM
31) Program pertanian organik berbasis komunitas
32) Revitalisasi sistem drainase kota untuk pencegahan banjir
33) Rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mencakup belanja pelengkap atau mendukung belanja prioritas I dan II, memiliki proporsi paling kecil namun relatif stabil di kisaran Rp223–240 miliar sepanjang periode proyeksi. Konsistensi alokasi untuk prioritas ini penting sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan jangka menengah dan panjang di Kabupaten Manggarai.

Dari sudut pandang indikator fiskal, capaian ini mencerminkan bahwa rasio kapasitas riil terhadap total penerimaan daerah relatif tinggi, menunjukkan

fleksibilitas fiskal yang memadai. Dengan adanya pengurangan kewajiban pembiayaan seperti cicilan utang, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga tingkat kapasitas riil di atas 90 persen dari total penerimaan. Kondisi ini memperlihatkan struktur fiskal Kabupaten Manggarai yang sehat dan berdaya tahan. Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal ini juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, sehingga tidak hanya memenuhi *mandatory spending*, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai berada pada jalur yang positif dalam memperkuat kemandirian fiskal. Namun, konsistensi dalam menjaga kualitas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam setiap program pembangunan menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas riil benar-benar terkonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu strategis Kabupaten Manggarai. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.3.1.1 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2. 36 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1.1.1. Belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah	1.1.1.1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan jenjang PAUD yang holistik dan integratif	1.1.1.1.1. Belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus TK
		1.1.1.1.2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PAUD
		1.1.1.1.3. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi PAUD
	1.1.1.2. Belum meratanya sarana, prasarana dan utilitas sekolah jenjang PAUD, SD, SMP dan sekolah nonformal/ kesetaraan	1.1.1.2.1. Masih terbatasnya Ruang Kelas Baru (RKB)
		1.1.1.2.2. Masih terbatasnya alat praktik dan peraga pendukung pembelajaran
		1.1.1.2.3. Masih banyaknya ruang kelas sekolah yang belum direhabilitasi
	1.1.1.3. Belum meratanya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan	1.1.1.3.1. Belum optimalnya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan
		1.1.1.3.2. Masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi dan berkualifikasi
		1.1.1.3.3. Belum optimalnya proporsi guru PAUD, SD dan SMP dengan kualifikasi S1/D-4
		1.1.1.3.4. Masih rendahnya guru yang tersertifikasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1.1.1.4. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan	1.1.1.4.1. Belum optimalnya pengelolaan dana BOS SD dan SMP
		1.1.1.4.2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD, SD, SMP dan sekolah nonformal/kesetaraan
		1.1.1.4.3. Masih rendahnya jumlah sekolah yang terakreditasi
		1.1.1.4.4. Masih rendahnya kompetensi minat, bakat dan kreativitas siswa
1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1.2.1.Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	1.2.1.1. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular	1.2.1.1.1. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat
		1.2.1.1.2. Masih rendahnya kesadaran akan pola konsumsi dan gaya hidup serta perilaku seksual yang aman
		1.2.1.1.3. Masih adanya agen penyakit baru yang menimbulkan KLB/wabah
		1.2.1.1.4. Masih terjadinya status imunisasi anak yang tidak lengkap
	1.2.1.2. Belum optimalnya penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1.2.1.2.1. Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan kesehatan jiwa
		1.2.1.2.2. Belum optimalnya SDM berbasis kesehatan jiwa dalam penanganan ODGJ
		1.2.1.2.3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penyembuhan pasien ODGJ

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1.2.1.3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1.2.1.3.1. Masih terjadinya komplikasi yang dialami oleh ibu saat kehamilan dan melahirkan serta saat bayi dilahirkan
		1.2.1.3.2. Masih rendahnya keterampilan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
		1.2.1.3.3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait tanda-tanda hamil, bersalin, masa nifas, persalinan, dan tanda-tanda bahaya pada janin dan bayi
		1.2.1.3.4. Masih adanya ibu yang hamil dengan kondisi penyulit atau penyakit penyerta sehingga dengan kehamilan memperberat kondisi kesehatan ibu
		1.2.1.3.5. Kurangnya informasi tentang pelayanan kesehatan ibu hamil
	1.2.1.4. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.2.1.4.1. Belum optimalnya penanganan deteksi dini maupun pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah bagi ibu hamil
		1.2.1.4.2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ASI eksklusif dan kualitas makanan pendamping ASI
		1.2.1.4.3. Belum optimalnya pelayanan terhadap balita gizi buruk
	1.2.1.5. Masih rendahnya kualitas kesehatan	1.2.1.5.1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	lingkungan masyarakat	terhadap pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
		1.2.1.5.2. Masih rendahnya pengawasan pada tempat pengolahan makanan dan fasilitas-fasilitas umum
		1.2.1.5.3. Masih ditemukannya makanan dan minuman kedaluwarsa di kios, sentra jajanan, toko serta distributor makanan dan minuman
		1.2.1.5.4. Masih adanya puskesmas yang belum memiliki sanitarian kit dan tempat pembuangan sampah sesuai standar
		1.2.1.5.5. Belum tersedianya tempat pemusnahan limbah di tingkat kabupaten
	1.2.1.6. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan di fasilitas kesehatan	1.2.1.6.1. Belum memadainya sarana dan prasarana serta alat kesehatan pendukung pelayanan
		1.2.1.6.2. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam penggunaan peralatan medis
		1.2.1.6.3. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter gigi
		1.2.1.6.4. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi
		1.2.1.6.5. Belum optimalnya manajemen dan kerja sama antar puskesmas dan jejaringnya (Tempat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Praktik Mandiri Dokter, klinik dan faskes lainnya)
	1.2.1.7. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan RSUD Ruteng sebagai rumah sakit layanan prioritas KJSU-KIA (Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak)	1.2.1.7.1. Masih tingginya permintaan pelayanan medis
		1.2.1.7.2. Belum memadainya alat kesehatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan
		1.2.1.7.3. Masih terbatasnya jumlah SDM dan jenis layanan spesialistik
1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1. Belum optimalnya kualitas infrastruktur daerah	1.3.1.1. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	1.3.1.1.1. Belum memadainya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pengendali bencana banjir dan abrasi
		1.3.1.1.2. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer pada Daerah Irigasi
	1.3.1.2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.3.1.2.1. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan SPAM
		1.3.1.2.2. Masih terbatasnya pembangunan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan
	1.3.1.3. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	1.3.1.3.1. Masih rendahnya cakupan area pelayanan sampah
		1.3.1.3.2. Belum optimalnya pembangunan dan penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		1.3.1.3.3. Masih rendahnya kontribusi masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terhadap pengelolaan sampah
	1.3.1.4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1.3.1.4.1. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai standar
		1.3.1.4.2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga
	1.3.1.5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1.3.1.5.1. Belum optimalnya rehabilitasi, pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		1.3.1.5.2. Masih terjadinya penumpukan sampah di saluran drainase
	1.3.1.6. Belum optimalnya pengembangan permukiman	1.3.1.6.1. Belum otimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
	1.3.1.7. Belum optimalnya penataan bangunan gedung	1.3.1.7.1. Masih rendahnya penyelenggaraan bangunan gedung
		1.3.1.7.2. Masih rendahnya pengawasan atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	1.3.1.8. Belum optimalnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	1.3.1.8.1. Masih terbatasnya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin jalan
		1.3.1.8.2. Masih terbatasnya pemeliharaan rutin dan pembangunan jembatan
		1.3.1.8.3. Masih rendahnya pengawasan pada

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
	1.3.1.9. Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi	1.3.1.9.1. Masih terbatasnya jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi
		1.3.1.9.2. Masih rendahnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
	1.3.1.10. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	1.3.1.10.1. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		1.3.1.10.2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
		1.3.1.10.3. Masih rendahnya pengawasan atas kesesuaian pemanfaatan ruang daerah
1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.4.1. Belum optimalnya penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) layak huni	1.4.1.1. Belum optimalnya pembangunan perumahan	1.4.1.1.1. Masih rendahnya kualitas pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana
		1.4.1.1.2. Belum tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
	1.4.1.2. Belum optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	1.4.1.2.1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan bidang PKP
		1.4.1.2.2. Belum optimalnya realisasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		1.4.1.2.3. Belum optimalnya pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh maupun RTLH
		1.4.1.2.4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas lingkungan PKP
		1.4.1.2.5. Masih rendahnya pengawasan atas kualitas kawasan permukiman
	1.4.1.3. Belum optimalnya penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	1.4.1.3.1. Masih rendahnya realisasi rumah tangga yang teraliri listrik
		1.4.1.3.2. Masih rendahnya realisasi kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum
		1.4.1.3.3. Masih terbatasnya pemeliharaan rutin PSU PKP
1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.5.1. Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	1.5.1.1. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan	1.5.1.1.1. Masih lemahnya pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
umum serta perlindungan masyarakat	Peraturan Kepala Daerah	1.5.1.1.2. Masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi Perda dan Perbup
		1.5.1.1.3. Belum tegasnya pemberian sanksi bagi pelanggar Perda dan Perbup, masih melalui pendekatan represif non justice/represif non yustisial (tidak sampai proses peradilan)
		1.5.1.1.4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan Perda dan Perbup
		1.5.1.1.5. Belum memadainya kapasitas aparatur Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perbup
		1.5.1.1.6. Masih terbatasnya personel, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban dan patroli rutin
	1.5.1.2. Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran	1.5.1.2.1. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran
		1.5.1.2.2. Belum memadainya kapasitas aparatur pemadam kebakaran
		1.5.1.2.3. Masih terbatasnya personel, sarana dan prasarana dalam pencegahan, penanggulangan, dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penyelamatan kebakaran
1.5.2. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem dasar penanggulangan bencana (pra bencana, bencana, dan pasca bencana)	1.5.2.1. Masih tingginya tingkat kejadian per jenis ancaman bencana	1.5.2.1.1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi, ancaman, dan dampak bencana
		1.5.2.1.2. Masih kurangnya penyebarluasan informasi tentang potensi, ancaman, dan dampak bencana
		1.5.2.1.3. Masih terbatasnya sistem peringatan dini di daerah rawan bencana
		1.5.2.1.4. Masih kurangnya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		1.5.2.1.5. Masih terbatasnya penyediaan sarana prasarana serta logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		1.5.2.1.6. Masih kurangnya kajian data dan informasi serta upaya penanganan darurat pada saat kejadian
		1.5.2.1.7. Belum memadainya kapasitas aparatur dalam perhitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana
		1.5.2.1.8. Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana
1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.6.1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.6.1.1. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS dan PSKS	1.6.1.1.1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan sosial
		1.6.1.1.2. Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS
		1.6.1.1.3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat maupun lembaga masyarakat serta aparat desa dalam proses pendataan
	1.6.1.2. Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial	1.6.1.2.1. Belum memadainya kapasitas SDM pekerja sosial
		1.6.1.2.2. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
2.1.1. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja	2.1.1.1. Masih kurangnya tingkat kesempatan kerja	2.1.1.1.1. Masih terjadinya ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		2.1.1.1.2. Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*
		2.1.1.1.3. Masih rendahnya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		2.1.1.1.4. Belum tersedianya informasi tentang kebutuhan tenaga kerja
	2.1.1.2. Belum optimalnya pencegahan dan	2.1.1.2.1. Masih rendahnya partisipasi perusahaan dan pekerja terhadap

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penyelesaian perselisihan hubungan industrial	pelaksanaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
		2.1.1.2.2. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan
		2.1.1.2.3. Masih rendahnya pemahaman perusahaan dan pekerja terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan sosial kesehatan
2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.2.1. Masih rendahnya keberdayaan perempuan dan anak	2.2.1.1. Belum optimalnya peran perempuan dalam politik	2.2.1.1.1. Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		2.2.1.1.2. Rendahnya minat perempuan dalam politik
		2.2.1.1.3. Belum optimalnya pengarusutamaan gender
	2.2.1.2. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	2.2.1.2.1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		2.2.1.2.2. Belum optimalnya pendampingan terhadap perempuan dan anak
		2.2.1.2.3. Belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
		2.2.1.2.4. Belum optimalnya penyelenggaraan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ramah perempuan dan peduli anak
2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
2.3.1. Masih rendahnya ketersediaan pangan	2.3.1.1. Belum optimalnya ketersediaan pangan, potensi manfaat pangan dan keterjangkauan pangan	2.3.1.1.1. Masih rendahnya produksi pangan
		2.3.1.1.2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal
		2.3.1.1.3. Masih adanya daerah rentan pangan
		2.3.1.1.4. Belum optimalnya diversifikasi
2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
2.4.1. Belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.4.1.1. Belum optimalnya penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	2.4.1.1.1. Masih terjadinya saling klaim kepemilikan tanah ulayat maupun tanah kosong
		2.4.1.1.2. Belum adanya data kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat
		2.4.1.1.3. Masih terbatasnya regulasi dalam penyelesaian sengketa tanah
2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
2.5.1. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	2.5.1.1. Belum optimalnya kualitas air	2.5.1.1.1. Masih terjadinya pencemaran air karena pembuangan limbah/ sampah domestik
		2.5.1.1.2. Masih tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian
		2.5.1.1.3. Masih rendahnya pengolahan limbah oleh pelaku usaha
		2.5.1.1.4. Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2.5.1.1.5. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan limbah
		2.5.1.1.6. Belum optimalnya konservasi badan air dan ekosistemnya
		2.5.1.1.7. Masih terbatasnya peningkatan kapasitas pengawas lingkungan hidup
		2.5.1.1.8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
		2.5.1.1.9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
	2.5.1.2. Makin menurunnya kualitas udara	2.5.1.2.1. Makin meningkatnya sumber emisi dan/atau sumber gangguan
		2.5.1.2.2. Belum adanya regulasi terkait pengendalian pencemaran udara
		2.5.1.2.3. Belum optimalnya pengelolaan pencemaran udara oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan
		2.5.1.2.4. Belum optimalnya penggunaan alat uji kualitas udara
	2.5.1.3. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan	2.5.1.3.1. Belum adanya regulasi terkait RTH
		2.5.1.3.2. Belum optimalnya pengelolaan RTH
		2.5.1.3.3. Belum optimalnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
		2.5.1.3.4. Masih terjadinya kegiatan alih fungsi lahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2.5.1.4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2.5.1.4.1. Belum terlaksananya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
		2.5.1.4.2. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
		2.5.1.4.3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan serta pengelolaan sampah
		2.5.1.4.4. Belum adanya proses 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah
		2.5.1.4.5. Belum adanya penanganan sampah berbasis komunitas (bank sampah)
		2.5.1.4.6. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan B3 dan limbah B3
		2.5.1.4.7. Belum tersedianya insinerator untuk pengelolaan limbah B3
2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.6.1. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	2.6.1.1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	2.6.1.1.1. Masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat
		2.6.1.1.2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
		2.6.1.1.3. Masih terbatasnya kualitas SDM operator SIAK
		2.6.1.1.4. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		2.6.1.1.5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.7.1. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	2.7.1.1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	2.7.1.1.1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah desa
		2.7.1.1.2. Belum optimalnya sosialisasi regulasi/peraturan teknis tentang penataan desa
		2.7.1.1.3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan sulitnya akses internet
		2.7.1.1.4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa
		2.7.1.1.5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa
		2.7.1.1.6. Belum optimalnya pengelolaan potensi desa
	2.7.1.2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	2.7.1.2.1. Belum memadainya pengetahuan kader maupun sarana prasarana posyandu
		2.7.1.2.2. Masih rendahnya pemahaman akan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		fungsi dan kehadiran lembaga adat di desa
		2.7.1.2.3. Belum optimalnya kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		2.7.1.2.4. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.1. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk serta pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)	2.8.1.1. Belum optimalnya pelayanan KB	2.8.1.1.1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB
		2.8.1.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
		2.8.1.1.3. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi KB kepada bapak-bapak dan remaja putra
		2.8.1.1.4. Masih terjadinya keterlambatan penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
	2.8.1.2. Masih tingginya angka prevalensi stunting dan bayi gizi buruk	2.8.1.2.1. Masih rendahnya kesadaran ibu-ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan
		2.8.1.2.2. Masih tingginya angka ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
		2.8.1.2.3. Masih buruknya sanitasi masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2.8.1.2.4. Masih terjadinya kekeliruan atas pola asuh anak
2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
2.9.1. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan	2.9.1.1. Belum optimalnya sistem transportasi	2.9.1.1.1. Belum tersedianya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)
		2.9.1.1.2. Masih rendahnya kualitas manajemen transportasi
		2.9.1.1.3. Belum optimalnya penataan jalur jalan
		2.9.1.1.4. Belum optimalnya penataan trayek kendaraan
		2.9.1.1.5. Masih kurangnya kualitas manajemen rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	2.9.1.2. Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	2.9.1.2.1. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
		2.9.1.2.2. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan lahan parkir
		2.9.1.2.3. Makin berkurangnya kapasitas jalan akibat pemakaian ruang parkir di tepi jalan
		2.9.1.2.4. Masih terbatasnya pemeliharaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan
		2.9.1.2.5. Masih kurangnya ketersediaan angkutan massal (moda transportasi umum)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2.9.1.2.6. Makin meningkatnya pertumbuhan transportasi ojek dan travel yang belum memiliki izin operasi
		2.9.1.2.7. Belum optimalnya pemanfaatan terminal
		2.9.1.2.8. Belum optimalnya pelayanan kelaikan angkutan jalan
		2.9.1.2.9. Masih kurangnya koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait
		2.9.1.2.10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan dalam menggunakan moda transportasi
		2.9.1.2.11. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
		2.9.1.2.12. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi
		2.9.1.2.13. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta pengemudi kendaraan akan keselamatan dan keamanan transportasi
2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
2.10.1. Masih terbatasnya akses informasi publik	2.10.1.1. Belum optimalnya layanan informasi publik	2.10.1.1.1. Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah
		2.10.1.1.2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2.10.1.1.3. Belum maksimalnya jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Suara Manggarai
		2.10.1.1.4. Belum optimalnya pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
		2.10.1.1.5. Belum maksimalnya pengelolaan layanan pengaduan masyarakat
		2.10.1.1.6. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika
		2.10.1.1.7. Belum maksimalnya pengelolaan PPID Kabupaten Manggarai
2.10.2. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.10.2.1. Belum optimalnya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.10.2.1.1. Belum tersedianya data center (pusat data) yang terintegrasi
		2.10.2.1.2. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
		2.10.2.1.3. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi
		2.10.2.1.4. Belum optimalnya pelaksanaan program *smart city*
		2.10.2.1.5. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang menggunakan jaringan internet secara mandiri
		2.10.2.1.6. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM pengelola TIK

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2.10.2.1.7. Masih terbatasnya infrastruktur TIK
2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.11.1. Belum optimalnya kontribusi koperasi serta Usaha Kecil dan	2.11.1.1. Masih rendahnya kapasitas manajerial koperasi	2.11.1.1.1. Masih rendahnya kapasitas SDM pengurus atau pengelola koperasi
		2.11.1.1.2. Belum optimalnya pendampingan koperasi secara berkesinambungan
		2.11.1.1.3. Masih terbatasnya kapasitas permodalan koperasi
2.11.2. Menengah (UKM) terhadap perekonomian	2.11.2.1. Masih rendahnya omzet pelaku UKM	2.11.2.1.1. Masih terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pokok maupun biaya produksi yang diikuti kenaikan harga jual
		2.11.2.1.2. Masih rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dan terampil di bidang manajemen usaha
		2.11.2.1.3. Belum optimalnya pendataan dan keterbukaan pelaku usaha atas omzet produk
		2.11.2.1.4. Masih terbatasnya potensi pasar dan kapasitas permodalan UKM
2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
2.12.1. Masih rendahnya realisasi nilai investasi	2.12.1.1. Masih kurangnya minat investor untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2.12.1.1.1. Belum tersedianya data potensi investasi untuk ditawarkan kepada investor
		2.12.1.1.2. Belum optimalnya promosi potensi investasi daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dan Penanaman Modal Asing (PMA)	2.12.1.1.3. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
	2.12.1.2. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	2.12.1.2.1. Belum tersedianya sistem perizinan dan non perizinan yang baku, integratif dan komprehensif
		2.12.1.2.2. Belum optimalnya implementasi Perizinan Berusaha (PB) secara digital
2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
2.13.1. Belum optimalnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	2.13.1.1. Belum optimalnya peran dan dukungan terhadap organisasi kepemudaan	2.13.1.1.1. Masih terbatasnya sosialisasi tentang organisasi kepemudaan
		2.13.1.1.2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
	2.13.1.2. Belum optimalnya pengelolaan bidang keolahragaan	2.13.1.2.1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan
		2.13.1.2.2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
		2.13.1.2.3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
		2.13.1.2.4. Masih rendahnya sertifikasi dan kompetensi pelatih
2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.14.1. Belum optimalnya kualitas statistik daerah	2.14.1.1. Belum optimalnya integrasi *database* daerah	2.14.1.1.1. Belum optimalnya pemetaan, identifikasi, pemenuhan data, dan validasi
		2.14.1.1.2. Belum optimalnya sinergitas forum data/informasi statistik sektoral
		2.14.1.1.3. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam pemenuhan data statistik sektoral
2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
2.15.1. Belum optimalnya layanan persandian	2.15.1.1. Belum optimalnya prosedur penggunaan persandian	2.15.1.1.1. Belum memadainya SDM bidang persandian
		2.15.1.1.2. Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang persandian
2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
2.16.1. Belum optimalnya pelestarian Manggarai sebagai pusat kebudayaan dan religi	2.16.1.1. Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan	2.16.1.1.1. Belum memadainya penelitian mengenai potensi/perkembangan budaya
		2.16.1.1.2. Belum optimalnya perencanaan pelestarian budaya
		2.16.1.1.3. Belum optimalnya perlindungan budaya
		2.16.1.1.4. Belum optimalnya pemeliharaan situs-situs budaya
		2.16.1.1.5. Belum memadainya pemanfaatan budaya
		2.16.1.1.6. Belum optimalnya pengawasan berbagai jenis budaya
2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
2.17.1. Masih rendahnya	2.17.1.1. Belum optimalnya	2.17.1.1.1. Belum adanya fasilitas penunjang layanan perpustakaan *online*

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
budaya baca masyarakat	cakupan layanan perpustakaan	2.17.1.1.2. Belum optimalnya pembinaan perpustakaan
		2.17.1.1.3. Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling
		2.17.1.1.4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
		2.17.1.1.5. Masih terbatasnya fungsi perpustakaan
		2.17.1.1.6. Masih terbatasnya SDM pengelola perpustakaan seperti pustakawan
		2.17.1.1.7. Belum tersedianya koleksi buku sesuai kebutuhan pemustaka
		2.17.1.1.8. Masih rendahnya sosialisasi literasi terhadap pentingnya minat baca masyarakat
2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
2.18.1. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	2.18.1.1. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	2.18.1.1.1. Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah
		2.18.1.1.2. Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip daerah
		2.18.1.1.3. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang penyimpanan arsip daerah
		2.18.1.1.4. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM arsiparis
		2.18.1.1.5. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
3.1.1. Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	3.1.1.1. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	3.1.1.1.1. Masih rendahnya kapasitas SDM nelayan
		3.1.1.1.2. Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan tangkap
	3.1.1.2. Rendahnya produksi perikanan budidaya	3.1.1.2.1. Masih rendahnya kapasitas SDM pembudidaya ikan
		3.1.1.2.2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
	3.1.1.3. Belum optimalnya standar mutu hasil perikanan	3.1.1.3.1. Masih rendahnya syarat teknis, sanitasi dan higienis perikanan
3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
3.2.1. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	3.2.1.1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata	3.2.1.1.1. Belum optimalnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata
		3.2.1.1.2. Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata
		3.2.1.1.3. Belum optimalnya kerja sama pengembangan wisata
		3.2.1.1.4. Belum optimalnya pengembangaan ekonomi kreatif (terutama kerajinan)
		3.2.1.1.5. Masih rendahnya *spend of money* wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
		3.2.1.1.6. Belum optimalnya pengembangan konsep *quality tourism*
		3.2.1.1.7. Masih kurangnya keterampilan SDM pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3.2.1.1.8. Masih rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal
3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
3.3.1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3.3.1.1. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat	3.3.1.1.1. Belum optimalnya pemanfaatan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		3.3.1.1.2. Masih terbatasnya pengetahuan petani terhadap benih bersertifikat
		3.3.1.1.3. Belum optimalnya penangkaran swadaya pada kelompok tani
		3.3.1.1.4. Masih terbatasnya modal petani untuk pembelian benih bersertifikat
	3.3.1.2. Belum optimalnya penanganan hama dan penyakit	3.3.1.2.1. Belum optimalnya pemanfaatan benih/bibit unggul yang bermutu, tahan hama dan penyakit
		3.3.1.2.2. Masih terbatasnya pemahaman petani terhadap hama dan penyakit tanaman
		3.3.1.2.3. Masih terbatasnya sarana pengendalian hama dan penyakit di tingkat petani
		3.3.1.2.4. Masih terbatasnya modal petani untuk pembelian obat-obatan
	3.3.1.3. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	3.3.1.3.1. Masih rendahnya pengetahuan petani yang berorientasi pada pengolahan hasil pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3.3.1.3.2. Masih rendahnya kontinuitas dan mutu produksi pertanian
		3.3.1.3.3. Belum optimalnya pemanfaatan prasarana pertanian di tingkat petani
		3.3.1.3.4. Belum optimalnya peningkatan prasarana pertanian sumber air, jalan usaha tani di sentra pertanian
		3.3.1.3.5. Masih terbatasnya informasi jaringan pasar
	3.3.1.4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur oleh petani	3.3.1.4.1. Masih terbatasnya kemampuan permodalan petani
		3.3.1.4.2. Belum tersedianya prasarana jalan usaha tani, irigasi menuju lahan tidur
	3.3.1.5. Masih rendahnya produksi hasil peternakan	3.3.1.5.1. Masih rendahnya kapasitas SDM peternak
		3.3.1.5.2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan
		3.3.1.5.3. Masih adanya metode budidaya konvensional
		3.3.1.5.4. Masih terbatasnya akses terhadap bantuan permodalan
		3.3.1.5.5. Masih terbatasnya produksi bibit unggul dari dalam daerah
		3.3.1.5.6. Masih terbatasnya produksi pakan ternak dari dalam daerah
	3.3.1.6. Masih kurangnya populasi ternak	3.3.1.6.1. Masih rendahnya tingkat kelahiran ternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3.3.1.6.2. Masih cukup tingginya tingkat kematian ternak
		3.3.1.6.3. Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya
3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
3.4.1. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	3.4.1.1. Belum optimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3.4.1.1.1. Belum optimalnya pemanfaatan gudang dan transportasi laut untuk distribusi perdagangan
		3.4.1.1.2. Belum optimalnya penataan akses infrastruktur di lokasi pasar rakyat
		3.4.1.1.3. Belum optimalnya revitalisasi/ pemeliharaan sarana pasar rakyat
	3.4.1.2. Belum otimalnya upaya stabilisasi harga barang perdagangan	3.4.1.2.1. Masih terbatasnya ketersediaan
		3.4.1.2.2. stok barang khususnya pangan lokal
		3.4.1.2.3. Belum optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
		3.4.1.2.4. Masih terjadinya sengketa kasus perdagangan
	3.4.1.3. Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran produk hasil daerah	3.4.1.3.1. Belum adanya mitra maupun sarana promosi dan pemasaran hasil usaha UMKM/pelaku usaha
		3.4.1.3.2. Belum optimalnya pembinaan serta pelatihan bagi pelaku usaha
		3.4.1.3.3. Belum optimalnya pelayanan koordinasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perizinan baik secara online maupun offline
3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
3.5.1. Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	3.5.1.1. Masih rendahnya produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)	3.5.1.1.1. Belum optimalnya fasilitasi terhadap peralatan dan mesin industri modern
		3.5.1.1.2. Masih kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana pendukung
		3.5.1.1.3. Belum optimalnya pendampingan dan pelatihan terhadap pelaku IKM
		3.5.1.1.4. Masih kurangnya jumlah SDM pelaku IKM
		3.5.1.1.5. Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.1. Unsur Sekretariat Daerah		
4.1.1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1.1. Belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	4.1.1.1.1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam penerapan SAKIP
		4.1.1.1.2. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan penyusunan analisis jabatan
		4.1.1.1.3. Belum terpenuhinya kriteria rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi *outcome* dengan indikator yang SMART (*Specific, Measurable,* Achievable, Relevant, Time-bound)
	4.1.1.2. Belum optimalnya sistem	4.1.1.2.1. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	pengendalian kebijakan pemerintah daerah		aparatur dalam pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan
		4.1.1.2.2.	Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dalam pelayanan operasional pimpinan daerah
		4.1.1.2.3.	Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan
		4.1.1.2.4.	Belum optimalnya penyelenggaraan program jaminan sosial dan pendataan masyarakat miskin
		4.1.1.2.5.	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian dan penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam
		4.1.1.2.6.	Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam penyampaian laporan belanja dan pelaksanaan APBD sesuai jadwal
		4.1.1.2.7.	Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum
		4.1.1.2.8.	Masih rendahnya minat ASN untuk menjadi pejabat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		fungsional pengadaan barang/jasa
		4.1.1.2.9. Masih rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan input Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempersiapkan dokumen persiapan pemilihan sesuai jadwal
		4.1.1.2.10. Masih rendahnya tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap kesepakatan bersama (MoU) yang sudah ditandatangani
	4.1.1.3. Belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	4.1.1.3.1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		4.1.1.3.2. Masih terbatasnya penerapan SKM pada Perangkat Daerah tertentu
4.2. Unsur Sekretariat DPRD		
4.2.1. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan tugas DPRD	4.2.1.1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	4.2.1.1.1. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM aparatur
		4.2.1.1.2. Belum memadainya sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendukung pelayanan
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
5.1. Unsur Perencanaan		
5.1.1. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi	5.1.1.1. Belum optimalnya sinergi	5.1.1.1.1. Masih terjadinya perubahan regulasi atas tata cara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
antara perencanaan dan penganggaran	perencanaan dan penganggaran	perencanaan pembangunan daerah
		5.1.1.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
		5.1.1.1.3. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM perencana
		5.1.1.1.4. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam penyampaian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
		5.1.1.1.5. Belum optimalnya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
5.2. Unsur Keuangan		
5.2.1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	5.2.1.1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	5.2.1.1.1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan anggaran dan dokumen laporan keuangan secara tepat waktu
		5.2.1.1.2. Masih terjadinya kendala dalam akses sistem informasi perencanaan anggaran daerah
		5.2.1.1.3. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan
		5.2.1.1.4. Belum optimalnya pengelolaan kas daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		5.2.1.1.5. Belum optimalnya upaya percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)
		5.2.1.1.6. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam upaya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan serta penyelesaian temuan kerugian daerah
		5.2.1.1.7. Belum memadainya sarana dan prasarana perkantoran
	5.2.1.2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	5.2.1.2.1. Belum terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, akurat dan terintegrasi
		5.2.1.2.2. Belum optimalnya pelaksanaan tahapan pengelolaan BMD oleh Perangkat Daerah
		5.2.1.2.3. Belum optimalnya proses penyertifikatan aset tanah daerah
		5.2.1.2.4. Belum tertibnya pengamanan dan pengarsipan dokumen aset
5.2.2. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.2.2.1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	5.2.2.1.1. Belum optimalnya penggunaan database pajak daerah
		5.2.2.1.2. Belum tegasnya penerapan sanksi pajak dan retribusi daerah
		5.2.2.1.3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		5.2.2.1.4. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang akuntansi, *programmer*, penilai, pemeriksa dan penyidik pajak daerah serta juru sita pajak daerah
		5.2.2.1.5. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah
5.3. Unsur Kepegawaian		
5.3.1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian	5.3.1.1. Belum optimalnya kompetensi pegawai	5.3.1.1.1. Belum tersedianya standar kompetensi pegawai
		5.3.1.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi pegawai
		5.3.1.1.3. Belum terpenuhinya kebutuhan diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya
		5.3.1.1.4. Belum tersedianya manajemen pola karier bagi ASN
		5.3.1.1.5. Belum terpenuhinya persyaratan pangkat/golongan ruang dan pendidikan untuk menduduki jabatan tertentu
	5.3.1.2. Belum optimalnya kinerja pegawai	5.3.1.2.1. Belum adanya sistem penghargaan berbasis kinerja kepada ASN
		5.3.1.2.2. Belum adanya penetapan jabatan bagi pelaksana
		5.3.1.2.3. Belum optimalnya instrumen pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan pengendalian disiplin ASN
5.4. Unsur Penelitian dan Pengembangan		
5.4.1. Belum optimalnya penerapan inovasi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	5.4.1.1. Belum optimalnya fungsi riset dan inovasi	5.4.1.1.1. Masih terbatasnya tenaga fungsional peneliti
		5.4.1.1.2. Belum adanya komitmen dan regulasi tentang pemanfaatan hasil riset dan inovasi
		5.4.1.1.3. Belum tersedianya rencana induk pengembangan riset dan inovasi daerah
	5.4.1.2. Belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi daerah	5.4.1.2.1. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi daerah
		5.4.1.2.2. Belum tersedianya database inovasi daerah
		5.4.1.2.3. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk mengembangkan inovasi
6. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
6.1. Inspektorat Daerah		
6.1.1. Belum optimalnya tata kelola pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan	6.1.1.1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	6.1.1.1.1. Masih kurangnya komitmen obyek pemeriksaan (perangkat daerah, pemerintah desa dan sekolah) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
		6.1.1.1.2. Masih kurangnya komitmen obyek pemeriksaan (perangkat daerah, pemerintah desa dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sekolah) dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan sesuai LHP
	6.1.1.2. Masih terbatasnya jumlah obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan setiap tahunnya	6.1.1.2.1. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kompetensi SDM auditor/ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		6.1.1.2.2. Belum memadainya sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendukung pengawasan
7. Unsur Kewilayahan		
7.1. Kecamatan		
7.1.1. Belum optimalnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	7.1.1.1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	7.1.1.1.1. Masih terbatasnya aspek kuantitas maupun kualitas SDM aparatur
		7.1.1.1.2. Belum memadainya sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendukung pelayanan kecamatan
		7.1.1.1.3. Masih luasnya cakupan wilayah pelayanan administrasi kecamatan
		7.1.1.1.4. Masih terbatasnya realisasi usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kabupaten
	7.1.1.2. Belum optimalnya fasilitasi pembangunan	7.1.1.2.1. Masih terjadinya konflik sosial yang berakibat pada rendahnya kesadaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dan pemberdayaan desa/kelurahan	masyarakat dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
		7.1.1.2.2. Belum optimalnya peran lembaga adat dalam fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
		7.1.1.2.3. Masih rendahnya upaya pembentukan komunitas masyarakat sebagai fasilitator dan motivator pembangunan
		7.1.1.2.4. Belum optimalnya pengelolaan peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
		7.1.1.2.5. Masih kurangnya komitmen pemerintah desa dalam penyampaian laporan keuangan desa yang tepat waktu
8. Unsur Pemerintahan Umum		
8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.1.1. Masih terjadinya gangguan terhadap kohesivitas sosial	8.1.1.1. Masih tingginya potensi konflik sosial	8.1.1.1.1. Belum optimalnya upaya peningkatan ruang dialog dalam penyelesaian konflik sosial
		8.1.1.1.2. Belum optimalnya upaya pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	8.1.1.2. Belum optimalnya peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan	8.1.1.2.1. Belum terwujudnya tata kelola partai politik yang berintegritas
		8.1.1.2.2. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi politik untuk kader partai politik dan organisasi kemasyarakatan

Sumber: Analisis, 2025

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung di masa datang. Perumusan Isu Strategis dalam bab ini mempertimbangkan Isu Strategis yang berkembang, baik di level global, nasional dan regional yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Manggarai

2.3.2.1 Isu Internasional

Isu Strategis Intenasional merupakan isu pada level makro yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas karena memberikan dampak secara global. Isu Strategis Internasional saat ini sering juga disebut sebagai *mega tren* global karena mengindikasikan adanya perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi di dunia dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan. Perubahan-perubahan tersebut diprediksi akan memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 2. 37 Telaahan Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	▪ Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 milyar jiwa ▪ Peningkatan pesat populasi lansia
Perkembangan Teknologi	▪ Ancaman hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi ▪ Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih
Konstelasi Perdagangan Global	▪ Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun ▪ Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerjasama tingkat regional
Urbanisasi Dunia	▪ Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi dunia ▪ Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan ▪ Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global
Luar Angkasa	▪ Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian ▪ Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit
Tata Kelola Keuangan Global	▪ Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal ▪ Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber
Perubahan Iklim	▪ Peningkatan suhu global ▪ Kejadian cuaca ekstrem ▪ Bencana alam
Persaingan Sumber Daya Alam	▪ Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia ▪ Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan
Pertumbuhan Kelas Menengah	▪ Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global ▪ Fenomena generasi *sandwich*, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Geopolitik dan Geoekonomi	▪ Persaingan antarnegara yang menegang ▪ Munculnya poros kekuatan baru ▪ Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan

Sumber: RPJPN 2025-2045

Berbagai Isu Strategis tersebut di atas perlu direspon dengan bijak oleh pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnnya. Bentuk respon terhadap isu global tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif, kontekstual dan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perlu disusun dengan konsisten agar berbagai tantangan tersebut dapat berdampak positif bagi pembangunan

2.3.2.2 Isu Nasional

Dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis tersebut dibentuk dari dinamika global dan respon atas persoalan pembangunan nasional yang mendesak. Isu-isu nasional ini penting untuk direspon oleh daerah dan mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini mengingat isu nasional yang membawa dampak bagi daerah dan kinerja pembangunan nasional yang ikut ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah. Adapun Isu Strategis pada level nasional, antara lain:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN);
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;

6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif rendah;
8. Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi;
9. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
11. Integrasi ekonomi domestik masih terbatas;
12. Akses dan kualitas yang merata pada sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
13. Kepastian dan penegakkan hukum yang masih rendah;
14. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal;
15. Demokratisasi belum optimal; dan
16. Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa.

Isu-isu jangka panjang nasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan untuk mewujudkan transformasi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Persoalan membentang dari aspek ekonomi, kualitas SDM hingga persoalan fondasi berupa tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum. Terdapat pula isu besar yang telah lama menjadi perhatian tetapi masih menjadi persoalan, yaitu pembangunan belum berkelanjutan dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

2.3.2.3 Isu Strategis RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan permasalahan dan potensi daerah serta isu global dan nasional, maka Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merumuskan isu-isu strategis Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. **Isu Strategis Transformasi Sosial:** peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif **(kurang optimalnya mutu dan akses pendidikan dan kurang optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta pengarusutamaan *gender equality, disability and social inclusion* (GEDSI/kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial yang belum optimal)**

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Provinsi NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui: penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan Gender equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial, peningkatan perlindungan sosial bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

2. **Isu Strategis Transformasi Ekonomi:** Peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi **(1) belum maksimalnya transformasi ekonomi daerah, (2) belum terbangunnya ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, (3) kurang optimalnya pembangunan inrastruktur dan pelayanan dasar, (4) peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer untuk mendukung hiliirisasi dan swasembada pangan**

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer sentrasentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan dihadapkan pada

upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimlsiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta insentif pada sistem pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industri di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis Core Competence Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. **Isu Strategis Transformasi Tata Kelola:** peningkatan efektivitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan **(kurang optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan)**

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap derajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya optimalisasi pengelolaan potensi PAD, mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan penguatan pengelolaan aset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat, peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Isu strategis superemasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indoensia

Penekanan utama pada isu yakni stabilitas makro dengan penjabaran isu strategis daerah sebagai berikut: peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi/hexa helix; peningkatan efektivitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Fokus isu meliputi aspek ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang dijabarkan dalam beberapa isu strategis daerah sebagai berikut: peningkatan pemanfatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi; peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan; Perubahan Iklim, ketahanan pangan dan penurunan indeks risiko bencana memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan pengelolaan lingkungan yang kuat dengan perencanaan strategis untuk mengurangi risiko

bencana, meningkatkan adaptasi perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Keselarasan Isu Daerah dengan Isu KLHS serta Isu Lingkungan Dinamis yang mencakup Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional dapat dilihat secara mendetail pada tabel di bawah ini yang menjelaskan bahwa Isu Strategis Daerah Provinsi NTT telah selaras dengan isu KLHS, isu Global, Nasional dan Regional. Selain itu, keselarasan menggambarkan adanya sinergitas setiap isu pembangunan yang wajib diselesaikan dengan dukungan kerja kolaborasi produktif bersama pihak/hexa helix demi mewujudkan agenda pembangunan NTT sekaligus mencapai tujuan pembangunan global yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3.2.4 Regional Bali – Nusa Tenggara

Isu strategis regional Bali-Nusa Tenggara diidentifikasi berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2045. Telaah terhadap isu strategis pada regional Bali - Nusa Tenggara menjadi bahan masukan penting dalam perumusan isu strategis Kabupaten Manggarai Barat. Secara lebih rinci, isu strategis dan permasalahan dalam pembangunan di regional Bali - Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Belum Memberikan Dampak yang Signifikan**

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali-Nusa Tenggara belum dapat memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, pusat produksi di perdesaan belum terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.

2. **Pengembangan Koridor Pariwisata Wilayah Nusa Tenggara Belum Optimal**

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas sejak tahun 2017. Namun demikian, keterhubungan pembangunan pariwisata dalam koridor Bali-Nusa Tenggara masih belum berhasil meningkatkan jumlah

wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara. Kondisi ini diindikasikan melalui jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan wisatawan Wilayah Bali. Hal ini disebabkan antara lain karena konektivitas yang menghubungkan Bali-Nusa Tenggara masih belum optimal serta belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata di Nusa Tenggara. Lebih dari itu, kapasitas masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata.

3. Kesenjangan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat NTT yang masih rendah diindikasikan dengan persentase penduduk miskin di NTT yang berada pada peringkat ke tiga tertinggi secara nasional. Tingginya kemiskinan disebabkan oleh sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor informal. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya rata-rata pendapatan yang diterima serta lemahnya perlindungan hak-hak di tempat kerja. Lebih dari itu kesenjangan pembangunan intra wilayah juga masih perlu mendapatkan perhatian. Di wilayah Nusa Tenggara masih terdapat 14 kabupaten tertinggal, 13 di antaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ketertinggalan wilayah ini dipengaruhi oleh infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah, serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi.

4. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur masih lebih rendah jika dibandingkan dengan dibandingkan nasional, kondisi ini berbeda dengan Provinsi Bali dengan capaian IPM sudah berada di atas nasional. Rendahnya IPM disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA, dan perguruan tinggi, serta kurang meratanya sebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Lebih dari itu, kualitas tenaga pendidik masih kurang memadai karena masih

banyak pendidik dengan pendidikan terkahir kurang dari S1/D4. Aspek kesehatan juga masih menjadi kendala, seperti masih adanya prevalensi stunting dan penyakit malaria dan kusta. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan juga masih terbatas.

5. Kinerja Desentralisasi dan Otonomi Daerah Belum Optimal

Kinerja desentralisasi dan otonomi daerah yang belum optimal ditandai dengan Indeks integritas di Provinsi NTB dan NTT masih berada di bawah capaian nasional. Capaian SPM terutama di Provinsi NTT juga masih perlu untuk ditingkatkan. Di samping itu, beberapa permasalahan lainnya adalah kemandirian fiskal yang rendah, ketergantungan terhdap TKD yang tinggi, dan kualitas belanja daerah yang masih rendah.

6. Kualitas Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana

Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa limbah dan sampah serta berbagai aktivitas pembangunan lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi agenda penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Lebih dari itu, Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi bencana geologi berupa gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara serta zona *megathrust* di selatan NTT dan NTB yang berpotensi menimbulkan bahaya tsunami. Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta sarana dan prasarana mitigasi bencana masih terbatas.

7. Akses dan Kualitas Sarana dan Prasarana

Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali Nusa-Tenggara masih belum optimal terutama dalam mendukung sektor unggulan pariwisata, serta komoditas perikanan, pekebunan, dan peternakan. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Flores dan jalan trans lainnya, serta rendahnya ketersediaan dan kualitas

infrastruktur jalan daerah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas wilayah. Masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata juga masih perlu menjadi perhatian.

8. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Masih banyak terjadi kasus *illegal fishing* di perairan Wilayah Bali-Nusa Tenggara terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor Leste dan Australia (WPP 573) yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga perlu dijaga kedaulatannya

2.3.2.5 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045

Isu strategis jangka panjang Kabupaten Manggarai dapat dicermati di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai tahun 2025-2045. Dokumen perencanaan jangka panjang ini sangat penting untuk menjamin bahwa dokumen RPJMD periode 2025-2029 sudah disusun dengan konsep *vision based* yang telah ditetapkan. Berikut adalah penelaahan RPJPD Kabupaten Manggarai tahun 2025-2045:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berinovasi.

Kemajuan pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Pembangunan SDM di Kabupaten Manggarai terus membaik. BPS mencatat nilai IPM Kabupaten Manggarai pada 2023 mencapai 66,42; naik 6,34 poin selama sepuluh tahun terakhir dibandingkan nilai IPM pada tahun 2014 sebesar 60,08. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak; rata-rata meningkat sebesar 0,634 persen per tahun sejak tahun 2014 hingga 2023.

Secara umum, wilayah Nusa Tenggara memiliki IPM di bawah rata-rata nasional dengan akar permasalahan khususnya pada aspek kesehatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rendahnya IPM di wilayah Nusa Tenggara disebabkan oleh UHH dan angka RLS yang berada di bawah capaian

nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA, dan perguruan tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

BAPPENAS mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. World Economic Forum (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Pada pembahasan mengenai Isu dan Potensi Kewilayahan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, dijelaskan bahwa wilayah Bali- Nusa Tenggara memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus yang tersebar di seluruh wilayah, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Sebagai provinsi yang memiliki destinasi pariwisata tujuan wisatawan mancanegara, Provinsi NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah.

Adapun berdasarkan indikasi geografis, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 menyebutkan salah satu potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan ini juga meliputi kopi Robusta Flores Manggarai dan kopi Arabika Flores Manggarai. Namun demikian, pengembangan sentra komoditas unggulan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan ekonomi wilayah.

3. Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan

UU No. 18/2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

4. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, ramah lingkungan, dan merata dengan memperhatikan tata ruang

Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Konsep ini juga berkaitan dengan sistem infrastruktur yang dibangun, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan,

telekomunikasi, pembangkit listrik, dan sebagainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Isu pemenuhan infrastruktur dasar sangat krusial untuk diangkat sebagai isu strategis karena sampai saat ini masih banyak masyarakat Manggarai yang belum memiliki fasilitas dasar di rumah mereka. Salah satu contoh akses terhadap air bersih dan listrik.

5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan.

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Isu ini sangat strategis karena jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun masih tinggi dan sebagai akibat dari pernikahan dini ini akan meningkatkan potensi kelahiran bayi stunting. Jika angka pernikahan dini tidak diatasi maka upaya mewujudkan visi Manggarai Mandiri, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan sangat sulit tercapai karena generasinya stunting. Masalah kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif juga layak diangkat karena partisipasi perempuan dibutuhkan dalam pembangunan.

6. Pelestarian Manggarai sebagai pusat kebudayaan dan religi

Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan wisata budaya dan religi sebagai unggulan dalam pembangunan pariwisata. Pemetaan potensi pariwisata Manggarai berbasis kekayaan budaya yang secara nyata memiliki situs-situs bersejarah sebagai tempat wisata religi. Dari sisi filosofis, Manggarai memiliki tatanan nilai yang kemudian terekspresi pada pola pikir “gendang’n one, lingko’n

pe'ang". Gendang bukan sekedar sebuah rumah tetapi memiliki makna sebagai pusat kehidupan. Demikian pula halnya dengan lingko yang bukan saja merupakan sebuah kebun komunal namun melambangkan dialektika kehidupan yang darinya kehidupan itu terus dilestarikan.

Pelestarian budaya dan religi berakar pada tujuan pembangunan karakter, pelestarian nilai dan pembangunan ekonomi. Kerja sama Pemerintah Kabupaten Manggarai, tokoh-tokoh adat, pelaku pariwisata, UMKM dan masyarakat untuk mewujudkan impian ini akan menjadikan Manggarai sebagai salah satu destinasi dengan kekhasan pada budaya dan religi yang dirindukan dan keistimewaannya mewajibkan tamu datang kembali. Pariwisata, budaya, dan religi adalah hal yang bisa berjalan beriringan dan pariwisata adalah kendaraan dalam menjaga semangat kebudayaan dan religi itu sendiri.

7. Pengelolaan lingkungan yang berkualitas

Perubahan iklim telah nyata terjadi di Kabupaten Manggarai. Perubahan paling signifikan terjadi pada sektor pertanian, yakni merosotnya hasil panen, berubahnya pola tanam masyarakat karena curah hujan tidak menentu, naik-turunnya debit air, serta ledakan populasi hama yang semakin tidak terbendung. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Manggarai tidak memiliki kemampuan adaptasi, sebaliknya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam. Jika terjadi sedikit saja gangguan pada kondisi alam, maka perubahan kehidupan masyarakat akan berubah. Ketika terjadi gangguan pada sektor-sektor strategis pangan, masyarakat tidak memiliki cadangan pangan baik pada level rumah tangga maupun level desa.

Kerentanan masyarakat pada sisi infrastruktur cukup bisa diatasi namun ada beberapa wilayah yang infrastruktur vitalnya justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara Kota Ruteng tidak cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan melihat fenomena-fenomena tersebut, langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim di Manggarai sudah semestinya didesak. Penanganan perubahan iklim dan bencana harus mendapat perhatian serius

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

9. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Baru

Pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 diarahkan sebagai "Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional" yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas, salah satunya termasuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Oleh sebab itu, dalam proses pembangunan Kabupaten Manggarai selama 20 tahun ke depan perlu diterapkan pengembangan kawasan pertumbuhan baru

berbasis potensi unggulan daerah sehingga memiliki daya saing dalam persaingan nasional maupun global. Proses pengembangan kawasan pertumbuhan baru tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian, namun diprioritaskan

pada pengembangan sektor ekonomi yang memiliki potensi perkembangan cukup besar. Dengan mengetahui potensi unggulan, Pemerintah Kabupaten Manggarai akan lebih leluasa untuk merancang strategi pengembangan kawasan pertumbuhan baru serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para investor.

10. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Adanya pemekaran wilayah akan memberikan dampak terhadap seluruh sektor, mulai sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemekaran wilayah secara umum akan memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan ini terukur dari peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur.

Di satu sisi, jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai semakin meningkat dan berdampak pada bertambahnya luas lahan terbangun di beberapa kawasan dengan berbagai fungsi. Hal ini rentan terhadap munculnya permasalahan kota di masa yang akan datang apabila tidak diatur dengan regulasi yang kuat. Pertumbuhan lahan terbangun di setiap desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang paling berpengaruh yakni kemiringan lahan, kepadatan penduduk, jarak titik pusat desa dengan jalan kolektor terdekat, dan kekuatan pusat aktivitas di suatu kecamatan. Kebijakan pemekaran wilayah ditujukan untuk mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah pinggiran, perkotaan dan wilayah terpencil.

11. Supremasi Hukum, Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sehubungan dengan itu, pendekatan pembangunan harus diubah untuk mencapai visi tersebut. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas nasional yang meliputi supremasi hukum, keamanan nasional, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi untuk situasi dalam negeri yang kondusif, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran di kancah internasional. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sementara keamanan nasional yang kuat melindungi negara dan menciptakan lingkungan aman. Demokrasi substansial menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, sedangkan stabilitas ekonomi, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Proses perencanaan dan pendanaan yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan

biasnya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.3.2.6 Telaah RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus merujuk kepada rencana tata ruang yang telah disusun. Beberapa substansi yang perlu dirujuk dalam dokumen RTRW meliputi identifikasi permasalahan dan isu strategis; rencana tujuan penataan ruang; rencana pengembangantaan ruang; serta lokus dan indikasi program prioritas. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan dokumen fakta dan analisa RTRW Kabupaten Manggarai:

- Masih rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- Rendahnya kualitas produksi dan produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas ternak;
- Masih adanya praktek perdagangan monopsoni dan oligopsoni pada perdagangan komoditi perkebunan;
- Belum berkembangnya industri kreatif (*home industry*);
- Masih rendahnya kualitas tata kelola koperasi;
- Belum mantapnya sistem transportasi antar desa dan antar
- Rendahnya cakupan layanan air minum bersih perkotaan dan perdesaan;
- Masih adanya permukiman kumuh dan lingkungan kumuh;
- Flores termasuk dalam 25 kawasan pariwisata nasional.
- Belum terwujudnya Kota Ruteng sebagai kota bersih;
- Menurunnya debit air minum;
- Meningkatnya pencemaran tanah, air, dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan;
- Masih luasnya kawasan kritis di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan;

kota dalam wilayah Kabupaten Manggarai;
- Terbatasnya akses komunikasi dan informatika;
- Masih adanya desa -desa belum memiliki listrik sebagai sumber penerangan utama di Kabupaten Manggarai;
- Rendahnya kompetensi, produktivitas, perlindungan dan penempatan tenaga kerja;
- Tingginya risiko daya rusak air terhadap kawasan budidaya (permukiman, pertanian);
- Belum optimalnya patroli rutin/terpadu pengamanan hutan dan penyuluhan;
- Pengelolaan pertambangan yang belum mendukung pelestarian lingkungan dan berbasis tata ruang;
- Ketidakpastian informasi perubahan iklim; dan
- 70,45% wilayah Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan lebih dari 40 derajat menyebabkan Manggarai kategori rawan bencana;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 – 2043. Adapun tujuan penataan ruang pada tahun 2024 -2043 diarahkan pada mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing, berbasis agropolitan, dan minapolitan didukung oleh pariwisata yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, rencana pengembangantaan ruang Kabupaten Manggarai 2024 – 2043 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 38 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Manggarai 2024 – 2043

Kebijakan	Strategi
Pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata	Mengembangkan agropolitan di wilayah wilayah basis seperti di Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Wae Rii
	Mengembangkan minapolitan pada wilayah dengan potensi perikanan tinggi di Kecamatan

Kebijakan	Strategi
	Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, Satar Mese Barat
	Mengembangkan sistem pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terpadu dengan peningkatan sistem pemasaran
	Meningkatkan aksesibilitas dari sumber produksi, pengolahan, dan pemasaran
Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat- pusat pelayanan	Mengembangkan pusat-sub pusat pelayanan yang diintegrasikan dengan jaringan aksesibilitas yang terhubung
	Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi pendukung
	Mengembangkan kawasan perdagangan jasa, dan pelayanan umum sebagai bangkitan dan tarikan
	Mengembangkan sektor perekonomian secara merata di setiap wilayah
Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama di ibu kota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan	Mengembangkan jaringan aksesibilitas penghubung antar pusat pelayanan
	Mengembangkan jalur agrobisnis antar desa basis dengan perkotaan; dan
	Mengembangkan sistem pelayanan umum terpadu dan fasilitas-fasilitas pendukung
Pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata	Mengembangkan terminal serta pelayanan transportasi umum dan angkutan barang
	Mengembangkan bandara, pelabuhan dan dermaga
	Mengembangkan sistem jaringan jalan dan prasarana jalan

Kebijakan	Strategi
	Mengembangkan lahan parkir
	Mengembangkan sistem drainase dan jalur hijau jalan
Pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian	Mengembangkan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan
	Melestarikan sumber mata air dan sempadan sumber mata air
	Mengembangkan sistem pelestarian wilayah tangkapan air hujan
	Mengembangkan sistem jaringan irigasi
Peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok	Mengembangkan jaringan listrik secara merata ke seluruh wilayah perencanaan
	Mengembangkan energi terbarukan
	Memanfaatkan listrik secara bijaksana
Peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan	Mengembangkan layanan menara telekomunikasi dan sistem jangkauan
	mengembangkan wilayah sadar telekomunikasi
	mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel/fiber optik dengan ducting bersama
Pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	Mengembangkan sistem zero waste di sumber pertama meliputi rumah tangga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dsb
	Mengembangkan TPA/TPAS yang telah diuji sesuai standar
	Mengembangkan TPS terpadu secara merata terutama di pusat-pusat kegiatan

Kebijakan	Strategi
	Mengembangkan pemilahan sampah
	Mengembangkan bank sampah
Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi	Menetapkan sistem yang mendukung perlindungan hutan lindung dan melestarikan hutan lindung melalui pengembalian rona awal dan penanaman gerakan cinta alam
	Menetapkan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai bukan untuk kawasan terbangun
	Melestarikan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng
	Menetapkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove dan melaksanakan reboisasi terumbu karang di sekitar kawasan
	Mengembangkan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau private minimal 10% (sepuluh persen) pada kawasan permukiman perkotaan atau kawasan budi daya terbangun lainnya
Pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah	Mengembangkan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Industri Bidang Pengolahan
	Mengembangkan sentra industri mikro dan kecil serta sarana pemasaran
	Mengembangkan jaringan jalan dan simpul transportasi sehingga memberikan kemudahan akses pengembangan agropolitan, agroindustri, minapolitan, dan ekowisata
	melestarikan pertanian dengan budaya sawah (lingko) dan mengembangkan sebagai objek wisata

Kebijakan	Strategi
	Mengintegrasikan antar objek wisata sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dipertimbangkan
Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan	Mengembangkan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan pariwisata yang merupakan potensi basis Daerah sebagai kawasan strategis ekonomi
	Mengembangkan kawasan hutan lindung dan kawasan taman wisata alam Ruteng sebagai kawasan strategis lingkungan hidup untuk tetap dilestarikan dan dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak
Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata	Menata lingkungan eustaria yang lestari melalui konservasi bakau dan terumbu karang serta pencegahan reklamasi di Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat
	Melindungi dan menetapkan kawasan sempadan pantai dari peruntukan kawasan terbangun
Pemantapan Daerah sebagai Kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan akomodasi wisata	Mengembangkan infrastruktur dan transportasi untuk mempermudah akses pencapaian lokasi wisata
	Mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenitas destinasi wisata, dan memperkuat promosi
	Mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata

Sumber: Analisis, 2025

Pengembangan sistem pusat permukiman Kabupaten Manggarai diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Adapun lokus pengembangannya meliputi:

Tabel 2. 39 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Manggarai

No.	Sistem Pusat Permukiman	Lokus
1.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	PKW Ruteng di Kecamatan Langke Rembong
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	PKL Reok yang berada di Kecamatan Reok
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Ruteng; Kecamatan Satar Mese; Kecamatan Satar Mese Barat; dan Kecamatan Wae Rii
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Cibal; Kecamatan Cibal Barat; Kecamatan Lelak; Kecamatan Rahong Utara; Kecamatan Reok Barat; dan Kecamatan Satar Mese Utara

Sumber: Analisis, 2025

2.3.2.7 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan pembangunan yang komprehensif telah disepakati secara global melalui adanya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals*. TPB menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diukur melalui pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan telah selaras dengan pembangunan

berkelanjutan, maka penyusunan dokumen RPJMD perlu diselaraskan dengan dokumen KLHS RPJMD yang memuat tentang capaian pembangunan berkelanjutan dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 diperoleh lima isu strategis. Identifikasi isu strategis ini didasarkan pada hasil sintesis ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup Kabupaten Manggarai, serta saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan.

1. Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi

Kerentanan sosial yang masih tinggi di Kabupaten Manggarai ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan. Meskipun terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai masih berada pada angka 19,01 persen. Capaian ini masih jauh dari capaian nasional yang berada pada 8,57 persen per September 2024.

2. Sistem Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal juga menjadi salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan selama lima tahun mendatang. Belum optimalnya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan ini ditandai dengan capaian Indeks Reformasi Birokasi Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 sebesar 60,04. Capaian ini masuk dalam kategori B (Baik) yang menunjukkan sebagian besar pelaksanaan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing telah dilaksanakan, akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

3. Akses ke Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Masih Rendah

Akses terhadap layanan yang masih rendah tercermin dari akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Kondisi ini diindikasikan dari capaian APM terutama pada tingkat SMP dan SMA yang masih berada pada kisaran angka 70 persen pada tahun 2024. Pada layanan kesehatan, belum semua fasilitas kesehatan yang tersedia mampu memberikan pelayanan yang optimal. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya tenaga kesehatan yang mumpuni. Pada tahun 2023, terdapat 5 Puskesmas yang sama sekali tidak memiliki dokter yaitu Puskesmas Cancar, Puskesmas Iteng, Puskesmas Langgo, Puskesmas Ketang, dan Puskesmas Todo.

Di samping layanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal, akses infrastruktur dasar juga belum merata meliputi infrastruktur air bersih/air minum, infrastruktur jaringan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan energi kelistrikan. Dengan kondisi daya dukung air sebesar 73,56 persen yang belum terlampaui seharusnya menjadikan masayarakat Kabupaten Manggarai dapat memenuhi kebutuhan air bersih yang ada, namun hingga tahun 2024 berdasarkan data capaian TPB dari Dinas PUPR akses layanan terhadap sumber air bersih masih berada pada angka 86,08 persen. Akses layanan terhadap jaringan telekomunikasi tahun 2023 masih berada pada angka 70,18 persen. Lebih dari itu, pembangkit listrik atau energi Kabupaten Manggarai dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menjangkau semua wilayah kecamatan walaupun belum merata. Berdasarkan data capaian TPB dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan akses layanan terhadap sumber penerangan/listrik masih mencapai 40,56 persen.

4. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Wilayah

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 sebesar 5 persen mengalami kontraksi yang cukup drastis pada tahun 2020 menjadi -0,89 persen. Hal ini dikarenakan adanya

dampak pandemi covid yang dimulai pada tahun 2020 sehingga mengganggu aktivitas ekonomi wilayah. Pada tahun 2021 hingga 2024 laju pertumbuhan PDRB berhasil mengalami peningkatan yakni mencapai 3,93 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik setelah pandemi covid, namun belum optimal. Pengembangan ekonomi wilayah menjadi isu strategis yang sangat krusial dalam pembangunan lima tahun mendatang.

5. Tingginya Risiko Bencana dan Degradasi Lingkungan Hidup

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah 138,85 poin dengan kategori tinggi. Berdasarkan data InaRISK Terdapat 10 jenis bencana yang diidentifikasi rawan di Kabupaten Manggarai meliputi bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor dan Tsunami.

Degradasi lingkungan di Kabupaten Manggarai ditandai dengan banyak alih fungsi lahan dan luasnya lahan kritis yang ada. Beberapa kasus alih fungsi lahan yang terjadi meliputi perubahan fungsi Hutan Lindung Kawasan Hutan Gapung; perubahan fungsi Hutan Lindung Kawasan Hutan Meler Kuwus; dan perubahan fungsi Hutan Lindung Kawasan Hutan Todo. Lebih dari itu, Kabupaten Manggarai memiliki lahan sangat kritis seluas 45.938,84 ha atau 34,18 persen dari total luas wilayah Kabupaten, lahan kritis seluas 45.086,06 ha (33,55 persen) dan lahan potensial kritis seluas 22.720,03 ha (16,91 persen).

2.3.2.8 Isu Strategis Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Tabel 2. 40 Isu Strategis Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengembangan pariwisata alam dan budaya **2.** Potensi pertanian dan Perkebunan **3.** Kohesivitas wilayah **4.** Kolaborasi antar pemangku kepentingan	1. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 2. Kualitas layanan dasar pendidikan belum optimal dan merata 3. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan 4. Belum optimalnya perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif	1. Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi 2. Sistem Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal 3. Akses ke Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Masih Rendah 4. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Wilayah	1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Pertumbuhan kelas menengah 3. Persaingan sumber daya alam 4. Perubahan iklim 5. Tata kelola keuangan global 6. Luar angkasa 7. Urbanisasi dunia 8. Konstelasi perdagangan global 9. Perkembangan teknologi	1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5. Krisis lingkungan 6. Geopolitik dan geoekonomi	1. Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif 2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan	1. Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 2. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif 3. Pengembangan ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan berbasis potensi daerah 4. Ketahanan sosial budaya

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
	5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup 6. Belum optimalnya pengelolaan persampahan 7. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian 8. Pengembangan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan potensial 9. Belum meratanya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas 10. Belum meratanya infrastruktur jalan yang berkualitas 11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	5. Tingginya Risiko Bencana dan Degradasi Lingkungan Hidup	10. Demoografi global	7. Tata kelola dan akubtabilitas pemerintah	produksi dan produktivitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi 3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektivitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan	5. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pengelolaan sampah terpadu 7. Tata kelola kolaboratif, bersih dan inovatif melayani

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional (Isu RPJMN)	Regional (Isu RPJMD Provinsi)	
	12. Belum optimalnya reformasi birokrasi				keberlanjutan pembangunan 4. Stabilitas Makro: Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah 5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi: Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan	

Sumber: Analisis, 2025

1. Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Manggarai. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam distribusi fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan belum memenuhi standar infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas layanan yang diterima masyarakat. Keterbatasan transportasi dan infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan dalam menjangkau layanan tersebut secara merata. Isu ini berimplikasi langsung pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah di dalam kabupaten.

Guna mengatasi tantangan tersebut diperlukan strategi terpadu yang mencakup pembangunan, rehabilitasi infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, kependidikan, tenaga medis, dan penyediaan sarana transportasi yang memadai. Pemerintah daerah juga perlu mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi digital, seperti layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) dan pembelajaran daring, untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah sulit akses. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas layanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan berkualitas. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai

2. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan

berkelanjutan. Kemiskinan di wilayah ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja produktif, serta rendahnya nilai tambah sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial semata, tetapi harus melalui pendekatan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah.

Di sisi lain, perlindungan sosial adaptif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika risiko sosial dan ekonomi, terutama yang bersumber dari bencana alam, krisis ekonomi, maupun pandemi. Sistem perlindungan sosial di Kabupaten Manggarai perlu diperkuat agar mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap kondisi darurat serta memberikan jaminan dasar bagi kelompok rentan. Hal ini mencakup integrasi program bantuan sosial dengan pendekatan pemberdayaan, penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Dengan mengedepankan sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Manggarai dapat membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh sekaligus mempercepat pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan

3. Pengembangan ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan berbasis potensi daerah

Pengembangan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai memiliki berbagai potensi unggulan, terutama di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Namun, tantangan seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan infrastruktur, minimnya akses pasar, dan lemahnya kapasitas pelaku

usaha masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penguatan daya saing ekonomi lokal perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk, pengembangan rantai pasok yang efisien, serta pemanfaatan teknologi tepat guna agar potensi daerah benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam setiap inisiatif pembangunan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, agar generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaatnya. Pemerintah daerah perlu mendorong model usaha ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga keuangan. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi di Kabupaten Manggarai tidak hanya akan tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, mandiri, dan tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.

4. Ketahanan sosial budaya

Ketahanan sosial budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas budaya, harmoni sosial, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Manggarai. Sebagai daerah yang memiliki warisan budaya, tradisi adat, dan nilai-nilai lokal, Manggarai menghadapi tantangan modernisasi dan arus globalisasi yang dapat melunturkan jati diri masyarakat. Perubahan gaya hidup, degradasi nilai-nilai kearifan lokal, serta berkurangnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, penguatan ketahanan sosial budaya harus diarahkan pada pelestarian nilai adat, pengembangan budaya lokal sebagai aset pembangunan, dan peningkatan literasi budaya di semua jenjang pendidikan.

Selain pelestarian budaya, ketahanan sosial juga mencakup kemampuan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial, bencana, dan perubahan sosial-ekonomi. Pemerintah daerah perlu membangun sistem sosial yang inklusif,

memperkuat peran lembaga adat dan komunitas lokal dalam mediasi sosial, serta meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan karakter, solidaritas sosial, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan memperkuat ketahanan sosial budaya, Kabupaten Manggarai tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika zaman secara harmonis dan berkelanjutan.

5. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas

Infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai. Saat ini, masih terdapat banyak wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi penghambat utama aksesibilitas layanan publik, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus untuk memenuhi aspek teknis, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan, aspek sosial-budaya, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal perlu diperkuat guna mempercepat realisasi proyek-proyek strategis. Dengan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, Manggarai dapat mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah secara menyeluruh

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pengelolaan sampah terpadu

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Manggarai mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam. Aktivitas pertanian, pemukiman, serta pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti rehabilitasi lahan kritis, konservasi sumber daya air, dan penegakan regulasi lingkungan secara konsisten. Selain itu, edukasi publik dan penguatan peran komunitas lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan harus menjadi bagian penting dalam setiap program pembangunan.

Di sisi lain, letak geografis Manggarai yang rawan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir menuntut adanya sistem ketahanan bencana yang lebih tangguh dan terintegrasi. Pemetaan risiko, peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, serta sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus dikembangkan. Di samping itu, pengelolaan sampah yang masih menjadi persoalan besar di kawasan perkotaan dan pedesaan perlu dibenahi melalui pendekatan terpadu seperti pemilahan, daur ulang, dan pembangunan infrastruktur persampahan yang memadai. Dengan sinergi ketiga aspek ini lingkungan, kebencanaan, dan persampahan, Kabupaten Manggarai dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

7. Tata kelola kolaboratif, bersih dan inovatif melayani

Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, bersih, dan inovatif merupakan pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Kabupaten Manggarai menghadapi tantangan dalam

meningkatkan kinerja aparatur, efisiensi pelayanan publik, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menekankan pada integritas, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas ASN agar lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan. Pendekatan kolaboratif antar instansi, lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha juga penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Di samping itu, inovasi pelayanan publik perlu terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pemerintahan. Transformasi digital akan mendorong layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan minim birokrasi. Inovasi juga mencakup penyederhanaan prosedur layanan, penyusunan kebijakan berbasis data, dan penguatan budaya kerja berbasis hasil. Dengan tata kelola yang terbuka, kolaboratif, dan inovatif, Kabupaten Manggarai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta membangun pemerintahan daerah yang lebih modern dan melayani secara efektif.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah serta program prioritas kepala daerah. Rumusan visi dan misi merupakan petunjuk bagi perumusan tujuan dan sasaran, sedangkan rumusan tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan pada periode perencanaan lima tahun ke depan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya. Bab ini juga turut menjelaskan program prioritas kepala daerah selama lima tahun ke depan.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Manggarai merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 adalah:

Visi

"Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing".

SEJAHTERA

Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, guna menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Manggarai.

BERSIH

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Makna "bersih" juga mencakup peningkatan integritas aparatur sipil negara, pelayanan publik yang jujur dan profesional, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, nilai ini turut merefleksikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan hidup, yang menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang tinggal yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

BERKELANJUTAN

Menjalankan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya dan kualitas hidup bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan penekanan pada pelestarian sumber daya alam, pengelolaan lingkungan yang bijak, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hasil-hasil pembangunan

BERDAYA SAING

Kabupaten Manggarai sebagai daerah yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global dengan tetap berpijak pada karakteristik dan budaya lokal.

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera: Kata kunci *"sejahtera"* dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ini mencerminkan tujuan utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya merujuk pada peningkatan

pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mencakup beberapa aspek lain meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta akses terhadap pelayanan publik yang adil dan merata. Dalam konteks ini, kata *"sejahtera"* menjadi arah strategis yang menekankan pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, guna menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Manggarai.

Bersih: Kata kunci *"bersih"* dalam visi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Makna *"bersih"* juga mencakup peningkatan integritas aparatur sipil negara, pelayanan publik yang jujur dan profesional, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, nilai ini turut merefleksikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan hidup, yang menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang tinggal yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Dengan demikian, *"bersih"* menjadi landasan moral dan etika dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Berkelanjutan: Kata kunci *"berkelanjutan"* dalam visi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya dan kualitas hidup bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan penekanan pada pelestarian sumber daya alam, pengelolaan lingkungan yang bijak, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks ini, *"berkelanjutan"*

menjadi prinsip dasar agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak fondasi kehidupan sosial dan ekologis Kabupaten Manggarai.

Berdaya Saing: Kata kunci "berdaya saing" dalam visi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai menunjukkan tekad pemerintah daerah untuk mendorong potensi lokal agar mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan global. Upaya Perwujudan daya saing ini dibangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis keunggulan lokal, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas infrastruktur penunjang. Selain itu, kata kunci "berdaya saing" merujuk pada pentingnya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, sehingga produk, layanan, dan tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai memiliki nilai tambah dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, visi "berdaya saing" menempatkan Kabupaten Manggarai sebagai daerah yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global dengan tetap berpijak pada karakteristik dan budaya lokal.

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Manggarai, RPJMD Provinsi NTT,
dan RPJMN

Visi			
RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045	**RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029**	**RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2025-2045**	**RPJMN 2025-2029**
"Manggarai yang Mandiri, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045: *Paka Bolek Loke, Baca Tara*".	**"Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan dan Berdaya Saing"**	**"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**	**"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPD Kabupaten Manggarai dan Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai mendukung pencapaian kondisi jangka panjang Kabupaten Manggarai yang mandiri, maju, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas Tahun 2045: Paka Bolek Loke, Baca Tara. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur upaya perwujudan NTT yang maju, cerdas, sehat, Sejahtera dan berkelanjutan. Dalam konteks nasional, RPJMD Kabupaten Manggarai mendukung pencapaian Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan yaitu "Kabupaten Manggarai yang sejahtera, bersih, berkelanjutan dan berdaya saing" terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan.

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
2. Misi 2: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Misi 3: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana
4. Misi 4: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera
5. Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Berikut penjelasan pada masing-masing Misi:

Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

Misi ke-1 pada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 ini menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah. Misi ini mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi sosial melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik, tetapi juga dari kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Demikian juga dengan layanan kesehatan yang diarahkan untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang memadai, terjangkau, dan merata, terutama di wilayah terpencil dan kurang berkembang.

Selain itu, Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan sosial yang adaptif, terutama dalam menghadapi berbagai krisis seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan iklim. Perlindungan ini harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam kondisi sosial tertentu, sehingga perlindungan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan menjadi kunci untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi serta meningkatkan ketahanan sosial secara menyeluruh di tingkat lokal

Lebih lanjut, misi ini juga menunjukkan kesadaran bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk mendorong daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. SDM yang sehat, cerdas, dan sejahtera akan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta menciptakan inovasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan kesehatan menjadi langkah strategis jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga ekonomi dan budaya. Dengan memastikan bahwa layanan tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan, Pemerintah

Kabupaten Manggarai menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Misi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; pendidikan berkualitas yang memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup; dan kesetaraan gender yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan serta anak perempuan.

Misi 2: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan

Misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan potensi lokal. Fokus utama dari misi ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sektor-sektor konvensional, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan komunitas kreatif untuk turut berperan aktif. Dengan mendorong sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan, kuliner lokal, pariwisata berbasis budaya, serta teknologi digital, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah.

Misi ini juga menunjukkan arah pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Inovasi dalam tata kelola, layanan publik, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan menerapkan pendekatan ini, Kabupaten Manggarai tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam angka, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan inklusif. Misi ini menegaskan pentingnya peran kreativitas dan

inovasi sebagai pondasi utama dalam mencapai visi jangka menengah dan panjang daerah.

Misi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan tanpa kemiskinan yang mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk; tanpa kelaparan yang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan; tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tenaga kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak.

Misi 3: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana

Rumusan misi ke-3 dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi situasi krisis, baik yang bersifat alam maupun non-alam. Ketahanan masyarakat tidak hanya mengacu pada kemampuan fisik atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi risiko seperti bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi), perubahan iklim, wabah penyakit, maupun ancaman sosial dan ekonomi. Melalui edukasi, pelatihan, dan penguatan kelembagaan lokal, masyarakat diharapkan mampu merespons dengan cepat dan tepat saat terjadi situasi darurat.

Misi ini juga turut menekankan pada pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya dalam membentuk sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam membangun infrastruktur yang tahan bencana, memperkuat sistem peringatan dini, serta menyediakan dukungan logistik dan layanan darurat yang memadai. Dengan membangun ketahanan dari tingkat keluarga hingga komunitas, diharapkan dampak negatif dari berbagai ancaman

bisa diminimalisir, sekaligus memperkuat rasa aman dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Misi ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang proaktif dan berorientasi pada keberlanjutan serta perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Misi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan penanganan perubahan iklim yang mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Misi 4: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera

Misi ke-4 dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyediakan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah dan dapat diakses oleh masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai di Kabupaten Manggarai merupakan dukungan untuk memperkuat ketahanan pangan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, optimalisasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, mendukung kepentingan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur diharapkan mampu menumbuhkan simpul baru pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dalam lima tahun ke depan akan berfokus pada penguatan konektivitas transportasi dan infrastruktur wilayah termasuk infrastruktur transportasi strategis seperti jalan dan pelabuhan kecil, pembangunan sistem perpipaan air bersih, pembangunan embung dan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan, pembangunan irigasi untuk pertanian efisien, pembangunan infrastruktur penyimpanan untuk penguatan ketahanan air, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sentra ekonomi lokal, pembangunan pusat industri kecil dan menengah berbasis produk lokal, dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk promosi dan pemasaran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Fokus rumusan misi keempat tersebut berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai.

Misi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur yang bertujuan membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi; air bersih dan sanitasi yang memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan serta sanitasi untuk semua; dan kota dan permukiman berkelanjutan yang membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembenahan sistem dan prosedur administrasi agar lebih efisien dan efektif. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas.

Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi strategi krusial dalam mendukung reformasi birokrasi. Digitalisasi pelayanan publik, seperti penggunaan aplikasi *e-government*, sistem informasi manajemen, dan platform pelayanan daring, dapat mempercepat proses pelayanan serta meminimalisir potensi penyimpangan. Adanya dukungan teknologi diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan terbuka, tanpa harus menghadapi hambatan

birokrasi yang berbelit. Inisiatif ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Misi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, serta menyediakan akses keadilan bagi semua; dan kemitraan untuk mencapai tujuan yang meningkatkan implementasi sarana dan memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Lima misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang tertuang dalam rumusan visi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian dan target Pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan antara visi dan misi dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:

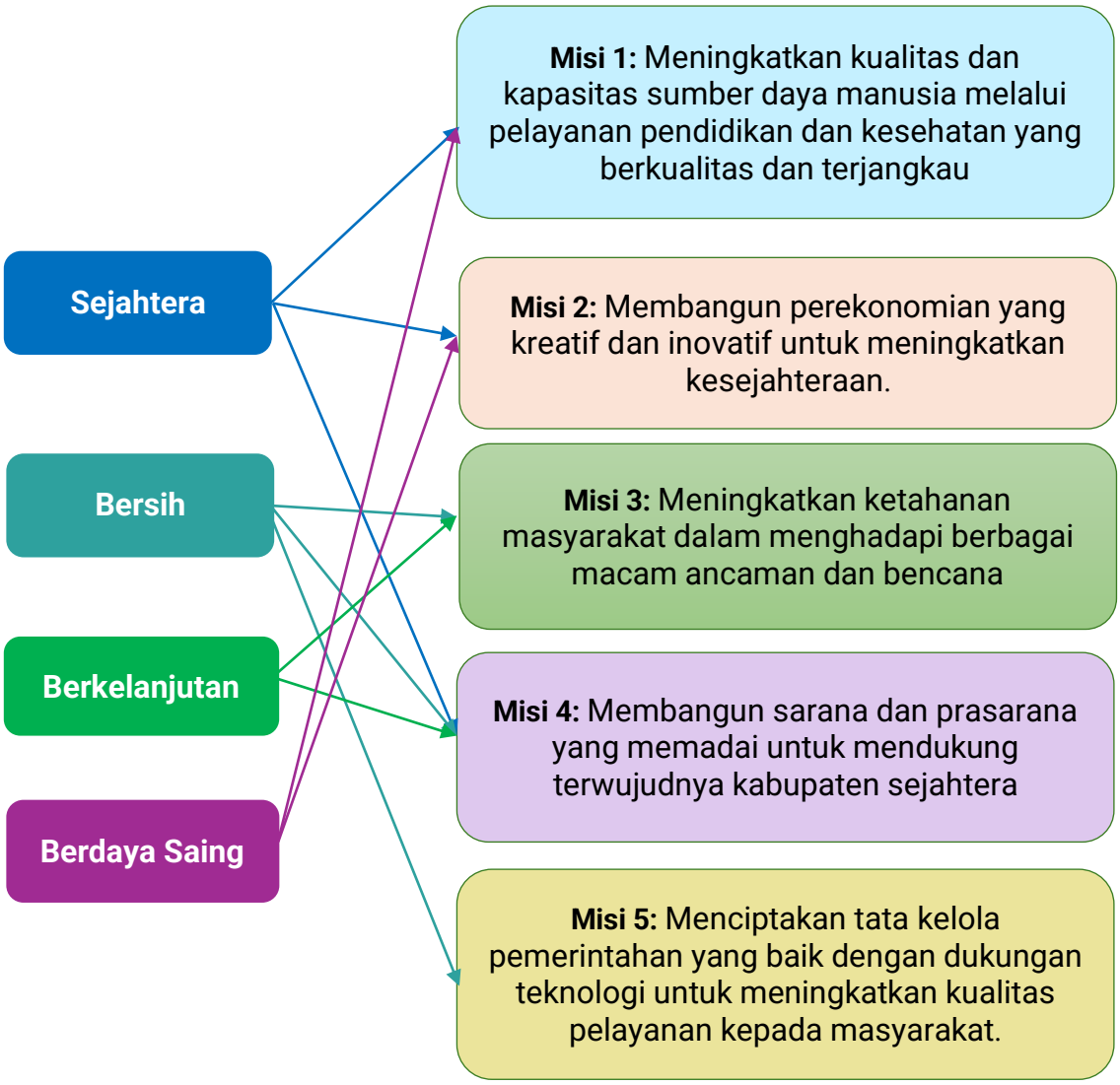

Gambar 3. 1 Keterkaitan Kata Kunci Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa setiap misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan setiap kata kunci yang terdapat pada Visi RPJMD Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergitas antara kondisi yang ingin dicapai dengan cara yang akan dilakukan. Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan misi RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, rumusan misi dalam RPJMD Kabupaten Mangagrai Tahun 2025-2029 juga perlu disandingkan dengan isu strategis hasil dari pemetaan permasalahan dan potensi daerah yang

telah dilakukan. Berikut merupakan hasil penyandingan antara misi daerah dengan isu strategis daerah:

Tabel 3. 2 Penyandingan Misi dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Misi Daerah	Isu Strategis Daerah
Misi 1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif
Misi 2 Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan	Pengembangan ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan berbasis potensi daerah
Misi 3 Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana	Ketahanan sosial budaya
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pengelolaan sampah terpadu
Misi 4 Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera	Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas
Misi 5 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Tata kelola kolaboratif, bersih dan inovatif melayani

Penyandingan misi daerah dan isu startegi daerah menunjukkan bahwa rumusan misi merupakan intervensi yang mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang dinlai menjadi isu strategis daerah. Kelima misi daerah selama lima tahun mendatang menyasar tujuh isu strategis daerah. Berbagai misi ini merupakan upaya pemerintah dalam mengintervensi berbagai isu yang dianggap penting untuk direspons oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang.

3.1.2.1 Penyandingan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Manggarai dirumuskan dengan memperhatikan rencana Pembangunan pada dokumen lainnya, baik di level nasional maupun provinsi. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas Pembangunan antara perencanaan Pembangunan di level nasional, perencanaan Pembangunan di level Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan perencanaan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan penyandingan visi misi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN, RPJMD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045.

Tabel 3. 3 Penyandingan Misi RPJMD Manggarai dengan Misi RPJPD Manggarai, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan RPJMN

Misi			
RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029	**RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029**	**Asta Cita (Misi RPJMN 2025-2029)**
Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	**Misi 1:** Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif	**Misi 2:** Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT)	**Asta Cita 4**: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas
		Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)	

Misi			
RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029	**RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029**	**Asta Cita (Misi RPJMN 2025-2029)**
Misi 2: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.	**Misi 2:** Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah	**Misi 1:** Memastikan infratsruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	**Asta Cita 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		Misi: 4 Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	**Asta Cita 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 3: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana	**Misi 6:** Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	**Misi 5:** Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	**Asta Cita 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia
	Misi 7: Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, supremasi hukum, demokrasi		**Asta Cita 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat

Misi			
RPJMD Kabupaten Manggarai 2025-2029	**RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029**	**Asta Cita (Misi RPJMN 2025-2029)**
	substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah		beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah menuju pencapaian Indonesia Emas		
Misi 4: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera	**Misi 3:** Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan	**Misi 1:** Memastikan infratsruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	**Asta Cita 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	**Misi 5:** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, akuntabel, dan inovatif berbasis IPTEK	**Misi 5:** Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	**Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Sumber: Analisis, 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Setiap tujuan disertai dengan sasaran yang merinci kondisi spesifik yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Berikut ini merupakan perumusan tujuan, sasaran, serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi: **"Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan dan Berdaya Saing"** **Misi 1** Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,35	69,35	70,22	71,09	71,96	72,61	72,83	
		Meningkatnya akses, kualitas, dan daya saing pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	72,00	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,89	70,71	70,95	71,18	71,42	71,65	71,89	
			Prevalensi Stunting	Persen	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,465	0,375	0,351	0,326	0,301	0,276	0,251	
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,04	55,88	57,41	58,93	60,46	61,98	63,51	
Misi 2: Membangun perekonomian	Meningkatnya perekonomian yang menyejahterakan		Indeks daya saing daerah	Nilai	3,56	3,60	3,63	3,67	3,70	3,74	3,78	
			Tingkat Kemiskinan	Persen	19,01	18,88	18,55	18,23	17,90	17,58	17,25	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan **Misi 4** Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera.	dan berdaya saing	Menurunnya ketimpangan dan pengangguran	Indeks Gini	Nilai	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,17	1,14	1,11	1,08	1,06	1,03	1,01	
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
			PDRB per Kapita	Juta	10,161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	75,69	78,00	79,31	80,61	81,91	83,22	84,52	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	NIlai	NA	84,46	84,56	84,98	85,34	85,87	86,67	
Misi 3 Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Persentase Penurunana Emisi GRK	Persen	NA	34,27	37,12	39,96	42,81	45,65	48,50	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NIlai	76,69	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67	
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	NA	0,10	0,54	1,08	1,63	2,17	2,71	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
bencana		Meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Nilai	142,09	141,97	139,73	137,49	135,24	133	130,76	
Misi 5 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Tata kelola pemerintahan semakin berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	67,66	68,66	69,66	70,66	71,66	72,66	73,66	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan melayani	Nilai SAKIP	Nilai	64,81	65,97	66,84	67,71	68,59	69,46	70,33	
			Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai	67,39	72,18	76,41	80,64	84,87	89,10	93,33	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,78	3,82	3,86	3,89	3,93	3,97	4,01	

Sumber: Analisis, 2025

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan kondisi dalam bentuk visi, tujuan dan sasaran membutuhkan berbagai agenda pembangunan untuk mencapainya. Agenda pembangunan merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Secara garis besar, sub bab ini mencakup empat aspek yaitu penahapan pembangunan RPJMD, lokus pembangunan wilayah, program prioritas daerah, dan arah kebijakan setiap misi.

3.3.1 Strategi

3.3.1.1 Tahapan/Tema Pembangunan RPJMD

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi sebagai pentahapan pembangunan dirumuskan dalam bentuk tema pembangunan tahunan yang selanjutnya dapat menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tema pembangunan setiap tahun Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

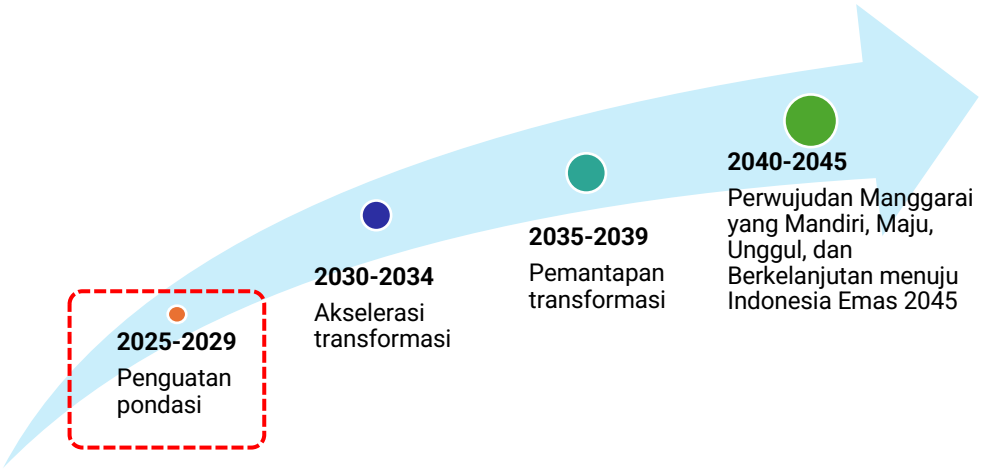

Gambar 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045

Gambar 3. 3 Tahapan/Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2026-2030

Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Manggarai memiliki tema pembangunan setiap tahunnya. Tema tersebut selaras dengan tema periode pertama RPJPD Kabupaten Manggarai 2025-2029 yaitu penguatan fondasi pembangunan. Adapun tema pembangunan per tahun pada RPJMD Kabupaten Manggarai yaitu:

1. **Tahap 1 Tahun 2026: Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal**

Arah kebijakan tahunan Kabupaten Manggarai yang berfokus pada "Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal" mencerminkan komitmen untuk memaksimalkan sumber daya dan keunggulan yang dimiliki daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan, serta produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar regional maupun nasional. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Manggarai berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia agar mampu bersaing secara produktif dan berkelanjutan.

2. **Tahap 2 Tahun 2027: Peningkatan daya saing daerah berbasis sektor unggulan**

Arah kebijakan tahunan Kabupaten Manggarai yang menitikberatkan pada "Peningkatan daya saing daerah berbasis sektor unggulan" bertujuan untuk memperkuat posisi strategis daerah melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Fokus kebijakan ini adalah mendorong inovasi, produktivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta menarik investasi, sehingga sektor unggulan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3. **Tahap 3 Tahun 2028: Peningkatan daya saing daerah berbasis pemerataan Pembangunan**

Arah kebijakan tahunan Kabupaten Manggarai yang berfokus pada "Peningkatan daya saing daerah berbasis pemerataan pembangunan" bertujuan

untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kabupaten, termasuk daerah terpencil dan kurang berkembang, mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan peningkatan konektivitas antarwilayah sehingga seluruh potensi daerah dapat dioptimalkan secara seimbang dan inklusif.

4. **Tahap 4 Tahun 2029: Perwujudan daya saing daerah yang menyejahterakan**

Arah kebijakan tahunan Kabupaten Manggarai yang berorientasi pada "Perwujudan daya saing daerah yang menyejahterakan" menekankan pentingnya pembangunan daerah yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan mengintegrasikan aspek kesejahteraan dalam pengembangan daya saing, pemerintah daerah berupaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga kemajuan daerah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. **Tahap 5 Tahun 2030: Pemanfaatan konsolidasi Pembangunan berkelanjutan**

Arah kebijakan tahunan Kabupaten Manggarai yang mengusung "Pemanfaatan konsolidasi pembangunan berkelanjutan" bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan berorientasi jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsolidasi pembangunan berkelanjutan mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, keterlibatan aktif masyarakat,

serta integrasi kebijakan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Manggarai berupaya menciptakan pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang melalui pelestarian lingkungan, peningkatan ketahanan ekonomi, dan pemerataan manfaat pembangunan.

3.3.1.2 Lokus Pembangunan Wilayah

Lokus pembangunan wilayah merupakan bagian dari strategi yang memiliki peran penting untuk memandu pembangunan kewilayahan secara lebih komprehensif. Lokus pembangunan wilayah dapat merujuk pada beberapa arahan yang ada pada dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen RPJMN (lampiran IV), dokumen RTRW dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dalam konteks dokumen RPJMN, tema pembangunan jangka menengah untuk Pulau Bali-Nusa Tenggara yakni sebagai *Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional.* Tema tersebut kemudian didukung indikasi intervensi untuk Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi NTT dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan: Pariwisata Prioritas Labuan Bajo (Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuhan Bajo-Flores (Manggarai, Ngada, Ende)	Perluasan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata dengan output: pembangunan jalan akses simpul transportasi, jalan strategis termasuk jalan lintas utara (Labuan Bajo-Terang-Kedindi) dan jalan daerah, serta Pelabuhan kapal pesiar (*cruise*) • Pengembangan atraksi dengan output: dukungan pelaksanaan event daerah, nasional, dan internasional • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata dengan output: SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan, dan revitalisasi pasar rakyat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan ketrampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan output: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan output: promosi investasi dan promosi destinasi terpadu • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan output: pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta peningkatan akses pembiayaan modal • Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan output: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, perlindungan jalur jelajah satwa Komodo, penyediaan jalur evakuasi bencana, pembangunan rambu suar dan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pengadaan ambulan laut
2	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan tranas, dan jalan 3TP, dengan output: jalan Trans Flores, Trans Timor, dan Trans Sumba, penanganan jalan daerah dan jalan 3TP, dan jalan akses simpul transportasi • Pengembangan Pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan output: Pelabuhan Kupang, Nun Baun Sabu, Wae Kelambu, Raijua, Lewoleba, Salura, Marapokat, Seba, Ndao, Baranusaa dan Wini, serta jaringan pelayaran dan sarana kapal Roro • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan output: Bandara El Tari, Bandara Komodo, dan Bandara Lede Kalumbang • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan output: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital
3	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C3: Kab. Manggarai Barat* (Padi, Pangan Akuatik • C4: Kab. Manggarai* (Padi, Sapi) • C5: Kab. Manggarai Timur* (Padi, Pangan Akuatik) • C6: Kab. Sikka* (Pangan Akuatik) • C7: Kab. Lembata* (Babi) • C10: Kab. Timor* Tengah Selatan (Jagung dan Sapi) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Alor** (Padi, Jagung, Pangan Akuatik) • Kab. Sabu Raijua** (Padi, Jagung, Sorgum, Kambing) Keterangan: *): indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **): Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau indeks ketahanan pangan rentan/ sangat rentan	Penguatan kawasan swasembada padangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui: • Penguatan produksi dengan output: optimalisasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, areal pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih tanaman pangan dan bibit ternak unggul, bantuan hijauan pakan ternak, layanan kesehatan dan vaksin hewan, serta pengembangan olahan hasil komoditas pangan dan produk turunannya • Pengembangan infrastruktur dan penyediaan saran prasarana pendukung, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, pengadaan gedung lumbungan pangan, serta penyediaan sarana pra, pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani, kelompok tani, nelayan, dan kelompok nelayan), dengan output: penguatan dan pelatihan kelompok tani yang terlatih GAP (*Good Agriculture Practices), GHP* (*Good Handlimg Practices),* dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), serta penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah terbentuk

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pembentukan/ pengembangan dan pendampingan koperasi, IKM/UMKM dan BUMDes, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan output: pengembangan kawasan padi, jagung, dan sorgum, penyaluran benih tanaman pangan dan bibit ternak unggul, bantuan hijauan pakan ternak, layanan kesehatan dan vaksin hewan, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
4	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C4: Kab. Manggarai* • C8: Kab. Kupang* Kawasan Rentan Energi: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** • Kab. Timor Tengah Selatan** Keterangan: *): indikasi lokasi yang memiliki potensi EBT tinggi **): Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektifikasi rendah/Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisis energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel yang pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan output: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTM), serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peningkata perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan output: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan output: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan output: event prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembngan event film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan output: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
6	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Peningkatan gizi, dengan output: pelaksanaan deteksi gini masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock,* serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta penambahan vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan output: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, serta gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, serta komunikasi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatn fasillitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengutan implementasi program KB
7	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peninngkatan perilndungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan output: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapangan iklim tematik wilayah timur, serta fasilitas dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasisi masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomaly iklim, serta penerapan *nature-based solutions,* pengembangan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan output: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan output: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan

Sumber: Lampiran IV, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Selain melihat indikasi intervensi RPJMN untuk wilayah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai, lokus pembangunan willayah juga bisa merujuk program prioritas, dokumen RTRW, maupun dokumen lainnya yang relevan.

Tabel 3. 6 Strategi Pembangunan Kewilayahan

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**		
1	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**		
a	Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Ruteng untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/ kota	Kecamatan Langke Rembong	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan Swasta
b	Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Reok untuk kegiatan utama pelayanan umum (*Civic Centre*) dan pusat koleksi dan distribusi perdagangan dan Jasa regional, serta transportasi regional	Kecamatan Reok	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan Swasta
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**		
2. 1	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Jalan**		
a	Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Kolektor Primer	a. Jln. Satar Tacik (Ruteng); b. ruas Reo – Dampek – Pota; c. ruas Ruteng – Golo Cala; dan d. ruas Sp. Cumbi - Golo Cala – Iteng.	APBN, APBD, Provinsi NTT
b	Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, Hibah
2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**		
	Kajian pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Dintor	Pelabuhan Dintor di Kecamatan Satar Mese Barat	APBD
	Pengembangan Terminal Khusus yaitu Depo Pertamina Reo	Kecamatan Reok	BUMN, swasta
	Pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Reo Kecamatan Reok; dan	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai
	Kajian pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Nanga Ramut	PPI Nanga Ramut Kecamatan Satar Mese Barat	APBD
3.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi**		
3.1	**Perwujudan Rencana Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**		
3.1.1	**Pengembangan Infrastruktur Pembangkitan tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**		

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	a. PLTP Ulumbu Unit 1, Unit 2 di Kecamatan Satar Mese; b. PLTP Ulumbu Unit 3, Unit 4 di Kecamatan Satar Mese; dan c. PLTP Ulumbu Unit 5, Unit 6 di Kecamatan Satar Mese	APBN, Swasta, Sumber lain yang sah
	Pembangunan penunjang fasilitas PLTP terdiri dari: a. wellpad D b. wellpad E c. wellpad F d. wellpad G e. wellpad H f. wellpad I g. wellpad J	Kecamatan Satar Mese	APBN, Swasta, Sumber lain yang sah
3.1.2 Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung			
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. SUTT 150 kV Ruteng terdapat di: a) Kecamatan Langke Rembong; dan b) Kecamatan Satar Mese. b. SUTT 70 kV Labuan Bajo – Ruteng terdapat di: a) Kecamatan Ruteng; b) Kecamatan Satar Mese; dan c) Kecamatan Satar Mese Utara. c. SUTT 70 kV Ruteng– Bajawa terdapat di: a)Kecamatan Langke Rembong; b)Kecamatan Ruteng; dan c)Kecamatan Wae Rii.	BUMN
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	seluruh kecamatan	Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR),	seluruh kecamatan	Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
4. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan fiber optik	a.Kecamatan Cibal; b.Kecamatan Langke Rembong; c.Kecamatan Lelak; d.Kecamatan Reok; e.Kecamatan Ruteng; f.Kecamatan Satar Mese; g.Kecamatan Satar Mese Utara; dan h.Kecamatan Wae Rii.	BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap	a.Kecamatan Langke Rembong dan b.Kecamatan Reok	BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler	a.Kecamatan Cibal; b.Kecamatan Cibal Barat; c.Kecamatan Langke Rembong (dua puluh empat lokasi); d.Kecamatan Lelak; e.Kecamatan Rahong Utara; f. Kecamatan Reok; g. Kecamatan Reok Barat; h. Kecamatan Ruteng (dua lokasi); i. Kecamatan Satar Mese; j. Kecamatan Satar Mese Barat; dan k. Kecamatan Satar Mese Utara.	BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
	Penerapan telekomunikasi berbasis teknologi modern (Data)	Seluruh kecamatan	BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai
	Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah wilayah pusat pertumbuhan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah
	Pembentukan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibu kota kabupaten	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah
	Pembangunan secara bersama pada satu tower BTS dalam	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama.		Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah
	Pengembangan ducting bersama	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai
5	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**		
5.1	**Perwujudan Prasarana sumber daya air**		
5.1.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**		
	kajian rencana pembangunan jaringan irigasi primer	seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
	Pengembangan jaringan irigasi primer	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Satar Mese; c. Kecamatan Satar Mese Barat; d. Kecamatan Satar Mese Utara; dan e. Kecamatan Wae Rii.	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, swasta, CSR, Hibah
	Pengembangan jaringan irigasi sekunder	a. Kecamatan Cibal Barat; b Kecamatan Langke Rembong; c. Kecamatan Ruteng; dan d.Kecamatan Satar Mese Barat.	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
	Pengembangan jaringan irigasi tersier	a. Kecamatan Cibal Barat; b. Kecamatan Langke Rembong c. Kecamatan Rahong Utara; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Satar Mese Barat	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
5.2.2	**Bangunan sumber daya air**		
	Pengembangan dan pemeliharaan Bendungan	a. Bendung/Intake Mese di: 1. Kecamatan Satar Mese (2 lokasi); 2 Kecamatan Satar Mese Barat; dan 3 Kecamatan Satar Mese Utara (2 lokasi). b. Bendungan Wae Mantar I dan II di Kecamatan Satar Mese	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, CSR, Hibah, Swasta

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Pengembangan dan pemeliharaan Embung	a. Embung Kenda di Kecamatan Wae Rii; b. Embung Nenu di Kecamatan Cibal; c. Embung Wae Lerong di Kecamatan Langke Rembong; dan d. Embung Wae Mau II di Kecamatan Satar Mese Barat.	APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, CSR, Hibah, Swasta
	Pengembangan dan pemeliharaan Sumur Bor	a. Kecamatan Reok (8 lokasi); b. Kecamatan Satar Mese; dan c. Kecamatan Satar Mese Barat.	APBD Kabupaten Manggarai
	Konservasi lahan	Kecamatan Reok	APBD, Swasta, CSR, dan Hibah
	Pembuatan tanggul dan perkuatan tebing	Seluruh kecamatan	APBD, Swasta, CSR, dan Hibah
	Normalisasi sungai	Seluruh kecamatan	APBD, Swasta, CSR, dan Hibah
6	**Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**		
6.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**		
6.1.1	**Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**		
	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku yang berasal dari mata air di seluruh kecamatan, unit air baku yang berasal dari pengolahan air di air baku sungai dan mata air serta pemurnian air laut	a. Kecamatan Cibal (empat lokasi); b. Kecamatan Cibal Barat (dua lokasi); c. Kecamatan Langke Rembong (lima belas lokasi); d. Kecamatan Reok (enam lokasi); e. Kecamatan Ruteng; f. Kecamatan Satar Mese (lima belas lokasi); g. Kecamatan Satar Mese Barat (tiga lokasi); dan h. Kecamatan Wae Rii (enam lokasi).	BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan air baku	a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Ruteng; dan b. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong.	BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi yaitu IKK Ruteng Perumda Tirta Komodo	Kecamatan Langke Rembong	BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi	a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng; b. IKK Golowoi melintas di Kecamatan Cibal Barat; c. IKK Iteng Satar Mese melintas di Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat; d. IKK Lake Satar mese melintas di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Utara; e. IKK Narang melintas di Kecamatan Satar Mese Barat; f. IKK Pagal Cibal melintas di Kecamatan Cibal; g. IKK Reo melintas di Kecamatan Reok; h. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong; dan i. IKK Wae Rii melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Wae Rii.	BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan	IKK Wai Rii Kantor Camat Wae Rii di Kecamatan Wae Rii	BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai
6.1.2 Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan penangkap mata air	a. IKK Golowoi Reservoir di Kecamatan Cibal Barat (2 lokasi); b. IKK Iteng Satar Mese Reservoar 27 m3 di Kecamatan Satar Mese; c. IKK Iteng Satar Mese Reservoar Kewok 180 m3 di Kecamatan Satar Mese;	APBD Kabupaten Manggarai, BUMD Kabupaten Manggarai

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		d. IKK Iteng Satar Mese Reservoir di Kecamatan Satar Mese (3 lokasi); e. IKK Lake Satar mese Reservoir di Kecamatan Satar Mese Utara; f. IKK Narang Reservoir di Kecamatan Satar Mese Barat; g. IKK Pagal Cibal Reservoir di Kecamatan Cibal; h. IKK Reo Reservoir Golo Longgo di Kecamatan Reok; i. IKK Ruteng Reservoir di Kecamatan Langke Rembong (2 lokasi); j. IKK Wae Rii Bak Pelepas Tekan di Kecamatan Wae Rii; k. IKK Wae Rii Reservoir di Kecamatan Wae Rii (2 lokasi); l. IKK Wae Rii Reservoir 400 m3 di Kecamatan Langke Rembong; m. Reservoir Nterlango 1252 mdpl di Kecamatan Ruteng.	
6.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**		
6.2.1	**Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**		
	Pengembangan sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Wae Rii.	KPBU, APBD Kabupaten Manggarai, Pinjaman Daerah
	Pengembangan sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Kecamatan Langke Rembong	KPBU, APBD Kabupaten Manggarai, Pinjaman Daerah
	Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
6.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**		
	Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 di rumah Sakit dan TPA	Kecamatan Langke Rembong (tiga lokasi)	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
6.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**		

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Pengembangan sistem persampahan 3R (*reduce, reuse dan recycle*), dan pengembangan prasarana dan sarana persampahan untuk mencukupi kebutuhan dari lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
6.5	**Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana**		
	Pemantapan jalur evakuasi bencana melalui jalur evakuasi, titik lokasi evakuasi dan rambu evakuasi	a. jalan arteri primer, melintas di: 1. Jln. A. Yani (Ruteng); 2. Jln. Komodo (Ruteng); 3. Jln. Motang Rua (Ruteng); 4. Jln. Ranaka (Ruteng); 5. Jln. Wae Ces (Ruteng); 6. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo); 7. ruas Bts. Kota Ruteng Km. 210; 8. ruas Bts. Kota Ruteng – Malawatar; dan 9. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo – Kedindi. b. jalan kolektor primer, melintas di: 1. Jln. Satar Tacik (Ruteng); 2. ruas Reo - Dampek – Pota; 3. ruas Ruteng – Golo Cala; dan 4. ruas Sp. Cumbi - Golo Cala – Iteng. c. jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan; dan d. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.	APBD Kabupaten Manggarai. Swasta, CSR, Hibah
	Pengembangan tempat evakuasi bencana	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Lelak; c. Kecamatan Reok (dua lokasi); d. Kecamatan Reok Barat;	APBD Kabupaten Manggarai. Swasta, CSR, Hibah

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		e. Kecamatan Ruteng; f. Kecamatan Satar Mese; g. Kecamatan Satar Mese Barat (dua lokasi); dan h. Kecamatan Wae Rii.	
6.6	**Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**		
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Satar Mese.	APBD Provinsi NTT
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kecamatan Langke Rembong	APBD Kabupaten Manggarai
B.	**PERWUJUDAN POLA RUANG**		
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**		
1.1	**Perwujudan Badan Air dengan kode BA**		
	Konservasi dan perlindungan badan air;	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta
	Normalisasi	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta
1.2	**Perwujudan Kawasan yang Memberikan perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB**		
1.2.1	**Perwujudan kawasan hutan lindung dengan kode HL**		
1.3	**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS**		
	1. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat; 2. Penyediaan sarana dan prasarana minimum; 3. Pengendalian kegiatan budi daya; dan 4. Pelaksana penyesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap KUZ di kawasan.	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai
1.4	**Perwujudan Kawasan konservasi dengan kode KS**		
1.5	**Perwujudan Kawasan Cagar Budaya dengan kode CG**		
	Pelestarian situs cagar budaya yaitu lingkungan bangunan non gedung	a. Goa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara b. Kampung adat: 1. Kampung adat Niang Todo di Kecamatan Satar Mese Barat	APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		2. Kampung Pongkor di Kecamatan Satar Mese 3. Rumah adat Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat	
1.6	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM**		
	Pengembangan dan perlindungan kawasan ekosistem mangrove	a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; dan c. Kecamatan Satar Mese	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**		
2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan kode HP**		
2.1.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK**		
	Pelepasan dan perwujudan holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan permukiman pedesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektare)	Kecamatan Satar Mese	APBD Kabupaten Manggarai
2.2	**Perwujudan Kawasan Pertanian dengan kode P**		
2.2.1	**Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1**		
	1. pengembangan kawasan tanaman pangan; 2. Pengembangan kegiatan agropolitan; dan 3. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	seluruh kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
	Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan LP2B	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.2.2	**Perwujudan Kawasan Perkebunan dengan kode P-3**		
	1. Pengembangan Kawasan perkebunan; 2. Peningkatan produksi dan produtivitas perkebunan; 3. Peningkatan kualitas dan pemasaran produksi perkebunan; dan 4. Pengembangan produk perkebunan berkelanjutan	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.2.3	**Perwujudan Kawasan Peternakan dengan kode P-4**		

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	1. Pengembangan Kawasan Peternakan; 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah 3. Pengembangan lahan penggembalaan umum	Kecamatan Satar Mese Barat	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan dengan kode IK**		
2.3.1	**Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1**		
	1. Pengembangan perikanan tangkap; dan 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	Kecamatan Reok	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.3.1	**Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2**		
	1. Pengelolaan pembudidayaan ikan; 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; dan c. Kecamatan Satar Mese.	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.4	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE**		
2.4.1	**Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL**		
2.5	**Perwujudan Kawasan Pariwisata dengan kode W**		
	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 3. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Rahong Utara; c. Kecamatan Reok; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Satar Mese Barat.	APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah, KPBU
2.6	**Perwujudan Kawasan Permukiman dengan kode P**		
2.6.1	**Perwujudan kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK**		
	1. Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan; 2. Pengaturan intensitas pemanfaatan kawasan terbangun; 3. Pendistribusian permukiman; 4. Perencanaan kawasan permukiman baru; 5. Pengembangan sarana prasarana permukiman; dan	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Wae Rii.	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	6. Pengaturan perumahan dan permukiman kumuh; dan 7. Peningkatan pelayanan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman		
	Pengembangan ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) pada permukiman perkotaan	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Satar Mese; dan e. Kecamatan Wae Rii.	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.6.2	**Perwujudan kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD**		
	1. Pengembangan Kawasan permukiman pedesaan; 2. Pengembangan sarana prasarana lingkungan; 3. Peningkatan aksesibilitas kota-desa; 4. Peningkatan pelayanan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
2.7	**Perwujudan Kawasan Transportasi dengan kode TR**		
	1. Pengembangan kawasan trasnportasi 2. Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi 3. Pengembangan penggunaan teknologi 4. Penyediaan sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c.. Kecamatan Wae Rii.	APBN, Badan Usaha
2.8	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK**		
	1. Pengembangan Makodim 1612 Manggarai, Koramil 1612-01, Koramil 1612-03, dan Kantor Makoramil 1612-07 2. Penyediaan sarana prasarana minimum kawasan pertahanan keamanan 3. Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Satar Mese	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**		
1	**Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**		
	1. Pengembangan Kawasan agropolitan 2. Penyusunan kajian perencanaan	a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Ruteng; e. Kecamatan Satar Mese; f. Kecamatan Satar Mese Barat; g.Kecamatan Satar Mese Utara; dan h. Kecamatan Wae Rii	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
	1. Kawasan minapolitan dengan prioritas perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri olahan sumber daya laut, industri dan jasa kemaritiman serta pengembangan minawisata; 2. Penyusunan kajian perencanaan detail	a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; c. Kecamatan Satar Mese; dan d. Kecamatan Satar Mese Barat	APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah
	1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Penyusunan kajian perencanaan detail	Kecamatan Satar Mese Barat	ABPD Kabupaten Manggarai, Swasta, Hibah
2	**Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**		
	1. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 2. Pengembangan kebudayaan berupa rumah adat, tradisi budaya, dan lembaga adat 3. Pengembangan pariwisata budaya	4. Goa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara 5. Kampung Adat Ruteng Pu'u di Kecamatan Langke Rembong 6. Kampung Wae Rebo Kecamatan Sater Mese Barat	APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, Hibah, CSR
3	**Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pemberdayagunaan Sumber daya alam dan / teknologi tinggi**		
	Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu	Kecamatan Sater Mese	BUMN, Swasta, dan APBD Kabupaten Manggarai

Sumber: Hasil Analisis RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043, 2025

3.3.1.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/*cross-cutting*, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode cascading kinerja dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Manggarai

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Visi: **Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan dan Berdaya Saing** *Misi 1* ***Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau***	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		Meningkatnya akses, kualitas, dan daya saing pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya layanan pendidikan yang inklusif di semua jenjang	Harapan lama Sekolah	Manggarai Sejahtera	Percepatan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
					Rata-rata Lama Sekolah		Penyediaan afirmasi akses pendidikan untuk daerah kepulauan dan terpencil	
					Skor Literasi Membaca SD dan SMP		Pembangunan sekolah/pembangunan ruang kelas baru, perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana di sekolah	
					Skor Numerasi SD dan SMP		Penerapan SPM bidang pendidikan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program beasiswa bagi tenaga pendidik PAUD	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Angka Kematian Ibu (AKI)		Perluasan upaya promotif dan preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Prevalensi Stunting		Angka Kematian Bayi (AKB)		Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan dengan afirmasi tenaga lokal	
					Persentase puskesmas terakreditasi		Pencegahan dan pengendalian penyakit akibat perubahan iklim	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Persentase rumah sakit terakreditasi		Penuntasan stunting dan eliminasi malaria	Program Pemberdayaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Nilai IKM Lab Kes, Rumah sakit dan Puskesmas		Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Masyarakat Bidang Kesehatan
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan rumah sakit rujukan di daerah terpencil	
							Penguatan posyandu dititik pelayanan	
							Penerapan SPM bidang kesehatan	
							Program bantuan iuran BPJS kesehatan	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Peningkatan partisipasi permpuan pada ranah publik	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Peningkatan perlindungan kekerasan pada Perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
							Penyediaan fasilitas dan ruang publik yang inklusif, dan layak anak	Program Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian kebudayaan	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Manggarai Berdaya Saing	Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
								Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Misi 2: ***Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan***	Meningkatnya perekonomian yang menyejahterakan dan berdaya saing		Indeks daya saing daerah					
			Tingkat Kemiskinan					
		Menurunnya ketimpangan dan pengangguran	Indeks Gini	Meningkatnya kontribusi koperasi dan	Rasio Volume Usaha Koperasi	Manggarai Berdaya Saing	Program inkubasi bisnis untuk wirausaha muda dan UMKM	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 4 ***Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera.***			Tingkat Pengangguran Terbuka	UKM terhadap perekonomian	terhadap PDRB (%)			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
					Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil			Program Pengembangan UMKM
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Menurunnya pengangguran	Tingkat penganggura n terbuka		Optimalisasi pemanfaatan BLK (balai latihan kerja) serta menciptakan peluang usaha bagi para kaum muda dan perempuan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase desa mandiri		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru	Program Administrasi Pemerintahan Desa

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							dan sentra ekonomi lokal	Program Penataan Desa
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
				Meningkatnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Persentase PPKS yang berdaya	Manggarai Sejahtera	Pemanfaatan data registasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk program kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
							Program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan	
							Penerapan SPM bidang sosial	Program Rehabilitasi Sosial

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Program bantuan sosial berbasis data terpadu	Program Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya kualitas pertumbuahan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan sub-sektor pertanian	Manggarai Berdaya Saing	Penerapan pertanian organik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
								Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Manggarai Berkelanjutan	Program pertanian organik berbasis komunitas	Program Penyuluhan Pertanian
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan pangan		food estate berbasis komunitas di lahan potensial	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PDRB per kapita	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (PDRB Industri Pengolahan)	Manggarai Berdaya Saing	Pembangunan pusat industri kecil dan menengah berbasis produk lokal	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum		Penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
							Pengembangan desa wisata berbasis komunitas	
							Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk promosi dan pemasaran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
							Pembangunan kawasan ekonomi kreatif berbasis digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sentra ekonomi lokal	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
								Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Program Promosi Penanaman Modal
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Program Pelayanan Penanaman Modal
				Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks harga konsumen			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
				Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Rasio Luas Daerah terlayani irigasi primer		Pembangunan irigasi untuk pertanian efisien	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Meningkatnya ketahahan pangan daerah	Indeks Ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan Pangan daerah	Indeks Ketersediaan Pangan	Manggarai Berkelanjutan	Pengembangan food estate berbasis komunitas di lahan potensial	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				Akses pangan daerah yang semakin optimal	Indeks Keterjangkauan Pangan			Program Penanganan Kerawanan Pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terwujudnya sumber pangan daerah yang beragam	Indeks Pemanfaatan Pangan		Pengembangan pangan lokal dan diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur daerah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Rasio konektivitas	Manggarai Berdaya Saing	Penguatan konektivitas transportasi dan infrastruktur wilayah	Penyelenggaraan Jalan
								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
								Program Pengelolaan Pelayaran
				Meningkatnya akses permukiman layak huni	Rasio permukiman kumuh	Manggarai Bersih	Rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat	Program Kawasan Permukiman
								Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Program Pengembangan Perumahan
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
							Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi yang inklusif	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang aman dan berkelanjuran	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
							Revitalisasi sistem drainase kota untuk pencegahan banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 3 ***Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana***	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Persentase Penurunan Emisi GRK			Manggarai Berkelanjutan	Pengelolaan Risiko Bencana Dengan Pendekatan Multiaktor	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah		Pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal	
							Pengendalian Bencana Terpadu di Wilayah Pariwisata	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
							Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi dan Perlindungan Pantai Dari Abrasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase titik pantau lingkungan yang memenuhi baku mutu		Penguatan Ketahanan Air Melalui Pembangunan Infrastruktur Penyimpanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Peningkatan peran lembaga adat dalam pembangunan daerah melalui pembangunan Rumah Gendang dan penataan lingkungan sekitar "Mbaru Gendang"	Lingkungan Hidup
					Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan usaha		Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim Untuk Wilayah Pesisir	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu berbasis hulu hilir	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Manggarai Bersih	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		Pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan	
							Penyediaan Fasilitas Bank Sampah di Setiap Desa	
							Program Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular	
Misi 5 ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat***	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi					
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan melayani	Nilai SAKIP	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Manggarai Berdaya saing	Digitalisasi Layanan Publik Dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					Perencanaan Pembangunan Daerah
			Indeks Pengelolaan Keuangan daerah		Peringkat EKPPD			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
								Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
								Program Perekonomian Dan Pembangunan
								Program Dukungan Pelaksanaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas		
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Tugas Dan Fungsi DPRD
								Program Pengelolaan Keuangan Daerah
								Program Kepegawaian Daerah
							Peningkatan Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
								Program Riset Dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya birokrasi yang melayani	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks SPBE		Digitalisasi Layanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3.3.1.4 Program Unggulan Daerah

Program unggulan merupakan program strategis kepala daerah yang terpilih dan dirumuskan berdasarkan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta permasalahan utama daerah. Perumusan program unggulan juga mempertimbangkan berbagai program prioritas pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program unggulan ini akan menjadi prioritas setiap tahun Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adapun program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Program Unggulan Kepala Daerah dan fokus kegiatannya

4 Program unggulan kepala daerah dan fokus kegiatan utama ini dirancang secara spesifik dan strategis untuk menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini bukan sekadar deretan program rutin, melainkan merupakan intervensi prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan dasar, serta transformasi tata kelola pemerintahan. Setiap kegiatan telah dirumuskan dengan memperhatikan aspek kebermanfaatan langsung, keberlanjutan hasil, dan kesinambungan antarprogram lintas sektor, sehingga mampu mempercepat pencapaian indikator-indikator kinerja utama daerah dalam jangka menengah. Dengan demikian, pelaksanaan program ungulan dan kegiatannya menjadi penentu keberhasilan arah pembangunan Kabupaten Manggarai selama lima (5) tahun ke depan. Pelaksanaan program ini dapat berjalan dan berhasil maka diperlukan dukungan pembiayaan yang terukur, kolaborasi dan sinergi antar stakeholders, dan partisipasi aktif Masyarakat. Seluruh program unggulan dan kegiatannya ini diharapkan tidak hanya berdampak dalam pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi kokoh bagi Manggarai yang lebih sejahtera, bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3.3.2 Arah Kebijakan

Strategi sebagai pentahapan pembangunan dan lokus pembangunan kewilayahan, diperkuat dengan arah kebijakan pada setiap misi RPJMD. Arah kebijakan merupakan rincian agenda pembangunan dari setiap misi. Arah kebijakan disusun berbasis pada pemetaan masalah, rumusan strategi dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Berikut arah kebijakan setiap misi RPJMD Kabupaten Manggarai.

Tabel 3. 8 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Manggarai

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1: **Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau**	1. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 2. Peningkatan ketersediaan bangunan gedung pendidikan sesuai standar 3. Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa tepat sasaran 4. Peningkatan literasi dan numerasi siswa 5. Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan 6. Pengarusutamaan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif 7. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan 8. Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan sesuai standar 9. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan bayi 10. Pemenuhan dan Pemerataan distribusi tenaga kesehatan 11. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan 12. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan sesuai standar 13. Intervensi program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting dengan pendekatan mikro; 14. Peningkatan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan 15. Pemutakhiran data penerima bantuan 16. Peningkatan partisipasi perempuan pada ranah publik 17. Peningkatan layanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak 18. Penyediaan fasilitas dan ruang publik yang inklusif, termasuk untuk difabel dan layak anak 19. Peningkatan penyelenggaraan desa ramah perempuan dan peduli anak 20. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik dan pembangunan, serta perumusan anggaran responsif gender

Misi	Arah Kebijakan
Misi 2: **Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan**	1. Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal. 2. Pengembangan Manggarai sebagai sentra produksi babi dan ayam petelur; 3. Peningkatan upaya pendampingan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani dan ternak 4. Pemanfaatan lahan tidur di seluruh wilayah Manggarai sesuai potensi masing-masing 5. Pembangunan pusat/kebun bibit dengan komoditi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan industri seperti kebun bibit porang, kebun bibit tanaman biofarmaka (seperti jahe, kunyit, dll) 6. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, irigasi, dan pasar rakyat. 7. Penerapan inovasi dan teknologi dalam sektor primer, serta peningkatan akses pasar melalui digitalisasi. 8. Peningkatan daya saing produk sektor primer sebagai penopang utama ekonomi dan daya saing nasional. 9. Penguatan keterampilan tenaga kerja berbasis triple skilling melalui pelatihan dan pemagangan kerja 10. Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru Wae Naong dan penambahan kawasan pertumbuhan ekonomi baru lainnya (kawasan Langke Majok, Nggalak/Singkul, Lelak, Poco Leok, dan Satar Mese Barat); 11. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata melalui melalui pemenuhan fasilitas-fasilitas pendukung di daerah tujuan wisata dengan pendekatan 3A (*Attraction, Accessibility, Amenity);*
Misi 3: **Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana**	1. Penguatan sistem peringatan dini 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana 3. Peningkatakan pelatihan dan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat 4. Pembangunan infrastruktur tanguh bencana 5. Penguatan sistem logistik dan cadangan bencana 6. Pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal

Misi	Arah Kebijakan
	7. Peningkatan peran lembaga adat dalam pembangunan daerah melalui pembangunan Rumah Gendang dan penataan lingkungan sekitar "Mbaru Gendang" 8. Memperkuat image pembangunan pariwisata budaya dan religi di kabupaten manggarai 9. Pemanfaatan data dan teknologi untuk mitigasi bencana 10. Penguatan kolaborasi dengan lembaga eksternal 11. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat 12. Peningkatan pengendalian dan pencemaran lingkungan
Misi 4: **Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten sejahtera**	1. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar, terutama air bersih. 2. Penyediaan air minum layak di perkotaan 3. Pembangunan TPA/TPST Ncolang 4. Pembangunan saluran drainase terintegrasi di dalam Kota Ruteng 5. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian 6. Pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 7. Peningkatan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan 8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah. 9. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga didukung pemicuan perubahan perilaku dan penyediaan sarana dan prasarana layanan air minum dan sanitasi yang aman. 10. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 11. Pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata

Misi	Arah Kebijakan
	12. Fasilitasi peningkatan akses terhadap layanan telekomunikasi 13. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang lingkungan hidup dan kebencanaan. 14. Pelaksanaan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan selaras dengan tata ruang dan karakteristik kewilayahan
Misi 5: **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat**	1. Membangun ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi berbasis teknologi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. 3. Digitalisasi layanan publik dengan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. 4. Pemanfaatan teknologi dan data guna mempercepat pengambilan keputusan serta mendorong ekosistem inovasi daerah. 5. Penguatan tata kelola keuangan dan pendapatan daerah dengan sistem berbasis data. 6. Kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi dengan industri dan akademisi untuk inovasi layanan publik yang lebih adaptif. 7. Penerapan sistem pemerintahan berbasis digital untuk menciptakan layanan yang transparan dan efisien.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Seluruh program yang tercantum dalam bab ini merupakan rangkaian rencana program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan program dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah wajib mengacu dan selaras rumusan program, outcome dan indikator outcome yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki keterpaduan, kesinambungan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini merupakan tabel rincian program perangkat daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Rincian Program Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					556.439.398.203		605.861.125.391		654.946.210.432		707.700.314.458		768.765.662.578	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					362.540.897.379		397.749.825.917		437.208.996.024		481.130.627.794		528.805.332.139	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai IKM (Nilai)	-	-	92,66	362.540.897.379	92,9	397.749.825.917	93	437.208.996.024	93,2	481.130.627.794	93,5	528.805.332.139	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	--	--	B		B		B		B		B		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	-	-	90		95		97		98		99		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					184.013.424.240		197.560.267.529		206.474.910.027		214.547.686.190		227.126.888.181	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dan anak disabilitas	APK PAUD (Angka)	82,3	-	85	184.013.424.240	0,87	197.560.267.529	0,89	206.474.910.027	0,9	214.547.686.190	0,92	227.126.888.181	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	APK SD (Angka)	100,95	-	1,01		1,02		1,03		1,04		1,05		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	APK SMP (Angka)	102,83	-	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Cakupan anak Kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus (%)	-	-	40		45		50		55		60		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase anak berkebutuhan khusus usia sekolah (%)	-	-	10		15		20		25		30		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase capaian APM PAUD (%)	47,58	-	47,7		48,7		49,7		50,7		51,7		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase capaian APM SD (%)	85,03	-	85,1		85,25		85,5		85,7		86		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase capaian APM SMP (%)	71,96	-	74		77		80		83		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Persentase anak putus sekolah SD (%)	-	-	0,6		0,5		0,4		0,3		0,2		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase anak putus sekolah SMP (%)	-	-	5,1		4,1		3,1		2,1		1,1		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas siswa dan guru yang berkompetensi dan berdaya saing	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berakreditasi minimal B (%)	60,51	-	65		70		75		80		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya tingkat refleksi perbaikan guru	Persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal B jenjang SD (%)	70	-	73		75		77		80		83		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya jumlah sekolah yang dibina sesuai ketentuan, berkualitas dan siap berdaya saing pembelajaran di sekolah	Angka Kelulusan Paket A, B, C; (Angka)	-	-	50		60		70		80		90		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Angka)	100,52	-	100,52		100,6		100,7		100,8		100,9		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA (Angka)	96,93	-	97		97,5		97,7		97,8		98		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Nilai rata-rata nilai ujian (%)	75	-	75		77		80		82		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase angka kelulusan SD/MI (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase angka kelulusan SMP/MTs (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B (%)	-	-	10		15		20		25		30		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	persentase lembaga Pendidikan Masyarakat Unggulan dan Lembaga Pendidikan Masyarakat yang terakreditasi. (%)	-	-	10		15		20		25		30		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal B jenjang SMP (%)	70	-	73		75		77		80		83		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase siswa pendidikan dasar yang berprestasi baik di tingkat kota, provinsi dan nasional. (%)	-	-	5		10		15		20		25		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Rasio guru terhadap siswa PAUD (Rasio)	1:16	-:-	1:20		1:20		1:20		1:20		1:20		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Rasio guru terhadap siswa SD (Rasio)	1:14	-:-	1:25		1:25		1:25		1:25		1:25		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Rasio guru terhadap siswa SMP (Rasio)	1:12	-:-	1:32		1:32		1:32		1:32		1:32		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana yang layak dan memadai	Persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan; (%)	-	-	40		50		60		70		80		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	persentase SD/MI dan SMP/MTs yang	-	-	40		50		60		70		80		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	memiliki perpustakaan dan gedung lainnya yang sesuai standar (%)													
	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak (%)	-	-	40		50		60		70		80		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (Rasio)	1:250	-:-	1:250		1:250		1:250		1:250		1:250		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya capaian SPM Pendidikan	Persentase capaian anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	14	0	18		22		27		31		35		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya sekolah ramah anak dan sekolah sehat	Indeks iklim keamanan	77,07	77,79	79		80		81		82		82		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sekolah SD (%)													
	Indeks iklim keamanan sekolah SMP (%)	77,07	71,62	73		75		76		78		79		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SD (%)	74,09	75,09	76		77		78		79		90		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SMP (%)	72,32	72,32	74,32		75		76		77		78		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Inklusivitas sekolah jenjang SD (%)	62,81	65,31	68		70		73		75		78		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Inklusivitas sekolah jenjang SMP (%)	57,41	59,81	62		65		67		69		72		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	80,84	83,8	87		90		93		95		98		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	96,25	96,88	98		98		99		99		100		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	14,26	18,36	22		27		31		35		39		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase sekolah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila (%)	-	-	60		65		70		75		80		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi SI/DIV (%)	80,01	89,31	90		90		91		91		92		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					550.000.000		577.500.000		606.375.000		636.693.750		668.528.438	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan	45	-	50	550.000.000	60	577.500.000	70	606.375.000	80	636.693.750	90	668.528.438	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)													
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					8.685.076.584		9.291.031.945		9.939.304.381		10.632.850.474		11.374.834.757	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik jenjang SD (%)	23	-	25	8.685.076.584	26	9.291.031.945	27	9.939.304.381	28	10.632.850.474	30	11.374.834.757	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Meningkatnya penyediaan fasilitas sarana prasarana bagi kesejahteraan , keamanan dan pengembangan karir guru	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	5,447	-	5,497		5,547		5,747		5,847		5,897		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Pemerataan guru PAUD (%)	0,4	-	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Indeks Pemerataan guru SD (%)	0,33	-	0,45		0,55		0,6		0,7		0,8		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh	3,29	-	3,3		3,4		3,5		3,6		3,7		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru SD (Angka)													
	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru SMP (Angka)	19,91	-	20		20,1		20,2		20,3		20,4		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Ketersediaan Jumlah Pengawas dan Penilik (Angka)	0,08	-	0,1		0,12		0,13		0,14		0,15		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi (%)	-	-	20		25		30		35		40		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik jenjang PAUD (%)	0,4	-	0,45		0,5		0,55		0,6		0,65		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik jenjang SMP (%)	5	-	5,2		5,5		5,7		5,9		6		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase Kehadiran Guru SD (%)	85	-	85		85		85		85		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase Kehadiran Guru SMP (%)	85	-	85		85		85		85		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase kualifikasi guru *Mishmatch* (guru yang tidak linear) (%)	-	-	70		60		50		40		30		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar	-	-	65		70		75		80		85		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pendidik dan tenaga kependidikan (%)													
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (Rasio)	1:14	-:-	1:25		1:25		1:23		1:25		1:25		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Rasio)	1:12	-:-	1:25		1:25		1:25		1:25		1:25		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					650.000.000		682.500.000		716.625.000		752.456.250		790.079.063	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase PAUD/kesetaraan yang memiliki izin operasional yang masih berlaku (%)	-	-	20	650.000.000	25	682.500.000	30	716.625.000	35	752.456.250	40	790.079.063	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					336.587.912.109		404.868.337.939		418.759.561.373		494.138.646.857		398.587.527.646	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					232.287.555.484		248.824.881.807		264.457.075.526		269.665.953.100		272.158.813.921	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	B (69,35)	B (70,00)	BB (71,00)	134.934.270.968	BB (72,00)	148.489.118.065	BB (73,00)	162.458.008.595	BB (74,00)	164.909.542.825	BB (75,00)	164.926.130.630	Dinas Kesehatan
	Nilai IKM (Nilai)	70	-	70		72		75		80		85		Dinas Kesehatan
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar					97.353.284.516		100.335.763.742		101.999.066.931		104.756.410.275		107.232.683.291	RSUD Ruteng
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					100.078.048.525		151.532.762.982		149.498.865.359		219.511.557.961		121.335.729.320	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	273,3	-	195		156		136		117		77		Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	18,74	-	16		14		12		10		8		Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Cakupan Penemuan Kasus TB	82,04	-	90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
promotif dan preventif	(Notifikasi KasusTB) (Angka)													
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa	Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) TBC (Angka)	57,8	-	91	77.544.240.622	92	133.279.764.684	93	118.258.217.146	94	199.387.627.337	95	100.205.602.165	Dinas Kesehatan
	Cakupan anak usia Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	88,81	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	98,55	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan ASI Eksklusif (Angka)	90,5	-	90		90		91		92		93		Dinas Kesehatan
	Cakupan Balita Gizi	13,6	-	13,6		12,6		11,28		10,51		9,74		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kurang (Angka)													
	Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	71,93	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan (Angka)	53,4	-	53,4		54		54,5		55		55,5		Dinas Kesehatan
	Cakupan desa UCI (Angka)	63,7	-	91,23		92,5		93,76		95,5		96,3		Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	72,94	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Hamil KEK (Angka)	16,51	-	14		13		12		11		10		Dinas Kesehatan
	Cakupan IDL (Angka)	80,5	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (Angka)	93	-	94		95		95		96		97		Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	95,53	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	85,19	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	67,08	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	standar (Angka)													
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Angka)	69,28	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pemeriksaan SHK pada Bayi Baru Lahir (Angka)	35,1	-	35,5		35,7		36,5		37		37,5		Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	98,02	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	82,29	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan penduduk penerima	-	-	20		25		30		35		40		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pelayanan kesehatan gratis (Angka)													
	Cakupan penduduk usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	77,54	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan penduduk usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Angka)	54,24	-	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (%)	-	-	72,69	22.533.807.903	74,69	18.252.998.298	76,69	31.240.648.213	78,69	20.123.930.624	80,69	21.130.127.155	RSUD Ruteng
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.567.972.200		3.805.423.660		4.048.417.408		4.195.945.998		4.326.795.935	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	76	-	84	1.351.057.000	88	1.477.662.700	92	1.604.268.400	96	1.629.589.540	100	1.632.121.654	Dinas Kesehatan
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Bidang Kesehatan (%)	33,7	-	33,9		34		34,3		34,5		34,7		Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar (%)	99,23	-	100	2.216.915.200	100	2.327.760.960	100	2.444.149.008	100	2.566.356.458	100	2.694.674.281	RSUD Ruteng
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					369.209.000		400.629.900		432.050.800		438.334.980		438.963.398	
Meningkatnya kualitas dan distribusi	Persentase pangan	100	-	100	369.209.000	100	400.629.900	100	432.050.800	100	438.334.980	100	438.963.398	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	olahan siap saji memenuhi syarat (%)													
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)	76	-	80		84		88		92		92,3		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					285.126.900		304.639.590		323.152.280		326.854.818		327.225.072	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu siklus hidup yang Aktif (%)	42,4	-	46	285.126.900	48	304.639.590	50	323.152.280	52	326.854.818	55	327.225.072	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					288.856.860.625		334.918.622.119		363.764.525.667		214.703.313.952		208.129.439.229	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.390.765.175		12.338.068.737		13.201.733.549		11.063.911.439		11.379.481.842	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	--	B	B	10.390.765.175	B	12.338.068.737	B	13.201.733.549	B	11.063.911.439	B	11.379.481.842	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	98	-	98,4		98,8		99,2		99,6		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.794.073.500		19.039.658.645		20.372.434.750		10.353.813.013		9.836.122.362	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	52,3	-	52,64	17.794.073.500	52,98	19.039.658.645	53,33	20.372.434.750	53,67	10.353.813.013	54,01	9.836.122.362	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Kawasan Rawan Abrasi dan Banjir Rob (%)	33,33	-	33,76		34,44		34,63		35,07		35,5		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM					16.000.000.000		17.200.000.000		17.900.000.000		18.300.000.000		18.300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam Kondisi Baik (%)	86,08	-	86,29	16.000.000.000	86,49	17.200.000.000	86,7	17.900.000.000	86,9	18.300.000.000	87,11	18.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					10.500.000.000		10.550.000.000		12.105.000.000		10.665.500.000		10.635.250.000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	22	-	22,46	10.500.000.000	22,92	10.550.000.000	23,38	12.105.000.000	23,84	10.665.500.000	24,3	10.635.250.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.890.625.000		15.500.000.000		16.000.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase SPAL dalam Kondisi Baik (%)	83,8	-	83,94	3.890.625.000	84,08	15.500.000.000	84,22	16.000.000.000	84,36	16.500.000.000	84,5	16.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					7.300.000.000		8.600.000.000		9.900.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik (%)	72,82	-	73,03	7.300.000.000	73,23	8.600.000.000	73,44	9.900.000.000	73,64	4.200.000.000	73,85	4.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					750.000.000		13.250.000.000		19.250.000.000		16.250.000.000		16.250.000.000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0,34	-	0,51	750.000.000	0,68	13.250.000.000	0,86	19.250.000.000	1,03	16.250.000.000	1,19	16.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					310.000.000		1.320.000.000		330.000.000		340.000.000		340.000.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Bangunan ber PBG Per Satuan Bangunan (Angka)	0,01	-	0,08	310.000.000	0,14	1.320.000.000	0,2	330.000.000	0,27	340.000.000	0,33	340.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					200.000.000		200.000.000		1.200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan	0,01	-	0,19	200.000.000	0,37	200.000.000	0,56	1.200.000.000	0,74	200.000.000	0,92	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lingkungan (Persentase)													
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					213.827.670.500		228.795.607.435		244.811.299.955		118.570.734.958		112.642.198.210	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	55,47	-	56,03	213.827.670.500	56,59	228.795.607.435	57,15	244.811.299.955	57,71	118.570.734.958	58,27	112.642.198.210	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	64,57	-	64,81		65,04		65,28		65,51		65,75		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.430.000.000		2.600.100.000		2.782.107.000		2.643.001.650		2.510.851.568	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Berkualifikasi (%)	68	-	70,2	2.430.000.000	72,4	2.600.100.000	74,6	2.782.107.000	76,8	2.643.001.650	79	2.510.851.568	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.463.726.450		5.525.187.302		5.911.950.413		5.616.352.892		5.335.535.247	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang (%)	40,77	-	41,37	5.463.726.450	41,97	5.525.187.302	42,57	5.911.950.413	43,17	5.616.352.892	43,77	5.335.535.247	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.100.730.000		19.606.830.000		18.810.855.000		18.848.775.000		13.552.784.750	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.644.730.000		4.075.830.000		4.254.855.000		4.317.775.000		4.521.784.750	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	--	--	B	3.644.730.000	B	4.075.830.000	B	4.254.855.000	B	4.317.775.000	B	4.521.784.750	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	98	-	99		99		99		99		99		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.666.000.000		2.491.000.000		2.516.000.000		2.491.000.000		2.491.000.000	
Meningkatnya Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi (%)	-	-	45	2.666.000.000	50	2.491.000.000	55	2.516.000.000	60	2.491.000.000	65	2.491.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					7.690.000.000		8.690.000.000		7.690.000.000		7.690.000.000		2.190.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni (%)	60,82	-	63,02	7.690.000.000	65,22	8.690.000.000	67,42	7.690.000.000	69,62	7.690.000.000	71,82	2.190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	
Menurunnya Luasan Kumuh di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh (%)	-	-	4,2	2.200.000.000	5,2	2.200.000.000	6,2	2.200.000.000	7,2	2.200.000.000	8,2	2.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.900.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan utilitas umum	Persentase Rumah Tangga yang teraliri listrik (%)	-	-	46,5	1.900.000.000	47	2.150.000.000	47,5	2.150.000.000	48	2.150.000.000	48,5	2.150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Persentase unit kawasan permukiman	23,81	-	23,81		24,81		25,81		26,81		27,81		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang terpasang LPJU (%)													Permukiman, dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.227.877.277,35		12.961.727.637,36		13.651.700.668,72		14.485.195.710,45		15.379.525.171,78	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.441.602.946,55		7.598.530.470,98		7.929.624.188,58		8.377.462.066,11		8.857.227.839,41	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	CC (58,95)	CC (59,95)	B (60,10)	4.358.734.068,55	B (61,10)	4.576.670.771,98	B (62,10)	4.805.504.310,58	B (63,10)	5.045.779.526,11	B (64,10)	5.298.068.502,41	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	98	99	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.082.868.878		3.021.859.699		3.124.119.878		3.331.682.540		3.559.159.337	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	97,00	97,00	97,00	3.082.868.878	97,00	3.021.859.699	98,00	3.124.119.878	99,00	3.331.682.540	99,00	3.559.159.337	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	B (68,75)	B (69,75)	BB (70,10)		BB (71,10)		BB (72,00)		BB (73,00)		BB (74,00)		Dinas/Badan yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.033.294.330,8		2.120.908.566,38		2.273.097.678,14		2.438.609.826,34		2.618.682.520,87	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	2.033.294.330,8	100	2.120.908.566,38	100	2.273.097.678,14	100	2.438.609.826,34	100	2.618.682.520,87	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibuntranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
Meningkatnya perlindunan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.382.980.000		2.228.788.600		2.384.803.802		2.551.740.068		2.730.361.874	
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bencana, pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan bencana yang cepat dan efektif, serta pemulihan yang berkelanjutan.	Cakupan warga negara dan korban bencana yang terlayani dan tertangani serta teridentifikasi (%)	-	-	100	2.382.980.000	100	2.228.788.600	100	2.384.803.802	100	2.551.740.068	100	2.730.361.874	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.370.000.000		1.013.500.000		1.064.175.000		1.117.383.750		1.173.252.937,5	
Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	58,33	66,67	75,00	2.370.000.000	83,33	1.013.500.000	91,67	1.064.175.000	100	1.117.383.750	100	1.173.252.937,5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
evakuasi korban kebakaran	Korban Kebakaran													
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.204.444.103,9		4.471.462.014,29		4.764.181.715,72		5.085.173.387,29		5.437.264.226,02	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.969.444.103,9		3.236.462.014,29		3.529.181.715,72		3.850.173.387,29		4.202.264.226,02	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	100	100	2.969.444.103,9	100	3.236.462.014,29	100	3.529.181.715,72	100	3.850.173.387,29	100	4.202.264.226,02	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	--	--	B		B		B		B		B		Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					188.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan (%)	100	-	100	188.000.000	100	188.000.000	100	188.000.000	100	188.000.000	100	188.000.000	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					719.500.000		719.500.000		719.500.000		719.500.000		719.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial (%)	100	-	100	719.500.000	100	719.500.000	100	719.500.000	100	719.500.000	100	719.500.000	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	
Meningkatnya mutu kepesertaan masyarakat dalam program perlindungan dan jaminan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0,95	-	100	105.500.000	100	105.500.000	100	105.500.000	100	105.500.000	100	105.500.000	Dinas Sosial
	Persentase kepesertaan baru dalam program perlindungan dan jaminan sosial (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					212.000.000		212.000.000		212.000.000		212.000.000		212.000.000	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	100	-	100	212.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya kualitas taman makam pahlawan yang lebih baik, lebih profesional, dan berkelanjutan	Persentase taman makam pahlawan yang berkualitas (%)	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.574.265.634		5.987.755.282		6.757.084.980		6.984.766.252		7.614.803.015	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.065.790.634		3.717.125.240		4.478.742.144		4.694.374.982		5.320.010.891	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	--	--	B	3.065.790.634	B	3.717.125.240	B	4.478.742.144	B	4.694.374.982	B	5.320.010.891	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	98	99		99		99		99		99		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase RTK yang Disusun Sesuai Prosedur (%)	0	0	50	300.000.000	52	50.000.000	55	50.000.000	57	50.000.000	60	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.585.000.000		1.585.000.000		1.585.000.000		1.585.000.000		1.585.000.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2	2	2	1.585.000.000	2	1.585.000.000	2	1.585.000.000	2	1.585.000.000	2	1.585.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					257.000.000		258.000.000		259.000.000		264.000.000		261.000.000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri (%)	38	44,52	75	257.000.000	76,19	258.000.000	77,27	259.000.000	78,26	264.000.000	79,17	261.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					366.475.000		377.630.042		384.342.836		391.391.270		398.792.124	
Menurunnya perselisihan hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang	0	0	2	366.475.000	1,67	377.630.042	1,33	384.342.836	1	391.391.270	0,67	398.792.124	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terselesaikan (%)													
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.709.785.210		5.161.054.771		4.808.701.328		4.965.678.461		5.134.880.718	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.481.105.600		3.833.807.200		3.369.329.000		3.403.762.900		3.439.880.200	
Meningkatnya urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	3.481.105.600	100	3.833.807.200	100	3.369.329.000	100	3.403.762.900	100	3.439.880.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai SAKIP OPD	B (66,30)	B (66,50)	B (67,00)		B (67,50)		B (68,00)		B (68,50)		B (69,00)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					261.363.100		287.499.410		316.249.351		347.874.286		382.661.715	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas	Persentase ARG (%)	0,03	0,82	1,00	261.363.100	1,10	287.499.410	1,20	316.249.351	1,30	347.874.286	1,40	382.661.715	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan														Perlindungan Anak
	TPAK Perempuan (%)	66,27	-	68,37		69,42		70,47		71,52		72,57		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					432.099.000		459.308.900		491.639.790		526.403.769		562.944.146	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	432.099.000	100	459.308.900	100	491.639.790	100	526.403.769	100	562.944.146	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					114.582.510		126.040.761		138.644.837		152.509.321		167.760.253	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan Gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	100	114.582.510	100	126.040.761	100	138.644.837	100	152.509.321	100	167.760.253	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					8.280.000		9.108.000		10.018.800		11.020.680		12.122.748	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Angka)	100	100	100	8.280.000	100	9.108.000	100	10.018.800	100	11.020.680	100	12.122.748	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Anak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	57,77	58,57	59,21	200.000.000	59,76	220.000.000	60,24	242.000.000	60,79	266.200.000	61,34	292.820.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					212.355.000		225.290.500		240.819.550		257.907.505		276.691.656	
Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	212.355.000	100	225.290.500	100	240.819.550	100	257.907.505	100	276.691.656	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.210.218.596		12.812.635.014		13.449.895.764		14.122.311.162		14.827.346.345	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.936.354.727		12.540.038.837		13.164.300.299		13.822.436.005		14.512.478.500	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	B	B	BB	11.936.354.727	BB	12.540.038.837	BB	13.164.300.299	BB	13.822.436.005	BB	14.512.478.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					50.216.000		52.500.000		55.125.000		57.881.200		60.775.260	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	33,06	0	36,37	50.216.000	40,01	52.500.000	44,01	55.125.000	48,41	57.881.200	53,25	60.775.260	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN					124.096.259		132.788.310		138.797.205		145.737.036		153.023.817	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	78,8	-	78,82	124.096.259	78,84	132.788.310	78,86	138.797.205	78,88	145.737.036	79	153.023.817	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					46.201.360		31.290.105		32.854.610		34.497.339		36.222.207	
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,03	-	10,74	46.201.360	10,18	31.290.105	9,62	32.854.610	9,06	34.497.339	8,5	36.222.207	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					53.350.250		56.017.762		58.818.650		61.759.582		64.846.561	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	80	-	82	53.350.250	84	56.017.762	86	58.818.650	88	61.759.582	90	64.846.561	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SENGKETA TANAH GARAPAN														
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah konflik pertanahan yang dimediasi (Angka)	-	-	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					11.027.254.172		11.006.616.217		12.310.290.689		12.662.107.380		13.717.742.970	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.424.792.650		7.702.646.915		8.738.411.607		9.225.252.768		10.145.778.043	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	B	B	B	7.424.792.650	B	7.702.646.915	BB	8.738.411.607	BB	9.225.252.768	BB	10.145.778.043	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup dan	-	-	0	700.000.000	71,43	450.000.000	78,57	450.000.000	85,71	450.000.000	100	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	RPPLH yang ditindaklanjuti (%)													
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					704.188.022		707.188.022		740.188.022		740.188.022		814.188.022	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau lingkungan yang memenuhi baku mutu (%)	56	-	56	704.188.022	56	707.188.022	56	740.188.022	56	740.188.022	56	814.188.022	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		15.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang Terkelola (%)	-	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					66.508.000		69.800.000		73.300.000		76.900.000		80.840.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	-	100	66.508.000	100	69.800.000	100	73.300.000	100	76.900.000	100	80.840.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					145.615.500		185.565.280		257.923.560		150.471.840		155.380.120	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin lingkungan (%)	-	-	8,67	145.615.500	8,93	185.565.280	9,2	257.923.560	9,47	150.471.840	9,87	155.380.120	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					19.320.000		20.286.000		21.300.000		22.365.000		23.483.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	41,67	19.320.000	41,67	20.286.000	41,67	21.300.000	41,67	22.365.000	41,67	23.483.000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MHA yang terkait dengan PPLH														
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha / kegiatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		33.000.000		36.000.000		39.930.000		43.923.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	-	-	11,36	30.000.000	12,5	33.000.000	13,64	36.000.000	14,77	39.930.000	15,91	43.923.000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Hidup (Persentase)													
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					29.830.000		31.330.000		128.815.000		32.980.000		32.980.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	-	-	100	29.830.000	100	31.330.000	100	128.815.000	100	32.980.000	100	32.980.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.852.000.000		1.751.800.000		1.809.352.500		1.869.019.750		1.926.170.785	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	88	-	89	1.852.000.000	92	1.751.800.000	95	1.809.352.500	98	1.869.019.750	100	1.926.170.785	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.958.761.685,9		7.281.435.415,07		7.481.867.630,17		8.012.691.520,48		8.438.542.796,27	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.236.506.488,5		4.300.388.397,93		4.268.809.311,32		4.545.430.169,74		4.692.871.960,36	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahn yang terpenuhi sesuai standar	98	100	100	5.236.506.488,5	100	4.300.388.397,93	100	4.268.809.311,32	100	4.545.430.169,74	100	4.692.871.960,36	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai IKM (Nilai)	85,6	-	86		86,4		86,8		87,2		87,6		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (72,50)	-	BB (74,50)		BB (75,50)		BB (76,50)		BB (77,50)		BB (78,50)		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					685.508.000		688.474.000		691.488.000		694.988.000		698.260.150	
Meningkatnya Kualitas Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA (%)	35,52	-	64,8	685.508.000	73,8	688.474.000	83,8	691.488.000	93,8	694.988.000	95	698.260.150	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KK (%)	98,31	-	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase peningkatan Kepemilikan eKTP (%)	99,99	-	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.803.969.197,4		1.984.366.117,14		2.182.802.728,85		2.401.083.001,74		2.641.191.301,91	
Meningkatnya Kualitas Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan	42,26		48,64	1.803.969.197,4	51,83	1.984.366.117,14	55,02	2.182.802.728,85	58,21	2.401.083.001,74	61,4	2.641.191.301,91	Dinas Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dokumen akta kelahiran (%)													Dan Pencatatan Sipil
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan (%)	52,46	-	58,47		61,47		64,24		66,9		69,46		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					198.879.000		274.206.900		301.627.590		331.790.349		364.969.384	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan (%)	21	-	100	198.879.000	100	274.206.900	100	301.627.590	100	331.790.349	100	364.969.384	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					33.899.000		34.000.000		37.140.000		39.400.000		41.250.000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil	100	-	100	33.899.000	100	34.000.000	100	37.140.000	100	39.400.000	100	41.250.000	Dinas Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kependudukan sesuai dengan standar (%)													Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.806.051.942		10.728.850.000		10.526.735.000		11.286.008.500		13.612.557.350	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.068.500.000		3.375.350.000		3.712.885.000		4.084.173.500		4.492.590.850	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	BB	BB	BB	3.068.500.000	BB	3.375.350.000	A	3.712.885.000	A	4.084.173.500	A	4.492.590.850	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					325.000.000		77.500.000		80.250.000		83.275.000		86.602.500	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	-	-	100	325.000.000	100	77.500.000	100	80.250.000	100	83.275.000	100	86.602.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.012.551.942		5.736.000.000		5.039.600.000		5.255.160.000		6.983.624.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	100	3.012.551.942	100	5.736.000.000	100	5.039.600.000	100	5.255.160.000	100	6.983.624.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.400.000.000		1.540.000.000		1.694.000.000		1.863.400.000		2.049.740.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat (%)	100	-	100	1.400.000.000	100	1.540.000.000	100	1.694.000.000	100	1.863.400.000	100	2.049.740.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi	100	-	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)													Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.056.328.313		6.661.961.144		7.328.157.259		8.060.972.985		8.867.070.284	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.865.108.961		2.051.619.857		2.256.781.843		2.482.460.027		2.730.706.030	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	96	97	97	1.865.108.961	98	2.051.619.857	98	2.256.781.843	98	2.482.460.027	98	2.730.706.030	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (76,80)	BB (77,00)	BB (77,50)		BB (78,00)		BB (78,50)		BB (79,00)		BB (79,50)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.027.381.500		1.130.119.650		1.243.131.615		1.367.444.777		1.504.189.254	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur	24,2	-	22	1.027.381.500	21,2	1.130.119.650	20,4	1.243.131.615	19,7	1.367.444.777	19,1	1.504.189.254	Dinas Pengendalian Penduduk dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun (Angka)													Keluarga Berencana
	Angka KelahiranTotal/ *Total Fertility Rate* (TFR); (Angka)	2,75	-	2,73		2,72		2,71		2,7		2,69		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	55,4	-	57,9		59,1		60,2		61,3		62,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	8,7	-	16,8		19,6		21,8		23,6		24,9		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.162.901.100		1.279.191.210		1.407.110.331		1.547.821.364		1.702.603.501	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Mod*	78,3	-	78,8	1.162.901.100	79	1.279.191.210	79,2	1.407.110.331	79,4	1.547.821.364	79,7	1.702.603.501	Dinas Pengendalian Penduduk dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	*ern Contraceptive* (mCPR) (Persentase)													Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	12,56	-	10,53		10,23		9,9		9,6		9,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	8,2	-	7,5		7,2		6,9		6,7		6,5		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.000.936.752		2.201.030.427		2.421.133.470		2.663.246.817		2.929.571.499	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	61	-	61,8		62,2		62,6		63		63,4		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Angka)	60,6	-	63,5		64,9		66,2		67,4		68,6		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan	80,6	-	83,5		84,7		85,9		86,9		87,9		Dinas Pengendalian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Keluarga Remaja (Angka)													Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					15.826.011.124		14.258.601.714,6		9.849.794.835,59		37.457.205.426,01		37.496.235.279,45	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.178.711.124		7.506.911.714,6		7.578.914.835,59		7.689.585.426,01		7.766.775.279,45	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98	99	100	8.178.711.124	100	7.506.911.714,6	100	7.578.914.835,59	100	7.689.585.426,01	100	7.766.775.279,45	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (72,75)	BB (73,00)	BB (73,50)		BB (74,00)		BB (74,50)		BB (75,00)		BB (75,50)		Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.083.500.000		6.187.890.000		2.231.780.000		2.717.020.000		2.678.860.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik (%)	33,02	-	36,71	5.083.500.000	38,54	6.187.890.000	40,47	2.231.780.000	42,49	2.717.020.000	42,49	2.678.860.000	Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan lulus uji berkala (%)	89	-	92,37		92,5		93,3		93,35		93,5		Dinas Perhubungan
	Persentase perlengkapan	48,35	-	49,35		53,14		56,25		59,38		59,38		Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	jalan kondisi baik (%)													
	Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang tertangani (%)	69,98	-	83,33		85,71		87,5		88,88		88,89		Dinas Perhubungan
	Persentase terminal kondisi baik (fasilitas utama dan pendukung) (%)	33,33	-	66,67		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
	Persentase wilayah/desa terlayani trayek angkutan umum (%)	86,09	-	92,05		94,7		98,01		100		100		Dinas Perhubungan
	Tingkat kepatuhan lalu lintas (Angka)	-	-	21		22		23		24		24		Dinas Perhubungan
	Tingkat kepuasan pengguna terminal terhadap fasilitas dan layanan	-	-	21		22		23		24		24		Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Indeks (Skala 0-100))													
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.563.800.000		563.800.000		39.100.000		27.050.600.000		27.050.600.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi secara aktif (%)	25	-	25	2.563.800.000	25	563.800.000	50	39.100.000	60	27.050.600.000	60	27.050.600.000	Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.910.284.000		10.732.184.000		6.664.260.000		6.775.060.000		6.868.060.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.684.460.000		5.961.860.000		4.571.260.000		4.690.060.000		4.783.060.000	
Meningkatnya urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	5.684.460.000	99	5.961.860.000	99	4.571.260.000	99	4.690.060.000	99	4.783.060.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Sakip OPD (Poin)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN					716.824.000		743.824.000		736.000.000		726.000.000		726.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks keterbukaan Informasi Publik (Angka)	87,25	-	88	716.824.000	88,5	743.824.000	90	736.000.000	90,5	726.000.000	100	726.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.509.000.000		4.026.500.000		1.357.000.000		1.359.000.000		1.359.000.000	
Meningkatnya Penerapan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mendukung *Smart City* (%)	2,58	0	2,98	1.314.000.000	3,18	3.854.000.000	3,38	1.184.000.000	3,58	1.184.000.000	3,78	1.184.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penerapan e-*government* di lingkup pemerintah daerah (%)	2,9	-	3,3		3,5		3,7		3,9		4,1		Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya perangkat daerah yang mendukung *Smart City*	Persentase perangkat daerah yang mendukung *Smart City* (%)	2,58	-	2,98	195.000.000	3,18	172.500.000	3,38	173.000.000	3,58	175.000.000	3,78	175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.317.271.451		1.378.582.844		1.410.259.461		1.439.908.908		1.467.816.493	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					30.000.000		53.625.000		70.500.000		70.500.000		70.500.000	
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	-	8	30.000.000	8	53.625.000	8	70.500.000	8	70.500.000	8	70.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					260.478.260		261.608.696		262.739.130		264.434.783		265.565.217	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan diawasi sesuai prosedur (%)	94,41	96,5	10	260.478.260	25	261.608.696	42	262.739.130	59	264.434.783	75	265.565.217	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					56.239.131		56.804.348		57.369.565		58.217.392		58.782.609	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	94,41	32	99,23	56.239.131	99,62	56.804.348	99,62	57.369.565	99,62	58.217.392	99,62	58.782.609	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					379.824.060		399.814.800		410.920.766		422.026.733		444.238.667	
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase koperasi yang	79,86	0	66,28	379.824.060	69,77	399.814.800	71,71	410.920.766	73,64	422.026.733	77,52	444.238.667	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	memiliki SDM terlatih (%)													Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					19.040.000		31.040.000		31.040.000		43.040.000		43.040.000	
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	0	12	19.040.000	23	31.040.000	23	31.040.000	35	43.040.000	35	43.040.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					499.690.000		503.690.000		505.690.000		509.690.000		513.690.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0	16,87	499.690.000	14,44	503.690.000	12,61	505.690.000	11,2	509.690.000	10,07	513.690.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya (%)	60	0	20,29	72.000.000	20,29	72.000.000	20,29	72.000.000	20,29	72.000.000	20,29	72.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.560.617.706		5.593.643.706		6.308.743.655		5.712.243.655		5.717.243.655	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.258.785.706		4.266.811.706		4.346.911.655		4.335.411.655		4.345.411.655	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	BB	BB	BB	4.258.785.706	BB	4.266.811.706	BB	4.346.911.655	BB	4.335.411.655	BB	4.345.411.655	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0		0		610.000.000		0		0	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	-	100	0	100	0	100	610.000.000	100	0	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI					20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-	-	2,78	20.000.000	2,78	25.000.000	2,78	30.000.000	2,78	35.000.000	2,78	40.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					312.100.000		322.100.000		332.100.000		342.100.000		322.100.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	-	20	312.100.000	20	322.100.000	20	332.100.000	20	342.100.000	20	322.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					919.732.000		924.732.000		929.732.000		934.732.000		939.732.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-	-	100	919.732.000	100	924.732.000	100	929.732.000	100	934.732.000	100	939.732.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.794.065.200		9.181.268.460		9.640.331.883		10.122.348.477		10.628.465.902	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.994.065.200		2.041.268.460		2.143.331.883		2.250.498.477		2.363.023.401	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Jumlah Kelompok Pemuda (Angka)	12	-	12	1.994.065.200	12	2.041.268.460	12	2.143.331.883	12	2.250.498.477	12	2.363.023.401	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase Kelompok pemuda aktif dalam pembangunan (%)	20	-	20		25		30		35		40		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan kader kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan, dan kepeloporan pemuda (%)	5	-	5		10		15		20		25		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/*training* dan memperoleh sertifikat (%)	5	-	5		10		15		20		25		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	5	-	5		5		5		5		5		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	20	0	20		25		30		35		40		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kemasyarakatan (Angka)													
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan wirausaha muda pemula yang mandiri (Angka)	20	-	20		25		30		35		40		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5.250.000.000		5.512.500.000		5.788.125.000		6.077.531.250		6.381.407.813	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Cakupan fasilitas olahraga yang sesuai standar (Angka)	60	-	60	5.250.000.000	65	5.512.500.000	70	5.788.125.000	75	6.077.531.250	80	6.381.407.813	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (Angka)	10	-	10		15		20		25		30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Cakupan pembinaan atlet muda (Angka)	10	-	10		15		20		25		30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Atlet (Orang)	10	-	10		10		10		10		10		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Cabang Olahraga yang pernah diakui (Cabang Olahraga (Cabor))	17	-	17		17		17		17		17		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Lapangan Olahraga (Unit)	2	-	2		2		2		2		2		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Tim Olahraga (Angka)	1	-	1		1		1		1		1		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk dalam Pelatda (%)	-	-	5		5		5		5		5		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase atlet yang masuk sampai level provinsi/pelatnas (%)	-	-	2		2		2		2		2		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase Kelompok Olahraga Terbina (%)	17	-	17		17		17		17		17		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik (%)	-	-	60		65		70		75		80		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.550.000.000		1.627.500.000		1.708.875.000		1.794.318.750		1.884.034.688	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan (%)	38	-	40	1.550.000.000	45	1.627.500.000	50	1.708.875.000	60	1.794.318.750	70	1.884.034.688	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif (%)	26,79	-	35		40		50		60		70		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	-	50		60		70		75		80		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					221.500.000		193.000.000		193.000.000		173.000.000		173.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					221.500.000		193.000.000		193.000.000		173.000.000		173.000.000	
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data sektoral (%)	100	-	100	221.500.000	100	193.000.000	100	193.000.000	100	173.000.000	100	173.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Persandian	Persentase tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan persandian (%)	0	-	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					22.703.620.000		21.553.620.000		21.553.620.000		21.553.620.000		21.553.620.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	84,13	0	87,82	675.000.000	91,51	675.000.000	95,2	675.000.000	98,89	675.000.000	100	675.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	83,28	83,28	83,28	200.000.000	87,93	200.000.000	92,57	200.000.000	97,21	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah Yang dapat diakses Masyarakat (%)	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					20.721.820.000		20.571.820.000		20.571.820.000		20.571.820.000		20.571.820.000	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	0	0	100	20.721.820.000	100	20.571.820.000	100	20.571.820.000	100	20.571.820.000	100	20.571.820.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	82,17	85,74	85,74		89,3		92,87		96,43		100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.006.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	100	1.006.800.000	100	6.800.000	100	6.800.000	100	6.800.000	100	6.800.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					18.222.908.354		20.021.366.590		21.997.909.651		24.171.715.621		26.562.643.845	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.381.954.644		18.020.167.509		19.820.679.162		21.801.091.468		23.979.529.956	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98	99	100	16.381.954.644	100	18.020.167.509	100	19.820.679.162	100	21.801.091.468	100	23.979.529.956	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Nilai IKM (Nilai)	89,91	90,00	91,00		91,50		92,00		92,50		93,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (75,45)	BB (75,90)	BB (76,00)		BB (76,50)		BB (77,00)		BB (77,50)		BB (78,00)		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.742.028.400		1.892.381.240		2.057.530.864		2.238.954.565		2.438.277.343	
Meningkatnya layanan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, (Angka)	-	-	15	1.742.028.400	16	1.892.381.240	17	2.057.530.864	18	2.238.954.565	20	2.438.277.343	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	-	-	2,6		2,7		2,7		2,8		2,8		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk (Rasio)	-	-	0,0365		0,0367		0,0368		0,037		0,037		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Rasio Kunjungan Perpustakaan (Rasio)	-	-	0,061		0,062		0,063		0,065		0,066		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	SKM Layanan Perpustakaan (%)	-	-	3,07		3,071		3,073		3,075		3,077		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					98.925.310		108.817.841		119.699.625		131.669.588		144.836.546	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	-	-	12	98.925.310	14	108.817.841	15	119.699.625	16	131.669.588	16	144.836.546	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					587.932.280		646.725.508		711.398.059		782.537.865		860.791.651	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					357.416.990		393.158.689		432.474.558		475.722.014		523.294.215	
Meningkatnya OPD yang melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip yang dikelola dan dilindungi sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) (%)	-	-	100	357.416.990	100	393.158.689	100	432.474.558	100	475.722.014	100	523.294.215	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					218.015.290		239.816.819		263.798.501		290.178.351		319.196.186	
Meningkatnya OPD yang melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK	Persentase OPD yang melakukan Penyelamatan dan Arsip sesuai NSPK	-	-	100	218.015.290	100	239.816.819	100	263.798.501	100	290.178.351	100	319.196.186	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Norma, standar, Prosedur dan Kriteria) (%)													
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					12.500.000		13.750.000		15.125.000		16.637.500		18.301.250	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	-	-	100	12.500.000	100	13.750.000	100	15.125.000	100	16.637.500	100	18.301.250	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.913.295.230		6.504.124.753		7.154.037.228,3		7.868.940.951,13		8.655.335.046,24	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.830.295.230		4.132.824.753		4.576.607.228,3		5.196.152.951,13		5.584.251.746,24	
Meningkatnya urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	B	B	B	3.830.295.230	B	4.132.824.753	B	4.576.607.228,3	B	5.196.152.951,13	B	5.584.251.746,24	Dinas Perikanan
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					715.000.000		836.500.000		899.150.000		898.565.000		1.023.564.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.392,2	7.135,49	7.466,12	715.000.000	7.540,78	836.500.000	7.616,19	899.150.000	7.692,35	898.565.000	7.769,27	1.023.564.000	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.190.000.000		1.339.000.000		1.462.900.000		1.537.305.000		1.786.909.500	
Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	173,22	180,98	174,95	1.190.000.000	176,7	1.339.000.000	178,47	1.462.900.000	180,25	1.537.305.000	182,05	1.786.909.500	Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					178.000.000		195.800.000		215.380.000		236.918.000		260.609.800	
Meningkatnya konsumsi ikan Oleh Masyarakat	Angka konsumsi ikan (AKI) (Angka)	50,5	0	53,03	178.000.000	55,68	195.800.000	58,46	215.380.000	61,38	236.918.000	64,45	260.609.800	Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.326.194.598		5.939.943.213		6.050.583.518		6.163.162.806		6.277.729.551	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.418.544.598		3.522.802.213		3.623.951.518		3.727.039.806		3.832.115.551	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang Terpenuhi Sesuai Standar	Nilai IKM (Nilai)	-	-	70	3.418.544.598	72	3.522.802.213	75	3.623.951.518	80	3.727.039.806	85	3.832.115.551	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Nilai Sakip OPD (Poin)	B	B	BB		A		A		A		A		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	98	0	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.209.100.000		709.100.000		709.100.000		709.100.000		709.100.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	10,28	-	10	1.209.100.000	10	709.100.000	10	709.100.000	10	709.100.000	10	709.100.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					738.550.000		748.041.000		757.532.000		767.023.000		776.514.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	20	738.550.000	40	748.041.000	60	757.532.000	80	767.023.000	100	776.514.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN					560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	20	560.000.000	20	560.000.000	20	560.000.000	20	560.000.000	20	560.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	-	44	400.000.000	50	400.000.000	60	400.000.000	80	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					43.062.678.745		49.749.462.452		55.755.524.908,5		62.421.207.061,87		69.026.708.873,03	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.692.004.950		6.240.310.283,25		6.140.580.731,46		6.624.213.922,38		7.246.501.678,12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	B	B	B	5.692.004.950	B	6.240.310.283,25	B	6.140.580.731,46	B	6.624.213.922,38	B	7.246.501.678,12	Dinas Pertanian
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					12.169.447.241		12.777.919.183		13.416.815.142		14.087.655.899		14.792.038.693,5	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang sesuai standar (%)	-	-	30,22	4.319.447.241	31,42	4.535.419.183	32,62	4.762.190.142	33,82	5.000.299.649	35,02	5.250.314.631	Dinas Pertanian
Meningkatnya ketersediaan Benih, Bibit, Pakan dan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Persentase Ketersediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) (%)	0	0	60	7.850.000.000	60	8.242.500.000	60	8.654.625.000	60	9.087.356.250	60	9.541.724.062,5	Dinas Pertanian
	Persentase Pengawasan Mutu dan Peredaran benih/Bibit ternak dan Tanaman	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pakan Ternak serta Pakan (%)													
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Persediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (%)	0	0	97,05		97,05		97,05		97,05		97,05		Dinas Pertanian
	Persentase Sarana pendukung pertanian yang diawasi (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
	Persentase Unit Usaha Obat Hewan yang Diawasi (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					19.525.673.000		24.819.600.000		30.033.500.000		35.288.925.000		40.295.871.250	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian	11,42	-	11,99	14.025.673.000	12,59	19.319.600.000	13,22	24.533.500.000	13,88	29.788.925.000	14,58	34.795.871.250	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang berfungsi dan berkondisi baik (%)													
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Pemenuhan Prasarana Peternakan	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Prasarana Peternakan (%)	100	100	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.780.000.000		3.954.000.000		4.136.700.000		4.328.535.000		4.529.961.750	
Meningkatnya Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan (%)	0	0	100	2.830.000.000	100	2.956.500.000	100	3.089.325.000	100	3.228.791.250	100	3.375.230.812,5	Dinas Pertanian
Meningkatnya Produk Hasil Peternakan Bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase Produk Hasil Peternakan yang Bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	40,5	0	15	950.000.000	23	997.500.000	31	1.047.375.000	38	1.099.743.750	46	1.154.730.937,5	Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN					215.426.900		200.250.000		190.426.900		176.250.000		165.426.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang ditangani sesuai standar (%)	29,24	-	32,16	215.426.900	35,37	200.250.000	38,9	190.426.900	42,79	176.250.000	47,06	165.426.900	Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					126.854.000		133.196.700		139.856.535		146.849.361		154.191.828,75	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	69,01	-	72,46	11.854.000	76,08	12.446.700	79,88	13.069.035	83,87	13.722.486	88,06	14.408.610	Dinas Pertanian
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha	Persentase Pengawasan Perizinan usaha pertanian (%)	-	-	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	133.126.875	100	139.783.218,75	Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.553.272.654		1.624.186.285,75		1.697.645.600,04		1.768.777.879,49		1.842.716.772,66	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang	95,29	0	74,76	873.763.639	75,67	910.701.820	76,53	948.486.911	77,11	982.161.256	77,68	1.016.769.318	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Ditingkatkan (Persentase)													
Meningkatnya kualitas pembinaan Peternak / Kelompok Ternak tentang Manajemen pemeliharaan ternak berorientasi agribisnis	Persentase Peternak / Kelompok Ternak yang Dibina dan didampingi berorientasi agribisnis (%)	10,24	-	3,47	679.509.015	3,47	713.484.465,75	3,47	749.158.689,04	3,47	786.616.623,49	3,47	825.947.454,66	Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.421.593.484		5.706.880.082		6.427.924.691		8.639.764.410		7.201.971.301	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.704.619.484		4.074.174.082		4.631.284.191		4.859.408.410		5.284.840.301	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	BB	BB	BB	3.704.619.484	BB	4.074.174.082	BB	4.631.284.191	BB	4.859.408.410	BB	5.284.840.301	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	100	100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					195.794.000		137.306.000		137.306.000		137.306.000		137.306.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya rekomendasi izin usaha perdagangan	Persentase rekomendasi izin usaha perdagangan yang diterbitkan sesuai SOP (%)	100	100	100	195.794.000	100	137.306.000	100	137.306.000	100	137.306.000	100	137.306.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					413.310.000		316.990.000		266.700.000		186.690.000		188.070.000	
Meningkatnya Kualitas Sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik (%)	100	0	33,33	413.310.000	66,67	316.990.000	83,33	266.700.000	91,67	186.690.000	100	188.070.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					385.545.000		454.720.000		499.249.500		526.540.000		556.560.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase bahan kebutuhan pokok dan barang penting yang memiliki harga yang stabil (%)	100	0	100	385.545.000	100	454.720.000	100	499.249.500	100	526.540.000	100	556.560.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					140.000.000		210.000.000		310.000.000		360.000.000		450.000.000	
Meningkatnya pedagang potensial berstandar ekspor	Persentase pedagang potensial yang berstandar ekspor (%)	-	-	12	140.000.000	16	210.000.000	20	310.000.000	24	360.000.000	28	450.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					431.325.000		339.110.000		393.965.000		2.361.420.000		366.215.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah (%)	0,9	-	12,7	431.325.000	24,87	339.110.000	36,97	393.965.000	49,64	2.361.420.000	61,73	366.215.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					151.000.000		174.580.000		189.420.000		208.400.000		218.980.000	
Meningkatnya UMKM yang menerapkan metode pemasaran *marketing-mix*	Persentase UMKM yang menerapkan metode pemasaran *marketing-mix* (%)	2,67	0	6,67	151.000.000	20	174.580.000	40	189.420.000	66,67	208.400.000	100	218.980.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.233.976.800		5.506.500.800		3.196.976.800		5.726.994.800		2.712.564.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.961.346.800		5.233.870.800		2.924.346.800		5.454.364.800		2.439.934.600	
Meningkatnya IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai	Persentase IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai (%)	66,54	-	71,54	2.961.346.800	76,54	5.233.870.800	81,54	2.924.346.800	86,54	5.454.364.800	91,54	2.439.934.600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					151.634.000		151.634.000		151.634.000		151.634.000		151.634.000	
Meningkatnya kualitas rekomendasi izin usaha industri	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang dikeluarkan (%)	Na	100	100	151.634.000	100	151.634.000	100	151.634.000	100	151.634.000	100	151.634.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					120.996.000		120.996.000		120.996.000		120.996.000		120.996.000	
Meningkatnya kelengkapan, akurasi dan pemutakhiran data dan informasi industri	Persentase data dan informasi industri yang tersedia secara lengkap, akurat dan	Na	100	100	120.996.000	100	120.996.000	100	120.996.000	100	120.996.000	100	120.996.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terkini (%)													
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					27.984.357.195		31.267.509.349		31.662.851.406		31.906.249.979		32.065.362.563	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.806.429.395		26.652.215.049		26.631.207.556		26.449.841.624		26.131.754.208	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase PD dengan indeks kelembagaan yang efektif (%)	100	100	100	604.720.000	100	907.720.000	100	734.720.000	100	788.720.000	100	867.220.000	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori Sangat baik (%)	10,87	15,22	19,57		23,91		28,26		32,61		32,61		Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan tepat waktu (%)	52,38	59,52	66,67		73,81		80,95		88,10		88,10		Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada KDH/WKDH	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar (%)	100	100	100	545.900.000	100	555.650.000	100	604.400.000	100	1.115.400.000	100	640.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada KDH/WKDH	Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar (%)	100	100	100	19.779.756.275	100	22.044.321.673	100	22.045.901.401	100	22.157.982.721	100	22.064.732.721	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	100	774.100.000	100	300.350.000	100	349.600.000	100	366.850.000	100	414.600.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi	100	100	100	127.600.000	100	201.150.000	100	547.050.000	100	155.450.000	100	155.700.000	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Sesuai Standar (%)													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	100	477.909.020	100	191.070.866	100	206.663.394	100	222.535.866	100	237.548.450	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	100	347.600.000	100	610.850.000	100	374.100.000	100	367.350.000	100	395.600.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	100	326.900.000	100	636.150.000	100	374.400.000	100	377.650.000	100	403.900.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	100	171.600.000	100	163.400.000	100	675.370.000	100	187.040.000	100	202.240.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan Yang	100	100	100	650.344.100	100	1.041.552.510	100	719.002.761	100	710.863.037	100	750.213.037	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terpenuhi Sesuai Standar (%)													
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.613.186.800		3.967.686.800		4.321.886.800		4.677.586.800		5.132.786.800	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	575.000.000	100	630.000.000	100	685.000.000	100	740.000.000	100	895.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Perjanjian kerja sama yang ditandatangani	100	100	100	170.700.000	100	173.000.000	100	175.500.000	100	178.000.000	100	178.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan (%)	100	100	100	257.486.800	100	289.686.800	100	321.386.800	100	354.586.800	100	389.786.800	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.610.000.000	100	2.875.000.000	100	3.140.000.000	100	3.405.000.000	100	3.670.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					564.741.000		647.607.500		709.757.050		778.821.555		800.821.555	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan SDA	Persentase Penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan (%)	100	100	100	100.000.000	100	117.000.000	100	135.000.000	100	156.000.000	100	175.000.000	Sekretariat Daerah
	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	108.806.000	100	139.112.000	100	144.112.000	100	149.112.000	100	152.112.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Angka)	4,29	8,57	12,86	355.935.000	17,14	391.495.500	21,43	430.645.050	22,86	473.709.555	22,86	473.709.555	Sekretariat Daerah
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Angka)	6,96	8,16	9,36		10,56		11,76		12,96		12,96		Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	53,82	55,00	60,00		62,00		65,00		70,00		70,00		Sekretariat Daerah
	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement (%)	97,71	98,00	98,50		99,00		99,50		100		100		Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	45,02	47,00	49,00		51,00		53,00		55,00		55,00		Sekretariat Daerah
	Tingkat UKPBJ (Angka)	17,78	26,67	31,11		35,56		35,56		40,00		40,00		Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					41.926.370.000		49.694.896.000		57.148.062.500		74.044.632.750		76.345.533.188	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.292.770.000		30.638.946.000		35.227.840.000		42.097.627.750		47.423.382.938	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	99,00	99,00	100	28.292.770.000	100	30.638.946.000	100	35.227.840.000	100	42.097.627.750	100	47.423.382.938	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (71,10)	BB (72,10)	BB (73,10)		BB (74,10)		BB (75,10)		BB (76,10)		BB (77,10)		Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					13.633.600.000		19.055.950.000		21.920.222.500		31.947.005.000		28.922.150.250	
Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Nilai)	31	31	31	13.633.600.000	32	19.055.950.000	33	21.920.222.500	33	31.947.005.000	34	28.922.150.250	Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.564.772.338		7.513.368.605		7.008.694.272		7.451.399.449		8.253.745.532	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.139.310.455		5.062.938.261		4.693.394.660		4.970.464.053		5.180.969.231	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Nilai)	BB (74,75)	BB (75,00)	BB (75,25)	5.139.310.455	BB (75,50)	5.062.938.261	BB (75,80)	4.693.394.660	BB (76,00)	4.970.464.053	BB (76,10)	5.180.969.231	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sesuai standar (%)													
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					927.376.200		971.068.011		1.005.126.069		1.072.796.555		1.566.500.637	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	927.376.200	100	971.068.011	100	1.005.126.069	100	1.072.796.555	100	1.566.500.637	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.498.085.683		1.479.362.333		1.310.173.543		1.408.138.841		1.506.275.664	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fokus Kegiatan pada Program Unggulan Kepala Daerah (%)	0	0	50	2.498.085.683	70	1.479.362.333	80	1.310.173.543	90	1.408.138.841	100	1.506.275.664	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					261.249.103.812,35		284.641.492.678,37		294.568.126.041,61		306.094.164.486,17		307.173.793.950,25	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.291.705.501,35		4.656.477.271,37		4.633.984.770,63		4.914.440.752,77		4.667.996.235,13	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Nilai)	BB (70,15)	BB (70,20)	BB (70,50)	4.291.705.501,35	BB (70,80)	4.656.477.271,37	BB (71,10)	4.633.984.770,63	BB (71,20)	4.914.440.752,77	BB (71,50)	4.667.996.235,13	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	97	97	97		97		97		97		97		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.703.605.219		8.140.934.809		8.085.546.194		8.465.205.317		8.748.365.722	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	BB (73,65)	BB (73,80)	BB (74,00)	6.178.394.719	BB (74,10)	7.022.521.309	BB (74,50)	6.876.355.194	BB (75,00)	7.156.409.717	BB (75,10)	7.417.976.222	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	0	0	98		98		98		98		98		Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya pendapatan retribusi dari perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi perangkat daerah (%)	-	-	25	1.525.210.500	28	1.118.413.500	30	1.209.191.000	35	1.308.795.600	38	1.330.389.500	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					243.681.755.763		267.470.025.900		277.587.443.871,98		288.421.364.954,4		289.213.542.361,56	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	25	0	40	1.646.025.000	50	1.649.125.900	40	1.652.605.109,8	40	1.646.025.000	40	1.646.025.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	34	0	48		40		35		30		30		Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0,16	0	0,15	241.564.129.163	0,14	265.302.138.240	0,13	275.364.200.826,18	0,12	286.147.638.224,8	0,11	286.877.045.459	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Reallisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	92,97	0	94		95		96		97		98		Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	92,31	0	100	471.601.600	100	518.761.760	100	570.637.936	100	627.701.729,6	100	690.471.902,56	Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tepat Waktu (%)													
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.828.391.878		1.267.331.878		1.497.451.878		1.393.541.878		1.421.412.715,56	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10,4	-	11	1.828.391.878	12	1.267.331.878	13	1.497.451.878	14	1.393.541.878	15	1.421.412.715,56	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.743.645.451		3.106.722.820		2.763.699.327		2.899.611.584		3.122.476.916	
Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan	Persentase Peningkatan PAD (%)	-	-	1,5	3.549.775.451	1,8	2.896.852.820	2	2.536.615.327	2,4	2.668.854.084	2,8	2.873.816.716	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	-	-	83	138.340.000	85	152.140.000	87	167.354.000	90	169.027.500	92	185.930.200	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	-	-	95	55.530.000	98	57.730.000	100	59.730.000	100	61.730.000	100	62.730.000	Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.819.728.501		7.223.888.411		7.145.112.804		7.325.020.954		7.283.792.025	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.368.965.501		4.455.547.411		4.452.936.804		4.532.128.954		4.430.900.025	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	4.368.965.501	99	4.455.547.411	99	4.452.936.804	99	4.532.128.954	99	4.430.900.025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	A (82,05)	A (82,15)	A (82,20)		A (82,50)		A (82,75)		A (82,90		A (83,00)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.450.763.000		2.768.341.000		2.692.176.000		2.792.892.000		2.852.892.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai Formasi (%)	100	100	100	2.179.999.000	100	683.000.000	100	741.300.000	100	805.430.000	100	805.430.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3,48	36,17	10,48	1.327.907.000	4,66	1.135.698.000	4,86	993.768.000	4,69	1.022.144.000	4,71	1.082.144.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Meningkatnya Tata Kelola	Persentase Pengembang	NA	100	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Badan Kepegawaian dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengembangan Karir ASN	an Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)													Pengembangan SDM Daerah
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	142.857.000	100	149.643.000	100	157.108.000	100	165.318.000	100	165.318.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.325.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.325.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	NA	35,68	10,31	4.325.000.000	4,66	1.775.000.000	4,68	1.775.000.000	3,24	1.775.000.000	3,11	1.775.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					720.000.000		760.000.000		790.000.000		805.000.000		885.000.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					720.000.000		760.000.000		790.000.000		805.000.000		885.000.000	
Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang termanfaatkan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang	100	100	100	720.000.000	100	760.000.000	100	790.000.000	100	805.000.000	100	885.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dimanfaatkan (%)													Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.006.280.356		12.046.280.356		12.046.280.356		12.046.280.356		12.051.280.356	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.406.280.356		6.518.280.356		6.418.280.356		6.568.280.356		6.553.280.356	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Nilai Sakip OPD (Poin)	A	A	A	7.406.280.356	A	6.518.280.356	A	6.418.280.356	A	6.568.280.356	A	6.553.280.356	Inspektorat Daerah
	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	97	97	97		97		97		97		97		Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.450.000.000		4.250.000.000		4.350.000.000		4.200.000.000		4.220.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Obyek Pengawasan dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (%)	46,34	46,34	47,34	150.000.000	48,34	200.000.000	49,34	200.000.000	50,34	200.000.000	51,34	200.000.000	Inspektorat Daerah
	Opini Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	500.000.000	WTP	650.000.000	WTP	650.000.000	WTP	650.000.000	WTP	650.000.000	Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	82,53	82,53	83,03		83,53		84,03		84,53		85,03		Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Eksternal (%)													
Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	520.000.000	Inspektorat Daerah
Obyek Pengawasan Yang dilakukan Pengawasan	Jumlah Obyek Pengawasan Yang dilakukan Pengawasan (Objek)	489	489	490	1.750.000.000	491	2.075.000.000	492	2.275.000.000	493	2.175.000.000	494	2.175.000.000	Inspektorat Daerah
Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	600.000.000	Level 3	825.000.000	Level 3	725.000.000	Level 3	675.000.000	Level 3	675.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.150.000.000		1.278.000.000		1.278.000.000		1.278.000.000		1.278.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pendampingan kepada perangkat Daerah	Cakupan OPD yang telah dilakukan penjaminan kualitas atas Maturitas SPIP (OPD)	13	13	14	1.150.000.000	15	1.278.000.000	16	1.278.000.000	17	1.278.000.000	18	1.278.000.000	Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai/Level) (Level)	2.604/Level 2	------/Level 2	2.650/Level 2		2.750/Level 2		2.850/Level 2		2.950/Level 2		3.000/Level 3		Inspektorat Daerah
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan Zona Integritas (ZI) (OPD)	1	2	2		2		2		3		3		Inspektorat Daerah
	Manajemen Risiko Indeks (Nilai/Level) (Level)	2.344/Level 2	-------/Level 2	2.500/Level 2		2.600/Level 2		2.750/Level 2		2.900/Level 2		3.000/Level 3		Inspektorat Daerah
	Nilai Monitoring Controling and Surveillance For Prevention (MCSP) (Nilai)	66,48	67	67		68		69		70		71		Inspektorat Daerah
	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Nilai)	69	69	70		71		72		73		74		Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN					54.670.039.966,14		47.791.105.032,48		47.151.190.597,68		49.017.228.511,23		44.877.752.321,25	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.812.106.606,14		37.592.774.771,48		36.620.531.184,18		38.139.652.858,27		33.636.457.202,69	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	3.186.888.074,39	99	2.956.994.716,62	99	2.539.204.558,12	99	2.553.580.694,86	99	2.630.188.115,71	Kecamatan Cibal
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Cibal
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Cibal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	2.474.500.000	99	1.968.620.000	99	1.919.482.300	99	2.530.093.319	99	1.822.241.689	Kecamatan Cibal Barat
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Cibal Barat
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi	98	99	99	14.898.746.036	99	14.996.048.417	99	15.726.769.869	99	14.798.312.965	99	13.471.002.354	Kecamatan Langke Rembong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
terpenuhi sesuai standar	sesuai standar (%)													
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Langke Rembong
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Langke Rembong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	1.772.521.203,75	99	1.706.196.839,86	99	1.250.882.745,06	99	1.226.609.227,41	99	1.263.407.504,23	Kecamatan Lelak
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Lelak
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Lelak
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	1.944.520.019	99	1.557.555.619	99	1.139.882.288	99	1.173.178.757	99	1.207.474.119	Kecamatan Rahong Utara
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Rahong Utara
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi	98	99	99	1.824.081.981	99	1.586.129.440	99	1.354.213.323	99	1.860.864.723	99	1.448.615.665	Kecamatan Reok Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
terpenuhi sesuai standar	sesuai standar (%)													
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Reok Barat
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Reok Barat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	5.001.392.509	99	3.476.234.284	99	3.473.921.313	99	3.514.538.952	99	3.618.175.120,75	Kecamatan Reok
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Reok
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Reok
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	3.366.055.187	99	2.616.055.187	99	2.216.055.187	99	2.916.055.187	99	2.166.055.187	Kecamatan Ruteng
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Ruteng
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Ruteng
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi	98	99	99	2.994.255.187	99	2.306.755.187	99	1.707.755.187	99	2.157.755.187	99	1.707.755.187	Kecamatan Satar Mese

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
terpenuhi sesuai standar	sesuai standar (%)													
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Satar Mese
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Satar Mese
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	1.479.264.873	99	1.320.282.099	99	1.542.029.342	99	1.608.443.722	99	1.109.940.534	Kecamatan Satar Mese Barat
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Satar Mese Barat
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar (%)	98	99	99	2.752.500.000	99	1.437.500.000	99	1.437.500.000	99	1.437.500.000	99	1.377.500.000	Kecamatan Satar Mese Utara
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Satar Mese Utara
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Satar Mese Utara
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Urusan Rutin Pemerintahan yang	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi	98	99	99	3.117.381.536	99	1.664.402.982	99	2.312.835.072	99	2.362.720.124	99	1.814.101.727	Kecamatan Wae Ri'i

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
terpenuhi sesuai standar	sesuai standar (%)													
	Nilai IKM (Nilai)	Na	70	75		80		85		90		95		Kecamatan Wae Ri'i
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Na	B	B		B		B		B		B		Kecamatan Wae Ri'i
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.333.371.000		1.364.594.130		1.389.186.954		1.414.160.563		1.439.526.379,89	
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	106.000.000	100	109.180.000	100	112.455.400	100	115.829.062	100	119.303.933,86	Kecamatan Cibal
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	595.000.000	100	606.900.000	100	618.800.000	100	630.700.000	100	642.600.000	Kecamatan Langke Rembong
Meningkatnya kualitas pencatatan	Persentase pelayanan	100	100	100	63.000.000	100	64.890.000	100	66.836.700	100	68.841.801	100	70.907.055,03	Kecamatan Lelak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)													
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	60.000.000	100	61.800.000	100	63.654.000	100	65.563.620	100	67.530.529	Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	65	70	75	59.000.000	80	59.000.000	85	59.000.000	90	59.000.000	95	59.000.000	Kecamatan Reok Barat
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	99	99	99	46.000.000	99	47.200.000	99	48.436.000	99	49.709.080	99	51.020.352	Kecamatan Reok
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase layanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	51.600.000	100	58.600.000	100	58.600.000	100	58.600.000	100	58.600.000	Kecamatan Ruteng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase layanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	Kecamatan Satar Mese
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase layanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	39.771.000	100	40.964.130	100	42.193.054	100	43.458.846	100	44.762.611	Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase layanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara
Meningkatnya kualitas pencatatan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Persentase layanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar (%)	100	100	100	102.000.000	100	105.060.000	100	108.211.800	100	111.458.154	100	114.801.899	Kecamatan Wae Ri'i
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.159.052.360		6.401.244.831		6.655.245.421		6.921.635.491		7.201.025.197,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	202.000.000	100	203.560.000	100	205.166.800	100	206.821.804	100	208.526.458	Kecamatan Cibal
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang	100	100	100	4.542.345.000	100	4.769.462.250	100	5.007.935.363	100	5.258.332.131	100	5.521.248.737	Kecamatan Langke Rembong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	25.000.000	80	25.750.000	85	26.522.500	90	27.318.175	95	28.137.720,25	Kecamatan Lelak
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	25.000.000	100	25.750.000	100	26.522.500	100	27.318.175	100	28.137.720	Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	65	70	75	25.000.000	80	25.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	Kecamatan Reok Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	n yang ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	99	99	99	983.800.000	99	995.314.000	99	1.007.173.420	99	1.019.388.623	99	1.031.970.281	Kecamatan Reok
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	259.200.000	100	259.200.000	100	259.200.000	100	259.200.000	100	259.200.000	Kecamatan Ruteng
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Satar Mese

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	-	100	6.707.360	100	6.908.581	100	7.115.838	100	7.329.313	100	7.549.193	Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang	100	100	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.609.000	100	10.927.270	100	11.255.088	Kecamatan Wae Ri'i

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)													
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					438.000.000		455.420.000		468.317.600		481.712.378		497.154.577,35	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	35.000.000	100	36.050.000	100	37.131.500	100	38.245.445	100	39.392.808	Kecamatan Cibal
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	35.000.000	100	36.050.000	100	37.131.500	100	38.245.445	100	40.157.717	Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	100	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	127.628.156	Kecamatan Langke Rembong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	umum yang ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	35.000.000	80	36.050.000	85	37.131.500	90	38.245.445	95	39.392.808,35	Kecamatan Lelak
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	35.000.000	100	36.050.000	100	37.131.500	100	38.245.445	100	39.392.808	Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	35.000.000	80	36.050.000	85	37.131.500	90	38.245.445	95	40.157.717	Kecamatan Reok Barat
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang	99	99	99	35.000.000	99	36.050.000	99	37.131.500	99	38.245.445	99	39.392.808	Kecamatan Reok

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	24.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Ruteng
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Kecamatan Satar Mese
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.000.000	100	9.270.000	100	9.548.100	100	9.834.543	100	10.129.579	Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.600.000	100	21.218.000	100	21.854.540	100	22.510.176	Kecamatan Wae Ri'i
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.139.800.000		1.160.050.000		1.180.997.500		1.202.667.925		1.225.087.688,6	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	97.000.000	100	99.910.000	100	102.907.300	100	105.994.519	100	109.174.354,57	Kecamatan Cibal
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	90.000.000	100	94.500.000	100	99.225.000	100	104.186.250	100	109.395.563	Kecamatan Langke Rembong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	105.000.000	80	108.150.000	85	111.394.500	90	114.736.335	95	118.178.425,05	Kecamatan Lelak
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	105.000.000	100	108.150.000	100	111.394.500	100	114.736.335	100	118.178.425,05	Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	105.000.000	80	105.000.000	85	105.000.000	90	105.000.000	95	105.000.000	Kecamatan Reok Barat
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	99	99	99	105.000.000	99	108.150.000	99	111.394.500	99	114.736.335	99	118.178.425	Kecamatan Reok
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang	100	100	100	89.800.000	100	89.800.000	100	89.800.000	100	89.800.000	100	89.800.000	Kecamatan Ruteng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Kecamatan Satar Mese
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	60.000.000	100	61.800.000	100	63.654.000	100	65.563.620	100	67.530.529	Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	53.000.000	100	54.590.000	100	56.227.700	100	57.914.531	100	59.651.966,93	Kecamatan Wae Ri'i
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					787.710.000		817.021.300		836.911.938,5		857.399.295,96		878.501.275,47	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	140.000.000	100	144.200.000	100	148.526.000	100	152.981.780	100	157.571.233,4	Kecamatan Cibal
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	80.000.000	100	82.400.000	100	84.872.000	100	87.418.160	100	90.040.705	Kecamatan Cibal Barat
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	80.000.000	80	82.400.000	85	84.872.000	90	87.418.160	95	90.040.704,8	Kecamatan Lelak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	40.000.000	100	41.200.000	100	42.436.000	100	43.709.080	100	45.020.352	Kecamatan Rahong Utara
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	65	70	75	40.000.000	80	41.200.000	85	42.436.000	90	43.709.080	95	45.020.352	Kecamatan Reok Barat
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	99	99	99	41.545.000	99	42.791.350	99	44.075.090	99	45.397.342	99	46.759.262	Kecamatan Reok
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang	100	100	100	38.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	Kecamatan Ruteng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	Kecamatan Satar Mese
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	50.000.000	100	51.500.000	100	53.045.000	100	54.636.350	100	56.275.441	Kecamatan Satar Mese Barat
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan	100	100	100	172.165.000	100	177.329.950	100	182.649.848,5	100	188.129.343,96	100	193.773.225,27	Kecamatan Wae Ri'i

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (%)													
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.197.084.177		5.458.006.881		5.729.931.480		6.016.510.541		51.317.245.302	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.161.447.567		2.270.588.443		2.383.142.126		2.502.381.724		2.627.410.052	
Meningkatnya Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98	99	100	2.161.447.567	100	2.270.588.443	100	2.383.142.126	100	2.502.381.724	100	2.627.410.052	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	C (49,65)	CC (55,00)	B (60,10)		B (61,10)		B (62,10)		B (63,10)		B (64,10)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					913.512.950		959.188.597		1.007.148.026		1.057.505.427		1.110.380.697	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	913.512.950	100	959.188.597	100	1.007.148.026	100	1.057.505.427	100	1.110.380.697	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.530.982.060		1.607.531.162		1.687.907.719		1.772.303.103		46.860.918.256	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.530.982.060	100	1.607.531.162	100	1.687.907.719	100	1.772.303.103	100	46.860.918.256	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					30.381.750		31.900.837		33.495.878		35.170.671		36.929.203	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	30.381.750	100	31.900.837	100	33.495.878	100	35.170.671	100	36.929.203	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					102.976.650		108.125.482		113.531.755		119.208.342		125.168.758	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengahayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	102.976.650	100	108.125.482	100	113.531.755	100	119.208.342	100	125.168.758	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					457.783.200		480.672.360		504.705.976		529.941.274		556.438.336	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penannganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	457.783.200	100	480.672.360	100	504.705.976	100	529.941.274	100	556.438.336	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan cerminan dari tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Manggarai selama lima tahun ke depan. Keberhasilan tersebut diukur melalui serangkaian indikator capaian kinerja yang dilengkapi dengan target-target pembangunan yang spesifik, terukur, dan realistis. Dalam sub bagian ini, indikator yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah mencakup dua kategori utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan ketercapaian visi misi pembangunan selama lima tahun ke depan, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan pencapaian kinerja secara menyeluruh di tingkat daerah berdasarkan penyelenggaraan rumpun urusan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU dirancang untuk mencerminkan dampak strategis dari program dan kebijakan yang dijalankan, sehingga mampu menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah telah tercapai. Dalam perumusannya, IKU disusun dengan mengacu pada indikator-indikator makro yang relevan di tingkat tujuan dan sasaran. Berikut ini merupakan IKU Kabupaten Manggarai selama periode 2025-2029:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	67,66	68,66	69,66	70,66	71,66	72,66	73,66	73,66
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3,56	3,60	3,63	3,67	3,70	3,74	3,78	3,78
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,35	69,35	70,22	71,09	71,96	72,83	72,61	72,61
4	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	N/A	84,46	84,56	84,98	85,34	85,87	86,67	86,67
5	Indeks Risiko Bencana	Nilai	142,09	141,97	139,73	137,49	135,24	133,00	130,76	130,76
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,69	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67	82,67
7	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	10,161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	22.484
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	4,17
9	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	75,69	78,00	79,31	80,61	81,91	83,22	84,52	84,52
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,01	18,88	18,55	18,23	17,90	17,58	17,25	17,25
11	Indeks Gini	Nilai	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	0,241
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,17	1,14	1,11	1,08	1,06	1,03	1,01	1,01
13	Prevalensi Stunting	Persen	41,00	38,2	35,7	33,4	31,2	29,2	27,3	27,3
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,04	55,88	57,41	58,93	60,46	61,98	63,51	63,51

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyusunan IKD dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan Indikator Utama Pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Indikator Kinerja Kunci spesifik menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga										
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,91	7,94	8,02	8,09	8,15	8,25	9,15	
2	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,27	61,31	68,45	75,59	82,73	89,87	97,1	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,95	14,25	14,75	14,96	15,12	15,26	
4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	50,31	61,1	68,24	75,38	82,52	89,66	96,8	
5	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45,14	57,53	64,67	71,81	78,95	86,09	93,23	
6	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	42,81	53,84	60,98	68,12	75,26	82,4	89,54	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan										
IV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng										
VI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	67,89	70,71	70,95	71,18	71,42	71,65	71,89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
VIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	-	84,46	84,56	84,98	85,34	85,87	86,67	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
X	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	58,43	58,43	60,2	61,98	63,75	65,52	67,3	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran										
XII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
XIV	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	142,09	141,97	139,73	137,49	135,24	133	130,76	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,5	0,53	0,57	0,62	0,68	0,75	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial										
XVI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Tingkat Kemiskinan	(%)	19,01	18,88	18,55	18,23	17,9	17,58	17,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.08.2.08.2.08.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
XVIII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,08	96,06	96,13	96,2	96,27	96,34	96,41	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	52,21	55,25	57,05	57,35	57,65	57,95	58,25	
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,465	0,375	0,351	0,326	0,301	0,276	0,251	
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
XX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,69	78	79,31	80,61	81,91	83,22	84,52	
2	Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	13,48	12,98	11,88	10,38	9,48	8,98	7,78	
XXI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
4	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
2.11.2.11.2.11.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
XXIII	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	0	0,1	0,54	1,08	1,63	2,17	2,71	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	0	34,27	37,12	39,96	42,81	45,65	48,5	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,69	81,81	81,98	82,15	82,32	82,5	82,67	
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	25	30	35	40	50	55	50	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
XXV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,78	3,82	3,86	3,89	3,93	3,97	4,01	
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
XXVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Persentase Desa Mandiri	%	-	-	0,6	1,37	2,06	2,75	3,44	
2.14.2.14.2.14.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
XXIX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,82	1,81	1,87	1,93	1,99	2,05	2,11	
XXX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	72,68	72,98	73,25	73,56	74,24	74,87	75,12	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
XXXII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	-	84,46	84,56	84,98	85,34	85,87	86,67	
2.16.2.16.2.16.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
XXXIV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,9	3,3	3,5	3,2	3,4	3,6	3,6	
2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja										
XXXVI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,17	1,14	1,11	1,08	1,06	1,03	1,01	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
3	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
4	Cakupan kepesertaan Jaminan sosial Tenaga kerja	%	68,02	68,87	69,74	70,62	71,52	72,43	73,36	
5	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
XXXVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio Kewirausahaan	%	1	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	
2	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	83,14	83,25	83,87	84,24	84,47	84,87	85,24	
2.18.2.18.2.18.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
XXXIX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan										
XLI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0	53,35	53,91	54,47	55,03	55,59	56,15	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
4	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
XLII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,45	1,451	1,452	1,453	1,454	1,455	1,456	
2.24.0.00.0.00.01.0000 - DInas Kearsipan dan Perpustakaan										
XLIV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	36,25	37,15	37,34	37,98	38,27	38,89	39,54	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan										
XLVI	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,69	78	79,31	80,61	81,91	83,22	84,52	
XLVII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
2	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
4	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Peternakan										
XLIX	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,69	78	79,31	80,61	81,91	83,22	84,52	
L	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,79	3,86	3,93	4	4,08	4,15	
2	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10.161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
4	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	
3.30.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan Dan perindustrian										
LII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Gini	Angka	0,274	0,271	0,265	0,259	0,253	0,247	0,241	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*2
	Prevalensi Stunting	%	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	10,161	17.694	18.652	19.610	20.568	21.526	22.484	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,97	4,01	4,05	4,09	4,13	4,17	
LIII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0	15,80	16,07	16,34	16,61	16,87	17,14	
2	Tingkat Inflasi	(%)	1,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4.01.0.00.0.00.04.0000 - Bagian Perekonomian dan SDA										
LV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Tingkat Inflasi	(%)	1,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4.01.0.00.0.00.06.0000 - Bagian Organisasi										
LVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,78	3,82	3,86	3,89	3,93	3,97	4,01	
4.01.0.00.0.00.08.0000 - Bagian Hukum										
LIX	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,72	86,75	86,92	88,02	88,32	89,02	89,02	
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah										
LXI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,84	52	54	56	58	60	62	
5.02.5.02.5.02.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah										
LXIII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,03	4,06	4,08	4,09	4,11	4,12	4,13	
5.02.5.02.5.02.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah										
LXV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	10	11	12	13	14	15	16	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah										
LXVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79,32	81,56	82,68	83,8	84,92	86,04	87,16	

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Manggarai disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,12	72,26	74,4	76,54	78,68	80,82	82,96	
2	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,41	60,55	63,69	66,83	69,97	73,11	76,25	
3	Iklim Kebinekaan SD	%	74,09	76,23	78,37	80,5`1	82,65	84,79	86,93	
4	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72,32	74,46	76,6	78,74	80,88	83,02	85,16	
5	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	80,84	83,8	86,77	89,74	92,71	95,26	97,81	
6	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	96,25	96,88	97,51	98,14	98,78	99,41	100	
7	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	14,26	18,36	22%	27%	31%	35%	39%	
8	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	80,01	89,31	89,81	90,31	90,81	91,31	91,81	
9	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	60,1	60,51	60,92	61,33	61,75	62,16	62,57	
10	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,27	61,31	68,45	75,59	82,73	89,87	97,01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Iklim Keamanan SD	Nilai	77,07	79,21	81,35	83,49	85,63	87,77	89,91	
12	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45,14	57,53	64,67	71,81	78,95	86,09	93,23	
13	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	50,31	61,1	68,24	75,38	82,52	89,66	96,8	
14	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	42,81	53,84	60,98	68,12	75,26	82,4	89,54	
15	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62,81	65,95	69,09	72,23	75,37	78,51	81,65	
2	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	N/A	195	175	156	136	117	77	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek)	Persen	41,00	38,20	35,70	33,40	31,20	29,20	27,30	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
15	Cakupan Calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan	Persen	N/A	51	53	55	57	59	60	
16	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali	Persen	N/A	53	55	57	59	61	63	
17	Persentase Ibu Hamil KEK	Persen	N/A	15	14	13	12	11	10	
18	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	18	16,5	15	14	13	12	
19	Cakupan penemuan Kasus TBC	Persen	N/A	90	90	90	90	90	90	
20	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	N/A	15	17	19	22	25	30	
21	Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap	Persen	N/A	90	90	90	92	92	92	
22	Cakupan Balita Gizi Kurang	Persen	N/A	13,6	12,06	11,28	10,51	9,74	8,97	
23	Cakupan ASI Eksklusif pada bayi enam bulan	Persen	N/A	90	90	91	92	92	93	
24	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Cakupan desa universal Child Immunization	Persen	N/A	91,23	92,5	93,76	95,50	96,3	97	
26	Cakupan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada Bayi Baru Lahir	Persen	N/A	40	42	45	47	49	50	
27	Angka Keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) TBC	Persen	N/A	90	91	92	93	94	95	
28	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	N/A	76	84	88	92	96	100	
29	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Bidang Kesehatan	Persen	N/A	33,7	33,9	34	34,3	34,5	34,7	
30	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan imunisasi rutin lengkap (IRL)	Persen	N/A	76	80	84	88	92	92,3	
31	Persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Posyandu siklus hidup yang Aktif	Persen	N/A	42,4	46	48	50	52	55	
33	Persentase Puskesmas Terakreditasi paripurna	Persen	N/A	28	28	28	40	68	76	
3	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	NA	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	NA	52,47	52,64	52,98	53,33	53,67	54,01	
4	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	NA	52,47	52,64	52,98	53,33	53,67	54,01	
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	NA	83,87	83,94	84,08	84,22	84,36	84,5	
6	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	NA	70,20	70,20	72,40	74,60	76,80	79,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	NA	86,18	86,29	86,49	86,70	86,90	87,11	
8	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	19,50	19,95	20,41	20,86	21,31	21,76	
9	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	NA	10,67	11,12	11,58	12,03	12,48	12,93	
10	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
11	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja	%	NA	69,10	70,20	72,40	74,60	76,80	79,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kualifikasi operator/teknisi/ analis									
12	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	NA	55,75	56,03	56,59	57,15	57,71	58,27	
4	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi	%	NA	47	45	50	55	60	65	
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak	%	NA	60,82	63,02	65,22	67,42	69,62	71,82	
3	Persentase berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	%	NA	14,2	8,2	7,2	6,2	5,2	4,2	
4	Persentase Rumah Tangga yang teraliri listrik	%	NA	46	46,5	47	47,5	48	48,5	
5	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang LPJU	%	NA	41	23,81	24,81	25,81	26,81	27,81	
5	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonom	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
7	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	N/A	98%	13%	17%	20%	23%	27%	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	N/A	0.09%	0.13%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota	%	N/A	44.52%	66.67%	71.43%	74.29%	77.14%	80%	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	N/A	N/A	50%	52%	55%	57%	60%	
8	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks pembangunan gender	Nilai	89,08	96,06	96,13	96,2	96,27	96,34	96,41	
2	Indeks ketimpangan gender	Nilai	0,465	0,375	0,351	0,326	0,301	0,276	0,251	
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	0,03	0,82	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK)yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	N/A	65	70	75	80	85	90	
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	N/A	11,03	10,74	10,18	9,62	9,06	8,5	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	N/A	50	55	60	65	70	75	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	N/A	78,82	78,84	78,86	78,88	78,82	78,82	
10	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Konflik Pertanahan yang di mediasi	Angka	NA	2	2	2	2	2	2	
11	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	76,69	81,81	81,98	82,15	82,33	82,50	82,67	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	NA	88	89	92	95	98	100	1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas 8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	NA	36,36	36,56	36,76	36, 96	37,16	37,36	
12	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	52,46	55,6	58,47	61,47	64,24	66,9	69,46	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	85,25	86,52	87,74	88,89	89,98	91,02	92,01	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	35,52	45,8	64,8	73,8	83,8	93,8	95	
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	1,05	28,95	33,95	38,95	43,95	48,95	53,95	
13	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0	1	1	1	1	1	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0	35,86	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	2,07	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	0	23,37	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	10,87	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	
14	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)	Persen	2,75	2,73	2,73	2,72	2,71	2,7	2,69	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	60,6	62,1	63,5	64,9	66,2	67,4	68,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persen	55,4	56,7	57,9	59,1	60,2	61,3	62,3	
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Nilai	78,3	78,5	78,8	79	79,2	79,4	79,7	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rat*e (ASFR 15- 19)	Nilai	24,2	23	22	21,2	20,4	19,7	19,1	
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Nilai	8,2	7,8	7,5	7,2	6,9	6,7	6,5	
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Nilai	80,7	82,1	83,5	84,7	85,9	86,9	87,9	
8	Indeks Lansia Berdaya	Persen	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen	8,7	13,3	16,8	19,6	21,8	23,6	24,9	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	12,56	10,7	10,53	10,23	9,9	9,6	9,3	
15	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00	
2	Konektivitas	Rasio	0,74	0,74	0,74	0,76	0,78	0,8	0,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	35,96	36,99	42,11	47,23	52,36	57,48	57,48	
16	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	N/A	0	target 21 PD dari 42 PD yg terhubung = 51,22%	target 21 PD dari 42 PD yg terhubung = 48,78%	0	0	0	
2	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	N/A	0	51,22	51,22	-	-	-	
3	Persentase PD dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo	%	10	7 PD dari 42 PD=16,66%	5 PD dari 42 PD=11,90%	5 PD dari 42 PD=11,90%	5 PD dari 42 PD=11,90%	5 PD dari 42 PD=11,90%	5 PD dari 42 PD=11,90%	
4	Indeks pembangunan statistik	Poin	2,24		2,26		2,28		2,3	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	skor	0	0-174	175-312	175-312	175-312	313-535	313-535	
17	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	N/A	25,46%	20,29%	16,87%	14,44%	12,61%	11,20%	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	N/A	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	N/A	25,46%	20,29%	16,87%	14,44%	12,61%	11,20%	
18	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan investasi	%	N/A	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	
19	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	NA	0	3	5	7	9	10	
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/*training* dan memperoleh sertifikat	%	20	21	23	25	27	30	35	
3	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	14,19	15,19	16,19	17,19	19,19	21,19	23,19	
4	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,23	3,23	5,23	6,23	7,23	8,23	10,23	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	%	NA	1	1	1	1	1	1	
20	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	NA		2,26		2,28		2,3	
21	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Persentase Tingkat Kematangan Pengelolaan Keamanan Informasi	Persen	NA	0-174	175-312	175-312	175-312	313-535	313-535	
22	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	NA	20	20	20	20	20	20	
2	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	NA	0	20	20	20	20	20	
3	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	NA	82,81	86,25	89,69	93,13	96,56	100	
23	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	NA	15	15	16	17	18	20	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	NA	2,57	2,60	2,70	2,70	2,80	2,80	
24	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	NA	10	15	15	15	20	25	
25	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
26	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	N/A	40	45	50	55	60	65	
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	N/A	0	20	20	20	20	20	
3	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	N/A	10,32	10,82	11,31	11,8	12,29	12,79	
27	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	23,68	N/A	23,68	24,15	24,63	25,12	25,62	
2	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	N/A	5	10	15	20	25	30	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	N/A	1,01	2,01	3,01	4,01	5,01	6,01	
4	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	30,22	N/A	30,22	31,42	32,62	33,82	35,02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	N/A	75	78	80	82	84	86	
6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	N/A	60	65	70	75	80	85	
30	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	N/A	0,90%	12,17%	24,87%	36,97%	49,64%	61,73%	
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah	%	N/A	2,00%	2,50%	3,00%	3,20%	3,50%	3,50%	
31	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	N/A	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
2	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	N/A	30%	30%	30%	30%	30%	30%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	N/A	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	N/A	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	N/A	0%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	N/A	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal ''Baik'' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	N/A	30%	35%	40%	45%	50%	55%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	N/A	30%	35%	40%	45%	50%	55%	
8	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	N/A	30%	35%	40%	45%	50%	55%	
32	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	83,22 (B, Kualitas Tinggi)	84,22 (B, Kualitas Tinggi)	85,22 (B, Kualitas Tinggi)	86,72 (B, Kualitas Tinggi)	88,22 (A, Kualitas Tertinggi)	89,22 (A, Kualitas Tertinggi)	89,22 (A, Kualitas Tertinggi)	
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	17,78	26,67	31,11	35,56	35,56	40	40	
3	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	6,96	8,16	9,36	10,56	11,76	12,96	12,96	
4	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	4,29	8,57	12,86	17,14	21,43	22,86	22,86	
5	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	97,71	98	98,5	99	99,5	100	100	
6	Persentase jumlah pengadaan yang Dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	53,82	55	60	62	65	70	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,02	47	49	51	53	55	55	
33	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun Berjalan (N)	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun Berjalan (N)	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
35	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	10,40	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	
2	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	NA	92,97	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	25	40	50	40	40	40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	NA	34,00	48,00	40,00	35,00	30,00	30,00	
36	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	70,35 (Baik)	72 (Baik)	74 (Baik)	76 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	
37	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	75	80	85	90	95	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Nilai	NA	40	45	50	55	60	65	
38										
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82,53	83,03	83,53	84,03	84,53	85,03	85,03	

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan daerah jangka menengah yang memegang peranan penting sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis masing-masing, yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai.

Penyusunan dokumen ini menggunakan pendekatan teknokratik, yakni pendekatan yang berbasis data dan analisis ilmiah untuk menilai berbagai aspek penting seperti kondisi wilayah, capaian pembangunan, serta potensi pendanaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan bersifat objektif, dapat diukur, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari perencanaan yang menyeluruh, RPJMD ini juga mengidentifikasi tantangan utama dan isu-isu strategis yang berperan sebagai hambatan sekaligus peluang dalam pembangunan. Isu-isu tersebut bersifat mendesak dan berdampak luas, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, proses identifikasinya dilakukan tidak hanya dari sudut pandang internal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Hal ini bertujuan agar solusi yang dihasilkan relevan, praktis, dan mampu menjawab kebutuhan nyata daerah.

Selanjutnya, isu-isu strategis yang telah dirumuskan menjadi dasar penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas agar pencapaiannya dapat dievaluasi secara berkala dan dijadikan acuan dalam kebijakan lanjutan.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Manggarai dapat berlangsung secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman yang kokoh bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Manggarai yang maju, sejahtera, dan kompetitif.

Semoga RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025–2029 ini menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Manggarai.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 dapat terwujud ketika adanya komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD. Berikut kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen pembangunan 5 (lima) tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;

2. RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman masa transisi tahun 2030. Dengan demikian, penargetan kinerja tujuan, sasaran, dan program ditetapkan hingga tahun 2030 dan menjadi pedoman dalam masa transisi ke depan;
3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai wajib memedomani dalam setiap perumusan kebijakan, seperti RKPD, Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya;
4. Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, dan dokumen lainnya.
5. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
6. Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
7. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
8. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran

pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi;

9. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025–2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dokumen RPJMD perlu dievaluasi untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakannya telah sesuai dengan peraturan maupun kondisi daerah. Untuk memastikan hal tersebut, pedoman umum pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2. Perangkat Daerah yang mengampu bidang urusan perencanaan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;

3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja bidang perencanaan.

BUPATI MANGGARAI

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembina,IV/a
NIP.198312132011011010

Pemerintah
Kabupaten Manggarai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tahun 2025 - 2029